PEMERINTAH
KABUPATEN
DHARMASRAYA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN DHARMASRAYA

TAHUN 2025

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Udangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai:

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
b. pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS.

Pasal 3

Rancangan KUA serta Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
    a. bab I memuat pendahuluan;
    b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
    c. bab III memuat kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
    d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
    e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
    f. bab VI memuat kinerja dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
    g. bab VII memuat penutup.
(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2025.
(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD Tahun 2025;
    b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2025;dan
    c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025.
(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) RKPD Tahun 2025 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 19 Juni 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

ASUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 19 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024 NOMOR 11.

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI/DIPERIKSA
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. DHARMASRAYA
TANGGAL | PARAF TANDATANGAN

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor 11 Tahun 2024
Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
PULAU PUNJUNG, TAHUN 2024

DAFTAR ISI

BAB 1. .. PENDAHULUAN 1-1

1.1. LATAR BELAKANG 1-1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD 1-4
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 1-6
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 1-10
1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD 1-10

BAB 2. .. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2-1

2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH 2-1
2.1.1. Aspek Geografi 2-1
2.1.2. Kondisi Demografi 2-19
2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2-22
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 2-43
2.1.5. Aspek Pelayanan Umum 2-44
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD 2-136
2.2.1. Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023 2-137
2.2.2. Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Urusan Tahun 2023 2-139
2.3. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 2-150
2.3.1. Permasalahan Pembangunan 2-151
2.3.2. Permasalahan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah 2-153

BAB 3. .. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 3-1

3.1. KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 3-1
3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025 3-1
3.1.2. Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 3-8
3.1.3. Arah Kebijakan Perkekonomian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 3-10
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3-11
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan 3-12
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah 3-18
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 3-23

BAB 4. .. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4-1

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 4-4

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 4-4
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 4-6
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya 4-7
4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 ..... *4-17*
4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 4-18
4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 4-27
4.2.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya 4-32
4.2.4. Penelaahan Terhadap Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 4-68
4.2.5. Penyelarasan RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 4-70
4.2.6. Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten 4-71
4.2.7. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025 4-76
4.3. INOVASI PEMBANGUNAN DAERAH *4-83*

BAB 5. .. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 5-1

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025 ..... *5-1*

BAB 6. .. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 6-1

6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA *6-1*
6.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH *6-5*

BAB 7. .. PENUTUP 7-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong 2-2
Tabel 2-2 Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya 2-3
Tabel 2-3 Jenis Tanah di Kabupaten Dharmasraya 2-6
Tabel 2-4 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 2-11
Tabel 2-5 Peruntukan Lahan Berdasarkan Status Lahan 2-13
Tabel 2-6 Ijin Usaha (IUP) Pertambangan 2-13
Tabel 2-7 Gerakan Tanah Wilayah Kabupaten Dharmasraya 2-15
Tabel 2-8 Kondisi Kualitas Air Sungai di Kabupaten Dharmasraya 18
Tabel 2-9 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Dharmasraya Tahun 2023 2-19
Tabel 2-10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 2-20
Tabel 2-11 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Dharmasraya Tahun 2019-2023 2-20
Tabel 2-12 Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 2-21
Tabel 2-13 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 2-21
Tabel 2-14 Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 2-24
Tabel 2-15 Perkembangan Nilai dan kontribusi PDRB ADHK Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2023 2-29
Tabel 2-16 Jumlah Penduduk Miskin Ektrim (Rumah Tangga) menurut Kecamatan dan Nagari Tahun 2023 2-35
Tabel 2-17 Indeks Perilaku Antikorupsi 2-39
Tabel 2-18 Indeks SPBE Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021-2023 2-40
Tabel 2-19 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2023 2-41
Tabel 2-20 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2-41
Tabel 2-21 Persentase Peningkatan Zakat 2-42
Tabel 2-22 Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif 2-42

Tabel 2-23 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 2-44
Tabel 2-24 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat 2-44
Tabel 2-25 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat 2-45
Tabel 2-26 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi 2-46
Tabel 2-27 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts 2-46
Tabel 2-28 Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) 2-46
Tabel 2-29 Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 2-47
Tabel 2-30 Persentase guru dan tenaga kependidikan professional 2-48
Tabel 2-31 Angka kematian bayi (AKB) 2-48
Tabel 2-32 Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) 2-49
Tabel 2-33 Prevalensi Stunting 2-50
Tabel 2-34 Prevalensi Malnutrisi 2-51
Tabel 2-35 Persentase Rumah Tangga PHBS 2-51
Tabel 2-36 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 2-52
Tabel 2-37 Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam 2-53
Tabel 2-38 Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular 2-53
Tabel 2-39 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular 2-54
Tabel 2-40 Visite Rate 2-55
Tabel 2-41 Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama 2-55
Tabel 2-42 Persentase UPT RSUD Terakreditasi 2-56
Tabel 2-43 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap 2-57
Tabel 2-44 Persentase jembatan dalam Kondisi Baik 2-58
Tabel 2-45 Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik 2-59
Tabel 2-46 Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum 2-60
Tabel 2-47 Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik 2-60
Tabel 2-48 Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik 2-61
Tabel 2-49 Persentase Kesesuaian Tata Ruang 2-62
Tabel 2-50 Cakupan permukiman layak huni 2-62
Tabel 2-51 Cakupan ketersediaan rumah layak huni 2-63
Tabel 2-52 Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana 2-63
Tabel 2-53 Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah 2-64

Tabel 2-54 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani 2-65
Tabel 2-55 Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU 2-66
Tabel 2-56 Cakupan rumah layak huni yang terjangkau 2-66
Tabel 2-57 Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum 2-67
Tabel 2-58 Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi 2-67
Tabel 2-59 Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran 2-68
Tabel 2-60 Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan 2-69
Tabel 2-61 Persentase PPKS yang tertangani 2-69
Tabel 2-62 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2-70
Tabel 2-63 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota 2-71
Tabel 2-64 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2-72
Tabel 2-65 Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan 2-72
Tabel 2-66 Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan 2-73
Tabel 2-67 Persentase Kasus - Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan 2-74
Tabel 2-68 Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah 2-75
Tabel 2-69 Persentase Organisasi perempuan yang aktif 2-75
Tabel 2-70 Tingkat kategori capaian APE 2-76
Tabel 2-71 Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) 2-76
Tabel 2-72 Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani 2-77
Tabel 2-73 Rasio kekerasan dalam rumah tangga 2-78
Tabel 2-74 Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah 2-79
Tabel 2-75 Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari 2-79
Tabel 2-76 Skor Pola Pangan Harapan 2-80
Tabel 2-77 Persentase tanah Pemerintah daerah yang bersertifikat 2-81
Tabel 2-78 Persentase penyelesaian / fasilitasi kasus tanah Pemerintah 2-81
Tabel 2-79 Indeks Kualitas Air 2-82
Tabel 2-80 Indeks Kualitas Udara 2-83
Tabel 2-81 Indeks Kualitas Tutupan Lahan 2-84
Tabel 2-82 Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi 2-85
Tabel 2-83 Meningkatnya luas tutupan lahan/ Menurunnya lahan kritis 2-85
Tabel 2-84 Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali) 2-86

Tabel 2-85 Penanganan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota) 2-86
Tabel 2-86 Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 2-86
Tabel 2-87 Persentase kepemilikan KTP-elektronik 2-87
Tabel 2-88 Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) 2-87
Tabel 2-89 Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun 2-88
Tabel 2-90 Persentase Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan 2-89
Tabel 2-91 Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan 2-89
Tabel 2-92 Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan 2-90
Tabel 2-93 Jumlah Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan 2-90
Tabel 2-94 Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM 2-91
Tabel 2-95 Persentase APB nagari berbasis IDM 2-91
Tabel 2-96 Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online 2-92
Tabel 2-97 Persentase Nagari Memiliki BUMNag Berkembang 2-92
Tabel 2-98 Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan 2-93
Tabel 2-99 Jumlah Bumnag Bersama 2-94
Tabel 2-100 Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga 2-94
Tabel 2-101 Angka kelahiran total 2-95
Tabel 2-102 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR) 2-96
Tabel 2-103 Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need) 2-96
Tabel 2-104 persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif 2-97
Tabel 2-105 persentase kelompok tribina yang aktif 2-97
Tabel 2-106 Jumlah penambahan trayek angkutan umum 2-98
Tabel 2-107 Persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR 2-99
Tabel 2-108 kreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) 2-99
Tabel 2-109 Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi 2-100
Tabel 2-110 Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik 2-100

Tabel 2-111 Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2-101
Tabel 2-112 Jumlah Koperasi Sehat 2-102
Tabel 2-113 Jumlah pelaku usaha mikro menjadi wirausaha 2-103
Tabel 2-114 Nilai realisasi Investasi 2-103
Tabel 2-115 Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal 2-104
Tabel 2-116 Jumlah cabang olahraga yang aktif 2-104
Tabel 2-117 Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi 2-105
Tabel 2-118 Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional 2-105
Tabel 2-119 Jumlah organisasi pemuda yang aktif 2-106
Tabel 2-120 Jumlah pemuda dan kepemudaan berprestasi 2-106
Tabel 2-121 Jumlah organisasi pramuka yang aktif 2-106
Tabel 2-122 Jumlah pelatih bersertifikat 2-107
Tabel 2-123 Persentase ketersediaan data Statistik sektoral 2-108
Tabel 2-124 Jumlah Nagari Statistik 2-108
Tabel 2-125 Jumlah Kecamatan Statistik 2-109
Tabel 2-126 Aplikasi yang dilakukan asesment 2-109
Tabel 2-127 Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital 2-110
Tabel 2-128 Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan 2-110
Tabel 2-129 Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan 2-111
Tabel 2-130 Persentase lembaga adat yang aktif 2-111
Tabel 2-131 Jumlah cagar budaya yang ditetapkan 2-112
Tabel 2-132 Jumlah cagar budaya yang dilestarikan 2-112
Tabel 2-133 Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan 2-113
Tabel 2-134 Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan 2-113
Tabel 2-135 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku 2-114
Tabel 2-136 Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku 2-114
Tabel 2-137 Produksi Perikanan 2-115
Tabel 2-138 Jumlah kunjungan wisatawan 2-116
Tabel 2-139 Tingkat hunian akomodasi 2-116
Tabel 2-140 Jumlah pelaku ekonomi kreatif 2-116
Tabel 2-141 Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina 2-117
Tabel 2-142 Produksi Sektor Pertanian 2-117

Tabel 2-143 Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi 2-119
Tabel 2-144 Alat UTTP yang Beratanda tera sah 2-120
Tabel 2-145 Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet 2-120
Tabel 2-146 Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar 2-120
Tabel 2-147 Nilai LPPD 2-122
Tabel 2-148 Nilai SAKIP 2-124
Tabel 2-149 Nilai Reformasi Birokrasi 2-125
Tabel 2-150 Persentase agenda DPRD yang difasilitasi 2-126
Tabel 2-151 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan 2-127
Tabel 2-152 Rata-rata ketergantungan dana transfer 2-127
Tabel 2-153 Persentase SILPA terhadap APBD 2-128
Tabel 2-154 Indeks Profesionalitas ASN 2-128
Tabel 2-155 Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu 2-129
Tabel 2-156 Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi 2-130
Tabel 2-157 Persentase kasus ASN yang tertangani 2-131
Tabel 2-158 Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 2-131
Tabel 2-159 Indeks inovasi daerah 2-132
Tabel 2-160 Tingkat Kapabilitas APIP 2-133
Tabel 2-161 Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2-133
Tabel 2-162 Persentase Pembinaan Partai Politik 2-134
Tabel 2-163 Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan 2-134
Tabel 2-164 Persentase Pembinaan LSM 2-135
Tabel 2-165 Jumlah Konflik Sosial 2-135
Tabel 2-166 Jumlah Penyakit Masyarakat 2-136
Tabel 2-167 Gradasi Nilai Kinerja 2-136
Tabel 2-168 Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023 2-137
Tabel 2-169 Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Urusan Tahun 2023 2-139
Tabel 3-1 Rincian Sasaran Fiskal Tahun 2025 3-7
Tabel 3-2 Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2024-2025 3-8
Tabel 3-3 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 s/d 2023 dan proyeksi tahun 2024 s/d 2025 3-10
Tabel 3-4 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d Tahun 2025 (Rp) 3-13
Tabel 3-5 Realisasi/Proyeksi Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 s/d 2025 3-21

Tabel 3-6 Proyeksi Belanja Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 3-22
Tabel 3-7 Realisasi/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 s/d Tahun 2025 3-25
Tabel 3-8 Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d Tahun 2024 3-26
Tabel 4-1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 4-6
Tabel 4-2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 4-8
Tabel 4-3 Indikator Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 4-9
Tabel 4-4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 4-11
Tabel 4-5 Agenda Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 4-21
Tabel 4-6 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 4-33
Tabel 4-7 Arah Kebijakan Pembangunan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 4-34
Tabel 4-8 Arahan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 4-44
Tabel 4-9 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 4-59
Tabel 4-10 Daftar Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2025 4-69
Tabel 4-11 Sandingan Antara Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 4-70
Tabel 4-12 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2025 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2025 dan Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 4-70
Tabel 4-13 Jenis Pelayanan Dasar dan Target Penerima Layanan Dasar Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 4-73
Tabel 4-14 Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 4-83
Tabel 4-15 Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 4-99
Tabel 5-1 Rekapitulasi Pagu Indikatif RKPD Tahun 2025 5-2
Tabel 5-2 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 5-5
Tabel 6-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 6-2
Tabel 6-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya 6-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota 1-7
Gambar 1-2 Keterkaitan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Keruangan (Spatial) 1-8
Gambar 2-1 Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya 2-3
Gambar 2-2 Peta Topografi Kabupaten Dharmasraya 2-4
Gambar 2-3 Peta Kelerengan Kabupen Dharmasraya 2-4
Gambar 2-4 Peta Geomorfologi Kabupaten Dharmasraya 2-5
Gambar 2-5 Peta Jenis Tanah Kabupaten Dharmasraya 2-7
Gambar 2-6 Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya 2-8
Gambar 2-7 Peta Hidrogeologi Kabupaten Dharmasraya 2-10
Gambar 2-8 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya 2-12
Gambar 2-9 Peta Status Lahan Kabupaten Dharmasraya 2-13
Gambar 2-10 Peta Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Dharmasraya 2-16
Gambar 2-11 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2-22
Gambar 2-12 Indeks Pembangunan Manusia Dharmasraya, Sumatera Barat 2-23
Gambar 2-13 Usia Harapan Hidup Saat Lahir Nasional, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 2-25
Gambar 2-14 Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 2-26
Gambar 2-15 Harapan Lama Sekolah Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 2-27
Gambar 2-16 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 (ribu rupiah/ orang/ tahun) 2-28
Gambar 2-17 Pertumbuhan PDRB/PDB Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 2-30

Gambar 2-18 PDRB/PDB Perkapita Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 (rupiah) 2-31
Gambar 2-19 Indeks Pembangunan Gender Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022 (indeks) 2-32
Gambar 2-20 Tingkat Kemiskinan (persen) Tahun 2019-2023 2-33
Gambar 2-21 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim berdasarkan Kecamatan Tahun 2023 2-36
Gambar 2-22 Gini rasio (indeks) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 2-37
Gambar 2-23 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 2-38
Gambar 2-24 Rasio Net Ekspor terhadap PDRB/PDB (persen) 2-43
Gambar 3-1 Pertumbuhan Ekonomi Global 3-2

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dijelaskan bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara umum bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Dimana tujuan pembangunan tersebut terlebih dahulu dirumuskan dan dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik dokumen Rencana pembangunan jangka panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, serta dokumen perencanaan tahunan atau disebut dengan Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD), dimana setiap dokumen perencanaan daerah tersebut menjadi satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah selalu mempedomani dokumen perencanaan daerah Provinsi Sumatera Barat dan dokumen perencanaan nasional, selain itu sesuai dengan amanat peraturan darrah juga dituntut untuk memperhatikan dokumen perencanaan daerah tetangga, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan selalu memiliki bersinergi dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan yang dilaksanakan.

Dokumen RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan tahun ke-4 dari kepemimpinan Sutan Riska Tuanku kerajaan untuk periode ke-2 pada periodesasi RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026. Dimana pada dokumen RPJMD tersebut telah ditetapkan tujuan, sasaran serta target pembangunan secara tahunan guna mencapai tujuan akhir yang ingin dicapai. Sehingga dengan adanya target yang jelas, maka pemerintah daerah bisa melakukan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan sekaligus mampu untuk menetapkan target pembangunan tahun berjalan serta tahun rencana 2025 secara baik sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki,

Sehingga dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya terus berupaya melaksanakan pembangunan secara efektif dan

efisien sesuai dengan asas otonomi daerah yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pada pasal 18 dijelaskan bahwa pemerintah daerah diamanatkan untuk melaksanakan urusan konkuren, urusan ini dilakukan melalui pembagian kewenanga urusan pemerintahan mulai dari tingkat pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota. Dengan demikian dengan adanya pembagian kewenangan ini setiap jenjang pemerintahan memiliki kewenangan yang jelas serta dapat menjalankan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Melihat pada perkembangan pembangunan beberapa tahun sebelumnya, diantaranya adanya wabah covid-19 yang memiliki pengaruh dan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan serta target pembangunan yang tidak sesuai dengan harapan selama tahun 2020 hingga tahun 2021, namun sejak tahun 2022 pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada umumnya sudah memperlihatkan optimisme dan bangkit dari dampak covid-19, hal ini diperlihatkan dari berbagai indikator makro pembangunan yang sudah membaik, diantaranya pulihnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pendapatan perkapita, kembali membaiknya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun percepatan perkembangan yang telah diukur pada indikator makro lainnya.

Sehingga ke depan untuk penyusunan arah kebijakan, dimana tahun 2024 merupakan satu tahun sebelum berakhirnya periodesasi RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025, sehingga dihadapkan kepada tantangan pada tujuan pembangunan jangka panjang tersebut sekaligus tahun 2025 merupakan masa transisi periodesasi antara RPJPD Tahun 2005-2025 dengan RPJPD Tahun 2025-2045 serta transisi periodesasi RPJMD Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Tahun 2025-2029. Tahun 2025 memiliki tantangan yang cukup berat ditengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah untuk mendanai pembangunan daerah. Dengan demikian prioritas pembangunan tahun 2025 diharapkan dapat memiliki inovasi dan kebijakan yang benar-benar menjalankan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Oleh sebab itu untuk menjalankan pembangunan sesuai dengan tahapan yang telah diproses penyusunan RKPD menggunakan 5 (lima) pendekatan pendekatan, yaitu terdiri dari teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan pendekatan bawah-atas.

Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, pendekatan ini didasarkan pada data yang akurat, tinjauan lapangan serta analisa yang komprehensif. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ketiga yaitu pendekatan politis yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Terakhir adalah pendekatan atas bawah dan bawah atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional. pendekatan ini adalah dilaksanakanya Musrenbang RKPD baik dari Musrenbang

nagari yang diusulkan melalui Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan (DURKP) nagari yang dibahas dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan, serta Musrenbang RKPD di Kabupaten, Musrenbang Provinsi maupun Musrenbang Nasional.

Sesuai dengan tata cara penyusunan RKPD Tahun 2025 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dimana tahapan tersebut terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu :

1. Tahapan persiapan Penyusunan RKPD (Minggu I Januari 2024)

   Persiapan penyusunan RKPD diawali pada minggu I bulan Januari tahun 2024 dengan ditetapkannya Tim Penyusun RKPD Tahun 2025 melalui keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/35/KPTS-BUP/2024 tentang Pembentukan Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dilanjutkan dengan orientasi dan rapat pembahasan, serta pengumpulan data indikator kinerja sesuai dengan RPJMD maupun Renstra PD Tahun 2021-2026.

2. Tahapan penyusunan Rancangan Awal RKPD (Minggu I Januari s.d. Minggu III Maret), tahapan ini diawali dengan perumusan Rancangan Awal RKPD, Konsultasi publik Rancangan awal RKPD tahun 2024 tanggal 6 Februari 2024, dilanjutkan dengan Musrenbang RKPD di kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 29 Februari 2024, sejalan dengan penyusunan muatan Renja PD juga telah dilaksanakannya Forum Gabungan Perangkat daerah pada tanggal 11 sampai dengan 29 Maret 2024.

3. Tahapan penyusunan Rancangan RKPD (Minggu III s.d IV Maret)

   Tahapan ini dilakukan setelah OPD menyampaikan Rancangan Renja yang telah diforumkan, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Bapperida terhadap muatan Rancangan renja yang disampaikan, selain mempertimbangkan prioritas pembangunan juga disinkronkan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinski Sumatera Barat.

4. Tahapan pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten tanggal 3 April 2024.

   Musrenbang RKPD di Kabuaten dihadiri oleh seluruh stakeholder pembangunan daerah, selain dihadiri oleh perangkat daerah, juga dihadiri oleh instansi vertikal, utusan Musrenbang kecamatan utusan Musrenbang Kecamatan, pemerintah nagari, serta daerah tetangga.

5. Tahapan perumusan Rancangan Akhir RKPD

   Perumusan rancangan akhir RKPD kabupaten berdasarkan
   - Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten
   - penyempurnaan RKPD berdasarkan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilaksanakan antara Bapperida Kabupaten Dharmasraya dengan Tim Fasilitasi RKPD Provinsi Sumatera Barat
   - hasil Harmonisasi dan Sinkronisasi yang dikoordinasikan oleh Kemenkumham Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Adapun fokus utama fasilitasi ini adalah untuk menyepakati target pembangunan, serta sinkronisasi arah kebiakan pusat, provinsi Sumatera Barat dengan target pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Dharmasraya

6. Tahapan penetapan RKPD (1 minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan)

   Sesuai peraturan perundang-undangan, maka RKPD Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan pada 7 Hari setelah ditetapkannya RKPD Provinsi, RKPD Kabupaten Dharmasraya ditetapkan melalui Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 /Pmk.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Narasi Rancangan Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Povinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Povinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Povinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Povinsi Sumatera Barat Nomor 195)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 56);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6);;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 83);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 ; (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 94);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 104).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagai konsekuensi dari landasan hukum pada penyusunan RKPD, maka dokumen RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 berpedoman pada sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah, dokumen perencanaan sektoral yang ada serta merujuk juga pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan level pemerintahan desa. Hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :Sesuai dengan hirarti perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RKPD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RKPD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antarwaktu, antarruang dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam menentukan arah kebijakan pembangunan terdapat 2 (dua) bentuk perencanaan yaitu Perencanaan Pembangunan (sektoral), dan Perencanaan Keruangan (spasial). Dimana pada perencanaan pembangunan diarahkan pada fokus (prioritas pembangunan), sedangan perencanaan keruangan diarahkan pada lokus (peruntukan kawasan). Adapun lebih detail mengenai hubungan antar dokumen dapat dijelaskan lebih detail sebagai berikut :

1.3.1. Hubungan RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

Untuk lebih jelasnya Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1-1 Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

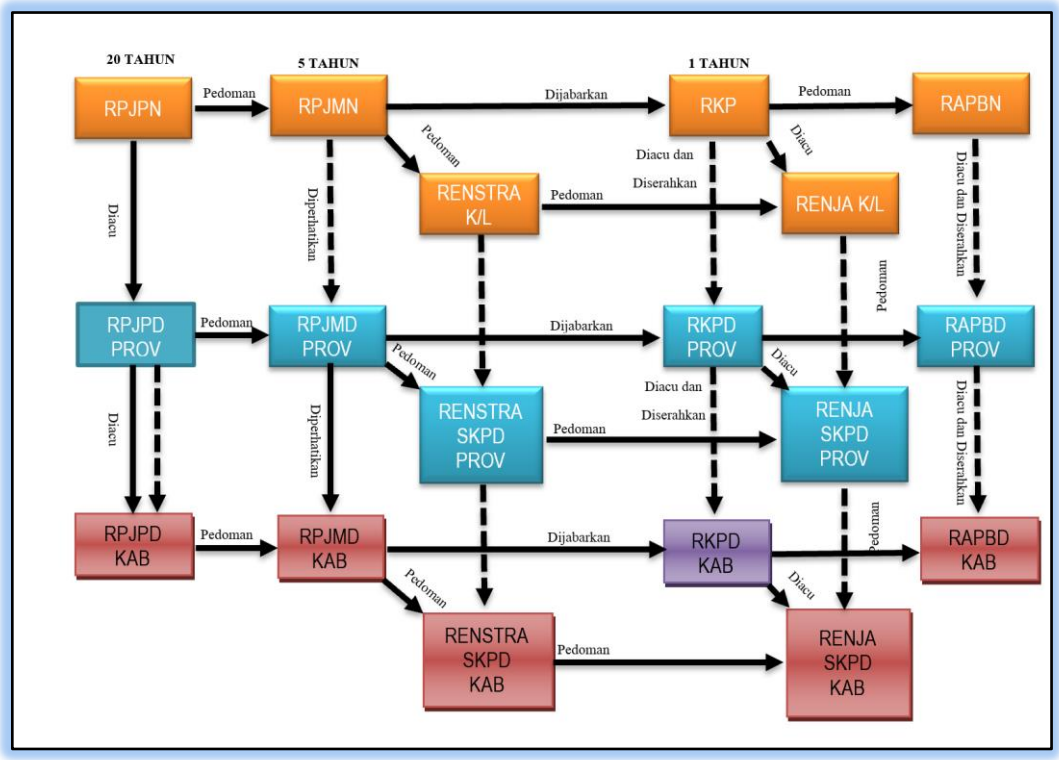

Berdasarkan bagan di atas terlihat bahwa selain berpedoman pada Dokumen Pusat dan Provinsi yang merupakan dokumen wajib yang perlu diselaraskan, dokumen-dokumen sektoral juga menjadi salah satu sumber informasi yang penting untuk digunakan sebagai bahan telaahan dalam menentukan permasalahan dan isu strategis

pembangunan yang selanjutnya menjadi salah satu dasar penentuan prioritas dan sasaran pembangunan, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah serta penyelarasan program prioritas dan pagu indikatif.

RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RAPBD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk program kegiatan yang akan didanai dari APBD. Sementara program/kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai dana APBN akan diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah RKP melalui proses musrenbang nasional. RKP akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional RAPBN.

1.3.2 Hubungan RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan RKP Nasional Tahun 2025, dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana dijelaskan bahwa SPPN satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen perencanaan, diantaranya pada penyusunan RKP, dan RKPD yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dimana pada penyusunan dokumen perencanaan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah dan bawah-atas.

Dimana salah satu pendekatan yang paling

1.3.3. Hubungan RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Dengan telah ditetapkan RTRW Kabupaten Dharmasraya melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043, sehingga dokumen ini menjadi acuan dalam perwujudan pemanfaatan ruang yang dituangkan dalam indikasi program.

Dalam menentukan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan melalui RPJMD Tahun 2021-2026, dimana dokumen perencanaan sebagai *focus* dan dokumen tata ruang (spatial) sebagai *locus*. Penyusunan RKPD Tahun 2025 masih memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, sementara lokus memperhatikan RTRW Tahun 2023-2043, terutama dari sisi pola ruang dan struktur tata ruang. Adapun keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumeN perencanaan keruangan (spatial) dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:

Gambar 1-2 Keterkaitan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Keruangan (Spasial)

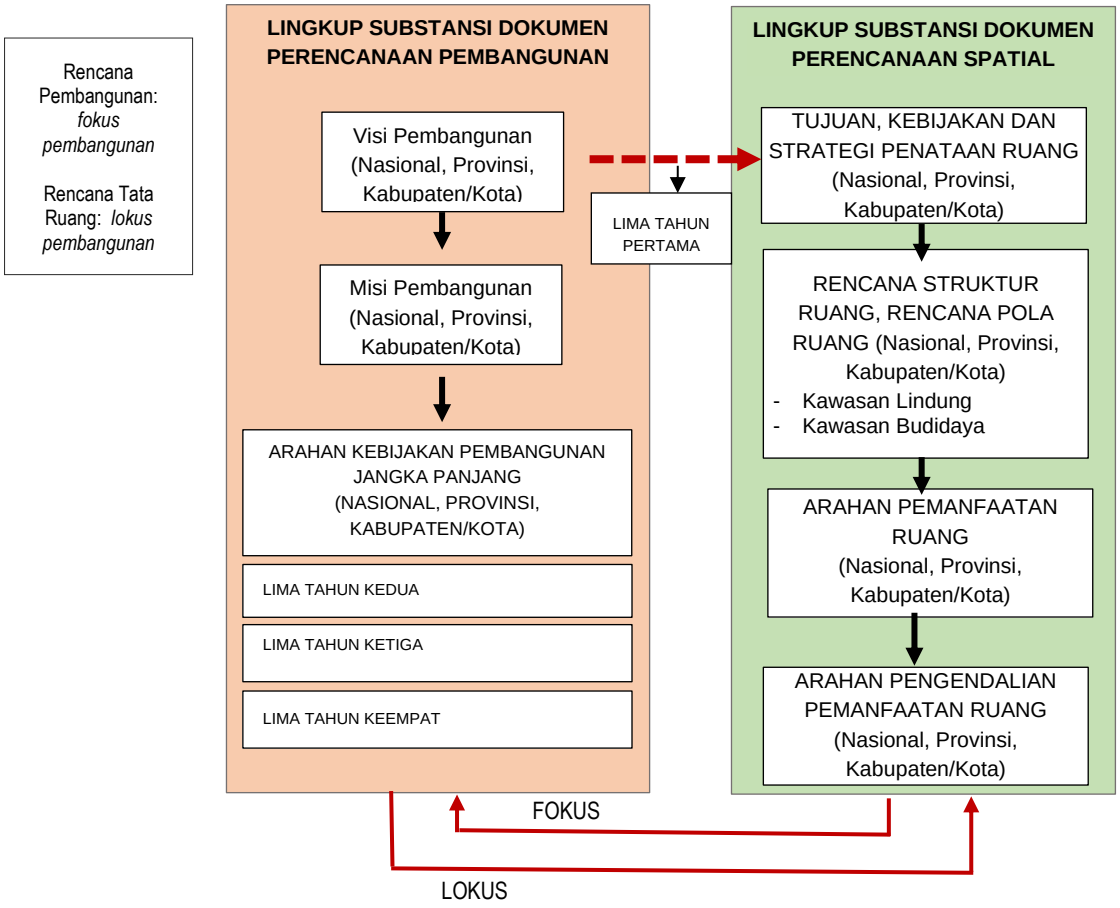

Berdasarkan bagan-bagan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya.

1. RKPD Tahun 2025 disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 yaitu melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
2. RKPD Tahun 2025 disusun berpedoman pada program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, yaitu melalui penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya. Penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 dengan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2025.
3. RKPD Tahun 2025 disusun berpedoman pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yang dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan

kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.

4. RKPD Tahun 2025 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 dan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 - 2043.
5. RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dan menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025; serta sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah sebagai alat untuk menjamin serta meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai alat dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, terdiri dari tinjauan terhadap Kondisi Umum Kondisi Daerah antara lain Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah untuk kondisi data realisasi tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Selain itu juga memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2023 dan realisasi RPJMD serta permasalahan Pembangunan Daerah yang meliputi Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH, memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, berisikan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH, memuat rekapitulasi belanja berdasarkan prioritas pembangunan, urusan pemerintah daerah serta program, kegiatan dan sub kegiatan dimasing-masing perangkat daerah.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, bab ini berisikan target kinerja Tahun 2025 yang diproyeksikan berdasarkan capaian RPJMD Tahun 2023, target kinerja tahun berjalan 2024 serta berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan tahun 2025.

BAB VII PENUTUP

BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah disajikan menggunakan gambar peta, grafik dan tabel untuk data 5 (lima) tahun terakhir, yaitu data tahun 2019 hingga tahun 2023, serta didukung penjelasan dan narasi yang memudahkan pembaca dalam memahami kondisi daerah serta beberapa indikator makro disandingkan capaian indikator nasional dan Proviinsi Sumatera Barat, sebagai perbandingan capaian pembangunan dengan daerah yang lebih luas.

2.1.1. Aspek Geografi

2.1.1.1.Letak, Batas dan Luas Wilayah

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 00º48’25,367”- 1º41’40,269” LS dan 101º8’32,52’’-101º53’30,166”BT. Kabupaten Dharmasraya terletak pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yang dilewati jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera.

Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 yaitu 2.961,13 Km^2 (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 302.599 Ha. Sementara luas berdasarkan citra 2017 dan diupdate menggunakan data citra tahun 2022 dan telah disesuaikan dengan batas kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu 292.120 Ha.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Dharmasraya berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi,
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kabupaten Dharmasraya memiliki luas sebesar 2.961,13 Km^2 (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil interpretasi digitasi Citra Satelite Pleiades tercatat bahwa luas Kabupaten Dharmasraya adalah 292.120 Ha sebagai konsekuensi dari keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penetapan batas daerah antara Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten dan provinsi tetangga yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat; dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tentang Batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan, secara administrasi pemerintahan Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 Kecamatan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari terdiri dari 52 nagari dengan 461 jorong. Untuk lebih jelasnya luas wilayah Kabupaten Dharmasraya per kecamatan danbanyak nagaris erta jorong dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan wilayah administrasi dapat dilihat pada Gambar 2.1..

Tabel 2-1 Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Nagari
1	Koto Baru	21,813	4
2	Pulau Punjung	43,835	6
3	Sungai Rumbai	4,950	4
4	Sitiung	18,459	4
5	Sembilan Koto	46,655	4
6	Timpeh	28,711	5
7	Koto Salak	12,212	5
8	Tiumang	11,243	4
9	Padang Laweh	7,184	4
10	Asam Jujuhan	43,280	5
11	Koto Besar	53,780	7
Kab. Dharmasraya		**292.120**	**52**

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Gambar 2-1 Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya

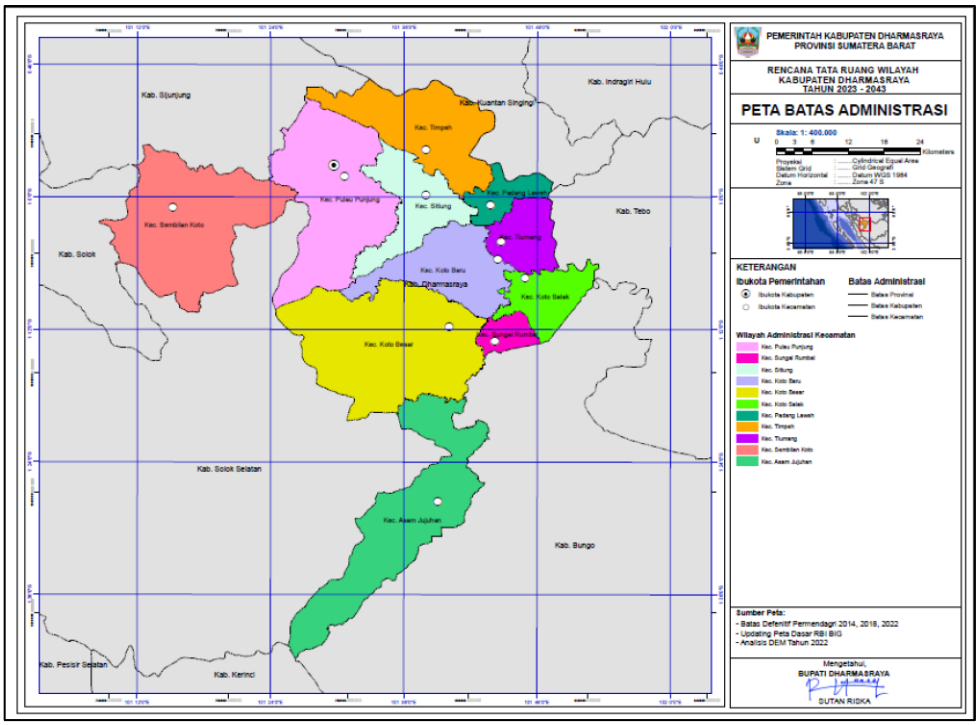

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

2.1.1.2.Topografi dan Kelerengan

Wilayah Kabupaten Dharmasraya secara umum merupakan wilayah perbukitan dan pergunungan dengan kondisi topografi berada pada ketinggian 100-2.600 meter diatas permukaan laut (mdpl). Wilayah dengan ketinggian mulai dari 100 mdpl berada pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, sedangkan ketinggian 2.600 mdpl berada pada kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat.

Kelerengan lahan bervariasi dari datar, landai sampai sangat curam. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis terhadap Pemetaan Digitasi Citra Satelite Pleiades Tahun 2017, diperoleh data kelerengan lahan seperti disajikan pada Tabel 2.2, dan Gambar 2.2 dan Gambar 2.3.

Tabel 2-2 Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya

Simbol	Klasifikasi Kemiringan Lereng	Tingkat Kemiringan	Luas	
			(Ha)	(%)
1	Datar	0 – 2,99 %	74,378	25.46
2	Agak Landai	3 – 7,99 %	134,367	46.00
3	Landai	8 – 14,99 %	35,852	12.27
4	Agak Curam	15 – 24,99 %	22,829	7.82
5	Curam	25 – 45 %	18,663	6.39
6	Sangat Terjal	>45 %	6,031	2.06
Jumlah			**292.120**	**52**

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Gambar 2-2 Peta Topografi Kabupaten Dharmasraya

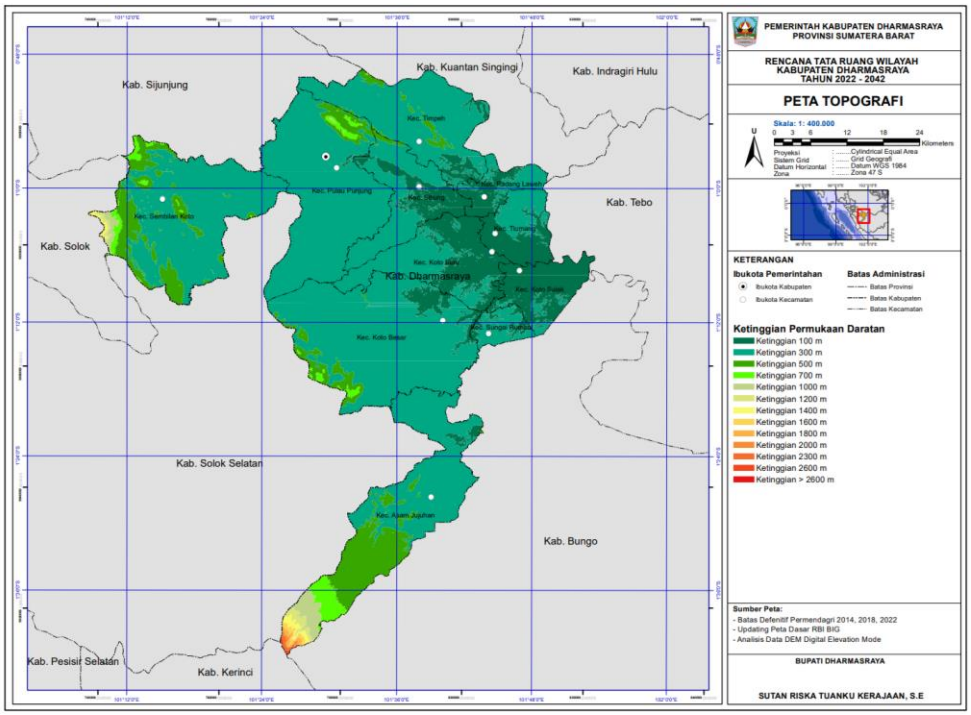

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Gambar 2-3 Peta Kelerengan Kabupen Dharmasraya

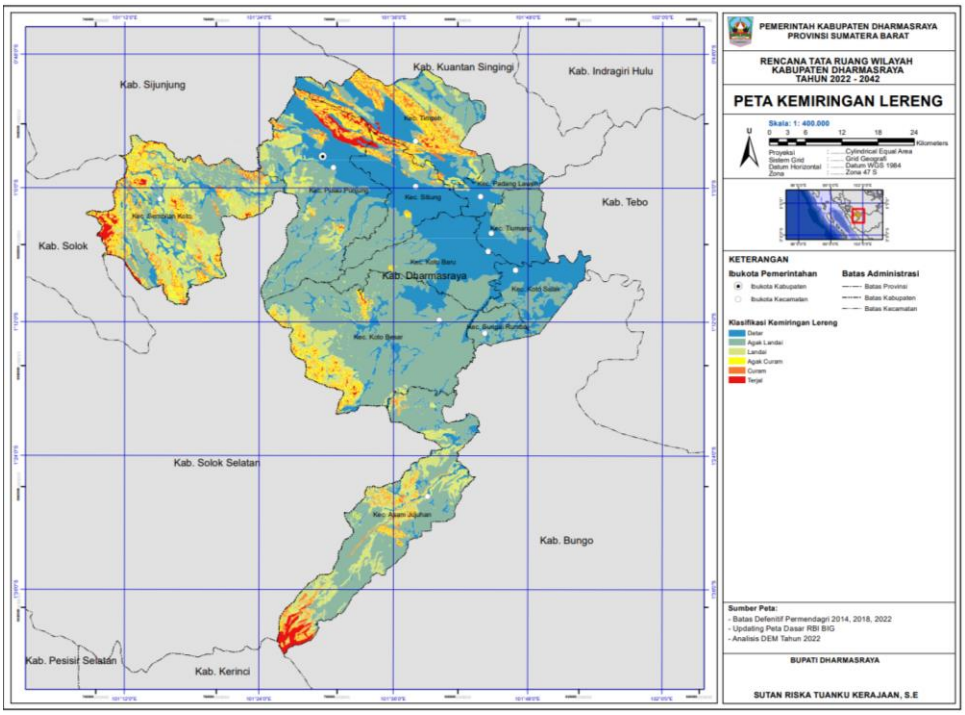

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

2.1.1.3.Geomorfologi

Terdapat 5 satuan morfologi di wilayah Kabupaten Dharmasraya yaitu:

1. Satuan aluvial
   - Jalur Aliran Sungai dengan topografi datar; daerah cekungan dengan topografi datar; dataran antar perbukitan dengan topografi agak landai.
2. Satuan dataran
   - Teras sungai (teras sungai bawah dengan topografi datar; teras sungai tengah dengan topografi landai; teras sungai atas dengan topografi agak curam)
   - Dataran (dataran berombak bergelombang, dataran bergelombang dan dataran perbukitan)
3. Satuan perbukitan
   - Perbukitan terpisah;
   - Perbukitan bergelombang;
   - Perbukitan agak tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang;
   - Perbukitan tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang;
   - Perbukitan tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam;
   - Perbukitan sangat tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam;
   - Perbukitan karst paralel tertoreh
4. Satuan Pergunungan
   - Pergunungan sangat tertoreh
5. Satuan vulkan
   - Lereng atas volkan dengan topografi sangat curam
   - Lereng tengah volkan dengan topografi curam
   - Lereng bawah volkan dengan topografi agak curam
   - Dataran volkan bergelombang dengan topografi landai

Untuk lebih jelasnya geomorfologi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2-4 Peta Geomorfologi Kabupaten Dharmasraya

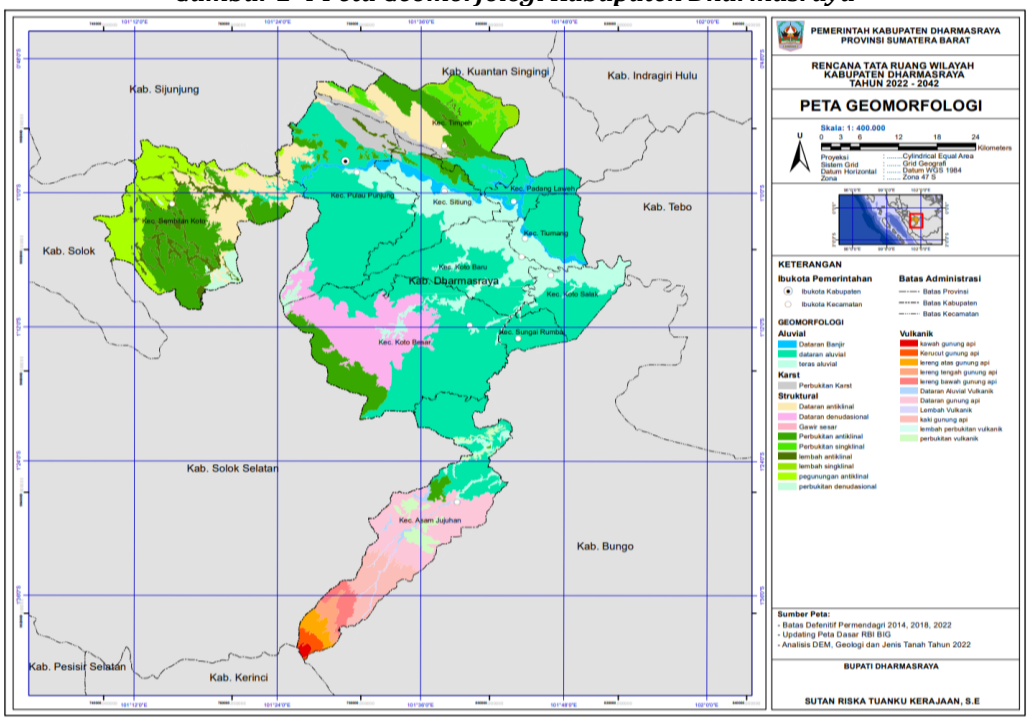

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

2.1.1.4.Hidrologi

Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Batanghari Hulu yang merupakan bagian dari DAS Batanghari. Wilayah Kabupaten Dharmasraya dialiri oleh banyak sungai/batang, dan salah satu sungai yang menjadi bagian dari sistem hidrologi Sumatera Barat dan Jambi adalah Sungai Batanghari. Sungai yang mengalir di Kabupaten Dharmasraya lebih kurang 60 sungai yang terdiri dari Sungai Besar dan anak sungai. Sungai paling besar dan panjang di Kabupaten Dharmasray ayaitu Sungai Batanghari yang termasuk dalam pengelolaan BWS V.

2.1.1.5.Klimatologi

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) wilayah Kabupaten Dharmasraya termasuk ini tergolong pada tipe iklim A (sangat basah). Sementara menurut zona agroklimat L.R. Oldeman termasuk pada zona iklim B1 dengan bulan basah 7-9 bulan dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan. Curah hujan sebagian wilayah Kabupaten Dharmasraya tergolong tinggi yaitu lebih dari 200 mm/bulan.

Suhu udara berkisar antara 210C hingga 330C, dengan tingkat kelembaban antara 70 hingga 80%. Curah hujan sebesar 14.684 mm/tahun dengan banyak hari hujan 361.

2.1.1.6.Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Dharmasraya ini terdiri atas 8 jenis tanah yaitu Aluvial, Kambisol, Gleisol, Nitosol, Latosol, Podsolik, Andosol, dan Litosol. Kesetaraan kedelepan jenis tanah tersebut dirinci atas satuan peta tanah (SPT) berdasarkan karakteristik: kelerengan, satuan fisiografi/bentuk wilayah, dan bahan induk tanah seperti terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2-3 Jenis Tanah di Kabupaten Dharmasraya

No	Pusat Penelitian Tanah (1983)	Soil Taxonomy (USDA,1975)	FAO-UNESCO (1974)	Luas	
				Ha	(%)
1	Aluvial	Tropaquepst	Gleysols	29.292	10,03
2	Andosol	Dystrandepts	Andosols	11.003	3,77
3	Gleisol	Tropaquepts	Gleysols	7.833	2,68
4	Kambisol	Dystropepts	Cambisols	127.573	43,67
5	Latosol	Haplorthoxs	Feralsols	16.107	5,51
6	Litosol	Troporthents	Lithosols	2.411	0,83
7	Nitosol	Paleudults	Nitosols	92.543	31,68
8	Podsolik	Tropudults	Acrisols	5.358	1,83
Total				**292.120**	**100**

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Dari data tabel di atas terlihat bahwa tanah di Kabupaten Dharmasraya didominasi oleh jenis tanah yang telah mengalami pelapukan lanjut (tanah tua) dari jenis Kambisol (44,89%) dan Nitosol (32,40%). Tanah jenis ini telah mengalami pelapukan lanjut dan karena berada pada zona tipe iklim A (sangat basah) berdasarkan sistim klasifikasi iklim Schmidt Ferguson (1951) dan termasuk zona iklim B1 menurut zona agroklimat L.R.Oldeman sehingga telah mengalami proses leaching yang terus menerus.

Hal ini mengakibatkan kandungan hara menjadi rendah, KTK rendah, kandungan bahan organic rendah, ketersediaan Ca, Mg, Na, N, P dan K rendah, tinggi kandungan Aluminium (Al) dan Besi (Fe), dengan pH yang rendah (bereaksi masam). Solum tanah pada umumnya dalam sampai sangat dalam, pori mikro banyak, tekstur lempung liat berdebu, struktur remah dan konsistensi lekat.

Tanah jenis ini tersebar pada punggung torehan, perbukitan bergelombang, perbukitan agak tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang, perbukitan tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang, perbukitan tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam. Jenis tanah ini terutama pada lahan dengan kelerengan 15-45% sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan (tanaman tahunan) seperti karet dengan sedikit treatment/masukan teknologi, Kelapa Sawit dengan pengapuran, coklat dengan pemberian bahan organic. Adapun jenis tanah di Kabupaten Dharmasray adapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2-5 Peta Jenis Tanah Kabupaten Dharmasraya

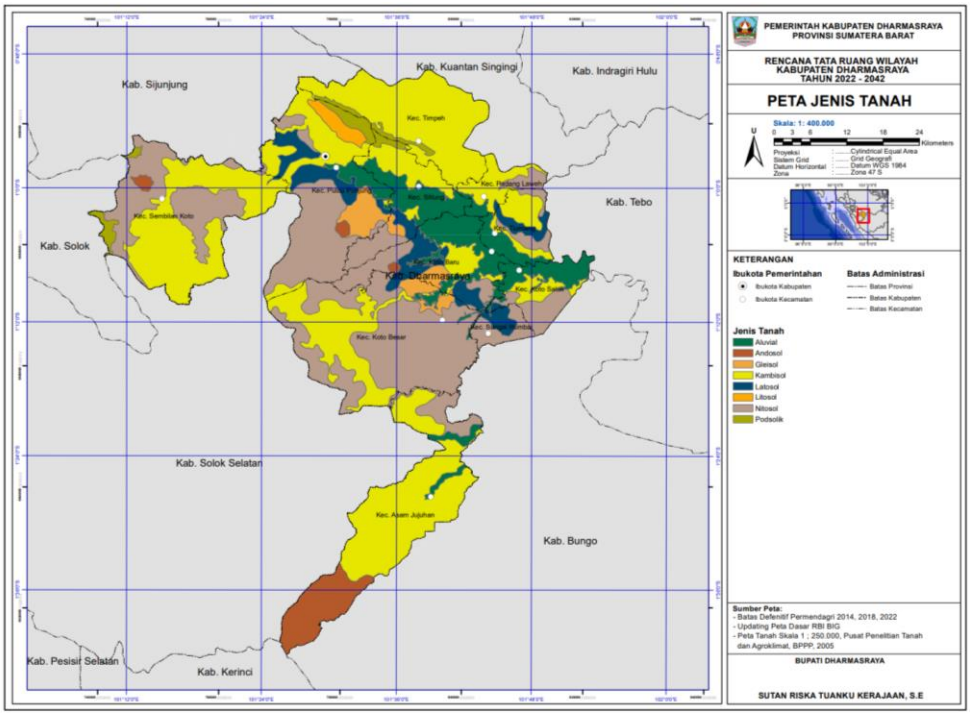

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

2.1.1.7.Geologi

Berdasarkan data informasi Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya secara geologi regional masuk dalam Peta Geologi Lembar Solok dan Lembar Painan dan Bagian Timur Laut Muara Siberut maka formasi dan litologi di wilayah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari :

1. Aluvium
2. Endapan Undak
3. Batuan Gunung Api yang tak terpisahkan
4. Lava
12. Porfir Kuarsa
13. Granodiorit
14. Formasi Barisan, Anggota batugamping
15. Formasi Barisan

5. Formasi Kasai
6. Formasi Rantaukil
7. Formasi Telisa, Anggota bawah
8. Formasi Gumai
9. Formasi Talang Akar
10. Formasi Sinamar
11. Granit
16. Formasi Pelepat
17. Diabas, Basal
18. Formasi Silungkang
19. Formasi Kuantan, Anggota Bawah
20. Formasi Kuantan, Anggota Filit dan Serpih
21. Formasi Kuantan, Anggota Batugamping

Untuk lebih jelasnya kondisi geologi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2-6 Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya

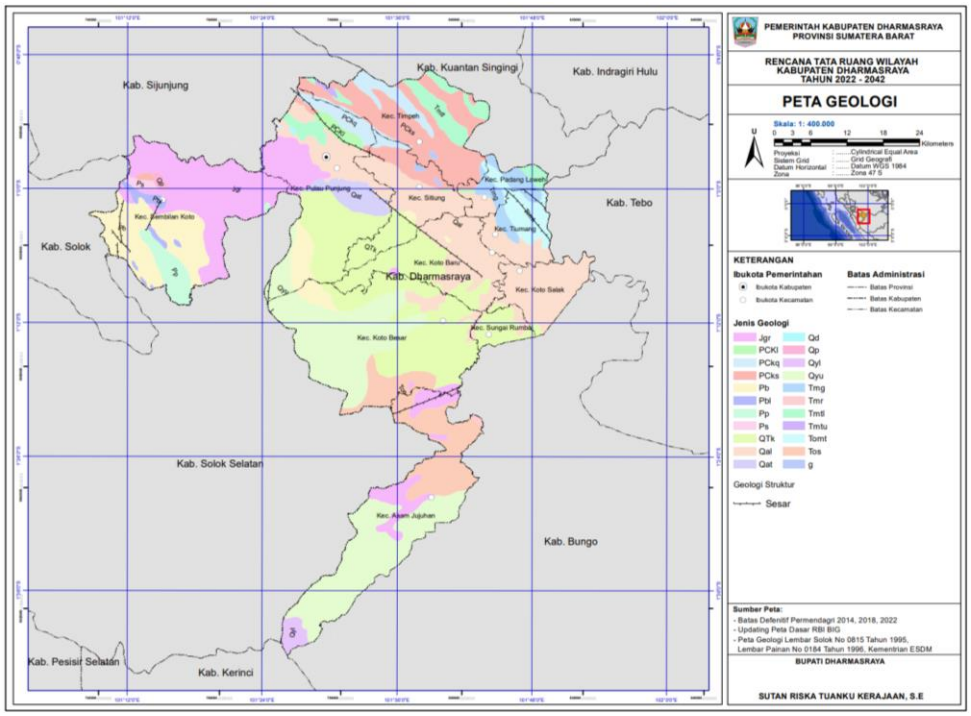

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

2.1.1.8.Hidrogeologi

Berdasarkan Peta Hidrogeologi, Peta Geologi dan Peta Pola Aliran Sungai Kabupaten Dhamasraya, kondisi hidrogeologi Kabupaten Dharmasraya terdiri dari :

A.* Akifer dengan Aliran Melalui Ruang Antar Butir *(Aquifers in which flow is intergranular)

- Akifer produktif dengan penyebaran luas *(extensive, productive aquifers)*

  Akifer terutama pasir, dengan keterusan sedang. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan sampai 5 meter dari muka air tanah. Debit mata air umumnya kurang dari 50 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai 10 liter/detik.

- Akifer produktivitas sedang, dengan penyebaran luas *(extansive, moderately productive aquifers)*

  Akifer terutama pasir, dengan keterusan sedang sampai rendah. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan sampai 14 meter dari muka air tanah setempat. Debit mata air umumnya kurang dari 25 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai 5 liter/detik.

- Setempat, akifer dengan produktivitas sedang *(locally,moderately producive aquifers)*

  Akifer terutama pasir lempungan, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan, kurang dari 10 meter dari muka tanah setempat. Debit mata air umumnya kurang dari 10 liter/detik. Debit sumur diperkirakan kurang dari 5 liter/detik.

B. Akifer dengan Aliran Melalui Celahan dan Ruang Antar Butir (aquifers in which flow is both through fissures and interstices)

- Akifer produktif dengan penyebaran luas *(extensive, productive aquifers)*
  Akifer dengan keterusan dan kisaran kedalaman muka air tanah beragam. Debit mata air umumya kurang dari 200 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai lebih dari 5 liter/detik.
- Akifer produtifitas sedang, dengan sebaran luas *(extensive, moderately productive)*
  Akifer dengan keterusan sangat beragam, kedalaman muka air tanah bebas umumnya dalam. Debit mata air kurang dari 100 liter/detik. Debit sumur diperkirakan kurang dari 5 liter/detik.
- Setempat, akifer dengan produktifitas sedang *(locally, moderately productive aquifers)*
  Akifer dengan keterusan sangat beragam, kedudukan muka air tanah bebasnya dalam. Debit mata air umumnya kurang dari 50 liter/detik.

C. Akifer Dengan Aliran Melalui Celahan, Rekahan dan Saluran (aquifers in which flow is through fissures, fractures and channels)

- Akiter produktif inggi sampai sedang *(highly to moderately productive aquifers)*

  Aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan. Debit sumur dan mata air beragam dalam kisaran yang besar, debit mata air kurang dari 1 sampai 400 liter/detik

D. Akifer Bercelah atau Sarang Produktif Kecil dan Daerah Air Tanah Langka (aquifers fissured or porous of poor productivity and regions without exploitable groundwater)

- Akifer dengan produktivitas kecil, setempat *(poorly productive aquifers of local importance)*

  Berada pada zona pelapukan, air tanah dangkal dalam jumlah terbatas masih dapat diperoleh. Kedalaman muka air tanah bebas dekat permukaan sampai 11 meter dari muka tanah setempat. Pemunculan mata air di zona rekahan kurang dari 2 liter/detik.

- Daerah air tanah langka *(regions without axploitable groundwater)*

Ditinjau dari aspek hidrogeologi secara umum Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi faktor air permukaan, curah hujan pada *cathment area* dan banyaknya sungai yang mengalir, sangat mempengaruhi *discharge* air di bawah permukaan. Secara hidrogeologi Dharmasraya sebagian wilayahnya tersusun oleh batuan vulkanik dan dataran rendah ditutupi oleh endapan alluvium dengan cadangan air yang melimpah terutama di daerah-daerah yang dilalui oleh dua sungai besar yang hulunya dari dataran tinggi/pegunungan. Daerah dengan batuan vulkanik (beku) mempunyai cadangan (aquifer) setempat dan pada rekahan (joint) umumnya cadangan air langka. Di daerah sedimen yang didominasi pasir lepas merupakan daerah yang mempunyai jenis aquifer dengan produktivitas tinggi dan penyebarannya luas.

Secara keseluruhan Kabupaten Dharmasraya mempunyai cadangan air yang relatif banyak. Khususnya di daerah lembah/dataran rendah merupakan daerah yang mempunyai cadangan (aquifer) yang tinggi, hal ini disebabkan arah aliran air dibawah permukaan mengalir dari dataran tinggi/pegunungan ke daerah yang rendah.

Untuk lebioh jelasnya kondisi hidrogeologi Kabupaten Dharmasray adapat dilihat pada Gambar 2.7.

Gambar 2-7 Peta Hidrogeologi Kabupaten Dharmasraya

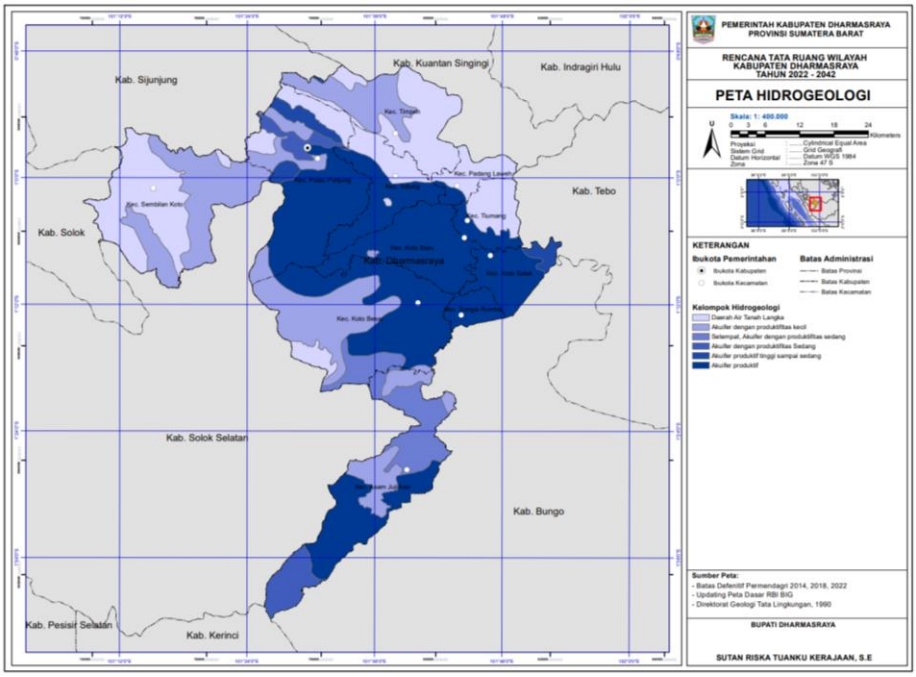

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

2.1.1.9.Tutupan Lahan

Berdasarkan pemetaan kembali tutupan lahan Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2018 berdasarkan citra terbaru tahun 2017 dan diupdating dengan data citra 2021 maka diperoleh hasil seperti berikut ini.

1. Lahan Pertanian

Luas lahan pertanian di Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan seluas 214.791 Ha (72,53% dari luas wilayah). Lahan pertanian yang dominan di Kabupaten Dharmasraya yaitu perkebunan sawit seluas 182.424 Ha (62,45%) dan karet seluas 21.874 Ha (7,49%). Lahan Sawah dengan padi terus menerus seluas 4.295 Ha (1,47%). Lahan pertanian tanaman pangan lahan kering (ladang/tegalan dengan palawija) seluas 6.198 Ha (2,12%).

2. Hutan
   Luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya 58,757 Ha (20,11% dari luas wilayah).

3. Permukiman
   Luas kawasan permukiman 5.026 Ha (1,70% dari luas wilayah). Kawasan permukiman dominan berkembang diarah timur dan tenggara wilayah yang meliputi Kecamatan Koto Salak, Koto Besar, Tiumang, Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh, dan Timpeh. Sebagian perkembangan permukiman didorong oleh perkembangan permukiman transmigrasi yang sudah dimulai sejak tahun 1970-an.

Untuk lebih jelasnya tutupan lahan kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Gambar 2.8.

Tabel 2-4 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

No	Jenis	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Permukiman/ tempat kegiatan masyarakat	5,026	1.72
2	Sawah dengan padi terus menerus	4,295	1.47
3	Perkebunan kelapa sawit	182,424	62.45
4	Perkebunan karet	21,874	7.49
5	Perkebunan campuran	3,087	1.06
6	Penggalian Pasir, Tanah dan Batu	346	0.12
7	Semak belukar	7,509	2.57
8	Ladang / tegalan/ palawija	6,198	2.12
9	Padang rumput/ alang-alang	219	0.08
10	Penambangan terbuka	137	0.05
11	Penampungan air	1	0.00
12	Bendungan	1	0.00
13	Danau	16	0.01
14	Empang	65	0.02
15	Hutan rimba	58,757	20.11
16	Irigasi	146	0.05
17	Sungai permanen	2,018	0.69
	Total Luas	**292.120**	**100**

Sumber : Interpretasi Pemetaan Digitasi Citra Satelite Pleiades pada RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Gambar 2-8 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya

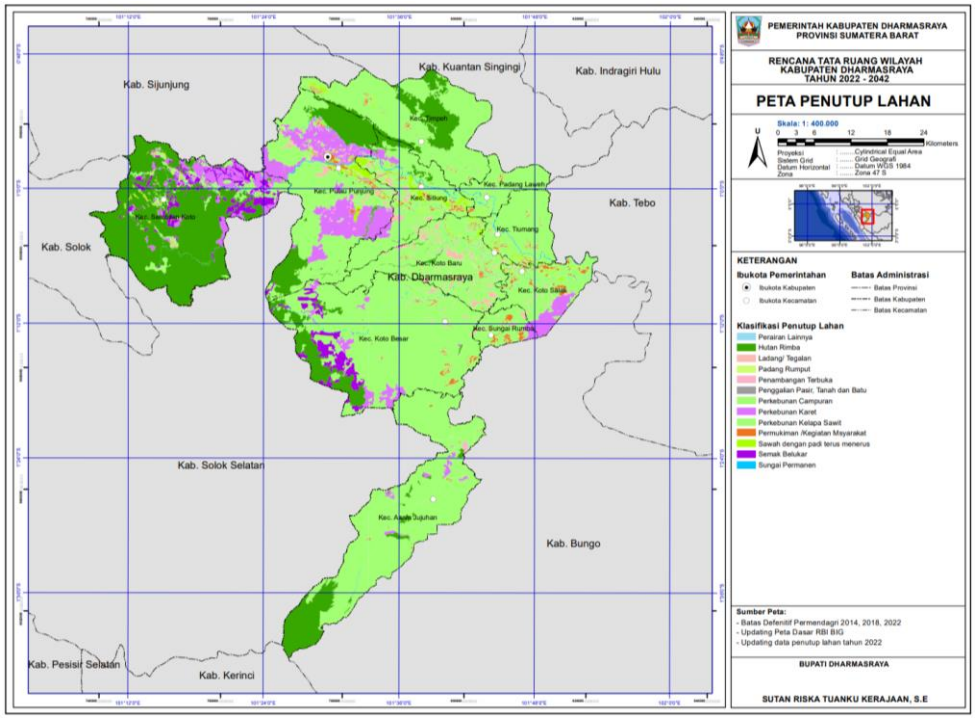

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

2.1.1.10. Pemanfaatan Lahan Berdasarkan Status

Berdasarkan status lahan yang merupakan penguasaan lahan oleh perusahaan atau pemerintah berdasarkan peraturan yang menunjukkan penguasaan lahan tergambar proporsi pemanfaatan lahan oleh masyarakat maupun daerah. Dari data status penguasaan lahan didapat gambaran sebagai berikut:

- Luas lahan yang telah diperuntukan bagi berbagai pemanfaatan berdasarkan perijinan yang telah dikeluarkan di Kabupaten Dharmasraya yaitu: kawasan hutan, perkebunan besar, kawasan pertambangan dan rencana pengembangan kawasan cadangan lahan oleh Departemen Transmigrasi seluas 143.769 Ha (48,90% dari luas wilayah kabupaten)
- Kawasan hutan berdasarkan yaitu SK. No 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 seluas 80.819 Ha (28,24% dari luas kabupaten).
- Perkebunan besar seluas 48.272 Ha (16,74% dari luas kabupaten)
- Kawasan pertambangan berdasarkan IUP operasi produksi pertambangan seluas 2.409 Ha.
- Luas kawasan untuk penggunaan lain diluar kawasan yang telah dikeluarkan ijin penguasaan pemanfaatan lahannya yaitu 150.213 Ha (51,10% dari luas wilayah).

Untuk lebih jelasnya peruntukan lahan berdasarkan status dapat dilihat pada Tabel 2.5, Tabel 2.6 dan Gambar 2.9.

Tabel 2-5 Peruntukan Lahan Berdasarkan Status Lahan

Peruntukkan Lahan Berdasarkan Status Lahan	Luas	
	(Ha)	%
Kawasan Hutan	**88.582,06**	**30,32**
- Hutan Lindung (HL)	10.653,55	3,65
- Hutan Produksi (HP)	24.116,69	8,26
- Hutan Produksi Konversi (HPK)	16.272,38	5,57
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)	28.171,03	9,64
- Kawasan Cagar Alam	770,95	0,26
- Kawasan Suaka Alam	3,51	0.00
- Kawasan taman nasional (TN)	8.593.94	2,94
Perkebunan Besar	48.272	16,52
Kawasan Pertanian Lahan Pangan Berkelanjutan (KP2B)	7.895	2,70
Kawasan Pertambangan (berdasarkan IUP operasi produksi)	2.526	0,86
Luas lahan yang dikuasai perusahaan dan pemerintah berdasarkan peraturan-perundangan	**147.270**	50,41
Penggunaan lain oleh masyarakat dan Pemda	158.387	49,59
Total Luas Kabupaten	**292.120**	**100,00**

Sumber: SK. No 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Tabel 2-6 Ijin Usaha (IUP) Pertambangan

No	Kategori	Luas Ha	Proporasi Dari Luas Kabupaten
1	IUP Pertambangan	2.526	0,86 %
2	IUP Operasi Produksi Pertambangan	2.526	0,86 %
3	IUP Eksplorasi Pertambangan	17.587	5,87%
4	Wilayah Pertambangan	**292.120**	**100,00%**

Sumber : dan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Gambar 2-9 Peta Status Lahan Kabupaten Dharmasraya

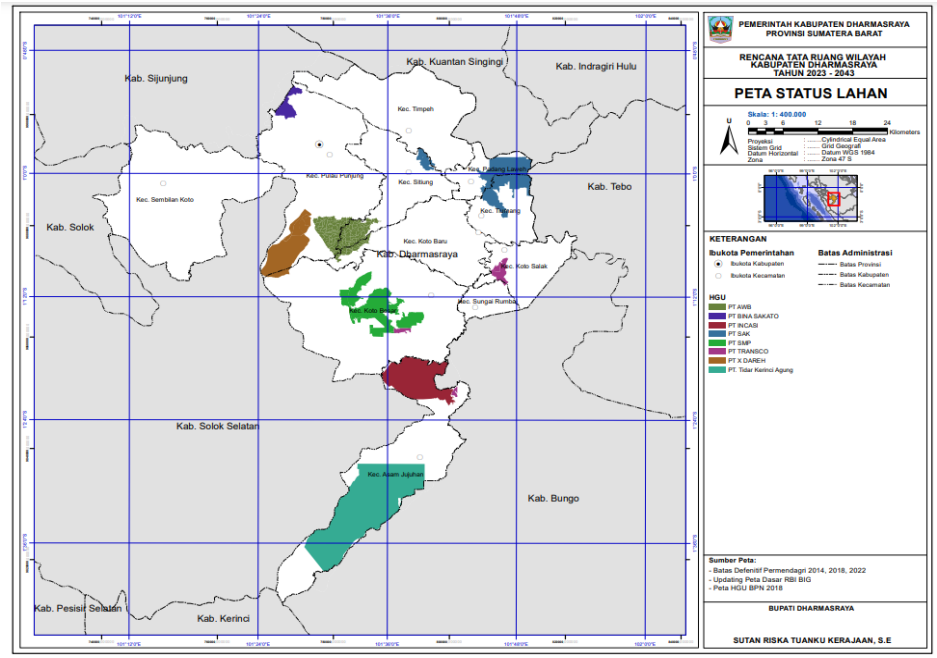

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

2.1.1.11. Kerawanan Bencana Alam

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana alam adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Salah satu faktor terjadinya bencana dikarenakan lingkungan. Oleh karena itu, kondisi daerah rawan bencana harus dikenali dan dibuat rencana tata ruang daerah rawan bencana. Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), disebutkan bahwa kawasan bencana alam dibedakan menjadi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.

Salah satu klasifikasikan kawasan rawan bencana alam yang terindentifikasikan di Kabupaten Dharmasraya adalah bencana tanah longsor yang dapat dilihat berdasarkan potensi gerakan tanah dan bencana banjir seperti uraian berikut:

A. Potensi Gerakan Tanah

Bencana Gerakan Tanah/longsoran gerakan tanah merupakan perpindahan tanah yang disebabkan karena gempa bumi, kelerengan terjal maupun adanya kontak antar batuan yang mempunyai densitas berbeda. Gerakan tanah/longsoran yang terjadi Kabupaten Dharmasraya umumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi geologi, morfologi, dan curah hujan. Daerah lokasi potensi tinggi longsor : Kecamatan Silago, Sialang Kecamatan Pulau Punjung, dan Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung.

Potensi gerakan tanah dijumpai pada daerah yang dibentuk oleh batuan Anggota Filit, Formasi Barisan (Pb) dan serpih Formasi kuantan (Pckl) dan batuan vulkanik (Qd) . Umumnya gerakan tanah berupa longsoran bahan rombakan dan nendatan berdimensi

panjang antara 1-2 m, lebar antara 0,5-1 m, terdapat pada kemiringan lereng antara 40-50 %. Sedangkan tipe gerakan tanah yang sering terjadi berupa longsoran bahan rombakan dan batu.

Bencana gerakan tanah pernah terjadi di Sialang, Kampung Surau, Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Silago yang mengakibatkan rusaknya sarana–prasarana transportasi dan lahan pertanian di daerah tersebut. Karakteristik bencana gerakan tanah tersebut dicirikan oleh adanya pergerakan suatu masa tanah/batuan dan air yang terjadi secara tiba-tiba dan serentak dengan kecepatan tinggi.

Gerakan tanah di wilayah Kabupaten Dharmasraya dapat dikelompokkan berdasarkan dominasi sebaran batuan utamanya, sehingga sebaran batuan yang luasnya kecil dan mempunyai topografi hampir sama akan disatukan dengan dominasi batuan utamanya, sedangkan metode yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah digunakan metode kualitatif. Metode ini parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah terdiri atas: bentuk muka tanah (morfologi), kondisi geologi, curah hujan, dan kegempaan. Dari analisis parameter-parameter tersebut secara umum di Kabupaten Dharmasraya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Pengelompokan gerakan tanah di Kabupaten Dharmasray adapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2-7 Gerakan Tanah Wilayah Kabupaten Dharmasraya

No	Zona Kerentanan Gerakan Tanah	Kelompok Batuan Utamanya	Jenis Gerakan Tanah	Sebaran
1	Tinggi	Kelompok Anggota filit dan serpih Formasi Kuantan (PCks), Batuan Intrusi Granit (g), Andesit (Qatg), Bahan vulkanik tak terpisahkan (Qtau).	Jenis gerakan tanah luncuran hingga runtuhan ataupun tumbang, lereng > 25%, kekar dan sesar.	Zona ini terdapat pada bagian Barat, meliputi Kecamatan Silago, Sialang, Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung
2	Sedang	Kelompok Batuan Anggota Batu Gamping Formasi Kuantan (PCks), Anggota Formasi Kasai (QTpu) Anggota Filit Serpih Formasi Kuantan, Batuan Intrusi (g), Andesit (Qatg), dan bahan vulkanik tak terpisahkan.	Gelinciran – Seluncuran (bidang lapisan, kekar dan sesar).	Zona ini terdapat pada bagian Tengah dan Timur Laut meliputi wilayah Kecamatan Kota Baru dan Ampalu
3	Rendah	Kelompok Bantuan Anggota Batugamping Formasi Kuantan, Anggota Filit dan Serpih Formasi Kuantan (Pcks), Bahan vulkanik tak terpisahkan (Qtau), kipas Alivium (Qf) dan Endapan Aluvium (Qaf).	Gelinciran – Luncuran (bidang foliasi, kekar dan sesar).	Penyebaran zona ini terdapat di bagian utara, selatan dan Timur daerah kajian yang meliputi wilayah Kecamatan Timpeh, Padang Laweh, Koto Besar, Kec. Koto Salak, Sungai Rumbai.

4	Sangat Rendah	Batuan penyusunan zona ini terdiri dari bahan vulknik (Qv), Kipas Aluvium dan Endapan Aluvium (Qal).	Erosi tebing sungai (litologi bersifat lepas-lepas).	Sebaran zona ini terletak di bagian tengah dan timur daerah telitian

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

B. Bencana Banjir

Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Dharmasraya terdapat pada kawasan-kawasan yang bercirikan : dataran limpah banjir yang terbentuk oleh teras-teras sungai yang terbentuk pada masa lampau, pertemuan dua sungai besar, meander sungai, dan daerah hilir sungai yang berhulu pada kawasan berhutan gundul. Kawasan yang sangat potensi bencana banjir di Kabupaten Dhamasraya adalah dataran banjir yang morfologi dataran disepanjang aliran sungai Batanghari, Batang Timpeh, Sungai Batang Abai dan Sungai Bonjol, yang ketika aliran sungai pada kondisi normal tidak meluap namun pada saat musim hujan aliran sungai melampui batas normal terjadi limpasan air sungai yang menyebabkan banjir.

Bahaya banjir sering terjadi di lokasi potensi banjir : Kampung Surau, Pelayangan, Nagari Gunung Selasih di Kecamatan Pulau Punjung. Banjir Bandang sekitar Batang Timpeh di Kecamatan Timpeh, Pasar Abai, Sungai Batang Abai, Sungai Bonjol di Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Padang Laweh. Berikut data bencana banjir pada Kabupaten Dharmasraya.

Gambar 2-10 Peta Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Dharmasraya

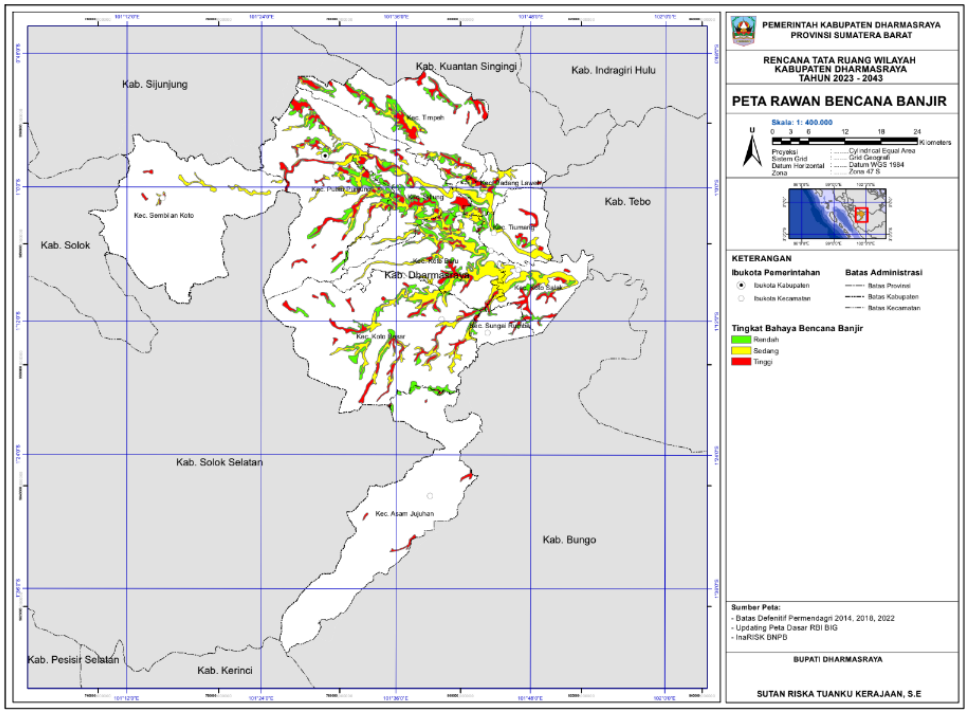

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

C. Kerawanan Longsor

Tingkat kerentanan terhadap bahaya longsor dari hasil analisis skoring terhadap parameter penentu kerawanan longsor klasifikasi berupa kelerengan, ketinggian, curah hujan, dan jenis tanah maka Diperoleh kelas kerentanan yaitu tidak rawan, kerawanan rendah, kerawanan sedang, kerawanan tinggi. Hasil dari analisis skoring dengan metode tabular dan overlay diperoleh gambaran tentang area rawan yang hanya sebagian kecil saja kawasan longsor yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya.

D. Kerawanan Pencemaran Lingkungan

Baku mutu air raksa telah dilewati terutama oleh Sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu, dan pada jumlah yang tidak terlalu siginifikan pada Sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan. Kualitas air beberapa sungai di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2-8 Kondisi Kualitas Air Sungai di Kabupaten Dharmasraya

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Lokasi Sampling														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Waktu Pemantauan (tgl/bln/thn)				8/27/ 2010	27/08 /2010	27/08 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	5/31 /2010	5/31 /2010	5/31 /2010	5/31 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010
1	**FISIKA**																	
	Temperatur	°C										28,4	30,0	30,1	30,1			
	TDS	Mg/L	1000	64	17	22	55	95	45	182	23	21,7	80,4	64,4	57,6	15	88	51
	TSS	Mg/L	50	6	23	13	42	**421**	8	520	19	**305**	9	20	12	16	51	25
2	**KIMIA ORGANIK**																	
	PH		6-9	6,57	6,37	6,76	6,70	6,34	6,80	7,05	6,50	6,82	7,48	7,33	7,50	6,64	6,98	6,80
	BOD	Mg/L	2	**2,4**	2,0	1,6	2,0	**3,2**	**3,5**	**2,8**	**3,4**	1,56	1,92	**2,44**	**2,86**	**3,1**	**4,5**	**2,8**
	COD	Mg/L	10	10	15	4	12	13	7	21	9	16	17	9	14	17	43	25
	DO	Mg/L	6	**7,2**	**7,3**	**6,9**	**7,1**	**7,1**	**6,1**	**6,7**	**7,2**	4,0	4,7	5,9	5,3	**6,8**	**7,0**	**6,3**
	Posfat	Mg/L	0,20	TTD	0,008	0,083	0,033	0,216	TTD	0,106	0,015	0,039	TTD	TTD	TTD	0,162	0,154	TTD
	NO2	Mg/L		TTD	0,004	TTD	0,005	0,119	TTD	0,099	TTD	0,019	0,007	0,008	0,023	TTD	TTD	TTD
	Tembaga	Mg/L	0,02	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD					TTD	TTD	TTD
	Besi	Mg/L	0,3	0,265	**2,152**	**1,574**	**3,617**	**11,92**	**0,882**	**12,14**	**0,4**					**1,229**	**4,869**	**1,551**
	Timbal	Mg/L	0,03	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD					TTD	TTD	TTD
	Air Raksa	Mg/L	0,001	TTD	0,00092	**0,00138**	**0,00166**	**0,00299**	TTD	0,00069	0,00054	**0,00172**	**0,00172**	**0,00163**	**0,02099**	**0,01392**	**0,00205**	0,00075
	Seng	Mg/L	0,05	**5,440**	**5,821**	**0,377**	**0,299**	**0,297**	**0,114**	**0,334**	**0,135**					**3,947**	**0,648**	**0,074**
	Sulfat	Mg/L	400	1,475	3,594	2,634	4,665	71,032	6,98	48,023	23,49					1,867	3,713	19,74

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya

1 = Sungai Batang Momongan Hulu
2 = Sungai Batang Mimpi
3 = Sungai Batang Siat Abai
4 = Sungai Betung
5 = Sungai Koto Balai & S. Batih
6 = Sungai Pangian Hulu
7 = Sungai.Piruko Palangko & Nyunyo
8 = Sungai Kuranji&Btng Siat
9 = Sungai Batang Siat Hilir
10 = Sungai Batang Timpeh
11 = Sungai Muaro batang Momongan
12 = Sungai Muaro Pangian
13 = Sungai Batanghari (Hulu)
14 = Sungai Batanghari (Tengah)
15 = Sungai Batanghari (Hilir)

2.1.2. Kondisi Demografi

Dalam penyajian kondisi demografi, akan disajikan karakter penduduk Kabupaten Dharmasraya berdasarkan jumlah, pertumbuhan, dan kepadatan penduduk. Kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perencanaan daerah. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri.

Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 sebanyak 237.724 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 120.602 jiwa (.50,78%), sedangkan penduduk perempuan sebanyak 117.122 jiwa (49,27%) dengan sex ratio 102,97. Dilihat berdasarkan distribusi penduduk, maka dapat diranking 3 (tiga) besar kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 46.790 jiwa atau 19,68 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Koto Baru sebanyak 33.869 jiwa atau 14,25 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, dan di Kecamatan Sitiung sebanayak 29.515 jiwa atau 12,39 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya.

Sebaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin di tiap kecamatan, dapat dilihat pada Tabel 2.9 dan Tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel 2-9 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Dharmasraya Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)	Distribusi (%)
1	Sungai Rumbai	23.586	9,92
2	Koto Besar	28.214	11,87
3	Asam Jujuhan	9.120	3,84
4	Koto Baru	33.869	14,25
5	Koto Salak	18.267	7,68
6	Tiumang	13.733	5,78
7	Padang Laweh	6.877	2,89
8	Sitiung	29.515	12,42
9	Timpeh	18.102	7,61
10	Pulau Punjung	46.790	19,68
11	Sembilan Koto	9.651	4,06
Jumlah		**237.724**	**100,00**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2024

Tabel 2-10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No.	Kelompok umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		Total (Jiwa)	Sex Rasio
		Laki-laki	Perempuan		
1	0-4	9.025	8.235	17.260	109,59
2	5-9	11.322	10.700	22.022	105,81
3	10-14	11.690	11.059	22.749	105,71
4	15-19	10.050	9.747	19.797	103,11
5	20-24	10.499	10.362	20.861	101,32
6	25-29	9.347	8.963	18.310	104,28
7	30-34	8.524	8.797	17.321	96,90
8	35-39	9.299	9.541	18.840	97,46
9	40-44	9.728	9.498	19.226	102,42
10	45-49	8.359	7.970	16.329	104,88
11	50-54	6.958	6.481	13.439	107,36
12	55-59	5.317	4.995	10.312	106,45
13	60-64	4.018	3.789	7.807	106,04
14	65-69	2.925	2.970	5.895	98,48
15	70-74	1.780	1.775	3.555	100,28
16	75+	1.761	2.240	4.001	78,62
Jumlah		**120.602**	**117.122**	**237.724**	**102,97**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Hasil Analisis Bapperida, Tahun 2024

Perkembangan jumlah penduduk disajikan dari data tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Untuk lebih jelasnya jumlah, dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut:

Tabel 2-11 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Dharmasraya Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sungai Rumbai	20.487	21.650	22.591	22.720	23.586
2	Koto Besar	24.404	26.373	27.387	27.457	28.214
3	Asam Jujuhan	9.285	7.787	8.295	8.493	9.120
4	Koto Baru	29.331	30.269	32.208	32.729	33.869
5	Koto Salak	16.747	17.217	17.729	17.771	18.267
6	Tiumang	11.217	12.813	13.193	13.295	13.733
7	Padang Laweh	8.207	6.003	6.335	6.472	6.877
8	Sitiung	26.511	27.107	28.139	28.523	29.515
9	Timpeh	15.359	16.293	17.252	17.457	18.102
10	Pulau Punjung	39.167	41.953	43.993	44.559	46.790
11	Sembilan Koto	13.577	8.737	9.143	9.325	9.651

Jumlah (Jiwa)	**214.292**	**216.202**	**226.265**	**228.801**	**237.724**
Pertumbuhan (%)	**2,69**	**0,89**	**4,65**	**1,12**	**3,90**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2024

Sementara jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Padang Laweh yaitu sebanyak 6.877 jiwa atau hanya 2,89 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Untuk lebih jelasnya kepadatan penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2-12 Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
1	Sungai Rumbai	4.950	23.586	4,76
2	Koto Besar	53.780	28.214	0,52
3	Asam Jujuhan	43.280	9.120	0,21
4	Koto Baru	21.813	33.869	1,55
5	Koto Salak	12.212	18.267	1,50
6	Tiumang	11.243	13.733	1,22
7	Padang Laweh	7.184	6.877	0,96
8	Sitiung	18.459	29.515	1,60
9	Timpeh	28.711	18.102	0,63
10	Pulau Punjung	43.835	46.790	1,07
11	Sembilan Koto	46655	9.651	0,21
	Jumlah	**292.120**	**237.724**	**0.81**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hasil analisis Bapperida, Tahun 2024

Apabila dilihat jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, maka secara eseluruhan jumlah penduduk laki-laki lebih lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan dengan sex rasio sebesar 102,32, sedangkan rasio jenis kelamin tertinggi ada pada kelompok umur 50-54 tahun dan 55-59 tahun. Penduduk Kabupaten Dharmasraya menurut kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 2.13 dan pada Gambar 2.11.

Tabel 2-13 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No.	Kelompok umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		Total (Jiwa)	Sex Rasio
		Pria	Wanita		
1	0-4	8732	8211	16.943	106,35
2	5-9	11176	10696	21.872	104,49
3	10-14	11802	10908	22.710	108,20
4	15-19	8722	8762	17.484	99,54
5	20-24	10014	9804	19.818	102,14
6	25-29	8972	8873	17.845	101,12
7	30-34	8401	8806	17.207	95,40
8	35-39	9432	9770	19.202	96,54
9	40-44	9496	9007	18.503	105,43
10	45-49	7980	7579	15.559	105,29
11	50-54	6417	5997	12.414	107,00
12	55-59	5043	4640	9.683	108,69

13	60-64	3868	3648	7.516	106,03
14	65-69	2624	2596	5.220	101,08
15	70-74	1539	1592	3.131	96,67
16	75+	1658	2036	3.694	81,43
Jumlah		**115.876**	**112.925**	**228.801**	**102,61**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hasil analisis Bapperida, Tahun 2024

Gambar 2-11 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

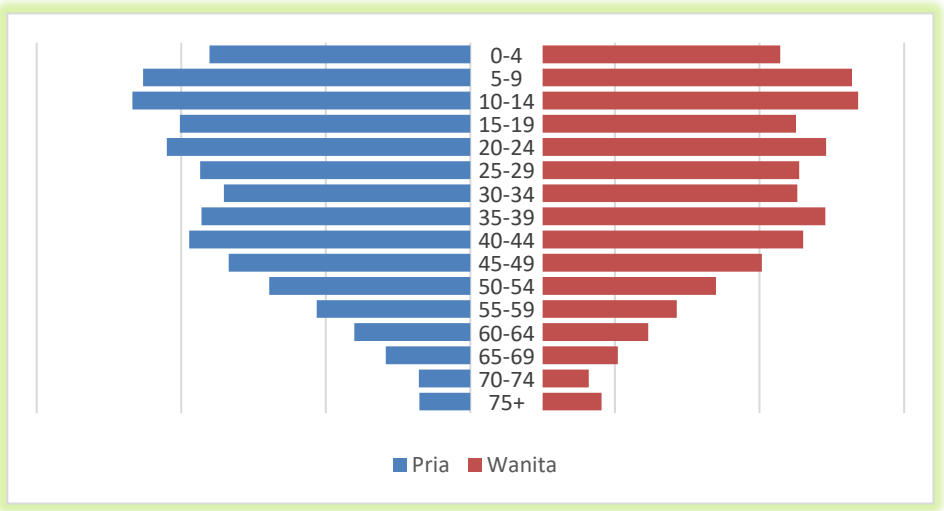

Dan apabila dilihat dari piramida penduduk seperti gambar di bawah maka terlihat bahwa semakin tinggi kelompok umur maka jumlah penduduknya semakin sedikit. Dan jumlah penduduk terbanyak ada pada kelompok usia 10-14 dan 5-9 tahun masing-masing sebesar 22.749 orang dan 22.022 orang.

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

a. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
b. Pengetahuan (*knowledge*)
c. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan

indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Konsep pembangunan manusia sebagai ukuran pencapaian hasil pembangunan menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya yaitu manusia sebagai penerima akhir dari hasil-hasil pembangunan. Angka IPM mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah.

IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

1) Rendah: IPM < 60;
2) Sedang: 60 ≤ IPM < 70;
3) Tinggi: 70 ≤ IPM < 80;
4) Sangat tinggi: IPM ≥ 80.

Perkembangan IPM secara nasional, provinsi, serta Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat dari Gambar 2.12.

Gambar 2-12 Indeks Pembangunan Manusia Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

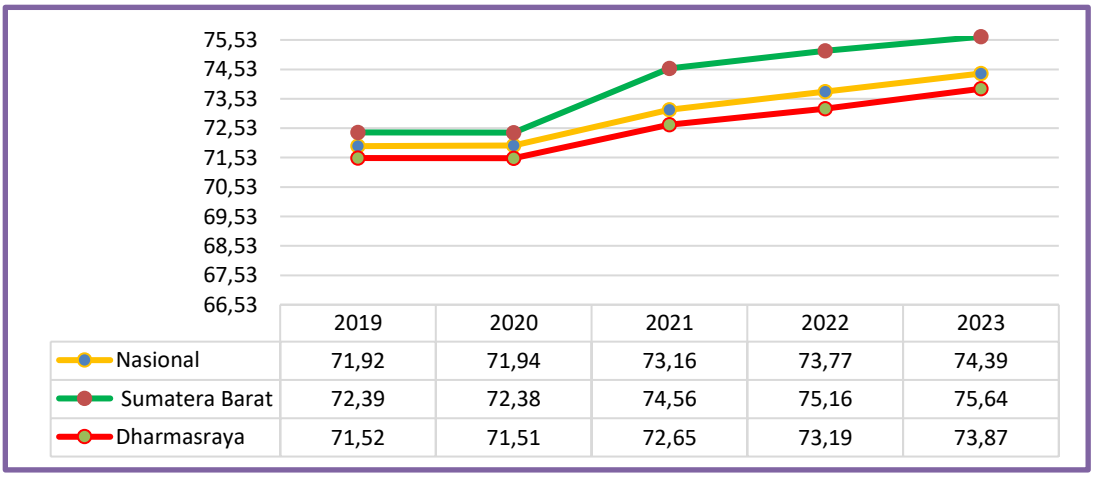

	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	71,92	71,94	73,16	73,77	74,39
Sumatera Barat	72,39	72,38	74,56	75,16	75,64
Dharmasraya	71,52	71,51	72,65	73,19	73,87

Sumber BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa IPM Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya sudah berada pada kategori tinggi, namun apabila dibandingkan pada ketiga wilayah tersebut maka IPM Kabupaten Dharmasraya berada di bawah rata-

rata IPM Nasional dan Provinsi. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Dharmasraya masih berada di bawah kemajuan pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya.

Dari sisi relevansi, kecenderungan perkembangan Kabupaten Dharmasraya sejalan dengan perkembangan IPM Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Apabila dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, maka posisi IPM Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat melalui Tabel 2.14 berikut :

Tabel 2-14 Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	2019*	2020*	2021**	2022**	2023**	Ranking
Kepulauan Mentawai	61,26	61,09	63.98	64.83	65.79	19
Pesisir Selatan	70,08	69,90	71.01	71.72	72.24	13
Kab.Solok	69,08	69,08	70.60	71.39	71.92	17
Sijunjung	67,66	67,74	70.48	71.32	72.30	12
Tanah Datar	72,14	72,33	74.14	74.87	75.57	8
Padang Pariaman	70,59	70,61	72.92	73.67	74.54	9
Agam	72,37	72,46	73.20	73.84	74.44	10
Lima Puluh Kota	69,67	69,47	71.03	71.64	72.05	15
Pasaman	66,46	66,64	68.48	69.12	69.85	18
Solok Selatan	68,94	69,04	70.88	71.36	72.24	13
Dharmasraya	71,52	71,51	72.65	73.19	73.87	11
Pasaman Barat	68,21	68,49	70.57	71.39	72.03	16
Padang	82,68	82,82	83.30	83.69	83.98	1
Kota Solok	78,38	78,29	78.53	79.35	79.66	6
Sawahlunto	72,39	72,64	74.35	75.21	75.91	7
Padang Panjang	78,00	77,93	78.52	79.28	79.76	4
Bukittinggi	80,71	80,58	80.79	81.52	81.88	2
Payakumbuh	78,95	78,90	79.24	79.70	80.14	3
Pariaman	76,70	76,90	78.72	79.31	79.76	4

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Keterangan :

* = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota (UHH Hasil Proyeksi SP2010)

** = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota (UHH Hasil Long Form SP2020)

Jika dilihat dari perkembangan IPM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 masih mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak sebesar loncatan perkembangan IPM rata-rata kabupaten/kota lain. Ditinjau dari perbandingan kab/kota, maka Dharmasraya berada di peringkat 11 dari 19 kab/kota atau peringkat 3 dibandingkan kabupaten lain, dan berada di bawah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. Pengetahuan (*knowledge*)
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

a. Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)

Umur Harapan Hidup Saat Lahir atau disebut juga dengan Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Perbandingan data usia harapan hidup Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2019=2023 dapat dilihat pada Gambar 2.13.

Gambar 2-13 Usia Harapan Hidup Saat Lahir Nasional, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

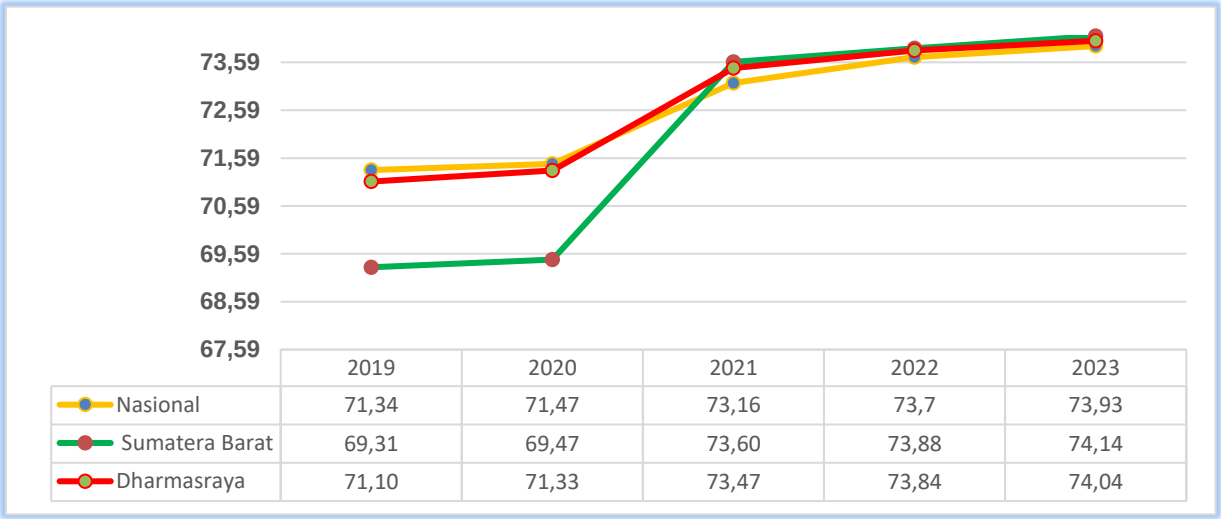

	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	71,34	71,47	73,16	73,7	73,93
Sumatera Barat	69,31	69,47	73,60	73,88	74,14
Dharmasraya	71,10	71,33	73,47	73,84	74,04

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Pencapaian IPM di Kabupaten Dharmasraya ditinjau dari dimensi umur panjang dan sehat diukur dari indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH) dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 74,04 tahun. Selama periode 2019-2023, walaupun relatif lambat, AHH mengalami pertumbuhan sebesar 1,03% atau meningkat 2,94 tahun. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi, hal ini disebabkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Dharmasraya dan peningkatanan kualitas sarana pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

UHH Kabupaten Dharmasraya diatas rata-rata nasional namun meskipun dari angka capaian berada dibawah rata-rata provinsi, namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan. Artinya capaian pembangunan bidang kesehatan Dharmasraya lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional, tidak jauh berbeda atau beriringan dengan capaian provinsi.

b. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Perbandingan data rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2019=2023 dapat dilihat pada Gambar 2.14.

Gambar 2-14 Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

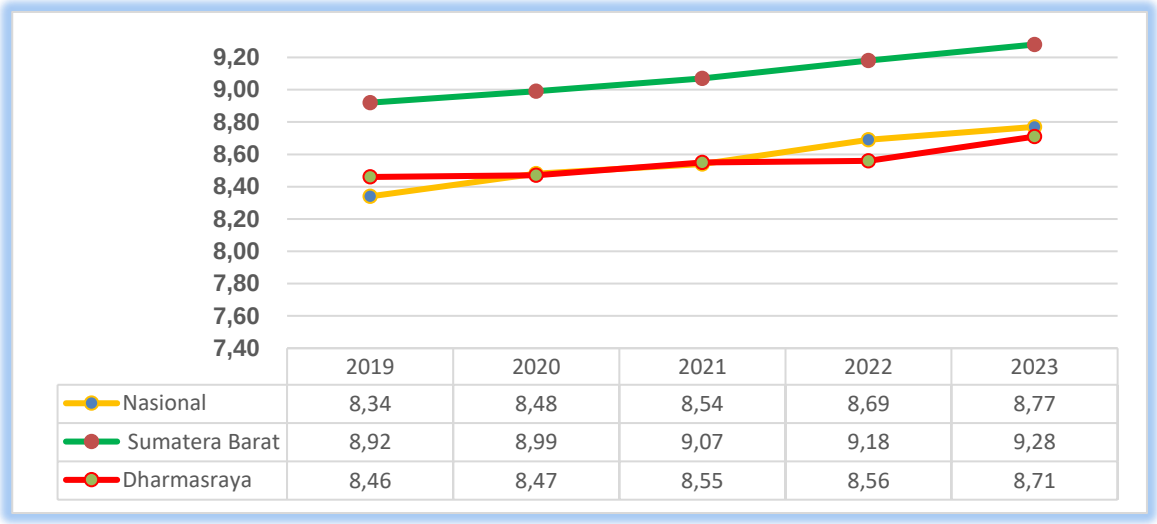

	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77
Sumatera Barat	8,92	8,99	9,07	9,18	9,28
Dharmasraya	8,46	8,47	8,55	8,56	8,71

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Beradsarkan grafik di atas terlihat bahwa dari tahun 2019 – 2023, RLS Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan. Tahun 2019 sebesar 8,46, sedangkan pada tahun 2023 naik menjadi 8,71 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Dharmasraya yang berada pada usia 25 ke atas dalam menjalani pendidikan formal belum menamatkan jenjang SMP.

Berbeda dibandingkan dengan dimensi kesehatan, RLS Kabupaten Dharmasraya hanya mengalami sedikit kenaikan dari 8,56 tahun menjadi 8,71 tahun. Sehingga posisi Dharmasraya jauh di bawah nasional serta berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat, begitu juga dengan tahun 2023.

c. Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk yang berusia 7 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Perbandingan data harapan lama sekolah Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2019=2023 dapat dilihat pada Gambar 2.15.

Gambar 2-15 Harapan Lama Sekolah Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

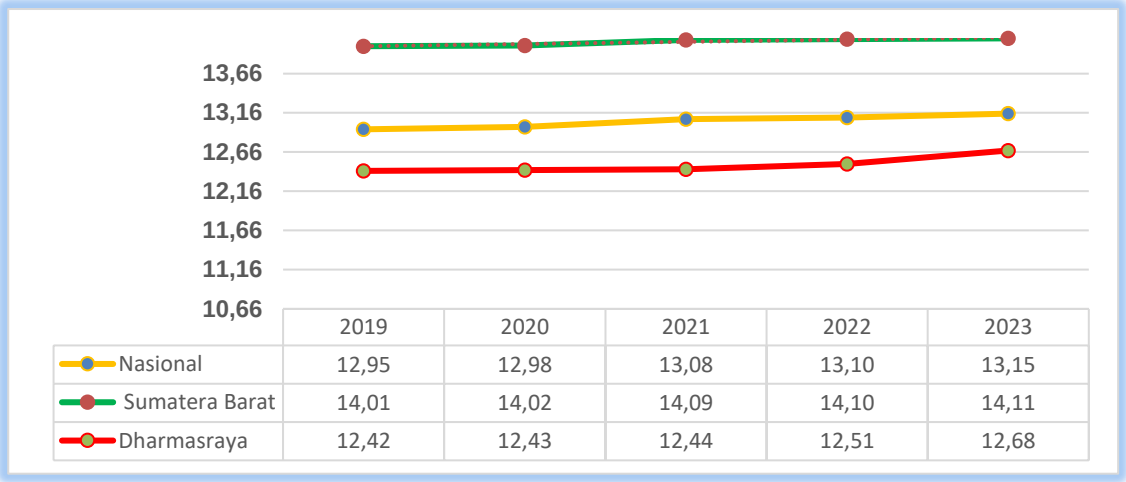

	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	12,95	12,98	13,08	13,10	13,15
Sumatera Barat	14,01	14,02	14,09	14,10	14,11
Dharmasraya	12,42	12,43	12,44	12,51	12,68

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas, HLS Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2023 sebesar 12,68 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,68 tahun atau setara dengan Diploma I, lebih lama dibandingkan dengan anak berusia sama di tahun 2023.

Dibandingkan dengan HLS nasional dan provinsi, maka HLS Kabupaten Dharmasraya masih berada paling rendah, begitu juga ditinjau dari perkembangan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 juga masih menunjukkan perkembangan yang rendah.

Berdasarkan dimensi pengetahuan untuk indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang masih relatif rendah sehingga hal ini mempengaruhi percepatan perkembangan IPM Kabupaten Dharmasraya.

Sehubungan dengan relatif rendahnya capaian IPM serta lambatnya perkembangan pada dimensi pendidkan, maka perlu strategi serta menjadi prioritas pembangunan yang lebih efektif dalam mendorong indikator-indikator pembangunan bidang pendidikan. Dengan dijadikannya bidang

pendidikan sebagai prioritas pembangunan maka diharapkan IPM Dharmasraya dapat didongkrak untuk bersaing dalam pencapaian IPM tingkat Provinsi.

d. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Perbandingan data pengeluaran per kapita Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2019=2023 dapat dilihat pada Gambar 2.16.

Gambar 2-16 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023 (ribu rupiah/ orang/ tahun)

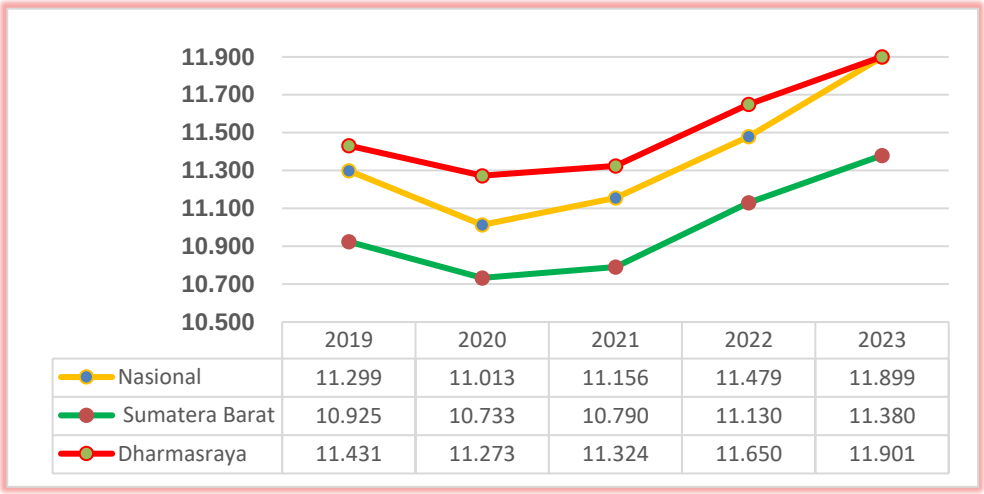

	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	11.299	11.013	11.156	11.479	11.899
Sumatera Barat	10.925	10.733	10.790	11.130	11.380
Dharmasraya	11.431	11.273	11.324	11.650	11.901

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Berdasarkan grafik terlihat bahwa angka pengeluaran perkapita di Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2019 – 2023 berfluktuatif. Hal ini terlihat dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan sebesar 0,58%, sementara dari tahun 2019-2020 mengalami perlambatan sebesar -0,16%. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan pada tahun 2021-2023. Peningkatan ini merupakan implikasi dari peningkatan upah gaji yang diterima seperti kenaikan gaji pegawai, upah buruh dan lain lain. Faktor pendorong lain yang meningkatkan konsumsi adalah peningkatan inflasi atas barang dan jasa sehingga memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berbeda dengan 3 (tiga) indikator pembentuk IPM Kabupaten Dharmasraya lainnya, pengeluaran per kapita diseseuaikan jauh lebih baik dengan capaian Provinsi dan sudah setara dengan perkembangan nasional.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Berdasarkan perhitungannya maka PDRB ini dibagi menjadi 3 (tiga)PDRB terdiri dari PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya.

a. Perkembangan Nilai PDRB ADHK

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat diketahui dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010) Tahun 2022-2023 dan pertumbuhan lapangan usaha Tahun 2022-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.15:

Tabel 2-15 Perkembangan Nilai dan kontribusi PDRB ADHK Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2023

No	Lapangan Usaha	Nilai		Kontribusi		Pertumbuhan	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.299.422,19	2.367.214,83	**28,60**	**28,22**	2,00	2,95
B	Pertambangan dan Penggalian	471.522,92	482.551,36	5,86	5,75	1,50	2,34
C	Industri Pengolahan	443.531,47	451.345,14	5,52	5,38	1,62	1,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.286,50	1.339,00	0,02	0,02	3,36	4,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	937,76	929,51	0,01	0,01	(2,27)	(0,88)
F	Konstruksi	1.041.880,71	1.105.433,18	**12,96**	**13,18**	2,04	6,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.167.863,63	1.229.913,25	**14,53**	**14,66**	5,84	5,31
H	Transportasi dan Pergudangan	489.640,49	516.409,91	6,09	6,16	4,38	5,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	68.227,72	72.718,24	0,85	0,87	15,50	6,58
J	Informasi dan Komunikasi	738.918,55	797.144,62	9,19	9,50	6,29	**7,88**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	172.541,37	179.267,21	2,15	2,14	5,70	3,90
L	Real Estat	169.356,62	179.855,13	2,11	2,14	4,03	6,20
M,N	Jasa Perusahaan	1.499,94	1.596,68	0,02	0,02	6,63	6,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	537.434,64	546.615,39	6,68	6,52	**15,90**	1,71
P	Jasa Pendidikan	220.604,87	225.103,33	2,74	2,68	4,56	2,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	151.263,04	161.542,80	1,88	1,93	4,39	6,80

R, S, T, U	Jasa lainnya	63.757,40	68.167,17	0,79	0,81	11,46	6,92
T O T A L		8.039.689,82	8.387.146,76	100	100	4,28	4,32

Sumber : sumbar.bps.go.id Tahun 2024

Nilai PDRB ADHK di tahun 2023 terus memperlihatkan angka peningkatan dibandingkan tahun 2022. Dilihat berdasarkan kontribusi, 3 (tiga) sektor yang memiliki kontribusi tertinggi yaitu pada; (1) sektor pertanian; (2) sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan (3) kontruksi. Selanjutnya pertumbuhan PDRB ADHK terbesar yaitu pada: (1) sektor Informasi dan Komunikasi: (2) jasa lainnya; dan (3) akomodasi.

Ditinjau dari pertumbuhan sektor PDBR di atas, justru pertumbuhan tertinggi bukan terletak pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar, sehingga pada jangka waktu panjang dan menengah Dharmasraya akan mengalami perubahan sektor pembentuk PDRB.

b. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan PDRB dihitung berdasarkan perkembangan PDRB ADHK Tahun 2000, indikator ini digunakan untuk untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan daerah. Perbandingan Pertumbuhan PDRB/PDB Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2019=2023 dapat dilihat pada Gambar 2.17.

Gambar 2-17 Pertumbuhan PDRB/PDB Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	5,03	-2,07	3,70	5,32	5,05
Sumatera Barat	5,01	-1,62	3,29	4,32	4,62
Dharmasraya	4,88	-1,39	3,42	4,28	4,35

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Berdasarkan data diatas, meskipun pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB terkontraksi (mengalami pertumbuhan negatif), namun pasca covid-19 pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh positif dan mengalami percepatan.

c. PDRB/PDB perkapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi. Perbandingan PDRB/PDB per kapita Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2019=2023 dapat dilihat pada Gambar 2.18.

Gambar 2-18 PDRB/PDB Perkapita Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 (rupiah)

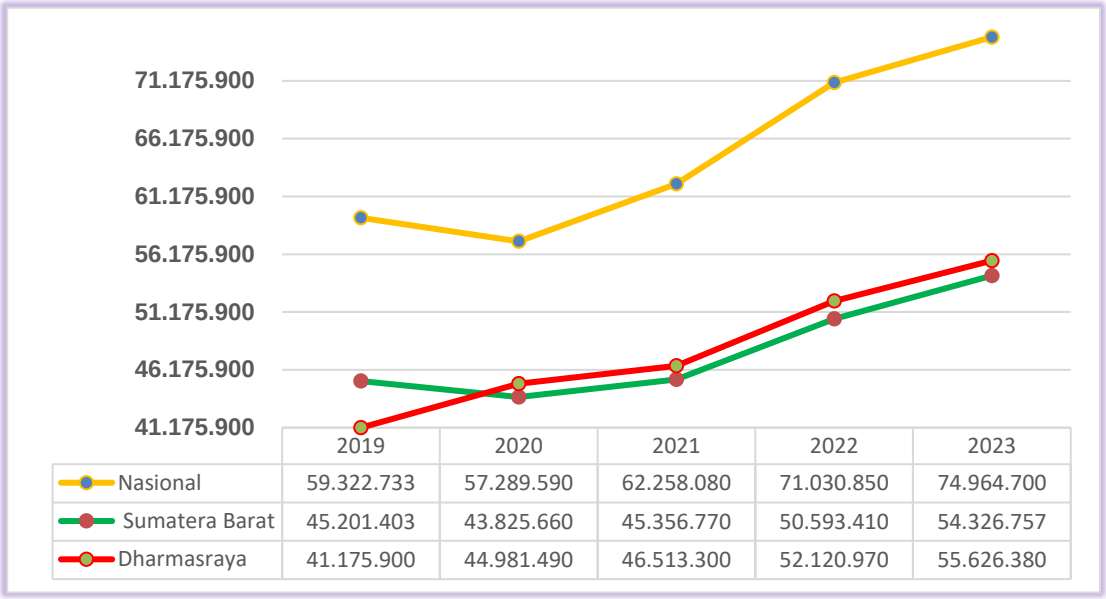

	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	59.322.733	57.289.590	62.258.080	71.030.850	74.964.700
Sumatera Barat	45.201.403	43.825.660	45.356.770	50.593.410	54.326.757
Dharmasraya	41.175.900	44.981.490	46.513.300	52.120.970	55.626.380

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Perkembangan nilai PDRB per kapita dari tahun 2019 hingga tahun 2023 terlihat adanya peningkatan, baik secara nasional, provinsi maupun Dharmasraya. Meskipun tahun 2019 nilai PDRB Perkapita Kabupaten Dharmasray alebih rendah dari nilai PDRB Perkapita Nasional dan provinsi, namun Tahun 2020 hingga tahun 2023 Dharmasraya sudah mampu berada di atas nilai PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat.

3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Indikator ini digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Dimana jika IPG semakin mendekati angka 100, artinya peran perempuan dalam pembangunan semakin besar. Dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan data dari Kementrian PP dan PA tahun 2022, capaian IPG Kabupaten Dharmasraya (88,56%) lebih rendah dari IPG tingkat Nasional (91,63%) dan pencapaian tingkat Provinsi Sumatera Barat (94,72). Perbandingan IPG Antara Kabupaten Dharmasraya, Nasional dan Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada Gambar 2.19.

Gambar 2-19 Indeks Pembangunan Gender Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022 (indeks)

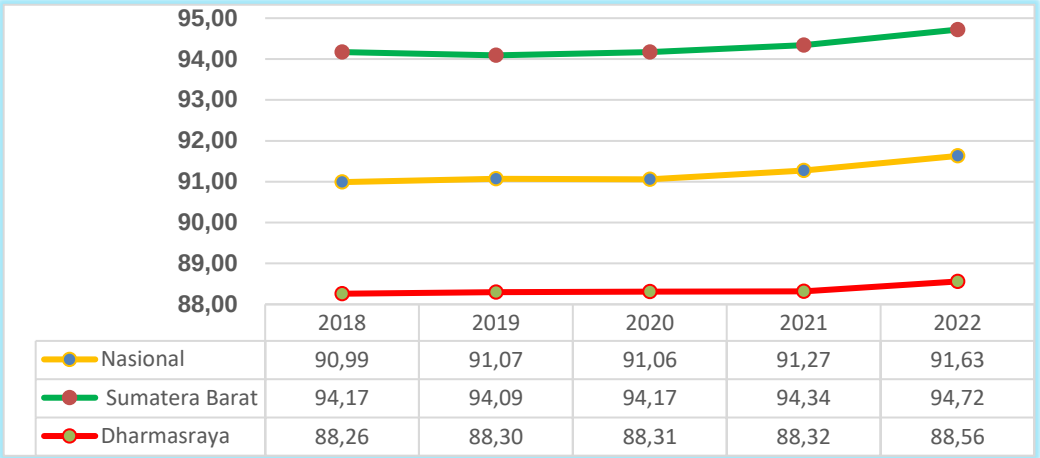

	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	90,99	91,07	91,06	91,27	91,63
Sumatera Barat	94,17	94,09	94,17	94,34	94,72
Dharmasraya	88,26	88,30	88,31	88,32	88,56

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024
Keterangan : Data Tahun 2023 belum tersedia.

Dilihat dari perkembangan IPG tahun 2018 hingga tahun 2022, maka perkembangan IPG Kabupaten Dharmasraya menunjukkan perkembangan positif, namun perkembangannya tidak sebagus nasional dan provinsi, jika dilihat dari perkembangan dari tahun 2018 ke tahun 2022, di tingkat nasional terjadi peningkatan sebesar 0,67 persen,

2.1.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan atau disebut juga dengan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan atau dikakategorikan penduduk miskin. Perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2019=2023 dapat dilihat pada Gambar 2.20.

Gambar 2-20 Tingkat Kemiskinan (persen) Tahun 2019-2023

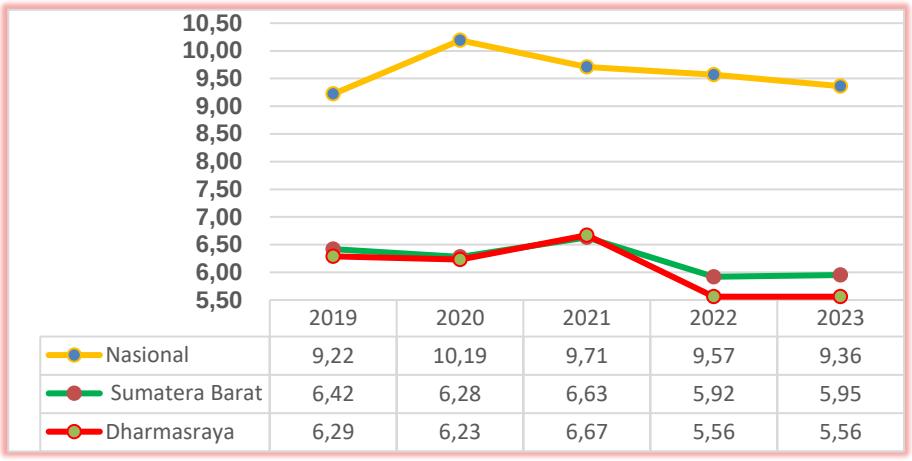

	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	9,22	10,19	9,71	9,57	9,36
Sumatera Barat	6,42	6,28	6,63	5,92	5,95
Dharmasraya	6,29	6,23	6,67	5,56	5,56

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2019 hingga tahun 2023 hampir bersamaan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat, serta kedua daerah ini lebih baik dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, dan di tahun 2023 tingkat kemiskinan Dharmasraya sebesar 5,56 persen atau sedikit di bawah Provinsi Sumatera Barat (5,95%).

Selanjutnya sesuai dengan komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrim menjadi nol persen di tahun 2024 ini melalui program pemberdayaan di berbagai bidang yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat serta di tingkat pemerintah daerah.

Adapun definisi dari kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan esktrem; setara dengan USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ditentukan menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan (BPS,2021). Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 1.288.680 per keluarga per bulan. Jika dibandingkan dengan data kemiskinan biasa.

Adapun data kemiskinan ektrim di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan nagari dan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2. 16:

Tabel 2-16 Jumlah Penduduk Miskin Ektrim (Rumah Tangga) menurut Kecamatan dan Nagari Tahun 2023

No.	Kecamatan	Nagari	Jumlah (Rumah Tangga)
1	Sitiung	Sitiung	1
2	Koto Besar	Abai Siat	3
3	Pulau Punjung	Tebing Tinggi	1
4	Sembilan Koto	Banai	3
5	Koto Baru	Sialang Gaung	1
6	Koto Salak	- Pulau Mainan	2
		- Ampalu	1
7	Timpeh	Taratak Tinggi	1
Total Tahun 2023			**13**
Tahun 2022			**4.324**
1 April 2024			**0**

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2024

Berdasarkan data kemiskinan ektrim yang dikeluarkan oleh Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 yaitu 4.324 rumah tangga. Tahun 2023 dari tada yang dikeluarkan oleh P3KE, pemerintah Kabupaten Dharmasraya melakukan verifikssi dan validasi ke setiap rumah tangga yang tercatat dalam P3KE. Dari hasil verifikasi dan validasi tersebut, jumlah rumah tangga yang termasuk pada miskin ektrim berjumlah sebanyak 13 rumah tangga yang tersebar di 7 kecamatan. Dari jumlah 52 nagari, masih terdapat 8 nagari yang memiliki penduduk miskin eksrim atau terdapat 46 nagari yang terbebas dari penduduk miskin ektrim.

Selanjutnya dilihat dari jumlah penduduk miskin ektrim berdasarkan kecamatan, maka jumlah penduduk miskin ektrim terbanyak ada di Kecamatan Koto Besar, Kecamatan sembilan Koto dan Kecamatan Koto Salak, masing-masing sebanyak 3 rumah tangga, dan untuk kecamatan lainnya masing-masing 1 rumah tangga. Untuk lebih jleasnya jumlah kemiskinan ekstrim di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.21.

Gambar 2-21 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

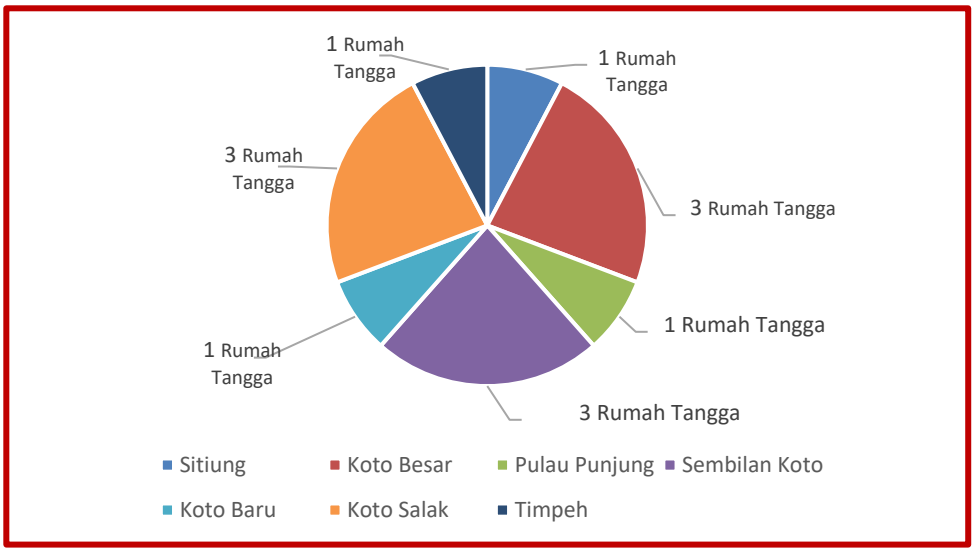

Sesuai dengan Surat Kepustusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/112/KPTS-BUP/2024 tentang Penghapusan data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 tanggal 1 April 2024. Artinya kemiskinan ekstrem di Kabupaten Dharmasraya sudah pada angka 0 atau sudah tidak ada lagi rumah tangga yang berada pada kemiskinan ekstrem.

2. Ketimpangan pendapatan (Gini Rasio)

Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dalam menerapkan kebijakan, maka nilai rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Untuk lebih jelasnya gini rasio Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.22.

Gambar 2-22 Gini rasio (indeks) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	0,380	0,385	0,381	0,381	0,388
Sumatera Barat	0,307	0,301	0,300	0,292	0,280
Dharmasraya	0,278	0,280	0,268	0,287	0,291

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Untuk capaian rasio gini, capaian Dharmasraya lebih baik dibandingkan dengan nasional, artinya ketimpangan pendapatan tidak sebesar nasional. Dilihat berdasarkan data tahun 2022, gini rasio Kabupaten Dharmasraya lebih rendah dari Provinsi dan Nasional. Tetapi pada tahun 2023 gini rasio Kabupaten Dharmasraya naik menjadi 0,291 dan lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat yang hanya 0,280.

3. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase sejumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Untuk lebih jelasnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.23.

Gambar 2-23 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)

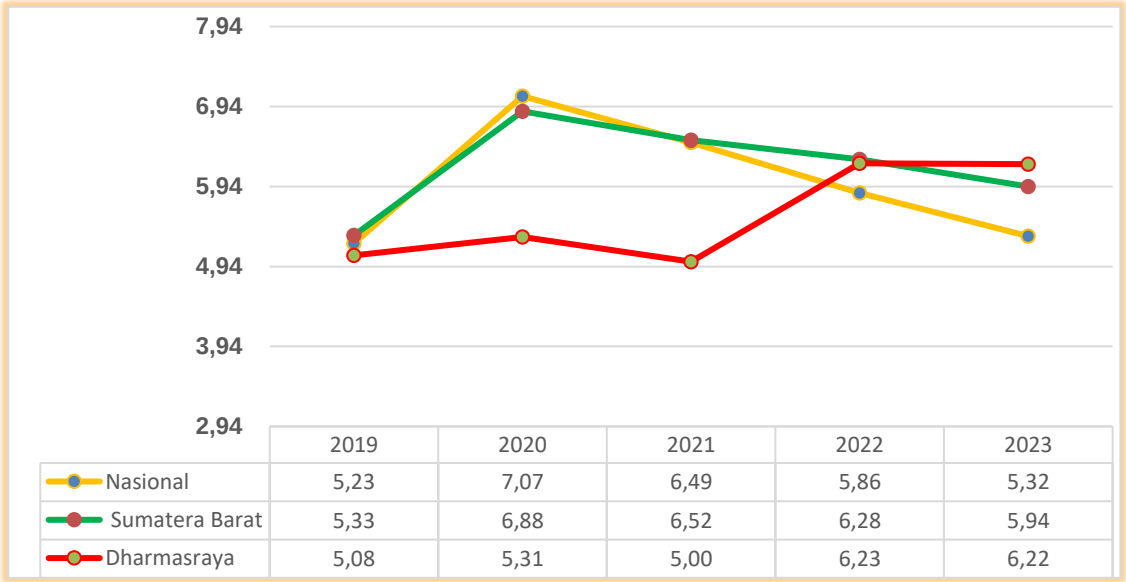

	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32
Sumatera Barat	5,33	6,88	6,52	6,28	5,94
Dharmasraya	5,08	5,31	5,00	6,23	6,22

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Capaian TPT Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2019 hingga tahun 2021 berada di bawah nasional dan provinsi. Namun memasuki tahun 2022 dan 2023 kondisinya berada di atas nasional. Namun demikian hal ini diharapkan ke depan tidak akan lebih buruk mengingat masih tingginya daya serap sektor pertanian serta sektor pendukung lainnya seperti sektor industri dan sektor perdagangan yang juga memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai tambah perekonomian daerah, serta masih tumbuhnya perekonomian daerah cukup baik.

2.1.3.3. Fokus Pencapaian RPJMD

1. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Indeks Perilaku Anti Korupsi digunakan untuk mengukur perilaku anti korupsi di masyarakat. Persoalan korupsi sudah bukan hal baru lagi di tengah kehidupan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang terus mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi di segala bidang. Hal ini menjadi perhatian pemerintah karena perilaku korupsi punya dampak buruk di dalam segala lini kehidupan. Berbagai macam unsur yang mampu menggambarkan perilaku korupsi sehari-hari atau (petty corruption)masyarakat Indonesia tergambarkan secara komprehensif. IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian atau pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat. Berikut perkembangan indeks perilaku antikorupsi nasional Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2-17 Indeks Perilaku Antikorupsi

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023*
1	Nasional	3,70	3,84	3,88	3,93	-

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2022
Keterangan * = Data tahun 2023 belum tersedia

Dengan belum tersedianya data indeks perilaku anti korupsi untuk tahun 2023, maka indikator yang digunakan untuk mengukur perilaku korupsi yang akan digunakan adalah Indeks Persepsi anti korupsi atau disebut dengan (Corruption Perception Index/CPI) yang dikeluarkan oleh KPK. CPI adalah CPI adalah sebuah gambaran tentang situasi dan kondisi korupsi pada level negara atau teritori. Survey CPI dilakukan dengan mengumpulkan data dari sejumlah sumber berbeda yang memberikan persepsi di kalangan pelaku bisnis dan para pakar tentang tingkat korupsi di sektor publik. Di mana skor 0 dipersepsikan sebagai kondisi yang korup dan skor 100 sebagai kondisi yang dipersepsikan bersih dari korupsi. Jadi, semakin tinggi angka skor CPI sebuah negara/daerah maka persepsinya semakin bersih. Sebaliknya semakin rendah angka skor CPI maka persepsinya juga semakin korup yaitu sebesar 78,93,

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dengan berbasis elektronik secara terpadu dan efisien. Untuk menilai pelaksanaan SPBE digunakan Indeks SPBE, indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.

Adapun pengaturan pelaksanaan SPBE telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Secara nasional indeks SPBE ini sudah dihitung sejak tahun 2018, adapun hasil penilaian indeks SPBE berdasarkan Keputusan MenpanRB Nomor 1503 Tahun 2021 tentang hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis eloktronik pada kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah, maka hasil penilaian indeks SPBE tahun 2021 dan 2022, sementara data Indeks SPBE 2023 berdasarkan Keputusan MenpanRB Nomor 13 Tahun 2024. Untuk lebih jelasnya perkembangan indeks SPBE Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.18 sebagai berikut:

Tabel 2-18 Indeks SPBE Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021-2023

No.	Kabupaten/Kota	2021			2022			2023		
		Indeks SPBE	Predikat	Rangking	Indeks SPBE	Predikat	Rangking	Indeks SPBE	Predikat	Rangking
1	Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	1,53	Kurang	19
2	Pesisir Selatan	3,34	baik	1	3,48	baik	1	4,17	Sangat Baik	1
3	Solok	2,82	baik	2	3,12	baik	5	3,49	Baik	3
4	Sijunjung	1,88	cukup	15	2,18	cukup	17	2,18	Cukup	18
5	Tanah Datar	2,18	cukup	10	3,21	baik	3	3,22	Baik	6
6	Padang Pariaman	2,6	baik	4	2,6	baik	12	2,62	Baik	14
7	Agam	2,31	cukup	8	3,18	baik	4	2,55	Cukup	15
8	Lima Puluh Kota	2,68	baik	3	3,29	baik	2	3,29	Baik	5
9	Pasaman	1,36	kurang	16	1,91	cukup	18	2,38	Cukup	17
10	Solok Selatan	1,21	kurang	17	2,26	cukup	16	2,98	Baik	9
11	**Dharmasraya**	**1,09**	**kurang**	**18**	**2,41**	**cukup**	**14**	**2,83**	**Baik**	**11**
12	Pasaman Barat	2,18	cukup	10	2,36	cukup	15	2,82	Baik	12
13	Kota Padang	2,09	baik	12	3,01	baik	7	3,54	Sangat Baik	2
14	Kota Solok	2,34	cukup	7	2,71	baik	10	3,37	Baik	4
15	Kota Sawahlunto	2,07	cukup	14	2,84	baik	8	3,09	Baik	8
16	Kota Padang Panjang	2,09	cukup	12	2,81	baik	9	2,92	Baik	10
17	Kota Bukittinggi	2,26	cukup	9	2,46	cukup	13	2,49	Cukup	16
18	Kota Payakumbuh	2,42	cukup	5	3,02	baik	6	3,17	Baik	7
19	Kota Pariaman	2,42	cukup	5	2,64	baik	11	2,65	Baik	13
SUMATERA BARAT		**2,69**	**baik**		**3,18**	**baik**		**3,75**	**Sangat Baik**	
Nasional		**2,43**	**baik**		**-**			**1,53**		

Sumber : Keputusan MenpanRB Nomor 1503 Tahun 2021 dan Keputusan MenpanRB Nomor 13 Tahun 2024

Dilihat dari tabel di atas, maka Kabupaten Dharmasraya sudah menduduki peringkat 14 dari 18 daerah yang dilakukan penilaian, sementara pada tahun 2023 Kabupaten Dharmasraya sudah menduduki peringkat 11 dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Naiknya peringkat ini disebabkan oleh meningkatnya capaian indeks SPBE yang diperoleh. Salah satu langkah besar yang dilakukan untuk mendorong indeks ini adalah melalui penyusunan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menjadi dasar dalam pengembangan pelaksanaan SPBE ke depan.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat / *Publik service indeks*

Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (impact) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat juga acuan bagi kementerian/lembaga untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Untuk melihat sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2-19 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	80,109	80,058	81,831	81	84,5

Sumber : Bapperida, Tahun 2024

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya pertama kali dilakukan pada tahun 2019, dari survey tersebut, dapat dilihat, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Dharamasraya sudah tinggi karena sudah berada pada rentang nilai mulai dari 80 sampai dengan 84,5 persen.

4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan/ Indeks Tutupan Lahan (ITL)

Nilai indeks kualitas udara bersama-sama dengan indeks kualitas air dan indeks tutupan lahan akan menentukan nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang akan menjadi indikator pencapaian kinerja program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah daerah. Indek kualitas lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2-20 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Sasaran	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,81	67,94	63,38	63,90	63,48

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Pada tahun 2019, IKLH Kabupaten Dharmasraya masih masuk kategori kurang dengan nilai 58≤IKLH≤ 66. Selanjutnya di tahun 2020 terjadi peningkatan nilai IKA,

IKU dan ITH sehingga meningkatkan nilai IKLH kabupaten Dharmasraya dari 61,81 pada tahun 2019 menjadi 67,94 pada tahun 2020. Nilai IKLH tersebut masuk kedalam kategori cukup yaitu dengan nilai 66 ≤ IKLH ≤ 74.Namun pada tahun 2021 kembali terjadi penurunan kualiatas Udara yang mengakibatkan IKLH menurun menjadi 63,38 sebagai kategori kurang. Selanjutnya di tahun 2022 kembali terjadi sedikit kenaikan di bandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2023 IKLH Kabupaten Dharmasraya menurun menjadi 63,48 tetapi masih termasuk kategori kurang.

5. Persentase peningkatan zakat

Bertumpu pada pengertian zakat, bahwa zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada golongan penerima sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Perkembangan zakat yang dikelola oleh Baznas setidaknya dapat menggambarkan perkembangan perekonomian masyarakat. Pada Tabel 2.21 dapat dilihatcapaian persentase peningkatan zakat di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023.

Tabel 2-21 Persentase Peningkatan Zakat

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase peningkatan zakat	persen	5,04	1,46	-0,60	12,37	36,67
jumlah zakat tahun n	Juta rupiah	4.613	4.680	4.652	5.227	7.144
jumalah zakat tahun n-1	Juta rupiah	4.392	4.613	4.680	4.652	5.227

Sumber : Baznas Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

Salah satu manfaat dari zakat di saat pandemi 2 tahun terakhir adalah semakin besarnya kesempatan dan daya manfaat pada para muzaki (pemberi zakat) untuk membantu mustahik (penerima zakat) dalam mengatasi dampak krisis akibat pandemi covid-19. Selain itu zakat juga disalurkan untuk bantuan beasiswa bagi para mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu yang sedang menjalani jenjang perkuliahan di berbagai perguruan tinggi.

6. Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif

Untuk mendorong agenda keagamaan di Kabupaten Dharmsaraya pemerinah sudah melakukan berbagai bantuan hibah kepada masjid/ mushallah yang aktif dalam melaksanakan TPA/MDA/TPSA serta memberikan insentif kepada mubaligh dan guru pengajar pada lembaga tersebut. Dari tahun 2019 – 2023 tidak ada perubahan jumlah MDA/TPA/TPSA di Kabupaten Dharmasraya. Untuk lebih jelasnya perkembangan MDA/TPA/TPSA dapat dilihat pada Tabel 2.22 berikut:

Tabel 2-22 Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	persen	100	100	100	100

jumlah MDA / TPA/TPSA yang aktif	unit	378	378	378	378
jumalah MDA / TPA/TPSA seluruhnya	unit	378	378	378	378

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa seluruh MDA/TPA/TPSA yang ada di Kabupaten Dharmasraya merupakan MDA/TPA/TPSA aktif.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Rasio Net Ekspor terhadap PDRB/PDB

Net Ekspor adalah hasil pengurangan antara nilai ekspor dengan nilai impor. Nilai ekspor neto akan positif dan neraca perdagangan akan surplus ketika nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Semakin tinggi nilai ekspor neto maka akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk lebih jelasnya perkembangan capaian Rasio Net Ekspor terhadap PDRB/PDB Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan nasional dapat dilihat pada Gambar 2.24.

Gambar 2-24 Rasio Net Ekspor terhadap PDRB/PDB (persen)

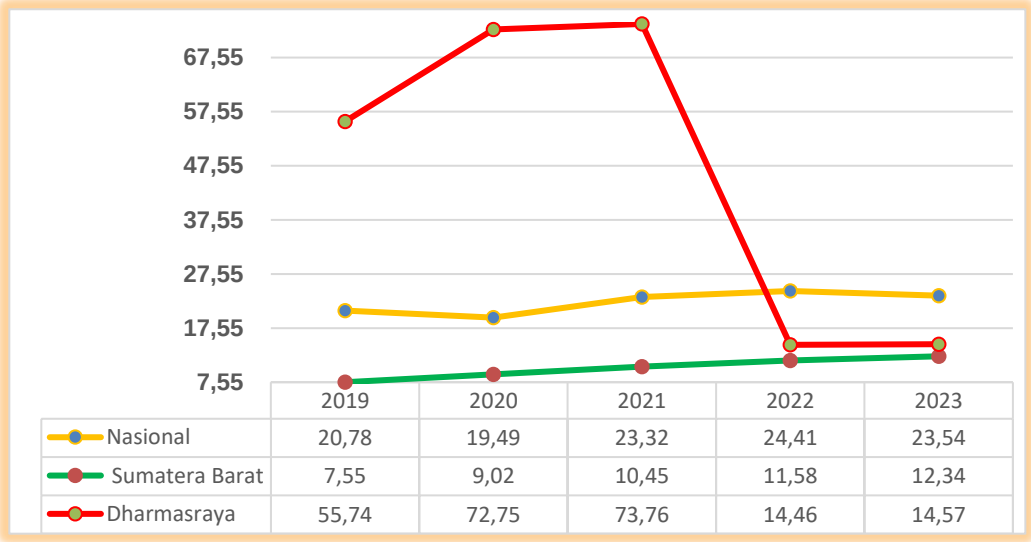

	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	20,78	19,49	23,32	24,41	23,54
Sumatera Barat	7,55	9,02	10,45	11,58	12,34
Dharmasraya	55,74	72,75	73,76	14,46	14,57

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Berpedoman pada publikasi data PDRB/PDB sampai tahun 2023, Kabupaten Dharmasraya dan nasional selalu menunjukkan perkembangan nilai net ekspor lebih besar dibandingkan dengan nilai impor barang/jasa dalam satu tahun

2.1.5. Aspek Pelayanan Umum

2.1.5.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. **Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**
   - Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

     Angka Partisipasi kasar merupakan Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Kegunaan indikator APK untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan serta tntuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK yang menjadi kewenangan kab/kota terdiri dari APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTs. Untuk lebih jelasnya capaian angka partisipasi kasar (APK) PAUd di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2-23 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	persen	65,23	68,62	67,99	69,39	72,84
Jumlah murid PAUD	Orang	6.466	7.614	7.595	7.806	9.163
Jumlah penduduk usia 3 – 6 Tahun	orang	9.912	11.096	11.170	11.250	12.579

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Perkembangan APK PAUD Tahun 2019 hingga 2023 terlihat adanya peningkatan, adanya penambahan jumlah penduduk usia PAUD dapat di diimbangi oleh jumlah jumlah murid PAUD. Peningkatan tersebut didorong oleh adanya peningkatan sarana dan prasarana PAUD yang ada, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh pemerintahan nagari dan masyatakat.

Sedangkan penurunan yang terjadi pada tahun 2021 terjadi karena dampak dari pandemi Covid-19. Secara garis besar dapat dilihat bahwa perkembangan APK PAUD terus mengalami peningkatan yang menggambarkan meningkatnya kesadaran masyarakat/orang tua akan pentingnya peran PAUD sebagai jenjang pra sekolah untuk mempersiapkan generasi menuju dunia pendidikan dasar.

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

  Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2-24 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat	persen	105,54	106,62	99,33	99,58	99,43
jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/sederajat	Orang	27.937	27.586	26.691	26.204	26.840
jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	orang	26.470	25.874	26.871	26.896	26.995

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Untuk nilai APK SD dari tahun 2019 hingga tahun 2020 berada di atas 100, meskipun terlihat menurun, namun kondisinya masih cukup ideal karena masih mendekati angka 100.

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
  Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2-25 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat	Persen	91,44	103,30	96,75	96,75	80,44
jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	Orang	12.845	11.220	12.567	8.715	11.057
jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	Orang	14.048	10.862	13.024	13.677	13.746

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Untuk APK SMP/MTs, cukup fluktuatif, di tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami peningkatan. Tahun 2020 menunjukkan angka di atas 100, namun di tahun 2021-2023 menunjukkan angka di bawah 100. Namun dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian APK tahun 2021 dan tahun 2022 masih mendekati 100. Secara umum kebijakan bidang kependidikan untuk tingkat pendidikan SMP/MTs sudah semakin membaik. Meskipun terlihat adanya peningkatan jumlah penduduk usia sekolah 13-15 tahun dapat diikuti oleh daya tampung sekolah yang ada, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.

- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi
  Angka Partisipasi Murni menunjukkan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuain. Adapun APM yang dihitung sesuai dengan kewenangan kab/kota adalah APM SD/MI, dan APM SMP/MTs. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2-26 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi	persen	94,59	99,31	98,40	98,92	99,48
jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/sederajat	orang	25.038	25.696	26.441	26.204	26.854
jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	orang	26.470	25.874	28.614	26.896	26.995

Sumber : Dinas Pendidikan, tahun 2024

Dengan adanya APM SD/MI yang sudah berada di angka cukup mendekati 100, artinya kondisi ini sudah cukup ideal, adanya sedikit kekurangan APM ini dari titik ideal diasumsikan minimnya angka putus sekolah di tingkat SD/MI. hal ini juga ditunjukkannya tidak jauh berbedanya anka APM SD/MI dibandingkan dengan APK SD/MI yang memperlihatkan semakin tingginya ketepatan usia anak sekolah sesuai umur dan tingkatannya.

- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts

  Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2-27 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts	persen	87,72	93,13	93,75	95,35	81,06
jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/sederajat	orang	12.323	10.116	12.210	8.715	11.141
jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	orang	14.048	10.862	13.024	13.677	13.746

Sumber : Dinas Pendidikan, tahun 2024

Dibandingkan dengan APM SD/MI, maka capaian APM SMP/MTs sedikit lebih rendah. Selain disebabkan oleh faktor ketepatan usia sekolah yang masih belum optimal yang juga terlihat pada APK SMP/MTs yang belum mencapai angka 100, salah satu penyebabnya adalah adanya lulusan SD/MI yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan SMP/MTs di luar Kabupaten Dharmasraya.

- Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)

  Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2-28 Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Persen	93,13	71,15	45,43	97,3	93,02
Jumlah anak usia 13 s.d. 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah Pertama	Orang	11.704	8.942	12.210	8.715	37.897
Jumlah anak usia 13 s.d.15 tahun pada Kabupaten Kota yang bersangkutan	Orang	12.567	12.567	26.871	13.677	40.741

Sumber : Dinas Pendidikan, tahun 2024

Persentase jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) dari tahun 2019 s.d. 2022 terlihat berfluktuasi. Dimana Jumlah anak usia 13 s.d. 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah Pertama maupun data kependudukan juga berfluktuasi tajam di tahun 2021, namun tahun 2022-2023 mengalami peningkatan dan makin membaik.

- Jumlah anak 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD

  Pendidikan PAUD merupakan pendidikan pra sekolah dilaksanakan dalam rangka pemberian rangsangan atau stimulasi pendidikan yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak dan dilaksanakan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Penanaman kejujuran, disiplin, cinta sesama, cinta tanah air dan semua nilai yang positif lain termasuk pengetahuan mendasar mengenai gizi perlu pembiasaan dan harus dilakukan secara terus menerus. Untuk lebih jelasnya Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2-29 Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	73,08	77,67	88,04	91,70	81,30
Jumlah anak usia 5 s.d 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	8.187	8.614	7.588	7.806	7.084
Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kabupaten Kota yang bersangkutan	Orang	11.203	11.090	8.619	8.512	8.713

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Jumlah anak 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menandakan pentingnya pendidikan pra sekolah untuk mempersiapkan anak peserta didik masuk ke dunia Pendidikan

- Persentase guru dan tenaga kependidikan professional
  Capaian persentase guru dan tenaga kependidikan professional di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2-30 Persentase guru dan tenaga kependidikan professional

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase guru dan tenaga kependidikan professional	persen	63,25	60,54	53,45	35,55	56,77
Jumlah guru dan tenaga kependidikan professional	Orang	1.420	1.623	1.813	1.152	2.119
Jumlah guru dan tenaga kependidikan seluruhnya	Orang	2.245	2.681	3.392	3.220	1.203

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Dari data di atas dapat dilihat bahwa adanya tren penurunan persentase guru dan tenaga kependidikan profesional sejak tahun 2019 sampai tahun 2023. Sedangkan jumlah guru dan tenaga kependidikan profesional memiliki tren kenaikan setiap tahun. Hal ini terjadi karena peningkatan jumlah guru yang tersedia juga mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan jumlah guru dan tenaga kependidikan profesional, sehingga secara persentase cakupan guru dan tenaga kependidikan profesional terlihat menurun.

2. **Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**
   - **Angka Kematian Bayi (AKB)**

AKB menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). AKB merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Indikator ini merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.31.

Tabel 2-31 Angka kematian bayi (AKB)

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Angka kematian bayi (AKB)	per 1.000 kelahiran hidup	9,4	8,98	7,72	11,7	9,0
Jumlah kematian bayi (yang berumur kurang 1 tahun)	orang	54	52	50	41	32
Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	orang	4.911	5.527	5.565	3.482	3.562

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berfluktuasi, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2022 angka kematian bayi mengalami peningkatan yaitu 11,7 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara pada tahun 2023 AKB mengalami penurunan menjadi 9 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan karena pada umumnya ibu sudah menyadari pentingnya melakukan pemeriksaan kehamilan sampai bayi lahir dengan mengikuti setiap tahapan imunisasi. Dan juga disertai dengan kehadiran tenaga kesehatan maupun bidan yang terlatih di setiap daerah.

- **Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)**

  AKI adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan - kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya - tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lainnya.

  AKI merupakan salah satu indikator dari derajat kesehatan yang merupakan salah satu target dalam tujuan pembangunan sustainable development goals (SDGs) yaitu tujuan SDGs 3a yakni mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup Tahun 2030. Selain itu, kematian ibu dapat dikaitkan dengan kualitas tenaga kesehatan dan kualitas hidup masyarakat disuatu daerah dimana semakin tinggi Angka Kematian Ibu disuatu daerah, kemungkinan besar kinerja tenaga kesehatan dan kualitas hidup masyarakat daerah tersebut rendah. Pada Tabel 2.32 dapat dilihat perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023.

Tabel 2-32 Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	108	77,02	257,59	201	84
Jumlah kematian ibu dalam tahap kehamilan atau kelahiran	Orang	6	3	14	7	3
Jumlah kelahiran hidup	orang	3.854	3.895	3658	3.482	3.562

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) di Kabupaten Dharmasraya rentang waktu tahun 2019-2023 berfluktuatif. Pada tahun 2019 AKI sebanyak 108 per 100.000 kelahiran hidup (6 kasus). Pada tahun 2020 mengalami penutunan yang cukup signifikan yaitu 77,02 per 100.000 kelahiran hidup (3 kasus). Namun pada tahun 2021 kasus AKI meningkat menjadi 257,59 per 100.000 kelahiran

hidup. Tingginya kasus kematian ibu melahirkan masih dipengaruhi oleh pandemi covid-19, namun di tahun 2022 sudah terjadi penurunan menjadi 84 per 100.000 kelahiran hidup, dimana kasus kematian ibu melahirkan dari 14 kasus tahun 2021 dan 7 kasus pada tahun 2022 menjadi 3 kasus. Pada tahun 2023.

- **Prevalensi Stunting**

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)1. Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Prevalensi stunting di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 berfluktuatif. Dimana pada Tahun 2019 Untuk lebih jelasnya perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Dharmasraya tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 33.

Tabel 2-33 Prevalensi Stunting

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Prevalensi Stunting	indeks	14,6	12,4	13,5	7,6	7,6
Jumlah balita Stunting	balita	-	-	1.558	1.329	1.329
Jumlah Balita yang diukur berat badan dan tinggi badan	balita	-	-	-	14.522	15.722

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Dalam penanggulangan kasus balita stunting, upaya yang dilakukan bukan hanya pada faktor kesejahteraan masyarakat, namun juga perlu disejalankan dengan dengan peningkatan layanan air bersih, higiene dan sanitasi lingkungan.

Sebagian kasus yang terjadi memperlihatkan kasus stunting terjadi karena faktor rumah dan sanitasi lingkungan yang kurang baik menyebabkan kasus stunting pada balita. Salah satu inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu dengan program orang tua asuh dan selanjutnya memberikan bantuan makan seusai dengan kebutuhan balita stunting agar dapat tumbuh kembang dengan lebih baik dan nantinya Puskesmas diminta untuk memantau perkembangan perkembangan balita stunting tersebut.

- **Prevalensi Malnutrisi**

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Perkembangan kasus balita

malturisi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2019 sebanyak 2.739 kasus dengan indeks 8,39 menurun pada tahun 2023 menjadi 1.958 kasus dengan indek 5,7. Untuk lebih jelasnya prevalensi malturisi tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.34.

Tabel 2-34 Prevalensi Malnutrisi

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Prevalensi Malnutrisi	indeks	8,39	6,56	6,25	6,65	5,7
Jumlah Balita Malnutrisi	Kasus	2.739	2.713	2.113	2.159	1.958
Jumlah Balita yang diukur berat badan dan tinggi badan	kasus	17.327	15.523	16.888	14.522	15.722

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Kasus malnutrisi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu asupan makanan yang kurang dan penyakit infeksi merupakan faktor langsung. Ketahanan pangan keluarga, pola pengasuhan anak, dan pelayanan kesehatan serta lingkungan yang kurang memadai menjadi faktor tidak langsung. Wasting memiliki dampak yang besar sehingga masih dikatakan sebagai salah satu masalah kesehatan masyarakat.

Anak balita yang wasting secara tidak langsung dapat mengalami defisiensi zat gizi yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap kesehatan pertumbuhan, penyakit infeksi dan kecerdasan anak. Keadaan kurang gizi yang tidak teratasi pada masa balita dapat mempengaruhi intellectual performance, kapasitas kerja, dan kondisi kesehatan di usia selanjutnya. Beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian wasting adalah asupan karbohidrat, penyakit infeksi, ASI ekslusif, kelengkapan imunisasi, usia ibu dan BBLR.

- **Persentase Rumah Tangga PHBS**

  PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Adapun persentase rumah tangga PHBS di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.35.

Tabel 2-35 Persentase Rumah Tangga PHBS

Indikator	Satuan	2021	2022	2023
Persentase Rumah Tangga PHBS	persen	30,9	32,9	49,4
Jumlah Rumah Tangga yang menerapkan PHBS	Rt	16.789	15.491	25.514
Jumlah Rumah Tangga	Rt	54.159	47.088	51.599

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Pelaksanaan PHBS merupakan pemantauan Rumah Tangga yang melaksanakan 10 indikator PHBS, yaitu : 1) Persalinan melalui tenaga kesehatan, 2) Asi Eklusif, 3)

Timbang Bayi, 4) Air Bersih, 5) Jamban Sehat, 6) cuci tangan pakai sabun (CPTS), 7) Bebas Jentik, 8) Makan buah dan sayur, 9) Aktifitas Fisik, 10) Tidak Merokok.

Pada tahun 2022, dari 47.088 rumah tangga yang ada di Kabupaten Dharmasraya, yang dipantau melaksanakan PHBS berjumlah 15.491 rumah tangga atau sebesar 32,9% dan tahun 2023 berjumlah 25.514 rumah tangga atau 49,4%.

- **Sanitasi Total Berbasis Masyarakat**

  Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Pelaksanaan Permenkes nomor 3 tahun 2014 tentang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), melaksanakan 5 (lima) Pilar STBM, yaitu: 1) Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), 2) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), 3) Pengelolaan air minum dan makanan di rumah tangga, 4) Pengelolaan sampah rumah tangga, 5) Pengamanan limbah cair rumah tangga. Tujuan dari program STBM adalah untuk merubah perilaku masyarakat dengan pendekatan pemicuan *Community Leat Total Sanitasion* (CLTS). Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.36.

Tabel 2-36 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persen	34,62	40,38	51,92	55,77	100
Jumlah Nagari PHBS (Nagari ODF)	nagari	18	21	27	29	52
Jumlah nagari	Nagari	52	52	52	52	52

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Pada saat ini kegiatan percepatan Universal Akses terhadap jamban sehat baru difokuskan pada pilar pertama, dalam rangka pencapaian status Oven Defication Free (ODF). di Kabupaten Dharmasraya tahun 2022 sudah ada 29 nagari dengan status ODF atau 55,77% dari 52 nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2023 sudah semua nagari dengan status ODF.

- **Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam**

  KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malpetaka.

Mengingat seriusnya dampak yang ditimbulkan dari kejadia luar biasa dan wabah akibat penyakit menular terhadap derajat kesehatan masyarakat, maka perlu langkah – langkah perlindungan kepada masyarakat melalui kegiatan surveilans terpadu dengan melibatkan semua sektor dan masyarakat untuk mendeteksi dan mencegah faktor – faktor risiko kejadian penyakit yang berpotensi KLB/wabah. Penanganan KLB dari tahun 2019 hingga tahun 2020 selalu ditangani segera atau kurang dari 24 jam. Untuk lebih jelasnya Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.37.

Tabel 2-37 Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam	Persen	100	100	100	100	100
Jumlah KLB yang ditangani ≤24 jam	Kasus	1	1	1	1	2
Jumlah kejadian Luar Biasa	kasus	1	1	1	1	2

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2019-2023, Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam sudah 100%.

- **Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular**

  Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular adalah jangkauan pelayanan kesehatan terhadap penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur, dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Saat ini kejadian/kasus penyakit menular dimasyarakat cukup meningkat, hal ini sangat berpengaruh kepada derajat kesehatan masyarakat. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular pendekatan keluarga dan gerakan masyarakat hidup sehat di arahkan sebagai upaya deteksi dan diagnosis dini penyakit, pendekatan keluarga dan GERMAS merupakan upaya efektif dalam rangka pencegahan dan pengendalian factor risiko terjadinya penyakit dan sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sehingga tidak mudah terpapar penyakit. Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 sudah 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.38.

Tabel 2-38 Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Di tahun 2023, penyakit menular yang disebabkan oleh TBC terdapat peningkatan penemuan kasus baru, sebesar 11,5%, sedangkan HIV mengalami penurunan penemuan kasus baru sebesar sebesar 25%, ini dikarenakan mangkin meningkatnya kesadaran masyarakat berisiko untuk memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan.

- **Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular**

  Indikator ini digunakan untuk menghitung jangkauan penemuan dan pelayanan kesehayan penyakit yang tidak menular dan bukan disebabkan oleh penularan vektor, virus atau bakteri, namun lebih banyak disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup. Berdasarkan data tahun 2019, cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular sudah 84%, sementara pada tahun 2020-2023 sudah mencapai 100%. Untuk lebih jelasnya Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular dapat dilihat Pada Tabel 2.39.

Tabel 2-39 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	Persen	84	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah lebih tinggi dari 140/90 milimeter merkuri (mmHG). Angka 140 mmHG merujuk pada bacaan sistolik, ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Sementara itu, angka 90 mmHG mengacu pada bacaan diastolik, ketika jantung dalam keadaan rileks sembari mengisi ulang bilik-biliknya dengan darah.

Pada tahun 2023, jumlah estimasi penderita dengan hipertensi berusia >15 tahun adalah 44 cukup tinggi, selain faktor pola hidup, hipertensi juga dipengaruhi oleh pola konsumsi yang dijalankan oleh masyarakat. Diabetes adalah penyakit yang berlangsung lama atau kronis serta ditandai dengan kadar gula (glukosa) darah yang tinggi atau di atas nilai normal. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh.Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita.

- **Visite Rate**

  Visit rate adalah Angka kunjungan rawat jalan/rawat inap pada Puskesmas/Puskesmas perawatan dibandingkan dengan jumlah penduduk disuatu wilayah. Visit rate digunakan untuk menilai tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh pemerintah. Seperti amanat undang-undang bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga Negara karena itu

setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh derajat kesehatan secara optimal dan mendapat perlindungan terhadap kesehatannya.

Pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan penduduk, serta mengupayakan penyelenggaraan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi segenap lapisan masyarakat. Makin tinggi visite rate di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama menandatakan akses masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat. Perkembangan visite rate di Kabupaten Dharmasraya tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2-40 Visite Rate

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Visite Rate	persen	21,4	21,4	4	4,6	5,25

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Tahun 2022 capaian visite rate di Kabupaten Dharmasraya meningkat dari data capaian *visite rate* tahun 2019 dan 2021 dengan visite rate 21,4%. Rata-rata capaian *visite rate* tahun 2022 adalah 4,6 dari jumlah penduduk yang ada diwilayah kerja, sedangkan tahun 2021 capaian visite rate di Kabupaten Dharmasraya 4,0,% dengan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2023 capaian visite rate yaitu 5,25%. Peningkatan visite rate di fasilitas kesehatan mengambarkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas sudah menjangkau seluruh penduduk yang ada di wilayah kerja dengan rata-rata kunjungan masing-masing individu 4 sampai 5 kali kunjungan dalam satu tahun.

- **Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama**

Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi dan akan dinilai kembali setiap 3 tahun sekali. Tujuan utama akreditasi adalah untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko.

Akreditasi Puskesmas tebagi menjadi 5 tingkatan akreditasi yaitu;
1. Tidak Akreditasi
2. Terakreditasi dasar
3. Terakreditasi madya
4. Terakreditasi utama, dan
5. Terakreditasi paripurna

Jumlah Puskesmas Terakreditasi Utama di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 4.41.

Tabel 2-41 Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023

Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	persen	7,14	7,14	21,40	21,43	93,3
Jumlah Puskesmas Terakreditasi Utama	unit	1	1	3	3	14
Jumlah Puskesmas	unit	14	14	14	14	15

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Pada tahun 2023 jumlah puskesmas di Kabupaten Dharmasraya berjumlah 15 unit, dan jumlah puskesmas yang akan penilaian pasca akreditasi sebanyak 10 puskesmas, yaitu, Puskesmas Gunung Medan, Puskesmas Sialang, Puskesmas Koto Baru, Puskesmas Koto Besar, Puskesmas Tiumang, Puskesmas Silago, Puskesmas Timpeh, Puskesmas Padang Laweh, Puskesmas Sungai Limau dan Puskesmas Sungai Rumbai. Jumlah puskesmas yang terakreditasi utama tahun 2023 sebanyak 14 unit dari 15 puskesmas yang ada di Kabupaten Dharmasraya, artinya 93,3% puskesmas di Kabupaten Dharmasraya sudah terakreditasi utama.

- **Persentase UPT RSUD Terakreditasi**

Akreditasi Rumah Sakit adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada manajemen rumah sakit, karena telah memenuhi standar yang ditetapkan. Akreditasi menjadi syarat yang penting untuk dipenuhi oleh rumah sakit karena selain bertujuan menjamin mutu layanan kesehatan kepada masyarakat, akreditasi juga dapat menjadi bukti bahwa rumah sakit memiliki komitmen untuk memberikan layanan yang paripurna dan sesuai standar.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan rujukan merupakan dasar peningkatan jumlah UPT RSUD di Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2016, UPT RSUD di Kabupaten Dharmasraya hanya UPT RSUD Sungai Dareh dan telah terakreditasi, di tahun 2017 terdapat penambahan UPT RSUD Sungai Rumbai.

RSUD Sungai Rumbai mulai beroperasi sejak tahun 2017, dan dalam tahap pengembangan, peningkatan sarana serta prasarana untuk memenuhi mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga pada tahun 2022, UPT RSUD Sungai Rumbai sudah terakreditasi. Untuk lebih jelasnya jumlah RSUD terakreditasi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 4.42..

Tabel 2-42 Persentase UPT RSUD Terakreditasi

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase UPT RSUD Terakreditasi	Persen	50	100	50	100	100
Jumlah RSUD terakreditasi	unit	1	2	1	2	2
Jumlah RSUD seluruhnya	unit	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Dengan ada 2 RSUD yang sudah terakreditasi, maka hal ini juga memberikan peningatan kualitas layanan yang diberikan oleh RSUD Sungai Dareh maupun RSUD Sungai Rumbai.

3. **Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
   - **Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap**

Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap**,** Jalan Daerah yakni jalan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) berupa Kemantapan Jalan Provinsi di Indonesia yang mana jalan Mantap adalah jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang, sementara jalan yang di katakan Tidak Mantap adalah jalan provinsi dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Peran dan fungsi jaringan jalan adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas Kabupaten/Kota, serta kecamatan hingga nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan dimana berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/469/KPTS-BUP/2017 tanggal 23 Desember 2017 tentang Penetapan Status Jalan diketahui bahwa total panjang jalan Kabupaten Dharmasraya adalah 1.042,87 km.

Mengingat jalan sebagai infrastruktur dasar, maka perlu diketahui kondisi kemantapan jalan kabupaten di Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2023 dilakukan updating terhadap ruas jalan kabupaten dan peninjauan kembali terhadap ruas jalan kabupaten maka panjang jalan kabupaten mengalami penambahan dari 1.042,87 Km menjadi 1052,66 Km. Perubahan panjang jalan ini merupakan penambahan ruas jalan kabupaten yang belum termasuk dalam Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/469/KPTS-BUP/2017. Dengan ditetapkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/336/KPTS-BUP/2023 tanggal 9 Desember 2023 tentang Penetapan Ruas Status Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, maka Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/469/KPTS-BUP/2017 telah dicabut dan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan pada data capaian proporsi panjang jalan dilakukan penyesuaian data sehingga terjadi penyesuaian data Panjang jalan yang mempengaruhi data jalan dengan kondisi baik. Secara umum pemerintah derah terus melakukan penyesuaian data dan definisi operasional terhadap pengertian jalan dengan kondisi baik. Kondisi kemantapan jalan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023.

Untuk lebih jelasnya proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 4.43 berikut:

Tabel 2-43 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	49.19	49.75	49.71	58,09	58,15
Panjang jalan kondisi mantap	Km	517.99	523.89	523,49	611,72	612,21
Panjang Jalan (Km)	km	1.042,87	1.042,87	1.042,87	1.042,87	1.052,66

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, secara keseluruhan panjang jalan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 yaitu sepanjang 1.052,66 Km, dimana panjang jalan dalam kondisi baik yaitu sepanjang 612,21 Km atau ketercapaian panjang jaringan jalan kewenangan Kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 58,15% dari total panjang jalan kewenangan kabupaten.

Terjadinya penurunan fluktuasi proporsi jalan mantap di Kabupaten Dharmasraya disebabkan beberapa hal :

1. Terjadi perubahan panjang jalan kabupaten karena perbedaan pemahaman terhadap kondisi jalan mantap, dimana pada tahun 2018 jalan kerikil yang rata dianggap jalan mantap tetapi saat ini jalan kerikil dianggap tidak termasuk jalan mantap
2. beban yang melewatinya terus menerus melampaui batas maksimum. Kendaraan-kendaraan yang lewat, sering kali beratnya melampaui batas (over load).

- **Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik**

Berdasarkan data 5 tahun terkahir bahwa jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 188 unit jembatan sesuai dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/469/KPTS-BUP/2017 tanggal 23 Desember 2017 tentang Penetapan Status Jembatan di Kabupaten Dharmasraya. Dari jumlah jembatan tersebut, jembatan dalam kondisi baik sebanyak 148 unit atau 79,07% dari jumlah jembatan secara keseluruhan.

Pada tahun 2023 telah dilakukan penyesuaian data jumlah jembatan, dimana saat ini jumlah jembatan yang ada yaitu 257 unit jembatan. Jembatan dalam kondisi baik sebanyak 180 unit atau sebanyak 70,03% jembatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya dalam kondisi baik.

Untuk lebih jelasnya presentase jembatan dalam kondisi baik dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 4.44 berikut:

Tabel 2-44 Persentase jembatan dalam Kondisi Baik

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase jembatan dalam Kondisi Baik	persen	65.96	68.09	68.09	79,07	70,03

Jumlah jembatan dalam Kondisi Baik	unit	124	128	128	148	180
Jumlah Jembatan seluruhnya	unit	188	188	188	188	257

Sumber : Dinas PUPR, Tahun 2024

- **Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik**

  Persentase luas daerah irigasi (DI) keweanangan kabupaten dalam kondisi baik yaitu mengambarkan persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dibangun/ditingkat dan di pelihara.

  Irigasi merupakan salah satu prasarana wilayah yang dapat mendukung peerkonomian. Pembangunan jaringan irigasi sebagai langkah strategis dalam mendukung peningkatan produksi pangan, serta dalam upaya mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Pemanfaatan air untuk irigasi persawahan merupakan salah satu upaya mendukung ketahanan pangan mengingat lapangan usaha dominan berada pada sektor pertanian terutama pertanian tanaman pangan. Artinya terdapat keterkaitan antara dampak pembangunan daerah irigasi terhadap produksi padi, menunjukkan bahwa jika luas fungsional daerah irigasi mengalami peningkatan maka produksi padi pun meningkat.

  Berdasarkan data, Luas Potensial Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kabupaten meliputi 2.783 Ha, dengan luas fungsional mencapai 1710,94 ha yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

  Berikut merupakan tabel presentase luas daerah irugasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2-45 Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	58,62	59,86	79,76	79,76	76,38

Sumber : Dinas PUPR, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dari 58,62% di tahun 2019 meningkat menjadi 76,38% tahun 2023. Jika dilihat dari data per tahun, persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik tahun 2011-2023 mengalami penurunan sebesar 3,38%.

- **Persentase penduduk yang terlayani jaringan air minum**

  Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Adapun kebutuhan air minum tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah. Layanan air minum di Kabupaten Dharmasraya

saat ini dikelola oleh UPTD Air Minum yang masih berada di bawah Dinas PUPR dan belum sepenuhnya mampu melayani kebutuhan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. Selain itu juga terdapat SPAM Perdesaan berupa PAMSIMAS untuk memenuhi kebutuhan daerah permukiman baik di ibu kota kabupaten maupun ibukota kecamatan dan pedesaan. Sumber air baku yang dimanfaatkan oleh sistem jaringan ini berasal dari air permukaan (sungai) dan air tanah (sumber mata air). Untuk lebih jelasnya Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 4.46 berikut:

Tabel 2-46 Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	persen	19,63	21,67	26,17	88,22	89,07
Jumlah penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	Persen	42.072	46.853	59,217	201.848	211.736
Jumlah penduduk	Jiwa	214.292	216.202	226.265	228.801	237.724

Sumber : Dinas PUPR, Tahun 2024

Pencapaian terkait cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Darmasraya dari Tahun 2019 sampai tahun 2023 menunjukan kecenderungan meningkat. Pelayanan air minum semakin baik dan menjangkau berbagai wilayah. Berdasarkan data lima tahun terakhir, dapat dilihat bahwa cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Dharmasraya terus meningkat dari tahun 2019 sebesar 19,63% meningkat pada tahun 2023 menjadi 89,07%.

- **Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik**

  Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, rumah susun dan asrama. Sesuai Peraturan Menteri (Permen) PUPR No.4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, sebagai pedoman bagi penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh masyarakat. Sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

  Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik di Kabupaten Dharmasraya tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 4.47.

Tabel 2-47 Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023

Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	persen	86,51	86,88	87,25	91,73	92,49
Jumlah penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	Jiwa	180.530	186.177	188.636	207.553	219.876
Jumlah penduduk	Jiwa	208.681	214.292	216.202	226.265	237.724

Sumber : Dinas PUPR, Tahun 2024

Akses layak air limbah domestik di Kabupaten Dharmasraya yang mencapai 92,49% dimana sebagian besar rumah tangga sudah melakukan praktik buang air besar ke jamban pribadi milik sendiri, dan hanya sebagian kecil saja rumah tangga menumpang ke jamban tetangga/saudara (sharing)

- **Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik**

Gedung perangkat daerah idealnya sesuai dengan jumlah perangkat daerah yang ada. Jumlah perangkat daerah yang ada sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 38 OPD.

Saat ini belum semua perangkat daerah memiliki kantor sendiri. Dari 38 OPD baru 18 OPD yang memiliki gedung kantor dalam kondisi baik yang terdiri dari 11 kecamatan dan 6 kantor OPD. Selain itu masih ada OPD di Kabupaten Dharmasraya yang belum memiliki kantor sendiri dalam hal ini masih menyewa dan menumpang pada bangunan lain.

Untuk lebih jelasnya Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik dapat dilihat pada Tabel 2.48.

Tabel 2-48 Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	Persen	44,73	44,73	44,73	44,73	47,36
Jumlah gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	unit	17	17	17	17	18
Jumlah Perangkat Daerah		38	38	38	38	38

Sumber : Dinas PUPR, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik sebesar 47,36%. Dari tahun 2019-2023 jumlah gedung perangkat daerah dalam kondisi baik masih 18 OPD yang terdiri dari 11 gedung kantor kecamatan dan 7 kantor OPD (sekretariat daerah, Bapperida, BKD, inspektorat, dinas PUPR, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan sekretariat DPRD).

- **Persentase Kesesuaian Tata Ruang**

Untuk lebih jelasnya persentase kesesuaian tata ruang dapat dilihat pada tabel 2.49 berikut :

Tabel 2-49 Persentase Kesesuaian Tata Ruang

Indikator	Satuan	2022	2023
Persentase Kesesuaian Tata Ruang	Persen	89.47	92.59
Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Yang Dikeluarkan	Buah	68	50
Jumlah Permohonan Kesesuaian tata Ruang	Buah	76	54

Sumber : Dinas PUPR, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa persentase kesesuaian pemanfaatan ruang semakin meningkat.. Hal ini terlihat dari tahun 2022 persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 89,47% dan tahun 2023 sebesar 92,59%.

4. **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

- **Cakupan permukiman layak huni**

Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat tersebut. Untuk lebih jelasnya cakupan permukiman layak huni di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.50.

Tabel 2-50 Cakupan permukiman layak huni

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan permukiman layak huni	Persen	83,88	83,88	83,99	84,15	84,30
Luas Permukiman layak huni (Ha)	Ha	2.068	2.068	2.072	2.076	2.079,80
Luas Wilayah Permukiman (Ha)	Ha	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas cakupan permukiman layak huni di Kabupaten Dharmasraya tahun 2019-2023 mengalami peningkatan tiap tahun. Tahun 2019 cakupan pelayanan permukiman layak huni sebesar 83,88% dan tahun 2023 meningkat menjadi 83,30%. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari program-program penangan kawasan permukiman layak huni yang dilaksanakan setiap tahunnya.

- **Cakupan ketersediaan rumah layak huni**

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Adapun cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Dharmasraya tahun 2019-2023 dapat dilihat pada 2.51.

Tabel 2-51 Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	91,98	90,61	90,68	91,17	91,49
Jumlah Rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	unit	41.942	53.029	53.074	53.512	53.972
Jumlah Rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	unit	45.601	58.526	58.526	58.695	58.993

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Berdasarkan data cakupan ketersediaan rumah tidak layak huni tahun 2019 yaitu 91,98%. Pada tahun 2020 dilakukan updating data oleh Dinas Perkimtan, dimana berdasarkan hasil pengumpulan data jumlah rumah tidak layak huni tahun 2020 yaitu 53.029 rumah atau 90,61% dari jumlah rumah keseluruhan.. Dilihat berdasarkan perkembangan data tahun 2020-2023 jumlah cakupan ketersediaan rumah layak huni mengalami peningkatan dari 90,61% menjadi 91,49%. Penambahan cakupan ketersediaan rumah layak huni disebabkan oleh 2 (dua faktor) yaitu adanya penambahan jumlah rumah itu sendiri serta adanya perbaikan rumah baik yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri maupun program yang dijalankan oleh pemerintah, terutama ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

- **Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana**

  Cakupan Ketersediaan Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah adalah indikator yang merupakan gabungan dari 2 (dua) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat.

  Berdasarkan data di atas terlihat bahwa cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana tahun 2019-2023 tidak ada rumah terkena bencana yang mesti ditangani oleh Pemerintah daerah. Lebih jelasnya perkembangan cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana dapat dilihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2-52 Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	%	100	100	100	100	100

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	unit	0	0	0	0	0
Jumlah total rencana ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	unit	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2019-2023 tidak ada ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana, atau tidak ada rumah terkena bencana yang mesti ditangani oleh Pemerintah daerah. sehingga capaian kinerja untuk cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana tetap 100%, sesuai ketentuan standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan.

- **Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah**

  Ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah tahun 2019-2022 yaitu tidak ada rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah. Pada tahun 2023 terdapat 2 unit rumah masyarakat terkena relokasi program pemerintah, dan statusnya menjadi rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah. Untuk lebih jelasnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah dilihat pada Tabel 2.53.

Tabel 2-53 Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	%	100	100	100	100	100
Jumlah ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	unit	0	0	0	0	2
Jumlah rumah masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	unit	0	0	0	0	2

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

- **Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani**

  Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

  Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang di tangani di Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 hanya sebesar 0,56%. Hal ini terjadi karena masih banyaknya kawasan kumuh yang belum ditangani melihat dari total luas kawasan kumuh di Kabupaten Dharmasraya. Adapun capaian Persentase Kawasan

Permukiman Kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani dapat dilihat pada Tabel 2.54.

Tabel 2-54 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani	Persen	0	0,56	2,13	4,35
Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani	Ha	0	0,61	2,3	4,7
Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar	Ha	107,98	107,98	107,98	107,98

Sumber : Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Luas kawasan permukiman kimuh dibawah 10 hektar di Kabupaten Dharmasraya yaitu 107,98 hektar. Berdasarkan capaian di atas terlihat bahwa terdapat peningkatan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang di tangani di Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2021-2023. Pada tahun 2010 tidak ada kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani. Pada tahun 2021, permukiman kumuh dibawah 10 hektar yang tertangani seluas 0,61 hektar, luasan ini meningkat menjadi 2,3 hektar tahun 2022 dan 4,7 hektar pada tahun 2023.

- **Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU**

  PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

  Penyediaan atau bantuan PSU adalah pemberian sebagian dari komponen PSU yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang fungsional. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman.

  Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU merupakan perbandingan antara Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu (Ha) dengan Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu (Ha). Adapun capaian Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU dapat dilihat pada Tabel 2.55.

Tabel 2-55 Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	53,39	51,68	50,36	49,37	50,02
Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu (Ha)	Ha	88,54	95,96	103,38	104,58	108,88
Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu (Ha)	Ha	165,84	185,67	205,29	211,82	217,69

Sumber : Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU sebanyak 53,39% dan pada tahun 2022 dilihat berdasarkan angka capaian mengalami penurunan menjadi 49,37%. Artinya setiap tahun cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU semakin berkurang. Salah satu penyebabnya yaitu pembangunan perumahan dan permukiman oleh masyarakat tidak dilengkapi dengan PSU, sementara itu program pembangunan PSU dari pemerintah juga masih terbatas. Pada tahun 2023, cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU meningkat menjadi 50,02%.

- **Cakupan rumah layak huni yang terjangkau**

  Cakupan rumah layak huni yang terjangkau merupakan Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu terhadap Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan data terlihat bahwa cakupan pelayanan dari tahun 2019-2023 cukup rendah yaitu dibawah 2%%. Untuk lebih jelasnya cakupan rumah layak huni terjangkau dapat dilihat pada Tabel 2.56.

Tabel 2-56 Cakupan rumah layak huni yang terjangkau

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	22,53	11,21	1,14	12,76	15,34
Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	unit	1.005	500	45	448	467
Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	unit	4.460	4.460	3.960	3.512	3.045

Sumber : Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

5. **Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

- **Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum**

  Untuk mengukur ketentraman dan ketertiban umum, maka salah satu indikator yang digunakan adalah persentase penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk lebih jelasnya jumlah kasus dan persentase penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum dapat dilihat pada Tabel 2.57.

Tabel 2-57 Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	91	90	100	100
Jumlah Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	kasus	45	10	9	-	-
Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	kasus	45	11	10	-	-

Sumber : Kantor Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

Catatatn : *jumlah Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum belum tersedia*

Adapun capaian persentase penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2023 terealisasi sebesar 100 persen.

- **Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi**

  Dari sisi regulasi, maka perwujudan ketentraman dan ketertiban umum diukur dengan tindakan penegakan perda dan perkada yang memuat sanksi. Capaian kinerja persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi dapat dilihat pada Tabel 2.58.

Tabel 2-58 Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	persen	100	100	100	100	-

Sumber : Kantor Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka capaian persentase penegakan perda dan perkada yang memuat sanksi pada akhir tahun 2022 adalah sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

- **Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran**

  Berkaitan dengan bencana kebakaran, maka indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah persentase respontime pada lokasi kebakaran yaitu sebesar 15 menit. Cakupan pelayanan respontime 15 menit pada lokasi kebakaran dapat dilihat pada Tabel 2.59.

Tabel 2-59 Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Kantor Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

Berdasarkan tingkat capaian persentase respontime pada lokasi kebakaran pada tahun 2023 sudah tercapai sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pelayanan pemerintah daerah telah memberikan pelayanan secara optimal. Hal ini tentunya juga didukung oleh partisipasi dari masyarakat dalam melakukan penanganan kebakaran secara mandiri.

- **Jumlah Nagari Tangguh Bencana**

  Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan (Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012). Ketangguhan ini bersifat multi-disiplin dan multi-sektoral, khususnya yang memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Kabupaten Dharmasraya telah memiliki Nagari Tangguh Bencana sebanyak 3 Nagari yaitu Nagari Timpeh Kecamatan Timpeh, Nagari Tabek Kecamatan Timpeh dan Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung.

- **Persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi**

  Evakuasi merupakan tindakan untuk membuat orang orang menjauh dari ancaman atau kejadian yang sangat berbahaya ke tempat yang lebih aman Ada banyak kondisi ekstrim yang berpotensi mengancam keselamatan manusia sehingga perlu dilakukan evakuasi. Berdasarkan data tahun 2023, korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi pada tahun 2023 tertangani seluruhnya.

- **Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan**

Persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi adalah menggambarkan jumlah warga negara yang menjadi korban yang berhasil diselamatkan dan dievakuasi.

Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi warga negara yang menjadi korban bencana telah tercapai 100% sejak tahun 2019 s/d 2023. Setiap kejadian bencana yang terjadi selalu direspon dengan cepat dan langsung dilakukan penanganan dan penyelamatan, baik terhadap warga maupun harta benda/materil warga yang terdampak bencana. Untuk lebih jelasnya persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan dapat dilihat pada tabel 2.60.

Tabel 2-60 Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan

Indikator	Satuan	2021	2022	2023
Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	persen	100	100	100

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun 2024

6. **Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

- **Persentase PPKS yang tertangani**

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Untuk lebih jelasnya PPKS yang tertangani dapat dilihat pada Tabel 2.61.

Tabel 2-61 Persentase PPKS yang tertangani

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
persentase PPKS yang tertangani	Persen	90	75	96	97	97,7
Jumlah PPKS yg diberikan bantuan	Orang	65.106	-	-	136.305	-
Jumlah PPKS yg seharusnya	orang	72.340	-	-	140.521	-

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2024

Pada tahun 2019 persentase PPKS yang tertangani menjadi 90% dari jumlah PPKS yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 75% jumlah PPKS yang tertangani, hal ini akibat merebaknya pandemi Covid-19 sehingga terjadi pembatasan beberapa kegiatan. Pada tahun 2021 kembali naik menjadi 96% karena sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru dan kegiatan pananganan PPKS dapat dilaksanakan, dan di tahun 2022 sedikit membaik menjadi 97%, begitu juga pada tahun 2023 menjadi 97,7%.

- **Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**

Pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti, paling lama 7 (tujuh) hari, meliputi permakanan; sandang; alat bantu; perbekalan kesehatan; bimbingan fisik,mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis; bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat; fasilitas pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Indentitas Anak; akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar; penelusuran keluarga, serta reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial. Untuk lebih jelasnya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dapat dilihat pada Tabel 2.62.

Tabel 2-62 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100
penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Orang	69	33	136	44	44
penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti	Orang	69	33	136	44	44

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2024

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti paling pada tahun 2023, sebanyak 44 orang. Dilihat berdasarkan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, semuanya (100%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.

- **Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota**

  Tanggap Darurat Bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Untuk lebih jelasnya persentase korban bencana

alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota dapat dilihat pada Tabel 2.63.

Tabel 2-63 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Persen	100	100	100	100	100
Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Orang	3.069	17.024	7.754	5.677	-
Jumlah korban bencana alam dan social	Orang	3.069	17.024	7.754	5.677	-

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2024

Selama tahun 2019 s.d. 2023 kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial di Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan dengan capaian 100%. Jika dilihat berdasarkan jumlah korban bencana alam dan sosial terbanyak terdapat pada tahun 2021, menunjukan jumlah yang cukup besar yaitu 17.024 orang. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 terjadi banjir di Kecamatan Timpeh, Sembilan Koto dan Pulau Punjung, serta adanya bencana lainnya.

2.1.5.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sendiri merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan semakin kecil TPAK (Payaman J Simanjuntak, 2005:45). Dan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi TPAK selain jumlah penduduk, seperti pendidikan, jenis kelamin, usia dan lain-lain.

Tinglat Partisipasi Angkatan Kerja adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Angka ini digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Dharmasraya digambarkan melalui tabel 2.64.

Tabel 2-64 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	70,17	72,72	73,04	77,84	73,93
Jumlah angkatan kerja	Orang	128.266	136.507	141.468	119.814	143.054
Jumlah penduduk 10 tahun ke atas	Orang	182.793	187.711	193.674	153.923	193.499

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2023
Keterangan :
* : sumber Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Tahun 2023

Berdasarkan data di atas pada tahun 2023 terlihat bahwa jumlah penduduk berusia 10 tahun ke atas yaitu 193.499 orang, dimana angkatan kerja berjumlah 143.054 orang dan bukan angkatan kerja berjumlah 91.659 dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 73,93%. Jika dilihat berdasarkan perkembangan dari tahun2019-2023, tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2019 sebesar 70,17% dan tahun 2023 menjadi 73,93%. Mata pencaharian penduduk Kabupaten Dharmasraya yaitu sebagai petani, peternak, buruh tani, pedagang, pegawai negeri sipil, pegawai swasta dan sektor jasa. Kabupaten Dharmasraya memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak, namun faktor pendukung dalam kegiatan ekonomi yang masih kurang dan dengan pendidikan yang relatif rendah sehingga menyebabkan banyak penduduk memilih untuk melakukan pekerjaan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini yang menyebabkan banyak penduduk Kabupaten Dharmasraya yang memilih bekerja di sektor informal daripada di sektor formal.

- Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan

  Tuntutan dunia kerja akan tenaga kerja yang terampil mendorong para pencari kerja untuk mengikuti pelatihan kerja untuk menambah keterampilan mereka. Dalam rangka peningkatan keterampilan dimaksud, pemerintah daerah memfasilitasi pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Sungai Dareh yang berada dibawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. UPT BLK Sungai Dareh sebagai lembaga pelatihan kerja milik pemerintah daerah, UPT BLK memiliki tugas mempersiapkan calon tenaga kerja untuk meningkatkan kompetensi kerja agar dapat bersaing pada dunia kerja dan dunia usaha di daerah atau Kabupaten Dharmasraya dan sekitarnya. Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan dapat dilihat pada tabel 2.65.

Tabel 2-65 Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023

Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	Persen	24	25	29	44,92	36,4
Jumlah Peserta Pelatihan yang ditempatkan	Orang	292	96	116	86	128
Jumlah Peserta lulus yang pelatihan	Orang	1216	384	400	191	352

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2024

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan pada tahun 2019 sebanyak 292 orang atau 24% dari total peserta lulus yang ikut pelatian. Tahun 2023 terdapat sebanyak 18 Paket dari APBN dan 4 Paket dari APBD. Kegiatan ini dilaksanakan tahun 2023 dengan pesentase kelulusan 100%. Dari persentase peserta yang lulus pelatihan yang dapat diterima kerja atau ditempatkan sebanyak 36,4%.

- Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan

  Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan merupakan perbandingan jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dengan jumlah tenaga kerja pada suatu daerah. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau luar negeri. Penempatan tenga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas objektif, secara adil dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada Tahun 2023 ini sudah mengolah data Tenaga kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan melalui Aplikasi Siap Kerja melalui Website Kementerian Ketenagakerjaan.

  Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam kurun waktu 2019-2023, dapat dilihat pada Tabel 2.66.

Tabel 2-66 Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	90,20	80,14	93.86	56,09	39,20
Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan	Orang	1740	1025	4449	2.489	1.425
Jumlah Tenaga Kerja	Orang	1929	1279	4740	4.437	3.633

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2024

Dilihat dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kinerja persentase tenaga kerja yang ditempatkan dari tahun 2022-2023 mengalami penurunan jika dilihat dari data tahun 2021.

- Persentase Kasus-Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan

Kasus yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya adanya laporan dari pekerja yang bekerja di perusahaan mengenai adanya PHK dari beberapa perusahaan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tidak terdapatnya perselisihan perusahaan, tetapi kasus yang ada Cuma kasus PHK, walaupun banyak pekerja pada tahun 2023 ini yang terkena dampak PHK oleh beberapa perusahaan, karena semua PHK telah disepakati oleh para pihak dan tidak diperselisihkan. Pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa memanfaatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang merupakan salah satu manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ini pengurusannya di bantu oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk dibuatkan bukti tanda terima kasus PHK dan membuatkan akun siapkerja di situs kemnaker.go.id serta cek eligibilitas kepesertaan Program JKP. Pada Tahun 2023 ini sudah sebanyak 12 Orang yang terdampak PHK dari beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Dari jumlah kasus ketenagakerjaan yang terjadi, semuanya dapat terselesaikan (100%). Untuk lebih jelasnya jumlah kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.67.

Tabel 2-67 Persentase Kasus - Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Kasus - Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
Jumlah Kasus – Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan	Kasus	16	1430	4	-	12
Jumlah Kasus – Kasus Ketenagakerjaan	Kasus	16	1430	4	-	12

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2024

Berdasarkan data Tahun 2019-2023, kasus ketenagakerjaan paling banyak terjadi pada tahun 2020, yaitu sebanyak 1.430 kasus dan semuanya dapat terselesaikan. Banyaknya jumlah kasus ini karena adanya masalah di perusahaan yang berkaitan dengan masalah hak-hak tenaga kerja yang tidak terpenuhi sesuai aturan, karena perusahaan belum memiliki dokumen kepatuhan ketenagakerjaan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan perwujudan upaya pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui kesetaraan gender pada seluruh pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan.

a. Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah

Focalpoint perangkat daerah merupakan aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender pada masing-masing perangkat daerah. Seluruh perangkat daerah telah mempunyai focalpoint

aktif. Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2-68 Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah

Indikator	satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat dari tahun 20219-2023 bahwa semua Perangkat Daerah dilingkup Kabupaten Dharmasraya mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender pada masing-masing perangkat daerah.

b. persentase Organisasi perempuan yang aktif

Persentase Organisasi Perempuan yang aktif adalah sebesar 100%. Yang menjadi sasaran adalah organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Dharmasraya yang aktif dalam pemberdayaan perempuan yaitu sebanyak 17 Organisasi. Untuk meningkatkan kapasitas organisasi-organisasi tersebut telah dilakukan pembinaan-pembinaan sehingga organisasi mampu melaksanakan program-programnya. Adapun Organisasi Perempuan yang aktif di Kabupaten Dharmasraya, dapat dilihat pada Tabel 2.69:

Tabel 2-69 Persentase Organisasi perempuan yang aktif

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
persentase Organisasi perempuan yang aktif	Persen	90,48	100	100	100	100
Jumlah Organisasi perempuan yang aktif	Organisasi	19	19	17	17	17
Jumlah Organisasi perempuan seluruhnya	Organisasi	21	19	17	17	17

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2024

Jumlah Organisasi perempuan yang mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2023. Hal ini terjadi karena adanya organisasi yang vakum dan akhirnya dibubarkan. Untuk organisasi yang aktif, seluruhnya dibina oleh pemerintah daerah.

c. Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)

APE (Anugrah Parahita Ekapraya) merupakan penghargaan atas upaya mewujudkan kesetaraan gender di daerah. Penilaian APE dilasanakan 2 (dua) tahun sekali, dan Kabupaten Dharmasraya baru mengikuti penilaian pada tahun 2020. Tingkat kategori capaian APE Kbaupaten Dharmasraya tahun 2020-2023 kategori Pratama. Tingkat kategori capaian APE di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.70.

Tabel 2-70 Tingkat kategori capaian APE

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
Tingkat kategori capaian APE	kategori	pratama	pratama	pratama	Pratama

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2024

Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada tahun 2023 yaitu Predikat/ penghargaan APE kategori pratama berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas keberhasilan dan prakarsa dalam kaitannya dengan pencapaian Pembangunan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah.

d. Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah sehingga pelaksanaannya perlu dikawal. Evaluasi KLA dilaksanakan setiap tahun, dan hasilnya berupa penghargaan kabupaten/kota layak anak yang terdiri dari 5 kategori. Penghargaan KLA untuk Kabupaten Dharmasraya selalu meningkat dari tahun ke tahun, dan pada Tahun 2021 sampai tahun 2023 berhasil memperoleh penghargaan KLA kategori Madya. Perkembangan status Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.71.

Tabel 2-71 Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Status	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2024

e. Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani

KDRT adalah Tindakan yang dilakukan didalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan. Perempuan korban kekerasan yang tertangani adalah perempuan yang mengalami kekerasan baik secara fisik, psikis, ekonomi, seksual yang telah diberikan pendampingan untuk pemulihan fisik, psikologis dan rehabilitasi sosial oleh lembaga layanan perlindungan perempuan di daerah.

Pada tahun 2023 realisasi cakupan perempuan korban kekerasan yang tertangani mencapai 100%, ini berarti bahwa semua perempuan korban kekerasan di Kabupaten Dharmasraya sudah mendapatkan layanan pendampingan. Cakupan ini disebabkan karena sudah ada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kab. Dharmasraya. UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan :

1. Pengaduan masyarakat;
2. Penjangkauan korban;
3. Pengelolaan kasus;
4. Penampungan sementara;
5. Mediasi;
6. Pendampingan korban.

UPTD PPA juga telah didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, diantaranya Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) dan rumah perlindungan sebagai tempat penampungan sementara bagi perempuan korban kekerasan.. Disamping itu pada tahun 2023, Dinas SOSP3APPKB juga menyediakan layanan pengaduan secara online bagi masyarakat yang akan melaporkan adanya kasus kekerasan terhadap perempuan melalui link pengaduan bit.ly//salingsappa sehingga memberi kemudahan bagi perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan layanan. Pada tahun 2023 terdapat 21 kasus kekerasan terhadap perempuan dan telah mendapatkan layanan penjangkauan dan pendampingan. Data tersebut di atas diperoleh dari data UPTD PPA kab. Dharmasraya Tahun 2023 sebanyak 21 Kasus. Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2019-2023 adalah 100%. Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.72.

Tabel 2-72 Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	persen	100	100	100	100	100
Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani	Orang	1	1	3	10	-
perempuan korban kekerasan	orang	1	1	3	10	-

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2024

Kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing 1 orang, di tahun 2021 sebanyak 3 orang dan di tahun 2022 terjadi sebanyak 10 kasus Seluruh kasus yang terjadi pada setiap tahun telah difasilitasi dan diselesaikan dengan

capaiam masing-masing 100%. Pada tahun 2023 rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani sebanyak 100%. Dengan telah terbentuk dan berjalannya UPT PPA diharapkan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diungkap dan ditangani dengan optimal.

f. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Angka kasus KDRT di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2023 yaitu 9 kasus. Hal ini terjadi salah satunya karena kegiatan pencegahan kekerasan yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang KDRT, baik pencegahan dan penanganannya. Namun dapat juga menggambarkan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan KDRT dikarenakan berbagai faktor. Sebagian masyarakat menganggap bahwa masalah kekerasan di dalam rumah tangga masih merupakan tabu bagi keluarga dan tidak perlu di laporkan. Kasus KDRT merupakan fenomena sosial yang sangat memprihatinkan, beranjak dari hal tersebut sejak tahun 2021 Dinas SOSP3APPKB melalui bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat inovasi SALING SAPA (Konsultasi Pelayanan Keliling Sahabat Perempuan dan Anak) yang memberikan layanan konseling bagi perempuan korban KDRT dan layanan pengaduan secara online yang menjamin kerahasiaan pelapor melalui link pengaduan bit.ly//salingsappa. Selanjutnya Rasio kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 2.73.

Tabel 2-73 Rasio kekerasan dalam rumah tangga

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio kekerasan dalam rumah tangga	rasio	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2024

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

a. Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah

Persediaan pangan di seluruh wilayah NKRI untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah di Kabupaten Dharmasraya semenjak tahun 2018 sebesar 15% terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 mencapai 27,87%. Cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh

pemerintah Kabupaten/Kota.Cadangan pangan daerah merupakan upaya untuk mengatasi gejolak harga pangan, bencana alam serta antisipasi masa paceklik.

Cadangan pangan daerah di Kabupaten Dharmasraya dikelola pada Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) sebanyak 6 LPM dan BULOG. Total cadangan pangan yang tersedia pada tahun 2022 di Kabupaten Dharmasraya sebesar 36,51 Ton dari 99,626 Ton berdasarkan perhitungan Permentan No. 11 Tahun 2018. Sehingga persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2019 sebesar 18%. Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.74

Tabel 2-74 Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah	persen	18	27,872	36,51	36,51	80,06

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan, Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi perkembangan yang signifikan dalam persentase ketersediaan cadangan pangan. Pada tahun 2019, data awal tercatat sebesar 18%, tetapi pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang mencolok, dengan persentase mencapai 27,872%. Tren ini terus berlanjut pada tahun 2021-2023, di mana ketersediaan cadangan pangan tetap stabil pada 36,51%. Namun, terjadi lonjakan yang luar biasa pada tahun 2023, dengan persentase ketersediaan cadangan pangan mencapai 80,06%. Hal ini menunjukkan upaya yang signifikan dalam meningkatkan produksi dan manajemen pangan untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik dalam skala yang lebih besar.

b. Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari

Keterjangkauan Pangan adalah kondisi masyarakat yang dapat dengan mudah memperoleh kebutuhan pangannya dengan harga yang terjangkau dan jumlah yang tersedia cukup. Angka yang harus terpenuhi dari ketersediaan kalori dan protein ini adalah ≥ 2.400 K.Kal/Kap/hr dimana kondisi ini menunjukkan bahwa bahwa pangan di daerah tersedia dan terjangkau oleh masyarakat Untuk lebih jelasnya Ketersediaan Kalori dan protein perkapita/ hari di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.75.

Tabel 2-75 Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023

Ketersediaan Kalori dan protein perkapita/ hari	K.Kal/Kap/hr	2.548	2.540	2.550	2416	2.490
Ketersediaan Protein	Gram/Kap/hr	95,11	91,51	85,95		

Sumber : Dinas Pangan dan perikanan, Tahun 2024

Tabel diatas menjelaskan ketersediaan kalori dan protein per kapita per hari, terdapat variasi dalam data yang diamati dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, data awal untuk indikator ini tidak tercatat. Namun, pada tahun 2020, terjadi peningkatan signifikan menjadi 2.540 kilokalori (K.Kal) dan protein per kapita per hari. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021, dengan ketersediaan kalori dan protein mencapai 2.645 K.Kal/Kap/Hr. Meskipun mengalami penurunan, pada tahun 2022, angka tersebut mengalami sedikit peningkatan kembali menjadi 2.416 K.Kal/Kap/Hr. Pada tahun 2023, data tidak tercantum, namun perlu dilakukan pemantauan lebih lanjut untuk memahami tren jangka panjang dan faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan kalori dan protein per kapita per hari dalam masyarakat.

c. Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu gizi dari keragaman konsumsi pangan (9 kelompok pangan) berdasarkan kontribusi asupan energi terhadap AKE.

Skor PPH berkisar antara 0-100. Susunan pangan yang beragam didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Semakin tinggi skor PPH, menunjukkan mutu gizi konsumsi pangan yang semakin baik. Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.76.

Tabel 2-76 Skor Pola Pangan Harapan

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Skor Pola Pangan Harapan	skor	89,4	85,6	94	87,8	**88,5**

Sumber : Dinas Pangan dan perikanan, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, data mengenai skor pola pangan harapan dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan variasi dalam penilaian harapan terhadap pola pangan dalam masyarakat. Pada tahun 2019, skor awal tercatat sebesar 86, menggambarkan tingkat harapan yang relatif stabil terhadap kualitas pola pangan. Namun, terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020, di mana skor turun menjadi 85,6. Signifikan terjadi pada tahun 2021, di mana skor melonjak tajam menjadi 94, mencerminkan peningkatan yang berarti dalam harapan terhadap kualitas pola pangan. Meskipun demikian, terjadi penurunan kembali pada tahun 2022, di mana skor turun menjadi 87,8. Namun, pada tahun 2023, skor pola pangan harapan kembali

meningkat sedikit menjadi 88,5, menunjukkan adanya konsistensi dalam upaya memenuhi harapan terhadap pola pangan yang lebih baik. Hal ini menegaskan perlunya pemantauan dan peningkatan terus-menerus dalam kebijakan pangan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pola pangan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

a. Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat

Pada bidang pertanahan indikator Persentase tanah Pemerintah daerah yang bersertifkat merupakan indikator yang dapat menunjukan kondisi pertanahan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan tanah pemerintah. Untuk lebih jelasnya Jumlah Luas Lahan Tanah Pemda yang bersertifikat (Ha) dan persentase tanah pemerintah daerah yang bersertifikat tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.77.

Tabel 2-77 Persentase tanah Pemerintah daerah yang bersertifikat

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase tanah Pemerintah daerah yang bersertifkat	Persen	54,56	22,29	23,86	26,13	**33,20**
Jumlah Luas Lahan Tanah Pemda yang bersertifikat (Ha)	Ha	350	372,89	399,13	437,14	555,48
Jumlah Luas lahan Tanah Pemda (Ha)	Ha	641,46	1.673	1.673	1.673	1.673

Sumber : Dinas Perkimtan, Tahun 2024

Sampai tahun 2023 luas lahan pemda yang sudah disertifikatkan tercatat sebanyak 555,48 hektar atau 33,20% dari seluruh tanah yang dimiliki pemerintah. Diantara tanah yang belum disertifikatkan adalah berupa tanah yag berlokasi di sekolah serta tanah lainnya.

b. Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan

Kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2019-2023 jumlah kasus tanah berkisar antara 5-10 kasus. Pada tahun 2019 persentase penyelesaian/fasilitasi kasus tanah Pemerintah sebanyak 50%, dan tahun 2020 sebanyak 66,67% kasus yang terselesaikan. Sementara pada tahun 2021-2023 persentase penyelesaian kasustanah pemerintah sudah 100%. Untuk lebih jelasnya persentase penyelesaian/fasilitasi kasus tanah pemerintah di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.78.

Tabel 2-78 Persentase penyelesaian / fasilitasi kasus tanah Pemerintah

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penyelesaian / fasilitasi kasus tanah Pemerintah	Persen	50	66,67	100	100	100
Jumlah Kasus yang terfasilitasi/terselesaikan	kasus	5	10	8	10	10
Jumlah Kasus yang terdaftar	kasus	10	15	8	10	10

Sumber : Dinas Perkimtan, Tahun 2024

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

a. indeks kualitas air

Indeks Kualitas Air (Water Quality Index / WQI) adalah metode sederhana yang digunakan sebagai bagian dari survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter yang mengurangi sejumlah besar informasi ke nomor tunggal, biasanya berdimensi, dengan cara yang mudah direproduksi. Pada Tabel 2.79 berikut disajikan capaian indikator indeks kuaitas air dari tahun 2019-2023.

Tabel 2-79 Indeks Kualitas Air

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	indeks	-	-	52,82	-	-
Sumatera Barat	indeks	77,67	75	79,00	-	-
Dharmasraya	indeks	60,00	70,00	52,73	53,18	54

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Kualitas air sungai di Kabupaten Dharmasraya akan menggambarkan keadaan kualitas air Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan melalui nilai Indeks Kualitas Air (IKA). Kualitas air didefinisikan memenuhi baku mutu jika IKA≥70, didefinisikan tercemar ringan pada IKA≥50, tercemar sedang pada IKA≥30, tercemar berat jika IKA≥10. Pada rentang waktu lima tahun, indeks kualitas air Kabupaten Dharmasraya berada pada status tercemar ringan dengan nilai IKA berada pada rentang 50 hingga 54.

Kondisi yang menyebabkan IKA masih dalam kondisi tercemar diantaranya meliputi meliputi:

1. Alih fungsi lahan dan pembukaan lahan baru yang menyebabkan terjadinya erosi yang masuk ke Badan Air. Alih fungsi lahan perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan sumberdaya air karena hutan adalah daerah tangkapan air akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas air di daerah sekitarnya. Sensitifitas ekosisten hutan terletak pada tutupan lahannya, semakin baik tutupan lahannya semakin bagus fungsi tanggapan air nya.

2. Penambangan emas skala kecil (PESK) yang masih menggunakan merkuri Proses penambangan emas yang dilakukan secara tradisional dengan penarikan biji emas dengan menggunakan Hg menghasilkan limbah (taiing) pada proses pencucian, yang umumnya masih mengandung merkuri namun dibuang begitu saja langsung ke badan air atau ke permukaan tanah tanpa perlakuan yang menyebabkan air dan tanah tercemar merkuri, akibatnya terjadi akumulasi mercuri pada tanah dan tanaman pangan maupun biota air.
3. Masih terbatasnya jumlah fasilitas pengolahan air limbah domestik, baik di pemukiman masyarakat maupun pada usaha/kegiatan
4. Masih Kurangnya Fasilitas Buang Air Besar pada Kawasan Pemukiman Masyarakat.
5. Masih adanya usaha/kegiatan yang tidak taat terhadap aturan pengelolaan limbah cair. Dari hasil pengawasan terhadap 15 (lima belas) usaha dan/atau kegiatan, 9 (sembilan) usaha dan/atau kegiatan atau sekitar 60% telah taat terhadap ketentuan pengelolaan limbah cair, 5 (lima) usaha dan/atau kegiatan atau 33% kurang taat serta 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan atau 7% tidak taat terhadap ketentuan. Ketidak taatan umumnya terdapat pada aspek pelaksanaan pemantauan kualitas air limbah dan kepemilikan izin air pembuangan air limbah.
6. Prilaku Kehidupan Sosial Masyarakat terhadap Lingkungan dan Peran Aktif Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan

b. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. Untuk lebih jelasnya indeks kualitas udara di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.80.

Tabel 2-80 Indeks Kualitas Udara

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	indeks			87,36		
Sumatera Barat	indeks	88,37	90,39	90,22		
Dharmasraya	Indeks	86,00	86,11	84,49	85,32	83,28

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Indeks Kualitas Udara/IKU adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan tentang kondisi kualitas udara pada kurun waktu tertentu. Metode perhitungan dan analisa data yang digunakan untuk menghitung indeks kualitas udara adalah model EU/Indeks annual Model EU-LEU. Parameter yang diuji dan menjadi dasar perhitungan IKU adalah parameter SO2 dan NO2. Pada rentang waktu lima tahun terakhir, konsentrasi parameter NO2 rata-rata dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami perubahan yang signifikan. Didukung dengan penghijauan yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah, fasyankes dan masyarakat, pengawasan industri yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan serta

meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah atau pembakaran pembukaan lahan baru.

c. indeks kualitas tutupan lahan

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2017. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh Karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan). Untuk lebih jelasnya indeks kualitas tutupan lahan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.81.

Tabel 2-81 Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	persen	-	-	60,72	-	-
Sumatera Barat	persen	64,33	64,13	66,24	-	-
Dharmasraya	persen	42,92	40,95	42,70	42,70	43,14

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) Kabupaten Dharmasraya tahun 2019-2023 berfluktuatif.. Tahun 2023, IKTL sebesar 42,92 dan tahun 2023 sebesar 43,14. Angka ini menunjukan masih ada lokasi lahan kritis karena masih adanya lahan yang belum dilakukan penanaman/penghijauan kembali, pembukaan lahan baru serta pengalihan fungsi lahan yang bersifat tanaman hutan menjadi lahan perkebunan sawit.

d. Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi

Cakupan sumber daya alam yang terlindungi ada dua hal yang diukur yaitu kawasan lahan yang terlindungi dan kawasan air yang terlindungi. capaian indikator pada sasaran startegis ini diukur dengan melihat luas area sumber daya alam baik lahan maupun air yang berhasil terlindungi dari potensi kerusakan serta dengan menghitung luas area penambahan tutupan lahan yang berhasil dilakukan. Dalam mencapai sasaran strategis ini ada beberapa program yang mendukung diantaranya Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh, Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. Untuk lebih jelasnya cakupan sumber daya alam yang terlindungi dapat dilihat pada Tabel 2.82.

Tabel 2-82 Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi	Ha/Kawasan	4,8	6	2,1	1	1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Pada tahun 2023 kegiatan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pembagian bibit tanaman dalam upaya melindungai sumber daya alam di Kabupaten Dharmasraya. Sebanyak 235 batang tanaman seperti Durian, Sukun, Nangka serta Mangga deserahkan ke 12 wilayah Nagari yang tersebar di Kabupaten Dharmasraya, sehingga diperkirakan penanaman bibit tersebut dapat melindungi sumber daya alam sekitar 2,1 Ha., selanjutnya di tahun 2023 kegiatan yang sama juga dilakukan untuk penambahan sebanyak 1 ha.

e. Meningkatnya luas tutupan lahan/Menurunnya lahan kritis

Luas tutupanlahan/menurunya lahan kritis di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.83.

Tabel 2-83 Meningkatnya luas tutupan lahan/ Menurunnya lahan kritis

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya luas tutupan lahan/ Menurunnya lahan kritis	Ha	4,8	6	2,1	1	1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Pada tahun 2021 kegiatan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pembagian bibit tanaman dalam upaya melindungai sumber daya alam di Kabupaten Dharmasraya. Sebanyak 235 batang tanaman seperti Durian, Sukun, Nangka serta Mangga deserahkan ke 12 wilayah Nagari yang tersebar di Kabupaten Dharmasraya, sehingga diperkirakan penanaman bibit tersebut dapat melindungi sumber daya alam sekitar 2,1 Ha.

Pengelolaan terhadap lahan kritis telah dilakukan dengan pengelolaan berupa pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Nagari Sungai Duo seluas 0,22 Ha. Selanjutnya dengan penanaman sebanyak 235 batang bibit buah yang tersebar 12 Nagari dikabupaten Dharmasraya juga telah mampu meningkatkan luas tutupan lahan sekitar 1,88 Ha. Sehingga pada tahun 2021 dinyatakan terjadi peningkatan luas tutupan lahan sebesar 2,1 Ha. Pada tahun 2022-2023 luas tutupan lahan/ Menurunnya lahan kritis yaitu 1 ha.

f. Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali)

Target pengelolaan sampah yang ingin dicapai dalam Jakstrada sebagaimana PERMEN LHK nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 pada tanggal 21 April 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dengan target 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025 (Indonesia Bersih Sampah) yang diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30%, dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025.

Berdasarkan kinerja Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Lingkungan Hidup maka kegiatan pengurangan sampah dari tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan hingga 15,35%. Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali) di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.84 dan Tabel 2.85.

Tabel 2-84 Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali)

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali)	Persen	8,31	8,92	11,34	15,09	15,35

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Tabel 2-85 Penanganan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota)

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Penanganan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota)	persen	56,01	61,75	78,71	79,65	80,48

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Untuk kinerja Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Lingkungan Hidup pada kegiatan penanganan sampah dari tahun 2019 hingga tahun 2023 juga terus mengalami peningkatan hingga lebih kurang 24,47%. Capaian tersebut telah melebihi target Jakstrada yang ditetapkan oleh KLHK hingga tahun 2025.

g. Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.86.

Tabel 2-86 Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	usaha/ kegiatan	25	29	14	20	20

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Mulai tahun 2023 telah dilaksanakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah sebanyak 20 usaha/kegiatan. Meliputi Perusahaan yang bergerak pada kegiatan industri Kelapa serta Rumah Sakit dan Puskesmas. Dimana 20 kegiatan sudah mentatati regulasi terkait pengelolaan limbah B3 sementara masih ada 4 kegiatan dengan status kurang taat. Sehingga cakupan ketaatan usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 pada tahun 2023 sebesar 100%.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Persentase kepemilikan KTP-el

Persentase kepemilikan KTP-el Tahun 2023 mencapai 95,56% dari target 100%. Pada tahun 2022, persentase kepemilikan KTP-el di Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar 97,63%. Dibandingkan dengan Realisasi Kinerja tahun 2022, capaian realisasi kinerja pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan persentase kepemilikan KTP-el. Karena banyaknya penduduk pemula (baru berusia 17 Tahun) yang tinggal tidak berdomisili di Kabupaten Dharmasraya. Untuk lebih jelasnya persentase kepemilikan KTP-el dapat dilihat pada tabel 2.87.

Tabel 2-87 Persentase kepemilikan KTP-elektronik

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase kepemilikan KTP-elektronik	persen	99,23	97,74	99,91	97,63	*95,56*
Kepemilikan KTP-el	orang	147.757	149.352	156.636	161.800	163.446
Wajib KTP-el (usia 17 tahun keatas)	orang	148.739	152.911	156.770	165.734	171.011

Sumber : Dinas Dukcapil, tahun 2024

Dilihat dari jumlah KTP yang diterbitkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun persentase kepemilikan KTP menunjukkan penurunn. Penurunan persentase kepemilikan KTP elektronik dari Tahun 2019-2023 yaitu 3,67%. Hal ini disebabkan oleh adanya keterlambatan kepengurusan dari penduduk yang seharusnya memiliki KTP belum mengurus KTP.

b. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Capaian Kinerja Kepemilikan KIA terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, persentase kepemilikan KIA di Kabupaten Dharmasraya hanya sebesar 27,40%, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 66,21%. Perkembangan persentase kepemilikan KIA di Kabupaten Dharmasraya tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.88.

Tabel 2-88 Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	persen	27,40	35,55	54,72	64,02	66,21
Jumlah anak memiliki KIA	orang	18.255	25.026	38.460	42.807	46.678
Jumlah Anak Usia 0-17 tahun	orang	66.610	69.398	70.282	66.864	70.504

Sumber : Dinas Dukcapil, Tahun 2024

Penerbitan KIA terlihat cukup meningkat dengan baik, hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KIA sebagai kartu identitas yang mesti dimiliki. Peningkatan ini terlihat setiap tahunnya, dimana di tahun 2023 menunjukkan capaian sebesar 66,21%.

c. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun

Akta Kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia. Dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia. Akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Untuk lebih jelasnya Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun dapat dilihat pada Tabel 2.89.

Tabel 2-89 Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun	persen	85,73	87,17	91,57	95,58	96,36
Jumlah Anak yang memiliki akta	Orang	61.103	65.506	68.803	68.041	71663
Jumlah Anak Usia 0-18 tahun	orang	71.274	75.062	75.135	71.190	74730

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Dharmasraya, tahun 2024

Penerbitan KIA terlihat cukup meningkat dengan baik, hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KIA sebagai kartu identitas yang mesti dimiliki. Peningkatan ini terlihat setiap tahunnya, dimana di tahun 2019 menunjukkan capaian sebesar 85,73%. Pada tahun 2023, persentase kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar 96,36%.

d. Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan

Akta kematian merupakan dokumen dalam pembuktian administrasi bahwasanya seseorang telah dinyatakan meninggal dunia. Selain untuk syarat pencairan asuransi dan mengurus penetapan ahli waris, pembuatan akta kematian juga dapat mencegah penyalahgunaan data almarhum, dan juga dapat membantu memastikan keakuratan data kependudukan. Selama tiga tahun berturut turut persentase cakupan akta kematian menunjukkan 100 persen. Untuk lebih jelasnya Persentase Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang diterbitkan dapat dilihat pada Tabel 2.90.

Tabel 2-90 Persentase Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang diterbitkan	persen	95,23	100	100	100	100
Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	dokumen	603	2.867	3.803	5.468	5.468
Jumlah Kematian yang dilaporkan	orang	655	2867	3.803	5.468	5.468

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Dharmasraya, tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2019 Persentase Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang diterbitkan sudah mencapai 95,23%. Dilihat pada tahun 2020-2023 Persentase Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang diterbitkan sudah mencapai 100%. Artinya jumlah kematian pada tahun tersebut sudah dilaporkan oleh keluarga dan sudah tercatat di Dinas Dukcapil Kab.upaten Dharmasraya

e. Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan

Buku nikah atau akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil adalah akta perkawinan apabila tidak diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Berdasarkan data perkembangan cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan tahun 2019-2023 sudah 100%. Untuk lebih jelasnya Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan dapat dilihat pada Tabel 2.91.

Tabel 2-91 Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	100	100	100	100	100
Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan	Orang	-	-	276	401	401
Jumlah Akta Perkawinan yang dilaporkan	Orang	-	-	276	401	401

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Dharmasraya, tahun 2024

f. Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan

Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan adalah pemanfaatan data dan dokumen hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui sistem informasi Administrasi Kependudukan kepada lembaga pengguna melalui pemberian hak akses oleh Menteri. Sejak tahun 2021-2023, pemanfaatan data kependudukan

sudah dilakukan melalui kerjasama antar pihak yang dapat menggunakan data kependudukan secara akurat dan bertanggung jawab. Untuk lebih jelasnya Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan dapat dilihat pada Tabel 2.92.

Tabel 2-92 Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah	0	0	4	11	16

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Dharmasraya, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan tahun 2021 hanya 4 lembaga, tahun 2022 sebanyak 11 lembaga dan tahun 2023 yaitu 16 lembaga.

g. Jumlah Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan

Berdasarkan data diperoleh bahwa dari banyaknya Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Dharmasraya semuanya memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan. Tahun 2021 sebanyak 4 lembaga, tahun 2022 sebanyak 11 lembaga dan tahun 2023 sebanyak 16 lembaga. Untuk lebih jelasnya Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan dapat dilihat pada tabel 2.93.

Tabel 2-93 Jumlah Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan	Jumlah	0	0	4	11	16

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Dharmasraya, Tahun 2024

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

a. Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM

RPJM Nagari adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan RKP Nagari sebagai penjabaran dari RPJM Nagari berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Untuk lebih jelasnya persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM dapat dilihat pada tabel 2.94.

Tabel 2-94 Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM

Indikator	Satuan	2021	2022	**2023**
Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM	Persen	19,23	30,77	82,69
Jumlah nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM	Jumlah	10	16	43
Jumlah nagari	Jumlah	52	52	52

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi indikator ini, Persentase Nagari yang Sudah Menyusun RPJM/RKP Nagari Berbasis IDM tahun 2021 sebesar 19,23% (10 dari 52 Nagari) dan naik menjadi 30,77% (16 dari 52 nagari) pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 naik menjadi 82,69% (43 dari 52 nagari), meski terjadi kenaikan pada realisasi kinerja, namun capaian kinerja mengalami penurunan. penurunan capaian kinerja ini terjadi karena adanya peningkatan yang cukup besar terhadap kinerja dari tahun ke tahun, selain itu juga dikarenakan perubahan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. jika dibandingkan dengan target akhir pada RENSTRA yaitu sebesar 100%, maka capaian untuk tahun 2023 terhadap target akhir RENSTRA adalah sebesar 82,69%. Target akhir periode RENSTRA untuk indikator ini adalah semua nagari telah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM, untuk tahun 2023 sudah ada 43 nagari yang menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM dari 52 nagari yang ada.

b. Persentase APB nagari berbasis IDM

Persentase APB nagari berbasis IDM merupakan persentase Nagari Yang sudah Menyusun APB Nagari Berdasarkan IDM. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat Nagari. Untuk lebih jelasnya persentase APB nagari berbasis IDM dapat dilihat pada tabel 2.94.

Tabel 2-95 Persentase APB nagari berbasis IDM

Indikator	Satuan	2021	2022	**2023**
Persentase APB nagari berbasis IDM	Persen	7,69	5,76	82,69
Jumlah APB nagari berbasis IDM	Jumlah	4	3	43
Jumlah nagari	jumlah	52	52	52

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2024

Pada tabel diatas tersaji capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, tahun 2021 Persentase APB Nagari Berbasis IDM adalah 7,69% (4 nagari). Pada tahun 2022 naik menjadi 11,53% (6 Nagari). Untuk tahun 2023 realisasinya menjadi 82,69% (43 nagari). Jika dibandingkan dengan target masa akhir RENSTRA yaitu 100%, capaian indikator sudah tercapai 82,69%, yang berarti sudah ada 43 nagari

yang menyusun RKP nagari berbasis IDM, meski masih ada kekurangan capaian sebesar 17,31%, diharapkan dengan adanya program, kegiatan serta anggaran yang mendukung target masa akhir RENSTRA bisa terpenuhi

c. Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online

Keuangan Nagari berbasis Siskeudes Online sudah diterapkan pada tahun 2022 setelah sebelumnya di tahun 2021 masih pada tahap sosialisasi dan percobaan.Kedepan diharapkan seluruh nagari sudah menerapkan Sistem keuangan nagari berbasis Siskeudes Online. Untuk lebih jelasnya Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online dapat dilihat pada tabel 2.94.

Tabel 2-96 Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online

Indikator	Satuan	2022	2023
Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online	Persen	57,69	100
Jumlah Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online	Jumlah	30	52
Jumlah nagari	jumlah	52	52

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2024

Pada tabel diatas terlihat capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, tahun 2021 capaian sebesar 0%, target untuk tahun 2021 adalah 50% (26 nagari) dengan realiasi 0%. Hal ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan belum maksimalnya pelatihan terhadap aparatur nagari terkait dengan penggunaan aplikasi Siskeudes. Selain itu, pandemi COVID-19 juga menyebabkan kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan karena penggunaan dana desa difokuskan kepada penanganan COVID-19. Pada tahun 2022 capaian indikator ini sebesar 173% dengan target 57,69% (30 Nagari) sedangkan realisasinya adalah 100% (52 Nagari). Capaian untuk tahun 2023 sebesar 100%, target untuk tahun ini adalah 100% (52 nagari) dengan realisasi 100% (52 nagari)

d. Persentase nagari memiliki bumnag berkembang

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah lembaga usaha nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah nagari dalam upaya memperkuat perekonomian nagari dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi nagari. BUMNag berkembang merupakan tingkat klasifikasi bagi BUMNag yang telah melewati tahap tumbuh. Untuk lebih jelasnya Persentase nagari memiliki BUMNAG berkembang dapat dilihat pada Tabel 2.97.

Tabel 2-97 Persentase Nagari Memiliki BUMNag Berkembang

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase nagari memiliki BUMNAG berkembang	Persen	19,23	21,15	26,92	21,15	34,61

Jumlah nagari memiliki BUMNAG berkembang	bumnag	10	11	14	12	18
Jumlah nagari	Nagari	52	52	52	52	52

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2024

Pada tabel di atas terlihat bahwa perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2021 capaian kinerja indikator ini adalah 116%, target tahun 2021 adalah 23,08% atau 12 nagari memiliki Bumnag berkembang, sedangkan realisasinya adalah 26,92% atau sudah 14 nagari memiliki bumnag berkembang. Pada tahun 2022 capaianya adalah 131% dengan target 25% atau 13 nagari memiliki bumnag berkembang sedangkan untuk realisasinya adalah 32,69% atau 17 nagari yang sudah memiliki Bumnag berkembang. Pada tahun 2023 capaiannya adalah 100% dengan target kinerja 34,62% atau 18 nagari memiliki bumnag berkembang sedangkan untuk realisasinya adalah 34,62% atau 18 nagari sudah memiliki bumnag berkembang

e. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan

Lembaga kemasyarakatan nagari yang telah mempunyai peran aktif dalam pembangunan nagari. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 (PP No. 72/2005) tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 (Permendagri No. 18/2018) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.98.

Tabel 2-98 Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	persen	84	86	100	100
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	Lembaga	311	320	370	370
Jumlah LKN	lembaga	370	370	370	370

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat perbandingan capaian indikator kinerja persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang aktif dalam pembangunan, pada tahun 2021 capaian dari indikator ini adalah 116, dari target 318 LKN realisasinya adalah 370 kemudian pada tahun 2022 capaiannya adalah 114%, dari target 326 LKN realisasinya adalah 370 dan pada tahun 2023 capaian yang diperoleh adalah 111%, dari target 333 LKN realisasinya adalah 370 LKN.

.

f. Jumlah Bumnag Bersama

Badan Usaha Milik Nagari Bersama (BUMNag Bersama) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari. Jumlah BUMNag berdama di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.99.

Tabel 2-99 Jumlah Bumnag Bersama

Indikator	Satuan	2021	2022	2023
Jumlah Bumnag Bersama	jumlah	0	5	6

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2024

Sampai tahun 2021 belum ada BUMNag bersama yang terbentuk di Kabupaten Dharmasraya. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang mengamanatkan pengalihan status UPK eks-PNPM menjadi BUMNag Bersama, maka hal tersebut menjadi angin segar bagi daerah mengenai status kewenangan UPK-eks-PNPM yang tidak jelas sejak berakhirnya program PNPM tahun 2014. Sehingga di tahun 2023 sudah terbentuk 6 (enam) Bumnag Bersama di Kabupaten Dharmasraya..

g. Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga

Kerjasama antar nagari dimaksudkan untuk kepentingan nagari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar nagari, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Kerjasama nagari juga dapat dilakukan dengan pihak ketiga sepanjang menyangkut kepentingan nagari dan bermanfaat bagi nagari. Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga Tahun2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.100.

Tabel 2-100 Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga	jumlah	2	3	4	5	4

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2024

Pada tahun 2019 s.d. 2023 terdapat kenaikan jumlah kerjasama nagari hingga terdapat 4 kerjasama nagari dengan pihak ketiga. Kerjasama ini dilakukan oleh nagari dengan empat Universitas yang ada di Sumatera Barat dalam program Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa maupun Pengabdian Masyarakat. Dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terdapat beberapa permasalahan yang ditemui. Antara lain:

- Belum semua nagari yang menyusun APB, RPJM/RKP Nagari berbasis IDM. Hal tersebut terjadi karena penyusunan berbasis IDM merupakan hal yang baru dan belum semua nagari memahami pelaksanaannya.
- Belum optimalnya pengelolaan BUMNag sehingga sulit berkembang untuk bersaing dalam pasar kompetitif.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Angka kelahiran total

Angka Kelahiran Total (TFR) adalah Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. TFR digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi). Angka kelahiran total di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.101.

Tabel 2-101 Angka kelahiran total

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Angka kelahiran total	PER 1.000 penduduk	2,64	2,62	2,6	-	-

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2024

b. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)

Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR) di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.102.

Tabel 2-102 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	Persen	81,25	81,3	83,43	80,60	70,19

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2024

Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR) dari tahun 2019 s.d. 2021 cenderung mengalami peningkatan. Namun di tahun 2022-2023 terjadi penurunan menjadi 70,19 persen.

c. Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)

Unmet Need diterjemahkan sebagai kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi atau dengan kata lain kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15 sampai 49 tahun untuk ber-KB tetapi tidak terpenuhi atau PUS tidak menggunakan kontrasepsi. Tingginya angka unmet need berpeluang terhadap meningkatnya peluang angka kematian ibu, terutama pada kehamilan yang tidak diinginkan. Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need) di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.103.

Tabel 2-103 Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	%	10,23	10,21	8,17	20,76	12,53
Peserta KB Aktif	Orang	-	-	-	7.374	
Jumlah pasangan usia Subur (PUS)	orang	-	-	-	35.525	

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2024

Dilihat dari kondisi terkahir tahun 2023, terlihat adanya peningkatan realisasi unmet need menjadi 12,53 persen atau lebih rendahi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun mengalami penurunan, masih perlu usaha untuk menekan angka ini untuk mencegah atau menekan terjadinya kematian ibu melahirkan.

d. persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif

UPPKS merupakan kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan Keluarga Sejahtera, baik Pasangan Usia Subur yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan.

Persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif di Kabbupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.104.

Tabel 2-104 persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2024

e. persentase kelompok tribina yang aktif

Tribina merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh BKKBN dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan pembinaan keluarga, yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan di dalam keluarga. Tri Bina memiliki tujuan khusus untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan orangtua maupun anggota keluarga lainnya dalam membina balita maupun remaja. Untuk balita berhubungan dengan pola asuh balita, perkembangan fisik atau tumbuh kembang balita, kemampuan motorik. Sedangkan untuk remaja mengenai cara efektif berinteraksi dengan remaja, bimbingan kepada anak remaja, dan lain-lain. Selain itu, Tri Bina juga mengedepankan kesejahteraan lansia agar tetap memiliki produktifitas yang baik di lingkungan keluarga dan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, Tri Bina dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya adalah BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia). persentase kelompok tribina yang aktif di Kabpaten Dharmasraya dari Tahun 2019-2023 adalah 100%. Untuk lebihjelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.105.

Tabel 2-105 persentase kelompok tribina yang aktif

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
persentase kelompok tribina yang aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2024

Persentase kelompok tribina yang aktif pada tahun 2022 dan 2023 mencapai 100%. ini disebabkan adanya pembinaan yang terpadu dan sosialisasi yang Continue ke setiap wilayah kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) di Kabupaten Dharmasraya dengan melalui pelatihan-pelatihan ke kelompok Tribina yang ada (BKB, BKR, BKL).

Pada tahun 2022 dan 2023 Pesentase Tribina yang Aktif adalah 100 % dengan capaian realisasi 100%. Dimana kelompok tribina itu adalah BKB (Bina Kelompok Balita), BKR (Bina Kelompok Remaja) dan BKL (Bina Kelompok Lansia). Kelompok BKB Merupakan upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina keluarga balita. BKR merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalau komunikasi defektif anatas orang tua dan anak remaja. Sedangkan BKL merupakan kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pangasuhan, perawatan, dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahetraannya.

Dari 237 kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) telah dilakukan sosialisasi dan Pembinaan di setiap Kelompok dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada keluarga untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan terhadap anak balita, remaja serta memberdayakan lansia yang ada pada keluarga.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

a. jumlah penambahan trayek angkutan umum

Penambahan Trayek Angkutan Umum adalah Penambahan lintasan kendaraan umum atau trayek untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap,lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak tetap.

Trayek angkutan umum yang ada di Kabupaten Dharmasraya hanya trayek angkutan umum Damri pada jalur Pasar Ampalu-Pulau Punjung dan Sungai Rumbai–Pulau Punjung. Sejak tahun 2019-2023 jumlah trayek angkutan umum hanya 1 trayek, atau tidak ada penambahan trayek angkutan umum. Masih kurangnya trayek ini disebabkan oleh mayoritas masyrakat Dharmasraya banyak menggunakan kendaraan pribadi, sehingga masih tingginya angka kecelakaan dikalangan pelajar dan usia muda. Jumlah trayek angkutan umum di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.106.

Tabel 2-106 Jumlah penambahan trayek angkutan umum

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penambahan trayek angkutan umum	izin	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2024

b. persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR

KIR merupakan kumpulan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di

jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang.

Berdasarkan data Persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR dari tahun 2018-2022 menunjukan angka berfluaktif. Pada tahun 2018, persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR mencapai 94% dan pada tahun 2021 sebanyak 65,50%. Dan di tahun 2022 kembali naik menjadi 77,82% dan tahun 2023 mencapai 86,5%. Lebih jelasnya persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR dapat dilihat pada Tabel 107 :

Tabel 2-107 Persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR	Persen (%)	72	102	65,50	77,82	86,5

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2024

Dengan tidak dipungut lagi retribusi atas uji KIR, maka ke depan diharapkan lebih banyak lagi kendaraan yang mematuhi dalam melakukan uji KIR kendaraannya.

c. akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)

Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.

Berdasarkan data akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) di Kabupaten Dharmasraya sejak tahun 2019 adalah C artinya masih kurangnya sarana dan prasarana Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Sedangkan pada tahun 2020-2022 meningkat menjadi akreditasi B, Pada tahun 2023 meningkat menjadi kareditasi A. Hal ini dikarenakan adanya penambahan alat untuk Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Untuk lebih jelasnya Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Thaun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 108.

Tabel 2-108 kreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	Nilai	C	B	B	B	A

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2024

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

a. Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi

Telekomunikasi terintegrasi adalah sistem transmisi informasi dari point-to-point atau point-to-multipoint melalui jarak. Aspek kunci yang membedakan sistem telekomunikasi terintegrasi dari sistem lain adalah konsep penggunaan berbagai format. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintah diperlukan sarana telekomunikasi terintegrasi. Sasaran dari telekomunikasi terintegaris ini uaitu Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk lebih jelasnya persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi dapat dilihat pada Tabel 2.109.

Tabel 2-109 Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Berdasarkan data, persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2019-2023 sudahmemiliki jaringan terintegrasit. Meskipun sudah memiliki jaringan terintegrasi, namun jaringan pada beberapa OPD tidak aktif karena prasarana Terminal Gunung Medan mengalami kerusakan dan kekuatan jaringan yang diberikan kepada OPD masih lemah karena memakai sistem radio dan tidak memakai sitem fiber optik.

b. Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Dharmasraya mulai dari OPD sampai ke nagari. Model aplikasi yang dikembangkan baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan baik yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilayani mandiri oleh OPD. Lebih jelasnya Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilihat pada Tabel 2.110.

Tabel 2-110 Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	%	94,74	100	100	100	100
Persentase nagari yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan	%	100	100	100	100	100
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat Nagari	%	21	21	21	21	21

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Berdasarkan data capaian persentase jumlah OPD yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 sudah semua OPD yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan dan mulai tahun 2020 sudah seluruh OPD yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan. Begitu juga di tingkat nagari, persentase nagari yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan meningkat.

c. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.111.

Tabel 2-111 Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	70.73	68,78	100	-
Jumlah Sasaran	Orang	152.911	152.911	-	-
Jumlah Penduduk	Orang	216.202	226.265	228.801	237.724

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Berdasarkan data terlihat bahwa persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2020 sebanyak 70,73% dan menurun pada tahun 2021 sebanyak 68,78%. Berdasarkan data terjadi penurunan akibat dari penggunaan data jumlah penduduk sasaran tahun 2020 dan tahun 2021 sama sementara jumlah penduduk mengalami peningkatan. Dan di tahun 2022 sudah semua masyakat dapat mengakses informasi publik.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. persentase Koperasi Sehat

Penilaian kesehatan koperasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kinerja koperasi dalam melakukan kegiatan usaha simpan pinjam berdasarkan jati diri koperasi. Penilaian ini dilakukan terhadap KSP/USP aktif. Dalam perkembangannya predikat sehat untuk usaha simpan pinjam koperasi sangat penting karena mengindikasikan bahwa koperasi tersebut telah memiliki sistem manajemen yang baik. Perkembangan jumlah koperasi sehat di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.112.

Tabel 2-112 Jumlah Koperasi Sehat

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Koperasi Sehat	Koperasi	25	30	33,3	47,77	59,70

Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase koperasi sehat pada tahun 2023 sebesar 59,70% hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang hanya sebesar 44,77%. Pada tahun 2023 jumlah koperasi yang tergolong sehat berjumlah 40 koperasi merupakan hasil peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 10 koperasi dari 67 koperasi yang ada di Dharmasraya. Hal ini bisa tercapai juga karena adanya pembinaan dan pengawasan serta kontribusi tenaga pendamping koperasi dari DAK non fisik dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Salah satu indikator penilaian kesehatan simpan pinjam koperasi adalah manajemen dari koperasi tersebut. Untuk meningkatkan kualitas manajemen dan kesehatan koperasi, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan Penilaian Kesehatan Koperai Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi, Capaian yang tergolong sangat berhasil ini tidak terlepas dari adanya bantuan dana dari Kementerian Koperasi RI melalui alokasi DAK Non Fisik Tahun 2023. Namun dalam pencapaian indikator ini masih terdapat faktor penghambat, yaitu kurangnya SDM dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya untuk melaksanakan penilaian koperasi.

b. Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

Pelaku usaha mikro yang menjadi wirausaha diartikan sebagai usaha mikro yang sudah naik kelas sesuai kriteria. Gerakan UMKM naik kelas merupakan salah satu akselerasi yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam membangun daya saing UMKM. Pemerintah mendorong peningkatan daya saing UMKM, mengembangkan dan memperkuat seluruh potensi UMKM agar bisa terus berkembang dan naik kelas. Jumlah pelaku usaha makro menjadi wiraswasta di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.113.

Tabel 2-113 Jumlah pelaku usaha mikro menjadi wirausaha

Indikator	Satuan	2022	2023
Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	persen	41,5	58,55
Jumlah UMKM yang menjadi wirausaha	unit	631	900
Jumlah UMKM	unit	1537	1537

Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2024

Pada tabel terlihat realisasi Persentase usaha mikro yang menjadi wirusaha pada tahun 2022 adalah 41,05% Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 58,55 %, Beberapa indikator UMKM naik kelas diantaranya, usahanya menjadi formal, total penjualan dan aset meningkat. Dalam hal ini kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah pembinaan terhadap pelaku usaha mikro dan dorongan menjadikan pelaku usaha mikro bisa naik menjadi usaha kecil. Pada tahun 2023, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya menargetkan persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha sebesar 50 % pelaku usaha dan saat ini telah terealisasi sebesar 58,55 %

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

a. Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal

Nilai realisasi investasi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 sebesar Rp. 160.860.163.587 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Dilihat pada tahun 2021 sampai 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Lebih jelasnya perkembangan nilai realisasi investasi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.114.

Tabel 2-114 Nilai realisasi Investasi

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai realisasi Investasi	rupiah	160.860.163.587	148.462.000.000	196.395.700.000	423.750.000.000	1.126,000.000.000

Sumber : Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Tahun 2024

Realisasi Investasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Namun terkait dengan permasalahan Pandemi Covid-19 maka investasi juga mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 hingga tahun 2022 nilai investasi kembali meningkat. Nilai realisasi investasi pada tahun 2023 dengan target Rp. 555 M terealisasi Rp. 1.126 Triliun dengan kategori cukup berhasil. Sedangkan pada tahun 2022 nilai realisasi investasi dengan target Rp. 163.308 M terealisasi Rp. 423.750 M dengan kategori sangat berhasil.

b. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal

Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 mengalami kenaikan yang cukup pesat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.115.

Tabel 2-115 Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal	persen	0,07	0,32	1,96	4,24	66,9

Sumber : Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Tahun 2024

Pertumbuhan realisasi investasi penanaman modal tertinggi tercatat di tahun 2019 mengalami peningkatan di tahun 2020. Kondisi tersebut juga terkait dengan Pandemi Covid-19. Dan ditahun 2022 pertubuhannya kembali baik menjadi 4,24 persen, begitu juga pada tahun 2023 meningkat sebesar 66,9%.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

a. Jumlah cabang olahraga yang aktif

Jumlah Cabang Olahraga yang Aktif Bisa Tercapai adalah Jumlah Cabang Olahraga yang terlaksana dan secara aktif dan diikuti oleh para atlet. Kabupaten Dharmasraya memiliki beberapa cabang olahraga yang aktif seperti paralayang, karate, volly dan beberapa cabor lainnya secara umum sudah berkembang dan mampu memperkenalkan Dharmasraya ke luar daerah. Jumlah cabang olah raga yang aktif di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.116.

Tabel 2-116 Jumlah cabang olahraga yang aktif

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah cabang olahraga yang aktif	30	32	33	33	35	25

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilhat bahwa pada tahun 2019 s.d. 2022 jumlah cabang olahraga yang aktif terus meningkat. Dari 30 buah pada tahun 2019 sampai menajadi 35 cabang olah raga di tahun 2022. Pada tahun 2023 jumlah cabang olah raga yang aktif hanya 25 cabang.

b. Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selalu mendukung pencapaian prestasi olahraga di tingkat provinsi. Dukungan tersebut berupa pengiriman atlet-atlet terbaik untuk mengikuti pertandingan olahraga tingkat Provinsi Sumatera Barat Jumlah

cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.117.

Tabel 2-117 Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi	cabang	-	-	6	21	15

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2024

Pada tahun 2019 s.d. 2020 tidak ada prestasi yang didapat dari cabang olahraga tingkat Provinsi yang diikuti. Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya selalu berupaya membina atlet-atlet daerah untuk dapat bersaing ke depannya di tingkat provinsi.

c. Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional

Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional adalah Jumlah cabang olahraga yang diikuti , berprestasi di tingkat nasional mendapatkan medali (emas, perak, perunggu).. Kabupaten Dharmasraya mengirimkan atlet untuk cabang olah raga yang berprestasi di tingkat nasional tahun 2023 sebanyak 4 cabang olah raga.. Angka ini menurun dari tahun 2022, dimana Kabupaten Dharmasray mengikuti 7 cabang olah raga berprestasi tingkat nasional.. Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional pada tahun 2023 sebanyak 4 cabang olahraga dari target tersebut terealisasi seanyak 4 cabor atau sebesar 100 % dimana cabor yang berprestasi tersebut adalang cabang olahraga taekwondo, cabang gulat, cabang olahrag volley dan tabang olahrag aerosport dan paralayang
Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.118.

Tabel 2-118 Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional	cabang	-	-	3	7	4

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2024

d. Jumlah organisasi pemuda yang aktif

Jumlah organisasi pemuda yang aktif adalah Jumlah organisasi pemuda yang aktif berkegiatan di Kabupaten Dharmasraya. Jumlah organisasi pemuda yang aktif tahun 2023 sebanyak 236 organisasi, sementara pada tahun 2022 berjumlah 245

organisasi. Jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kabapaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.119.

Tabel 2-119 Jumlah organisasi pemuda yang aktif

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah organisasi pemuda yang aktif	organisasi	0	0	108	246	236

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2024

Pada tabel diatas dapat kita lihat capaian indikator Jumlah organisasi pemuda yang aktif, pada tahun 2019, 2020, kondisinya masih 0 (nol), sementara capaian kinerja pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan 246 organisasi dan pada tahun 2023 capaian indikator kinerja mengalami mengalami penurunan 236. Dalam hal ini adanya organisasi pemuda yang tidak aktif sebanyak 10 organisasi..

e. Jumlah pemuda dan kepemudaan berprestasi

Jumlah Pemuda/kepemudaan yang berprestasi adalah Jumlah pemuda/kepemudaan yang mendapatkan prestasi dalam mengikuti ajang kepemudaan. Jumlah pemuda dan kepemudaan berprestasi di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.120.

Tabel 2-120 Jumlah pemuda dan kepemudaan berprestasi

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pemuda dan kepemudaan berprestasi	orang	0	0	19	25	30

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2024

Pada Tabel diatas dapat kita lihat capaian indikator Jumlah Pemuda/kepemudaan yang berprestasi pada tahun 2019, 2020, kondisinya masih 0 (nol) dan capaian kinerja pada tahun 2021 sebanyak 19 orang jika dibandingkan dengan tahun 2022, 2023 mengalami kenaikan.

f. Jumlah organisasi pramuka yang aktif

Jumlah organisasi pramuka yang Aktif adalah Jumlah organisasi pramuka yang aktif berkegiatan di Kabupaten Dharmasraya. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana dan merupakan organisasi atau gerakan kepanduan. . Pramuka adalah sebuah organisasi yang merupakan wadah proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Jumlah organisasi pramuka yang aktif di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.121.

Tabel 2-121 Jumlah organisasi pramuka yang aktif

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah organisasi pramuka yang aktif	organisasi	30	30	30	210	210

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2024

Pada Tabel diatas dapat kita lihat capaian indikator Jumlah organisasi pramuka yang aktif pada tahun 2019, 2020,2021 kondisinya masih 0 (nol) dan capaian kinerja pada tahun 2022 sebanyak 210 orang dan pada tahun 2023 sebanyak 210 orang, capaian kinerja ini dari tahun 2022 ke tahun 2023 masih tetap.

g. Jumlah pelatih bersertifikat

Pelatih Bersertifikat adalah Jumlah pelatih yang telah mengikuti pelatihan memiliki bersertifikat. Pelatih ialah seseorang yang bertugas untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan. Jumlah pelatih bersertifikat di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.122.

Tabel 2-122 Jumlah pelatih bersertifikat

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pelatih bersertifikat	orang	0	0	0	18	20

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2024

Tahun 2023 target pelatih bersertifikat sebanyak 20 orang dapat terealisasi sebesar 100%, sertikat kepelatihan dimaksud dimelalui beberapa pelatihandi berbagai cabor missal nya sertikat kepelatihan sepak bola senayak 10 orang dari berbagai tingkat license ada C dan D, kedua sertikat pelatih taekwondo sebanyak 1 orang dan sisa adalah pelatih renang

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

a. Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data berperan penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah. Perkembangan dari indikator urusan pemerintahan bidang statistic berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, secara umum dapat dikatakan sudah memenuhi standar pelayanan umum daerah, hal ini tercermin dari tersedianya Buku Dharmasraya Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Dharmasraya setiap tahunnya dari tahun 2021-2024.

Perkembangan Buku Sumbar Dalam Angka dan Buku PDRB masih dilaksanakan oleh BPS, karena sesuai dengan Peraturan Presiden no.39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan Permendagri nomor 70/2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada dua Peraturan itu dinyatakan kalau OPD yang menangani Statistik sektoral sebagai wali data. Selain itu, berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026. Secara umum dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah dan melakukan evaluasi pembangunan daerah.

Untuk lebih jelasnya persentase ketersediaan data statistik sektoral dapat dilihat pada tabel 2.123 :

Tabel 2-123 Persentase ketersediaan data Statistik sektoral

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase ketersediaan data Statistik sektoral	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa persentase ketersediaan data Statistik sektoral dari tahun 2019-2023 sudah menunjukkan kinerja 100%.

b. Jumlah Nagari Statistik

Nagari statistik yaitu nagari yang mengembangkan basis data secara statistik. Launching Nagari Statistik pertama di Kabupaten Dharmasraya yaitu pada tahun 2018 di Nagari Sungai Duo dan tahun 2020 mulai dikembangkan ke Nagari Gunung Medan, Nagari Sitiung dan Nagari Siguntur. Jumlah nagari statistik di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.124.

Tabel 2-124 Jumlah Nagari Statistik

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Nagari Statistik	nagari	4	4	4	4	4

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Permasalahan yang dihadapi sampai saat ini dengan adanya nagari statistik yaitu masih terbatasnya kemampuan sumberdaya pengelola di nagari sehingga kegiatan ini tidak berjalan maksimal dan Level pengambil kebijakan nagari yg dipilih tidak mengerti sementara kegiatan ini merupakan pilot project nasional.

c. Jumlah Kecamatan Statistik

Kecamatan statistik yaitu kecamatan yang mengembangkan basis data secara statistik. Pengembangan Kecamatan Statistik dimulai tahun 2020 di Kecamatan

Sitiung, namun belum dilakukan launching sampai saat ini. Jumlah kecamatan statistik di KabupatenDharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.125.

Tabel 2-125 Jumlah Kecamatan Statistik

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kecamatan Statistik	kecamatan	-	-	1	1	1

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Jumlah kecamatan statistik sampai saat ini baru 1 kecamatan yaitu Kecamatan Sitiung. Dalam pelaksanaannya permasalahan yang dihadapi sampai saat ini yaitu masih terbatasnya kemampuan sumberdaya pengelola di nagari sehingga kegiatan ini tidak berjalan optimal.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

a. Aplikasi yang dilakukan asesment

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini merupakan hal yang amat penting di era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (e-office), perencanaan (e-planning), keuangan (e-budgetting), dan fungsi pemerintahan lainnya. Pemberdayaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko diantaranya penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. hadirnya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi penting. Aplikasi yang dilakukan asesment di Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.126.

Tabel 2-126 Aplikasi yang dilakukan asesment

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Aplikasi yang dilakukan asesment	Unit	4	4	4	0	-

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Aplikasi yang dilakukan asesment di Kabupaten Dharamsraya baru sebanyak 4 unit. Assesment dilakukan dengan Badan Saiber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2018 yaitu website utama dan seluruh website OPD, Website server, Aplikasi LPSE dan Aplikasi PPID, tahun 2018 sampai 2022 belum dilakukan penambahan assessment. Permasalahan saat ini yaitu masih menimnya sumberdaya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang persandian.

b. Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital

Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.127.

Tabel 2-127 Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	persen	0	5,26	5,26	5,26	-
Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	OPD	-	2	2	2	-
Jumlah Perangkat Daerah	OPD	38	38	38	38	-

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa persentase perangkat daerah yang menggunakan sertifikat digital tahun 2020 hingga tahun 2022 masih terdapat 2 (dua) OPD yang menggunakan sertifikat digital.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

a. Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan

Jumlah group kesenian daerah yang dibina adalah Jumlah group/ sanggar seni daerah dibawah binaan Disbudparpora Kab.Dharmasraya. Group Kesenian adalah kumpulan seniman atau pelaku seni yang tergabung dalam sebuah organisasi dan mendapat legalitas baik formal maupun non formal. Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.128.

Tabel 2-128 Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan	Grup	30	30	30	30	38

Sumber, Dinas Budparpora, Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian indikator kinerja Jumlah group kesenian daerah yang dibina dari tahun 2019 s/d 2020 belum ada dilakukan pembinaan dan pada tahun 2021, tahun 2202 capaian kinerja dari indicator ini sebesar 30 grup yang dilakukan pembinaan, dan dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami kenaikan, Grup Kesenian Daerah yang telah terdaftar di Dinas Budparpora telah dilakukan pembinaan dan pelatihan oleh Dinas, sehingga ilmu yang didapatkannya dapet menunjang kegiatannya dilapangan Secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan sampai tahun 2023 sebanyak 38 group.

b. Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan

Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan adalah Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan dan dibawah pengawasan Disbudparpora. Jenis Kesenian adalah macam-macan kesenian yang tergabung dalam sebuah organisasi dan mendapat legalitas baik formal maupun non formal. Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.129.

Tabel 2-129 Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan	jenis	30	30	30	14	16

Sumber, Dinas Budparpora, Tahun 2024

Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan adalah jumlah jenis kesenian atau Sanggar kesenian yang terdaftar didaerah yang mendapat binaan dari Dinas terkait dengan tujuan untuk dilestarikan. Pelestarian ini berupa mengikutsertakan dalam penampilan hari besar Daerah seperti Hari Ulang Tahun Kabupaten, Memperingati 17 Agustus dan agenda – agenda pemerintah daerah seperti pisah sambut dan peresmian serta penyambutan tamu daerah. Secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa jumlah kesenian daerah yang dilestarikan sampai tahun 2023 sebanyak 16 jenis.

c. Persentase lembaga adat yang aktif

Persentase lembaga adat yang aktif adalah Tingkat lembaga adat yang aktif melaksanakan kegiatan. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya yang berada di wilayah kabupaten Dharmasraya. Lembaga Adat mempunyai tugas membina, melestarikan dan melindungi budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan. Perkembangan lembaga adat yang aktif di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.130.

Tabel 2-130 Persentase lembaga adat yang aktif

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase lembaga adat yang aktif	Persen	90	100	100	80	85

Sumber, Dinas Budparpora, Tahun 2024

Kemudian, lembaga adat yang aktif juga mengalami peningkatan dari 85% tahun 2018 menjadi 100% pada tahun 2021, namun di tahun 2023 turun menjadi 85 persen. Presentase Lembaga Adat yang Aktif dalam kegiatanny adalah :

1. Melakukan Pembinaan dan memberikan Insentif terhadap Rajo. KAN dan Penghulu Suku yang telah masuk dalam Surat Keputusan Bupati setiap Tahunnya.

2. Melakukan Renovasi dan Pembangunan Rumah Adat penghulu Suku sesuai dengan Anggaran yang tersedia.
3. Melakukan pembinaan terhadap Bundo Kanduang Kabupaten, Bundo Kanduang Kecamatan dan Nagari dengan mengadakan Sosialisasi dan Lomba Sumbang Duo Baleh Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

d. Jumlah cagar budaya yang ditetapkan

Jumlah cagar budaya yang ditetapkan adalah Jumlah cagar budaya yang ditetapkan milik daerah. Cagar Budaya adalah warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama. Jumlah cagar budaya yang ditetapkan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.131.

Tabel 2-131 Jumlah cagar budaya yang ditetapkan

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	unit	0	35	21	45	3

Sumber, Dinas Budparpora, Tahun 2024

Cagar Budaya yang telah dilakukan pendaftaran dan pengkajian oleh BPK Wilayah III Propinsi Sumatera Barat, berjumlah 176 Unit, dimana Dinas Budparpora yang bekerja sama dengan Tim Ahli Cagar Budaya sampai dengan Tahun 2023 telah menetapkan 104 Unit jadi cagar Budaya Kabupaten Dharmasraya, sehingga yang belum di tetapkan sebanyak 72 Unit. Cagar Budaya yang ada di Dharamsraya sudah di tetapkan 2 Tingkat Propinsi dan 1 Tingkat Nasional yaitu Candi Pulau Sawah.

e. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan

Jumlah cagar budaya yang dilestarikan adalah Jumlah cagar budaya yang terdaftar dan dilestarikan dibawah pengawasan Disbudparpora. Maksud dilestarikan adalah dijaga kelangsungannya. Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebanyak 102 Unit tersebut, telah dilakukan pelestarian oleh Dinas Budparpora dengan cara Renovasi dan pembersihan lainnya. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.132.

Tabel 2-132 Jumlah cagar budaya yang dilestarikan

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	jenis	10	37	56	101	102

Sumber: Dinas Budparpora, Tahun 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah cagar budaya yang dilestarikan terus meningkat dari tahun 2019 sebanyak 10 unit dan sampai tahun 2023 sudah berjumlah 102 unit

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peranan strategis untuk turut mendukung peningkatan kecerdasan masyarakat. Selain kunjungan ke perpustakaan daerah, juga dilakukan layanan kunjungan pustaka keliling ke sekolah, nagari, dan Taman Bacaan Masyarakat. Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan dan perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 – 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan

Jumlah pemustaka mengalami peningkatan cukup tinggi karena pada tahun 2018 kunjungan Pustaka Keliling sudah sampai ke sekolah-sekolah, nagari, dan Taman Bacaan Masyarakat. Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan karena pandemi Covid-19, dan muai tahun 2021 kembali meingkat sesuai dengan sudah berkurangnya dampak covid19. Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.133.

Tabel 2-133 Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	orang	157.579	67.742	202.273	152.286	**156.300**

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tahun 2024

b. Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan

Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan merupakan perbandingan antara Jumlah perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan terhadap Jumlah perpustakaan seluruhnya. Dilihat dari tahun 2020-2023, persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan terus mengalami peningkatan, sehingga pada tahun2 023 telah mencapai 44,57%. Untuk lebih jelasnya perkembangan persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.134:

Tabel 2-134 Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	Persen	8,09	6,25	9,19	38,68	44,57
Jumlah perpustakaan yang melaksanakan	Perpustakaan	22	17	25	105	121

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
manajemen perpustakaan						
Jumlah perpustakaan seluruhnya	Perpustakaan	272	272	272	272	272

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tahun 2024

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Pengelolan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Perkembangan pengelolaan arsip secara baku pada perangkat daerah dan nagari sejak tahun 2019 s.d. 2023.:

a. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku merupakan perbandingan antara Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku terhadap jumlah perangkat daerah yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Bedasarkan data tahun 2019 – 2023 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku mengalami peningkatan yang cukup memuaskan, dimana pada tahun 2019 hanya 7,89% perangkat daerah yang menerapakan pengelolaan arsip secara baku, dan pada tahun 2023 sudah mencapai 66,42%. Untuk lebih jelasnya perkembangan data Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.135:

Tabel 2-135 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	7,89	7,89	47,37	47,37	68,42
Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	PD	3	3	21	21	26
Jumlah perangkat daerah	PD	38	38	38	38	38

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tahun 2024

b. Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku

Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku merupakan perbandingan jumlah nagari yang mengelola arsip secara baku dengan jumlah nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2023, dari 52 nagari terdapat 20 nagari atau 38,46% nagari yang sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Angka ini jauh meningkat dibandingkan dengan tahun 2019, dimana hanya 3 nagari yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Untuk lebih jelasnya persentase nagari yang mengelola arsip secara baku tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.136:

Tabel 2-136 Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	Persen	5,77	5,77	23,08	30,77	38,46
Jumlah Nagari yang mengelola arsip secara baku	Nagari	3	3	10	16	20
Jumlah Nagari	Nagari	52	52	52	52	52

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tahun 2024

2.1.5.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

a. Produksi Perikanan

Produksi Perikanan adalah hasil yang diperoleh dari aktivitas/kegiatan baik budidaya ikan maupun penangkapan ikan. Adapun produksi perikanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.137.

Tabel 2-137 Produksi Perikanan

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi Perikanan	Ton	19.597	22.185	27.182	25.120	25.449

Sumber : Dinas Pangan dan perikanan, Tahun 2024

Produksi Perikanan Kabupaten Dharmasraya semenjak Tahun 2019 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 dari 19.597 ton menjadi 25.449 ton. Capaian Produksi Perikanan Kabupaten Dharmasraya yang terus mengalami peningkatan sebagai akibat dari semakin meningkatnya luasan usaha budidaya seperti kolam ikan, kolam terpal, perkembangan teknologi budidaya ikan seperti budidaya Bioflok, peningkatan pengetahuan masyarakat dalam budidaya ikan dan dukungan pembangunan insfrastruktur pendukung perikanan yang disediakan oleh pemerintah sehingga perikanan di daerah dapat berkembang dengan baik.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

a. Jumlah kunjungan wisatawan

Jumlah wisatawan adalah banyaknya orang yang melakukan kegiatan atau kunjungan wisata. Jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 terlihat fluktuatif, pada tahun 2018 sebanyak 37.830 orang dan mengalami peningkatan terus hingga tahun 2023 yaitu 188.463 orang. Namun jika dilihat data per tahun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 6.164 orang akibat adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 kembali terjadi kenaikan kunjungan wisatawan sejumlah 101.394 orang, dan kembali turun menjadi 71.550 orang dan tahun 2023 meningkat menjadi 188.463 orang. Untuk lebih jelansya perkembangan jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.138:

Tabel 2-138 Jumlah kunjungan wisatawan

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kunjungan wisatawan	orang	37.830	6.164	101.394	71.550	188.463

Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Tahun 2024

b. Tingkat hunian akomodasi

Tingkat hunian akomodasi atau disebut juga dengan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel merupakan perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia. Tingkat hunian akomodasi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.139.

Tabel 2-139 Tingkat hunian akomodasi

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat hunian akomodasi	persen	23,69	9,95	22,05	69,75	61.514
Jumlah Malam Kamar yang Dihuni	kamar	19.697	9.282	22.210	68.860	-
Jumlah Malam Kamar yang Tersedia	kamar	83.160	93.240	100.740	98.723	-

Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Tahun 2024

Tingkat hunian akomodasi mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2019 tingkat hunian sebesar 23,69% dengan jumlah malam kamar yang dihuni sebanyak 19.697 menjadi 9,95% pada tahun 2020 dengan 9.282 kamar yang dihuni. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan tingkat hunian akomodasi menjadi 69,75 persen dengan 68.860 kamar yang dihuni dari 98.723 jumlah kamar.

c. Jumlah pelaku ekonomi kreatif

Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Di Kabupaten Dharmasraya sudah terdapat sebanyak 45 pelaku ekonomi kreatif. Untuk lebih jelasnya perkembangan jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Dharmasraya tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.140:

Tabel 2-140 Jumlah pelaku ekonomi kreatif

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pelaku ekonomi kreatif	unit	750	32	32	36	45

Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Tahun 2024

Jumlah pelaku ekonomi kreatif pada tahun 2019 sebanyak 750 unit, terus mengalami pertumbuhan hingga 2019 sebanyak 750 unit. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah pelaku ekonomi kreatif sebanyak 32 unit akibat pandemi Covid-19.

d. Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina

Jumlah lembaga pada daya tarik pariwisata yang dibina mengalami peningkatan dari 7 lembaga pada tahun 2019 menjadi 21 lembaga pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 24 lembaga pada daya tarik wisata yang dibina. Untuk lebih jelasnya jumlah lembaga pada daya tarik pariwisata yang dibina di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 141.

Tabel 2-141 Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina	lembaga	7	12	16	21	24

Sumber :Bidang Pertanian, Tahun 2024

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Dibidang pertanian komoditi padi merupakan salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Dharmasraya. Dengan total luas sawah sebanyak 6.023 Ha berdasarkan PERDA LP2B No. 18 Tahun 2018 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Dharmasraya berkeinginan bisa memenuhi kebutuhan akan pangan bagi masyarakat sehingga tercapainya kemandirian pangan.

Selain padi komoditi pertanian di Kabupaten Dharmasraya yaitu jagung, kelapa sawit, karet dan peternakan. Untuk lebih jelasnya perkembangan produksi komoditi pertanian di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel 2.142:

Tabel 2-142 Produksi Sektor Pertanian

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi Padi	ton	67.850	68.652	40.797	56.290,25	53.868,84
	Produktivitas	ton/ha	4,59	4,64	4,46		
	Luas panen	ha	14.774	14.783	9.149		
2	Produksi jagung	ton	104.626	4.069	12.125	2.553,12	**2.755,39**
	Produktivitas	ton/ha	6,23	5,79	4,79		
	Luas panen	ha	843	698	2.093		
3	Produksi kelapa sawit	ton	104.626	104.992	103.279,18	103.636,76	**123.104,94**
	Produktivitas	ton/ha	4.68	4.98	4,60		
	Luas panen	ha	22.361,85	22.441,85	32.743,64		

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
4	Produksi karet	ton	29.615,41	29.689	2.366,76	24.758,03	**32.712,38**
	Produktivitas	ton/ha	0.87	0.78	0,88		
	Luas panen	ha	34.188,00	34.278,00	3.758,90		
5	Produksi Daging	Ton	4.187	6.340	1.558,80	1.535,78	1.697,15
6	Populasi Ternak (Sapi/Kerbau)	ekor	48.062	49.043	51.380	44.971	42.612

Sumber : Dinas Pertanian, Tahun 2024

Produksi Padi Kabupaten Dharmasraya sangat didukung oleh irigasi Batanghari, sehingga produksi padi cukup memadi, begitupun dengan sawit dan karet juga masih menjadi komoditi yang unggulan daerah.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan produksi padi tahun 2022 sebesar 15.493,08 ton atau sebesar 37,98% dibandingkan dengan produksi padi Tahun 2021 sedangankan pada tahun 2023 terjadi penurunan produksi padi sebesar 2.421,41 ton atau sebesar 4,30% dibandingkan dengan Tahun 2022. Penurunan produksi padi terjadi karena adanya fenomena El-Nino yang terjadi yang menyebabkan kekeringan dan terdapat perbaikan jaringan irigasi sekunder yang pengerjaannya memerlukan waktu yang lama sehingga menghambat proses pengolahan tanah dan jadwal tanam menjadi mundur tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Potensi produksi jagung sangat besar di Kabupaten Dharmasraya karena masih banyak lahan yang bisa ditanami jagung, namun minat petani untuk menanam jagung sangat rendah dikarenakan faktor harga benih jagung yang mahal. Tahun 2023 Kabupaten Dharmasraya hanya mengandalkan bantuan benih jagung daru sumber dana APBD Provinsi dan APBN karena kurangnya dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Dharmasraya. Adapun capaian realisasi kinerja produksi jagung tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Terjadi peningkatan produksi Kelapa Sawit (kebun rakyat) tahun 2022 sebesar 357,58 ton atau sebesar 0,35% dibandingkan dengan produksi Kelapa Sawit (kebun rakyat) Tahun 2021 dan pada tahun 2023 terjadi peningkatan produksi Kelapa Sawit (kebun rakyat) sebesar 19.468,18 ton atau sebesar 18,79% dibandingkan dengan Tahun 2022.

Untuk perkebunan karet, terjadi penurunan produksi karet tahun 2022 sebesar 1.130,24 ton atau sebesar 4,37% dibandingkan dengan produksi karet Tahun 2021 dan pada tahun 2023 terjadi peningkatan produksi karet sebesar 7954,35 ton atau sebesar 32,13% dibandingkan dengan Tahun 2022. Peningkatan produksi karet terjadi karena adanya peningkatan mutasi dari tanaman belum menghasilkan (TBM) menjadi tanaman menghasilkan (TM) seluas dari 3.800 Ha

Sehingga menambah peningkatan produksi karet. Capaian produksi karet selama 3 tahun terakhir dari tahun 2021 hingga 2023.

Untuk produksi daging, terjadi penurunan tahun 2021 sebesar 23,02 ton atau sebesar 1,48% dibandingkan dengan produksi daging Tahun 2022 dan tahun 2023 terjadi kenaikan produksi daging sebesar 1.61,37 ton atau sebesar 10,51% dibandingkan dengan Tahun 2022.

Terjadi penurunan populasi sapi/kerbau tahun 2022 sebesar 6.409 ekor atau sebesar 12,47% dibandingkan dengan populasi sapi/kerbau Tahun 2021 dan tahun 2023 terjadi penurunan populasi sapi/kerbau sebesar 2.359 ekor atau sebesar 5,25% dibandingkan dengan Tahun 2022. Penurunan populasi sapi/kerbau ini disebabkan karena terjadinya kasus penyakit hewan menular strategis yaitu penyakit mulut dan kuku (PMK) dan penyakit endemik seperti Jembrana juga masih mengancam populasi ternak di Kabupaten Dharmasraya.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

a. Persentase pasar rakyat yang telah direvitalisasi

Pasar rakyat yang dimaksud yaitu pasar tradisonal atau pasar nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Persentase pasar rakyat yang telah direvitalisasi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.143.

Tabel 2-143 Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	%	43,23	48,63	48,63	48,63	48,63

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, tahun 2024

Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi dari tahun 2019 hingga 2020 mengalami peningkatan. Namun hingga tahun 2023 tidak ada penambahan pasar yang direvitalisasi.

b. Alat UTTP yang Beratanda tera sah

UTTP merupakan singkatan dari alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengakapnnya, merupakan alat-alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran, penakaran, dan penimbangan suatu kuantitas dan/atau kualitas. Pelaksanaan tera ulang UTTP adalah dalam rangka perlindungan konsumen atas pembelian barang. Capain indikator persentase alat UTTP yang beratanda tera sah dapat dilihat pada Tabel 2.144.

Tabel 2-144 Alat UTTP yang Beratanda tera sah

Indikator	Satuan	2022	2023
Persentase alat UTTP yang Beratanda tera sah	Unit	44	44,77

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, tahun 2024

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

a. Persentase peningkatan omzet IKM

Persentase IKM Dengan Peningkatan Omzet adalah salah satu cara pengukuran untuk melihat perkembangan IKM yang ada di Kabupaten Dharmasraya dilihat dari sisi Peningkatan Omzet IKM Pada Tahun 2023 dibandingkan dengan omzet tahun sebelumnya.

Persentase peningkatan omzet IKM sangat dipengaruhi oleh fluktuasi perekonomian dan kondisi keuangan masyarakat yang ada didaerah. Semakin bagus kondisi perekonomian maka akan semakin bagus juga daya beli masyarakat yang akan langsung berefek pada peningkatan omzet IKM, begitu juga sebaliknya, apabila daya beli masyarakat menurun maka omzet IKM juga akan menurun. Dinas koperasi UKM dan Perdagangan khususnya Bidang Perindustrian sudah melakukan banyak upaya agar omzet IKM kita senantiasa mengalami peningkatan. Dengan melakukan pendampingan, pemberdayaan, pengawasan demi peningkatan daya saing IKM. Namun itu semua belum maksimal karena keterbatasan anggaran pada tahun 2023. Untuk lebih jelasnya Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.145.

Tabel 2-145 Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet	%	6,62	6,50	9,26	8,1	8,54
Omzet IKM tahun n	Rupiah	96.836.486	103.170.000	160.793.698	173.193.760.000	14.798.520.000
Omzet IKM tahun n - 1	Rupiah	92.999.751	96.836.486	147.170.356	160.793.693.000	173.193.760.000

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, tahun 2024

.

b. Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar

IKM yang memiliki legalitas sesuai standar adalah syarat mutlak untuk perkembangan IKM selanjutnya. Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.146.

Tabel 2-146 Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	%	4,3	9,6	12,5	73,14	75,68
Jumlah IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	Unit	32	76	111	700	800
Jumlah IKM seluruhnya	Unit	737	789	888	957	1057

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, tahun 2024

Pada tabel terlihat persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar pada tahun 2022 adalah sebesar 73,14%. Sedangkan tahun 2023 adalah 75,68%. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan khususnya Bidang Perindustrian sudah mengupayakan banyak hal agar capaian kinerja indicator ini semakin meningkat setiap ahunnya. Dengan melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada IKM bahwa pentingnya untuk melengkapi semua legalitas izin usaha yang juga merupakan bagian dari usaha meningkatkan daya saing IKM itu sendiri. Selain itu juga memberikan fasilitasi dan percepatan pemberian rekomendasi dalam pengurusan legalitas usaha IKM tersebut. Namun masih banyak ditemui bermacam kendala dalam pelaksanaannya

2.1.5.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

a. Nilai LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Untuk menentukan bobot penilaian/skor capaian kinerja masing-masing indikator pada LPPD dilakukan melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD), dengan sasaran penilaian sebagai berikut :

1) EPPD dilakukan untuk menilai kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
2) Evaluasi kinerja makro dilakukan dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD; dan perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD;
3) Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan dengan menilai capaian IKK dalam LPPD;
4) Penilaian capaian IKK dilakukan berdasarkan bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang urusan pemerintahan;

Adapun penilaian:

1. Predikat AA dengan bobot > 90 – 100 : sangat memuaskan

Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

2. Predikat A dengan bobot > 80 – 90 : memuaskan

   Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

3. Predikat BB dengan bobot > 70 – 80 : sangat baik

   Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

4. Predikat B dengan bobot > 60 – 70 : baik

   Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

5. Predikat CC dengan bobot > 50 – 60 : cukup (memadai)

   Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

6. Predikat C dengan bobot > 30 – 50 : kurang

   Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat..

7. Predikat D dengan bobot > 0 – 30 : sangat kurang

   Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.147.

Tabel 2-147 Nilai LPPD

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Rangking	Rangking	-	-	43	9	-

Skor	indeks	3,5138	-	2,88	3,5036	-
status	Tinggi/ sangat tinggi	Sangat tinggi	-	Sedang-	Tinggi	-

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2024, KepMendagri No. 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 dan KepMendagri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023

Catatan : Data Tahun 2020 tidak tersedia karena Covid-19, dan data Tahun 2023 sedang proses penilaian LPPD oleh Kemendagri

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap LPPD Kabupaten/Kota se-Indonesia Tahun 2021-2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 Kabupaten Dharmasraya berada pada peringkat ke-43 Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, sementara pada Tahun 2022 meningkat menjadi peringkat ke-9.

Perkembangan realisasi indikator LPPD dari tahun 2019-2022 sangat memuaskan, hal ini dipengaruhi oleh:

1. Adanya komitmen dari pimpinan kepada seluruh kepala OPD terkait data LPPD yang berkualitas sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci yang telah ditetapkan, kinerja yang maksimal dan ketepatan waktu dalam pengumpulan data.
2. Verifikasi data capaian kinerja dilakukan terhadap setiap indikator kinerja, meliputi validasi capaian kinerja dan verifikasi elemen data yang dilakukan secara mandiri (Self Assesment-Evaluasi Mandiri).
3. Pada tahap ini juga dilakukan evaluasi capaian kinerja melalui pembandingan dengan data-data tahun sebelumnya, baik data-data yang disampaikan oleh perangkat daerah provinsi maupun data agregasi dari kabupaten kota.

b. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai alat pengukur sejauh mana penerapan SAKIP di suatu daerah, ditetapkan 5 komponen penilaian SAKIP, Kelima komponen itu meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Perencanaan kinerja yang meliputi dokumen renstra, rencana kerja tahunan, dan penetapan kinerja, mendapat bobot paling besar, yakni 35.

Komponen kedua, yakni pengukuran kinerja diberi bobot 20, dengan indikator kinerja dan pengukuran kinerja. Sedangkan pelaporan kinerja, yang meliputi pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja diberi skor 15. Untuk evaluasi kinerja yang terdiri dari pelaksanaan evaluasi dan pemanfaatan evaluasi diberikan skor 10, dan capaian kinerja yang terdiri dari capaian output dan capaian outcome, skornya 20.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 yaitu 64,65 dengan predikat ”B”. Hal ini menunjukan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja ”Baik” yaitu kualitas penerapan manajemen kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil telah menunjukan hasil yang baik.

Untuk melihat capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.148:

Tabel 2-148 Nilai SAKIP

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022*	2023
Nilai hasil evaluasi	AA/A/ BB/B/CC	B	B	B	B	B
Tingkat akuntabikitas kinerja	indeks	62,58	63,44	63,98	64,07	64,65
Perencanaan Kinerja	bobot	18.43	19,35	19,42	22,20	22,28
Pengukuran Kinerja	bobot	16,22	16,48	16,48	18,19	18,64
Pelaporan Kinerja	bobot	10,92	10,58	10,61	10,78	10,81
Evaluasi internal	bobot	5,91	6,47	6,37	12,90	12,92
Capaian kinerja	bobot	11,1	10,56	11,1		
Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	bobot				12,90	

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2024

Keterangan * = terjadi perubahan penilaian evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Selama 5 tahun terakhir, nilai SAKIP di Kabupaten Dharmasraya sudah berada pada nilai B, artinya Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. Namun dilihat dari nilainya masih menunjukan peningkatan, dimana tahun 2022 sebesar 64,07 dan tahun 2023 menjadi 64,65. Sesuai denan surat Kemenpan Nomor B/875/AA.05/2022, maka hasil evaluasi tahun 2022 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelmnya karena terdapat perbahan bobot komponen dan sub kkomponen serta kriteria penilaiannya.

c. Nilai Reformasi Birokrasi (Nilai RB)

Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.

Secara umum terkait Reformasi Birokrasi ini terdapat 8 area perubahan yang meliputi manajemen perubahan; penataan perundang-undnagan; penataan penguatan organisasi; penguatan tata laksana; penataan SDM aparatur; penguatan akuntabilitas kinerja; penguatan pengawasan; dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hingga saat ini Reformasi Birokrasi merupakan akhir dari RB jilid 2 dengan 3 sasaran yaitu birokrasi yg bersih dan akuntabel; birokrasi yg efektif dan efisien; serta birokrasi yg memiliki pelayanan publik berkualitas.

Secara umum terkait Reformasi Birokrasi ini terdapat 8 area perubahan yang meliputi :

1. Manajemen perubahan
2. Penataan perUUan
3. Penataan penguatan Organisasi
4. Penguatan Tata laksana
5. Penataan SDM aparatur
6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan publik

Hingga saat ini Reformasi Birokrasi merupakan akhir dari RB jilid 2 dengan 3 sasaran yaitu :

1. Birokrasi yg bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yg efektif dan efisien
3. Birokrasi yg memiliki pelayanan publik berkualitas.

Pelaksanaan reformasi birokrasi suatu daerah dapat dilihat dari indeks reformasi birokrasi daerah tersebut. Pencapaian pelaksanaan RB di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.149 dibawah ini:

Tabel 2-149 Nilai Reformasi Birokrasi

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
Nilai Reformasi Birokrasi (Nilai RB)	nilai	44,7	46,58	50,20 (CC)	57,28 (CC)

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2024

Dari hasil peialian tersebut, maka pemerintah Dharmasraya sudah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform tetapi mengalami penurunan niai pada total komponen hasil. Sehingga masih perlu meningatkan upaya lebih baik lagi dalam melaksanakan reformasi agar mencapai target indeks lebih baik lagi.

2. Sekretariat DPRD

a. Persentase agenda DPRD yang difasilitasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam pasal 365 ayat (1) dinyatakan bahwa DPRD berfungsi sebagai fungsi legislasi, anggaran dan fungsi anggaran. Sedangkan sekretariat DPRD bertugas dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Dharmasraya. Sebagai unsur dari penyelenggaran pemerintahan daerah, dimana pemerintahan daerah tersebut trdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah, sehingga dalam hal ini DPRD berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Perkembangan agenda DPRD yang difasilitasi di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2.150.

Tabel 2-150 Persentase agenda DPRD yang difasilitasi

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase agenda DPRD yang difasilitasi	persen	100	100	100	95	100
Jumlah agenda DPRD yang difasilitasi	agenda	104	125	147	-	-
Jumlah agenda DPRD seluruhnya	agenda	104	125	147	-	-

Sumber : Sekretariat DPRD, Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa agenda DPRD yang dilaksanakan, mulai tahun 2018 hingga tahun 202 seluruhnya difasilitasi oleh sekretariat DPRD. Namun di tahun 2022 hanya 95% agenda DPRD yang dapat difasilitasi oleh sekretariat DPRD, sedangkan tahun 2023 semua agenda DPRD dapat difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

3. Keuangan

a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan

membahasnya bersama pihak terkait. Adapun capaian kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.151.

Tabel 2-151 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan keuangan Daerah, Tahun 2024

Sejak tahun 2015 sampai tahun 2023, selama 9 (sembilan) kali berturut-turut Pemerintah secara berturut turut telah menerima WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini menunjukan bahwa kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Dharmasraya sangat baik.

b. Rata-rata ketergantungan dana transfer

Untuk pembiayaan pembangunan Kabupaten Dharmasraya masih bergantung pada sumber pendanaan pembangunan dari dana transfer. Adapun rata-rata ketergantungan dana transfer di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.152.

Tabel 2-152 Rata-rata ketergantungan dana transfer

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata ketergantungan dana transfer	Persen	92,36	91,63	85,73	80, 67	88,59

Sumber : Badan keuangan Daerah, Tahun 2024

Dilihat dari perkembangan rata-rata ketergantungan APBD terhadap dana transfer terlihat masih tinggi. Penurunan tersebut disebabkan oleh naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta turunnya total alokasi dana transfer dari pusat. Sehingga dengan kedua faktor tersebut menyebabkan turunnya angka ketergantungan APBD terhadap dana pusat.

c. Persentase SILPA terhadap APBD

SILPA (dengan huruf I besar/capital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dilihat perkembangan SILPA terhadap APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 menunjukan angka peningkatan. Pada tahun 2019 hanya 0,38% SILPA terhadap APBD, sementara pada tahun 2023 mencapai 5,57% dari APBD Kabupaten Dharmasraya. Untuk lebih jelasnya perkembangan persentase SILPA terhadap APBD tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.153:

Tabel 2-153 Persentase SILPA terhadap APBD

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	0,38	0,85	7,66	4,46	5,57
Jumlah SILPA terhadap APBD	Juta Rp	3.893,45	8.337,43	70.209,49	41.912	46.430
Jumlah belanja APBD	Juta Rp	103.6553,41	985.747,17	917.045,66	939.201	822.042

Sumber : Badan keuangan Daerah, Tahun 2024

Persentase Silpa tahun 2022 dibandingkan tahun 2019-2021 terihat lebih rendah. Hal ini disebaban oleh nilai SILPA tahun 2022 jauh lebih kecil dibandingkan SILPA yang diterima tahun 2021.

4. Kepegawaian

a. Indeks Profesionalitas ASN

Pengukuran indeks profesionalitas ASN pada dasarnya merupakan respon proaktif dan sekaligus mandat yang dilakukan oleh BKN untuk menjawab kebutuhan tingkat profesionalitas ASN melalui standariusasi pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.

Tujuan pokok dari program ini untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN dengan serangkaian langkah kegiatan identifikasi dan pemetaan terhadap hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN. Hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kreteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN. Indeks profesionalisme ASN di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.154.

Tabel 2-154 Indeks Profesionalitas ASN

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	68	58,04	62,87	62,86	(Sedang penilaian)
Indeks Profesionalisme dimensi kualifikasi	Nilai	12	12,53	13,39	-	-
Indeks Profesionalisme dimensi kompetensi	Nilai	24	15,49	20,57	-	-
Indeks Profesionalisme dimensi kinerja	Nilai	27	24,8	23,92	-	-
Indeks Profesionalisme dimensi disiplin	Nilai	5	5	5	-	-

Sumber : BKPSDM, Tahun 2024

Perkembangan nili indeks profesionalisme ASN (IP ASN) cenderung mengalami kenaikan, meskipun dari tahun 2019 mengalami kenaikan namun turun lagi di tahun 2020 karen adanya perubahan pembobotan pada penilaian IP ASN yang dikeluarkan

oleh BKN. Sedangkan untuk IP ASN tahun 20223 berdasarkan nilai dimensi pembentuk IP ASN belum dirilis oleh BKN.

b. Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu

Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan rencana tahunan instansi yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.

Pada tahun 2023 kinerja persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu berhasil mencapai target yang ditetapkan, yakni 96 persen atau dengan capaian kinerja 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2023 semakin baik. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Dimana pada tahun 2022 capaian kinerja hanya mencapai 63,5 persen. Adapun penyebab tidak maksimalnya capaian kinerja pada penyusunan SKP pada tahun lalu antara lain masih banyak ASN yang belum memahami cara penyusunan SKP yang benar disebabkan adanya perubahan tata cara penyusunan SKP dari Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2021 ke Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2022. Selain itu juga sering berubahnya regulasi tentang penailaian kinerja ASN, sehingga pemahaman ASN terhadap regulasi yang baru masih kurang. Disamping itu, masih rendahnya kepedulian ASN dalam menyusun SKP. Agar dapat memenuhi target yang diinginkan dalam penyusunan SKP, maka telah dilakukan pelatihan (coaching) ke setiap OPD. Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.154.

Tabel 2-155 Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	Persen	100	99,35	14,39	63,5	96
Jumlah ASN yang menyusun SKP	Jumlah	3632	3533	506	2.164	3940
Jumlah pegawai	Jumlah	3632	3556	3516	3.408	4104

Sumber : BKPSDM, Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa capaian kinerja pada penyusunan SKP dinilai berhasil dan mencapai target. Dimana, untuk pengukuran capaian kinerja tersebut dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah SKP yang dientrikan ke SIASN dengan jumlah ASN. Dimana jumlah SKP yang dientrikan ke SIASN berjumlah 3940, sedangkan jumlah ASN adalah 4104. Dengan demikian realisasi kinerja berhasil mencapai target yang ditetapkan, yakni 96 persen.

c. Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi

Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi merupakan perbandingan antara julah penempatan ASN sesuai kompetensi dterhadap total jumlah pegawai. Untuk

menghitung persentase penempatan ASN sesuai kompetensi dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi dengan jumlah jabatan struktural.

Pada tahun 2023 jumlah PNS yang ditempatkan sesuai kompetensi berjumlah 276 orang dengan rincian: esselon II sebanyak 25 orang, esselon III sebanyak 118 orang, dan esselon IV sebanyak 133 orang. Sedangkan jumlah jabatan struktural yang tersedia sebanyak 337 jabatan. Sehingga diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 81,9 persen. Sedangkan untuk target kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 47 persen. Dengan demikian capaian kinerja dapat melebihi target. Atau dengan kata lain sangat berhasil. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 2.156 di bawah ini.

Tabel 2-156 Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	Persen	35,03	41,25	79,04	70	81,9
Jumlah penempatan ASN sesuai kompetensi	Jumlah	179	205	215	199	276
Jumlah pegawai	Jumlah	511	497	272	284	337

Sumber : BKPSDM, Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan pada realisasi kinerja, yakni sebesar 81,9 persen dari target 47 persen, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2022, capaian kinerja sebesar 70 persen, dan pada tahun 2021 capaian kinerja sebesar 79 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Dharmasraya selalu berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan ke arah yang lebih baik.

d. Persentase kasus ASN yang tertangani

Persentase kasus yang tertangani adalah kasus indisipliner ASN yang tertangani di BKPSDM. Kasus yang tertangani adalah kasus pelanggaran disiplin yang penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi kewenangan Bupati. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, dari 5 kasus disiplin berat yang sudah terlaksana penjatuhan hukuman disiplinnya 2 diantaranya diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena tidak masuk kantor sedangkan 2 orang penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 12 bulan dan 1 lagi diberikan sanksi pembebasan jabatan selama 12 bulan karena tidak masuk kantor. Sedangkan untuk 2 orang kasus penyalahgunaan wewenang jabatan (TIPIKOR) dan diberikan sanksi diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.

Untuk pelanggaran sedang sebanyak 11 orang berdasarkan hasil rekapitulasi absensi yang dikirimkankan oleh perangkat daerah setiap bulannya. Sudah ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan 12 orang disiplin ringan didominasi karena tidak hadir apel gabungan pada Senin pertama setiap bulannya. Sudah ditindak lanjuti oleh

Kepala Perangkat Daerah berdasarkan penegasan tertulis Surat Bupati Dharmasraya setiap bulannya. Persentase kasus ASN yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.157.

Tabel 2-157 Persentase kasus ASN yang tertangani

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase kasus ASN yang tertangani	Persen	100	100	100	100	**100**
Jumlah kasus yang diterima	Jumlah	6	5	83	12	30
Jumlah kasus yang tertangani	Jumlah	6	5	83	12	30

Sumber : BKPSDM, Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2023 dan 2021 terjadi peningkatan kasus. Tingginya kasus disebabkan karena banyaknya kepala OPD yang belum memahami tentang proses pembinaan PNS di lingkungannya sesuai dengan PP No. 94 tahun 2021 yang baru ditetapkan pada bulan Juni 2021. Agar pencapaian kinerja di tahun berikutnya sesuai yang diharapkan, maka BKPSDM akan melaksanakan kembali sosialisasi dan monitoring evaluasi ke OPD tentang PP No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Serta mensosialisasikan aplikasi IDIS yang sudah dilounching oleh BKN.

Disamping itu faktor yang mempengaruhi pembinaan Pegawai tidak terlepas dari pelaksanaan Absensi Online dan Pembayaran reward kinerja berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pelaksanaan Absensi Online dan Pembayaran TPP selama Tahun 2023 bisa dikatakan belum maksimal. Diharapkan ke depannya ini dapat menjadi fokus stake holder terkait untuk sehingga menunjang peningkatan kinerja dan disiplin PNS.

5. Pendidikan dan Pelatihan

a. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi

Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi merupakan semua jenis pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh ASN, dapat berupa peningkatan kualifikasi pendidikan, mengikuti pelatihan, seminar, bimbingan teknis dan lain sebagainya. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi Indeks profesionalisme ASN di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.158.

Tabel 2-158 Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi	Persen	**30,59**	**33,63**	**42,12**	**49,04**	**85,01**
Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah	1111	1196	1481	1617	3489
Jumlah pegawai	Jumlah	3632	3556	3516	3297	4104

Sumber : BKPSDM, Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa capaian kinerja pada indikator Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana capaian pada tahun 2023 mencapai 85,01 persen, sedangkan tahun 2022 mencapai 49,04 persen. Pada tahun 2023 tidak ada dilaksanakan penerimaan CPNS, sehingga tidak ada pelaksanaan pelatihan dasar (Latsar) bagi CPNS. Disamping itu juga pada tahun 2023 masih kurangnya minat ASN dalam meningkatkan pengembangan kompetensi menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian kinerja pada tahun 2023, salah satunya mengikuti tugas belajar. Keengganan ASN mengikuti tugas belajar ini disebabkan karena tidak adanya bantuan pendidikan dari pemerintah Daerah dan tidak dibayarkannya tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan tunjangan lainnya.

6. Penelitian dan Pengembangan

a. Indeks inovasi daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu. Adapun tujuan dari penilaian indeks inovasi daerah adalah untuk Peningkatan Pelayanan Publik;Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan Peningkatan daya saing Daerah.

Berikut skor dan kategori indeks inovasi daerah tahun 2023:

- Kategori Rentang Skor Sangat Inovatif 60,01 - 100,00
- Inovatif 35,00 – 60,00
- Kurang Inovatif 0,01 - 34,99
- Tidak Dapat Dinilai 0

Perkembangan indeks inovasi daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.159.

Tabel 2-159 Indeks inovasi daerah

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
Jumlah skor	indeks	3	48,07	57,84	55,61
kategori	-	Kurang inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber : Bappeda, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas bahwa Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2021-2023 termasuk pada kategori kabupaten yang inovatif.

2.1.5.5. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

a. Tingkat Kapabilitas APIP

Penilaian kapabiltas APIP dilakukan oleh BPKPpermasalah dengan menggunakan metode Internal Audit Capability Model (IACM) yang terdiri dari 5 level, yaitu level 1 (initial), level 2 (insfrastruktucture), Level 3 (integrated), Level 4 (managed) dan Level 5 (optimizing). Tingkat kapabilitas APIP Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.160.

Tabel 2-160 Tingkat Kapabilitas APIP

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Kapabilitas APIP	level	3DC	3	3	3	3

Sumber : Inspektorat Daerah, Tahun 2024

Pada periode sebelumnya Inspektorat Kabupaten Dharmasraya sudah berada pada level 2 dengan tanpa dilakukan Quality Assurance oleh tim BPKP. Pada Tahun 2018 awal dilakukan penilaian oleh BPKP dengan menggunakan metode IACM Inspektorat Kabupaten Dharmasraya memperoleh nilai Level 2. Pada tahun 2019 dilakukan penialian namun belum bisa mencapai nilai level 3 penuh, pada tahun 2020 hingga tahun 2023 sudah dilakukan penilaian dengan memperoleh level 3. Artinya Inspektorat sebagai oraganisasi sebagai unsur pengawasan urusan pemerintahan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi serta pengendalian telah dilaksanakan tetapi belum efektif.

b. Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Penilaian maturitas SPIP dilakukan oleh BPKP dengan pendekatan kuantitatif, pada lima area penilaian yaitu : lingkungan pengandalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Penilaian maturitas SPIP berada pada enam tingkatan , yaitu : 0 (belum ada), level 1 (rintisan), level 2 (berkembangan), level 3 (terdefenisi), level 4 (terkelola dan terukur), level 5 (optimum). Penilaian ini dilakukan terhadap SPIP pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya. Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.161.

Tabel 2-161 Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	level	3	3	3	2,6	2,96

Sumber : Inspektorat Daerah, Tahun 2024

Penilian mauritas SPIP sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 yang dilakukan oleh BPKP, dan Kabupaten Dharmasraya memperoleh nilai pada level 1. Pada tahun 2019

dilakukan penialian oleh BPKP Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya memperoleh nilai 3 sehingga berada pada level 3, sementara tahun 2022 berada pada nilai 2,6, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hampir mencapai level berkembang.

2.1.5.6. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Persentase Pembinaan Partai Politik

Persentase pembinaan partai politik di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.162.

Tabel 2-162 Persentase Pembinaan Partai Politik

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pembinaan Partai Politik	Persen	68,7	125	62,5	62,5	62,5

Sumber : Dinas Kesbangpol, Tahun 2024

Dari tabel di atas tergambar bahwa pada tahun 2019 dan 2020 terdapat kenaikan signifikan dari persentase pembinaan partai politik, dan kembali menurun pada tahun 2021-2023. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2019 s.d. 2020 intensif dilakukan pembinaan kepada partai politik untuk menyonsong Pemilu serentak pemilihan Presiden, Kepala Daerah dan legislatif pada tahun 2020. Saat ini dari 19 partai politik, 10 partai Partai Politik bagi Pengurus Partai Politik dan sekaligus di berikan Pembinaan. Salah satu penyebab masih rendahnya pembinaan partai politik yaitu kurangnya dana pendukung untuk Bimbingan Teknis Admnistrasi bantuan Partai Politik bagi Pengurus Partai Politik dan sekaligus di berikan Pembinaan.

b. Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan

Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.163.

Tabel 2-163 Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	55	20,2	10,14	10,14	10,14

Sumber : Badan Kesbangpol, Tahun 2024

Pada tahun 2023 jumlah ormas yang ada sebanyak 69 Ormas, sedangkan Ormas yang terbina sebanyak 7 Ormas atau 10,14%. Ormas yang terbina sebanyak yaitu: Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI),

Majlis Tafsir Al-Qur'an (MTA), Majlis Taklim Indonesia (MTI), Lembaga Dakwah Indonesia (LDII), Sentra Komunikasi Mitra Polri (Senkom Polri), Gerakan Pemuda Ansor.

Jika dilihat berdasarkan data tahun 2019 jumlah ormas yang dibina sebanyak 55%., sementara tahun 2020-2023 mengalami penurunan. terjadinya penurunan dari dikarenakan tidak adanya dana yang mendukung pada kegiatan ini, proses pembinaan dilakukan sama dengan tahun sebelumnya, melalui diskusi dan tatap muka ketika mereka melaporkan kepengurusan yang baru atau program kerja yang akan mereka laksanakan ke Badan Kesatuan Bangsa dan politik. Adapun jumlah Ormas yang melaporkan kepengurusannya Sama dengan tahun sebelumnya namun dengan Ormas yang berbeda yang melaporkan keberadaan Ormasnya.

c. Persentase Pembinaan LSM

Persentase pembinaan LSM di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.164.

Tabel 2-164 Persentase Pembinaan LSM

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pembinaan LSM	Persen	63,6	33,3	16,67	16,67	

Sumber : Dinas Kesbangpol, Tahun 2024

Begitu Dari tabel di atas terlihat kenaikan persentase pembinaan LSM pada tahun 2019. Tetapi pada tahun 2020 hingga 2022 terjadi penurunan dari tahun ke tahun.

d. Jumlah Konflik Sosial

Jumlah konflik sosial di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.165.

Tabel 2-165 Jumlah Konflik Sosial

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Konflik Sosial	Kasus	5	3	5	5	5

Sumber : Badan Kesbangpol, Tahun 2024

Adapun konflik yang terjadi yaitu mengenai Persengketaan batas tanah Ulayat yang sama-sama menuntut kepemilikan tanah tersebut oleh masyarakat Sipangkur dengan PT SAK Muaro Timpeh di Kecamatan Tiumang, Konflik antar masyarakat di Kecamatan Asam Jujuhan dengan PT TKA yang mana masyarakat mempertanyakan tentang perpanjangan Hak Guna Usaha PT TKA sehingga masyarakat tidak terima di karenakan tidak adanya kejelasan dari perusahaan, Konflik antar masyarakat di Kecamatan Koto Baru mengenai Limbah yang

berasal dari PT DSL yang merusak lingkungan masyarakat, terakhir di Kecamatan Pulau Punjung terjadinya Konflik antara Masyarakat dengan PT AWB mengenai kepemilikan lahan perkebunan sawit dengan lahan milik masyarakat.

d. Jumlah Penyakit Masyarakat

Jumlah kasus penyakit masyarakat di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.166.

Tabel 2-166 Jumlah Penyakit Masyarakat

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penyakit Masyarakat	Kasus	2	3	2	2	

Sumber : Badan Kesbangpol, Tahun 2024

Adapun kasus penyakit masyararakat yang terjadi di tahun 2022 adalah Kasus Pencurian TBS Sawit masyarakat dan Kebun Sawit Perusahaan

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1) Hasil Tercapai, Sangat Tinggi dan Tinggi
   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2) Hasil Sedang
   Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3) Hasil Rendah
   Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Untuk lebih jelasnya gradasi nilai kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.167.

Tabel 2-167 Gradasi Nilai Kinerja

No.	Interpretasi	Rrange Capaian
1	tercapai	>=100
2	sangat tinggi	80-100
3	tinggi	70-80
4	sedang	50-70
5	rendah	<50

Sumber : Hasil Analisis Bapperida Tahun 2024

2.2.1. Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023

Capaian indikator Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya diukur dari realisasi ketercapaian kinerja indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2023 dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2023 dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi mendasarkan pada realisasi kinerja RPJMD di tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 dapat digambarkan dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKPPD) sebagaimana tabel 2.168.

Tabel 2-168 Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Interpretasi
			2023	2023	2023	
1	**Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur**					
	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	60	58.15	96.92	Sangat tinggi
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	70	89.07	127.24	Tercapai
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	95	92.49	97.36	Sangat tinggi
	Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	41.13	4.35	10.58	Sangat Rendah
	Rasio pemukiman layak huni	persen	91.45	84.3	92.18	Sangat tinggi
	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	69.75	76.38	109.51	Tercapai
2	**Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**					
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71.98	73.0	101.47	Tercapai
	Angka Harapan Hidup	tahun	71.87	74.04	103.02	Tercapai
	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8.49	8.71	102.59	Tercapai
	Harapan lama sekolah	tahun	12.45	12.68	101.85	Tercapai
	Indeks Pembangunan Gender	indeks	89.17		-	Sangat tinggi (capaian 2022)
3	**Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing**					
	Pertumbuhan PDRB	persen	4.2	4.35	103.57	Tercapai

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Interpretasi
			2023	2023	2023	
	Gini rasio	indeks	0.26	0.291	111.92	Tercapai
	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	44.79	55.63	124.19	Tercapai
	Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	persen	3.4	14.57	428.62	Tercapai
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	5.49	6.22	113.30	Tercapai
	Tingkat Kemiskinan	persen	6.02	5.56	107.64	Tercapai
4	**Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien**					
	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	70	57.28	81.83	Sangat tinggi
	Indeks perilaku antikorupsi	indeks	3.322		-	Sangat Rendah
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP	WTP	100	Tercapai
	Hasil evaluasi AKIP	bobot/ indeks	BB	64.65	80.81	Sangat tinggi
	Nilai LPPD	Skor	3.7		-	Sangat Rendah
	Indeks SPBE	indeks	2.175	2.83	130.11	Tercapai
	Indeks Profesionalisme ASN	indeks	68		-	Sangat Rendah (2022)
	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	82	84.5	103.05	Tercapai
	Persentase nagari mandiri	persen	19.23	17.31	90.00	Sangat tinggi
	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	indeks	0.84	0.85	101.31	Tercapai
	Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	indeks	0.71	0.74	104.33	Tercapai
	Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	indeks	0.60	0.67	110.93	Tercapai
5	**Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan**					
	Kesesuaian pemanfaatan ruang	persen	10	92.59	925.93	Tercapai
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	65.47	63.48	96.96	Sangat tinggi
6	**Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah**					
	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	nagari	6	2	33.33	Sangat Rendah
	Persentase peningkatan zakat	persen	2	36.67	1,833.50	Tercapai
	Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	persen	85	100	117.65	Tercapai

Sumber : Hasil Analisis Bapperida Tahun 2024

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja diatas yang dilihat berdasarkan target RKPD Tahun 2023 dengan reaisasi RKPD Tahun 2023, secara umum sudah tercapai. Sebanyak 22 indikator sudah tercapai sesuai dengan target yang ditentukan, 7 indikator dengan capaian sangat tinggi, 1 indikator dengan capaian tinggi dan 1 indikator dengan capaian rendah.

2.2.2. Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Urusan Tahun 2023

Capaian indikator kinerja berdasarkan urusan daerah tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.169:

Tabel 2-169 Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Urusan Tahun 2023

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target RPJMD 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Interpretasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
1:01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	75.5	72.84	96.48	Sangat tinggi
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen	107.94	99.43	92.12	Sangat tinggi
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persen	106.3	80.44	75.67	Tinggi
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi	Persen	99.55	99.48	99.93	Sangat tinggi
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts	Persen	96.13	81.06	84.32	Sangat tinggi
6	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Orang	348	93.02	26.73	Sangat Rendah
7	Jumlah anak 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PAUD	orang	7828	81.3	1.04	Sangat Rendah
8	Persentase guru dan tenaga kependidikan professional	Persen	97	56.77	58.53	Rendah
1:02	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**					
1	Angka kematian bayi (AKB)	per 1.000 kelahiran hidup	17.6	9.00	148.86	Tercapai
2	Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	per 100,000 kelahiran hidup	108	84	122.22	Tercapai
4	Prevalensi Stunting	indeks	11.65	7.6	134.76	Tercapai

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target RPJMD 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Interpretasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Prevalensi Malnutrisi	Persen	19.65	5.7	170.99	Tercapai
4	Persentase Rumah Tangga PHBS	Persen	33	49.4	149.70	Tercapai
5	Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persen	50	65	130.00	Tercapai
6	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam	Persen	100	100	100.00	Tercapai
7	Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Persen	100	100	100.00	Tercapai
8	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	Persen	100	100	100.00	Tercapai
9	Visite Rate	/ Jumlah Penduduk	5	5.25	105.00	Tercapai
10	Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	Persen	50	93.3	186.60	Tercapai
11	Persentase UPT RSUD Terakreditasi	Persen	100	100	100.00	Tercapai
1:03	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**					
1	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	60	58.15	96.92	Sangat tinggi
2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	47	70.03	149.00	Tercapai
3	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	65	76.38	117.51	Tercapai
4	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	Persen	70	89.07	127.24	Tercapai
5	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	Persen	95	92.49	97.36	Sangat tinggi
6	Persentase ketersediaan Utilitas Umum (Drainase)	Persen	5.77		-	Sangat Rendah
7	Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	Persen	65	47.36	72.86	Tinggi
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	Persen	10	92.59	925.93	Tercapai
9	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang	Persen	10		-	Sangat Rendah

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target RPJMD 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Interpretasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Memenuhi Standar Kompetensi					
1:04	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**					
1	Cakupan permukiman layak huni	Persen	91.45	91.49	100.04	Tercapai
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	92.8	91.49	98.59	Sangat tinggi
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100	100	100.00	Tercapai
4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	Persen	100	100	100.00	Tercapai
5	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani	Persen	41.13	4.35	10.58	Sangat Rendah
6	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	65.57	50.02	76.28	Tinggi
7	Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	11.12	15.34	137.95	Tercapai
1:05	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**					
1	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100.00	Tercapai
2	Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	Persen	100	100	100.00	Tercapai
3	persentase Inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta	Persen	90	100	111.11	Tercapai
4	Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran	Persen	100	100	100.00	Tercapai
5	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	Nagari	1	3	300.00	Tercapai
6	Persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi	Persen	100	100	100.00	Tercapai

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target RPJMD 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Interpretasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	Persen	75	100	133.33	Tercapai
1:06	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**					Sangat Rendah
1	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	82	97.7	119.15	Tercapai
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100.00	Tercapai
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Persen	100	100	100.00	Tercapai
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
2:07	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**					
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	78.92	73.93	93.68	Sangat tinggi
2	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	Persen	29.32	36.4	124.15	Tercapai
3	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	44.36	39.2	88.37	Sangat tinggi
4	Persentase Kasus - Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan	Persen	100	100	100.00	Tercapai
2:08	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**					
1	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	Persen	100	100	100.00	Tercapai
2	persentase Organisasi perempuan yang aktif	Persen	98	100	102.04	Tercapai
3	Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	Predikat/ Nilai	-	pratama	100.00	Tercapai
4	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Predikat/ Nilai	Pratama	madya	100.00	Tercapai
5	rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	Persen	100	100	100.00	Tercapai

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target RPJMD 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Interpretasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Rasio KDRT	Persen	0.001	0.001	100.00	Tercapai
2:09	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**					
1	Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah	Persen	53	80.06	151.06	Tercapai
2	Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari	K.Kal/kap/hr	2,560	2,490	97.27	Sangat tinggi
3	Skor Pola Pangan Harapan	indeks	88	88.5	100.57	Tercapai
2:10	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**					
1	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat	Persen	37:34:00		-	Sangat Rendah
2	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	Persen	100		-	Sangat Rendah
3	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	Persil	7		-	Sangat Rendah
2:11	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**					
1	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	dokumen	2		-	Sangat Rendah
2	indeks kualitas air	indeks	56.3	54	95.91	Sangat tinggi
3	indeks kualitas udara	indeks	83.85	83.28	99.32	Sangat tinggi
4	indeks kualitas tutupan lahan	indeks	47.2	43.14	91.40	Sangat tinggi
5	Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi	Ha/Kawasan	Kawasan Lahan: 1	1	100.00	Tercapai
6	Meningkatnya luas tutupan lahan/Menurunnya lahan kritis	Ha	2	100	5,000.00	Tercapai
7	Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali)	persen	14	15.35	109.64	Tercapai
8	Penanganan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di	persen	15	80.48	536.53	Tercapai

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target RPJMD 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Interpretasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota)					
9	Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	usaha/kegiatan	20	20	100.00	Tercapai
2:12	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**					
1	Persentase kepemilikan KTP-el	Persen	100	95.56	95.56	Sangat tinggi
2	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	90	66.21	73.57	Tinggi
3	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun	Persen	97	96.36	99.34	Sangat tinggi
4	Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan	Persen	100	100	100.00	Tercapai
5	Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	90	100	111.11	Tercapai
6	Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	Persen	90		-	Sangat Rendah
7	Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan	unit	15		-	Sangat Rendah
8	Jumlah Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan	unit	15		-	Sangat Rendah
2:13	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**					
1	Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM	Persen	17.31	82.69	477.70	Tercapai

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target RPJMD 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Interpretasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Persentase APB nagari berbasis IDM	Persen	11.58	82.69	714.08	Tercapai
3	Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online	Persen	67.31	100	148.57	Tercapai
4	Persentase nagari memiliki bumnag berkembang	Persen	26.92	34.61	128.57	Tercapai
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	Persen	90	100	111.11	Tercapai
6	Jumlah Bumnag Bersama	unit	2	6	300.00	Tercapai
7	Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga	nagari	4	4	100.00	Tercapai
2:14	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**					
1	Angka kelahiran total	Persen	2.64		-	Sangat Rendah
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	Persen	81.25	70.19	86.39	Sangat tinggi
3	Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	Persen	10.23	12.53	122.48	Tercapai
4	persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA) aktif	Persen	100	100	100.00	Tercapai
5	persentase kelompok tribina yang aktif	Persen	100	100	100.00	Tercapai
2:15	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**					
1	Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan	Persen	62	0	-	Sangat Rendah
2	V/C (volume capaciti Ratio)	indeks	0.2		-	Sangat Rendah
3	jumlah penambahan trayek angkutan umum	trayek	0	0	#DIV/0!	-
4	persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR.	Persen	87	86.5	99.43	Sangat tinggi
5	akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	bobot	A	A	100.00	Tercapai

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target RPJMD 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Interpretasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2:16	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika**					
1	Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi		38 OPD	100	100.00	Tercapai
			20 Nagari			
			20 SMP			
			20 SD			
			8 Puskesmas			
2	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	aplikasi	15	100	666.67	Tercapai
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	aplikasi	70	100	142.86	Tercapai
2:17	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**					
1	persentase Koperasi Sehat	Koperasi	40	59.7	149.25	Tercapai
2	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	Usaha mikro	50		-	
	Jumlah Pelaku usaha mikro yang menjadi wirausaha		50	58.55	117.10	Tercapai
2:18	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**					
1	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	miliar rupiah	179,639	1,126.00	0.63	Sangat Rendah
2	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal	Persen	3.3	66.9	2,027.27	Tercapai
2:19	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**					
1	Jumlah cabang olahraga yang aktif	cabor	25	25	100.00	Tercapai
2	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi	cabor	23	15	65.22	Rendah
3	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional	cabor	5	4	80.00	Sangat tinggi
4	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	unit	9	236	2,622.22	Tercapai
5	Jumlah pemuda dan kepemudaan berprestasi	Orang	3	30	1,000.00	Tercapai

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target RPJMD 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Interpretasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Jumlah organisasi pramuka yang aktif	unit	17	210	1,235.29	Tercapai
7	Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	5	20	400.00	Tercapai
2:20	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**					
1	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persen	70	100	142.86	Tercapai
2	Jumlah Nagari Statistik	Nagari	30	4	13.33	Sangat Rendah
3	Jumlah Kecamatan Statistik	kecamatan	4	1	25.00	Sangat Rendah
2:21	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**					
1	Aplikasi yang dilakukan asesment	web, aplikasi	10	0	-	Sangat Rendah
2	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	Persen	50%		-	Sangat Rendah
2:22	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**					
1	Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan	Grup	90	38	42.22	Sangat Rendah
2	Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan	Jenis	16	16	100.00	Tercapai
3	Persentase lembaga adat yang aktif	Persen	85	85	100.00	Tercapai
4	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	unit	23	48	208.70	Tercapai
5	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Unit	100	102	102.00	Tercapai
2:23	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**					
1	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	orang	84,000	156,300	186.07	Tercapai
2	Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	Persen	44.97	44.57	99.11	Sangat tinggi
2:24	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**					
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	68.42	68.42	100.00	Tercapai
2	Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	Persen	38.46	38.46	100.00	Tercapai
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					
3:25	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan**					
1	Produksi Perikanan	Ton	28,123	25,449	90.49	Sangat tinggi

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target RPJMD 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Interpretasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3:26	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**					
1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	37567	188,463	501.67	Tercapai
2	Tingkat hunian akomodasi	Persen	20.493	61,514	300,170.79	Tercapai
3	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	Unit	40	45	112.50	Tercapai
4	Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina	lembaga	29	24	82.76	Sangat tinggi
3:27	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**					
1	Produksi Padi	ton	67,500	53,869	79.81	Tinggi
2	Produksi Jagung	ton	4,000	2,755	68.88	Rendah
3	Produksi Kelapa sawit	ton	103,000	123,104.94	119.52	Tercapai
4	Produksi karet	ton	30,200	32,712.38	108.32	Tercapai
5	Produksi Daging	ton	1,200	1,697.15	141.43	Tercapai
6	Populasi Ternak (Sapi/Kerbau)	ekor	42,100	42,612	101.22	Tercapai
						Sangat Rendah
3.30	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**					
1	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	%	39	48.63	124.69	Tercapai
2	Alat UTTP yang Beratanda tera sah	Unit	40	44.77	111.93	Tercapai
3:31	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**					
1	Persentase peningkatan omzet IKM	Persen	8.2	8.54	104.15	Tercapai
2	Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	Persen	80	75.68	94.60	Sangat tinggi
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					
4:01	**Sekretariat Daerah**					
1	Nilai LPPD	bobot	3.7		-	Sangat Rendah
2	Nilai SAKIP	bobot	72	64.65	89.79	Sangat tinggi
3	Nilai RB	bobot	67.7	57.28	84.61	Sangat tinggi
4:02	**Sekretariat DPRD**					
	Kinerja DPRD (sebagai indikator tujuan)					
1	Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan berdasarkan program rancangan peraturan daerah (Prompemperda)	Persen	85		-	Sangat Rendah
2	Persentase ditetapkanya PerdaAPBD dan APBD-P	Persen	100		-	Sangat Rendah

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target RPJMD 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Interpretasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Persentase rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	persen	100		-	Sangat Rendah
	Kinerja Sekretariat DPRD (sebagai indikator sasaran)					
1	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi	Persen	90	100	111.11	Tercapai
2	Persentase Fasilitasi hubungan Kerjasama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD	persen	90		-	Sangat Rendah
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					
5:01	**Perencanaan**					
1	Capaian sasaran RPJMD	Persen	90		-	Sangat Rendah
2	Rata-rata capaian sasaran Renstra PD	Persen	90		-	Sangat Rendah
3	Rata-rata capaian Kegiatan/sub kegiatan	persen	90		-	Sangat Rendah
5:02	**Keuangan**					
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	persen	WTP	WTP	100.00	Tercapai
2	Rata-rata ketergantungan dana transfer	persen	90	88.59	98.43	Sangat tinggi
3	Persentase SILPA terhadap APBD	persen	0.25	5.57	2,228.00	Tercapai
5:03	**Kepegawaian**					
1	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	68		-	Sangat Rendah
2	Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	persen	96	96.00	100.00	Tercapai
3	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	persen	47	81.90	174.26	Tercapai
4	Persentase kasus ASN yang tertangani	Persen	100	100.00	100.00	Tercapai
5:04	**Pendidikan Dan Pelatihan**					
1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	persen	15	85.01	566.73	Tercapai
5:05	**Penelitian Dan Pengembangan**					
1	Indeks inovasi daerah	indeks	Sangatinovatif(70)	55.61	79.44	Tinggi
5:06	**Pengelolaan Perbatasan**					

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Target RPJMD 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Interpretasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**					
6:01	**Inspektorat Daerah**					Sangat Rendah
1	Tingkat Kapabilitas APIP	Bobot	3 DC	3	100.00	Tercapai
2	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Bobot	3	2.96	98.67	Sangat tinggi
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**					
8:01	**Kesatuan Bangsa Dan Politik**					
1	Persentase Pembinaan Partai Politik	Persen	30	62.5	208.33	Tercapai
2	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	30	10.14	33.80	Sangat Rendah
3	Persentase Pembinaan LSM	Persen	30		-	Sangat Rendah
4	Jumlah Konflik Sosial	Kejadian	5	5	100.00	Tercapai
5	Jumlah Penyakit Masyarakat	kasus	3		0	Sangat Rendah

Sumber : Hasil Analisis Bapperida Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 132 indikator kinerja Perangkat Daerah berdasarkan urusan dapat disimpulkan bahwa sebanyak 97 indikator sudah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Dilihat berdasarkan capaian bahwa capaian sangat tinggi sebanyak 26 indikator, capaian tinggi sebanyak 6 indikator, capaian sedang sebanyak 1 indikator dan capaian rendah sebanyak 2 indikator.

2.3. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari permasalahan yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta adanya pencapaian yang mempunyai gap terhadap kondisi ideal. Adapun hasil identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah ini sifatnya permasalahan makro, dan merupakan permasalahan lintas sektor serta berkaitan dengan isu strategis daerah yang juga perlu menjadi perhatian perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya untuk diselesaikan pada Tahun 2024

1. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka.
   Pada dasarnya sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan mengingat peran sumber daya manusia sebagai motor penggerak serta bagian dari proses dan tujuan pembangunan. Di sisi lain tantangan bonus demografi dan perubahan industri di era digital atau revolusi industri menuntut perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Dharmasraya. Hingga saat ini kualitas sumber daya manusia Kabupaten Dharmasraya dinilai belum memadai yang ditunjukkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meskipun termasuk dalam kategori tinggi, dengan nilai 73,87, sementara jika dibandingkan dengan IPM Provinsi dan Nasional masih dibawah provinsi dan nasional serta penurunan ranking dari peringkat 10 tahun 2022 menjadi peringkat 11 di tahun 2023, sehingga kondisi ini berakibat pada masih lambatnya perkembangan dimensi pengetahuan dalam mendorong perkembangan IPM.

2. Masih tingginya angka kemiskinan
   Dilihat berdasarkan data tingkat kemiskinan Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 sebesar 5,56%, angka ini lebih rendah dari tingkat kemiskinan provinsi dan nasional. Di sisi lain, rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cukup besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa bukan hanya jumlah absolut penduduk miskin yang menjadi permasalahan utama di Kabupaten Dharmasraya, juga termasuk ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk miskin.

   Kualitas sumber daya manusia juga terkait dengan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan ukuran usia harapan hidup. Kualitas usia harapan hidup berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penguatan sistem kesehatan. Selain derajat kesehatan, kebugaran menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan dimensi pengetahuan untuk indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya yang masih relatif rendah.

3. Kondisi kapasitas, daya saing, serta pemerataan perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur.

   Perekonomian Kabupaten Dharmasraya masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 sampai tahun 2023 meningkat positif, meskipun sangat melambat pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB terkontraksi (mengalami pertumbuhan negatif), namun pasca covid-19 pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh positif dan mengalami percepatan. Perekonomian Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan sektor-sektor unggulan yaitu sektor yang memiliki kontribusi tertinggi yaitu pada; sektor pertanian, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan kontruksi. Selanjutnya pertumbuhan PDRB ADHK terbesar yaitu pada: sektor Informasi dan Komunikasi: jasa lainnya; dan akomodasi. Ditinjau dari pertumbuhan sektor PDBR di atas, justru pertumbuhan tertinggi bukan terletak pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar, sehingga pada jangka waktu panjang dan menengah Dharmasraya akan mengalami perubahan sektor pembentuk PDRB. Tantangan kedepan adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan antar masyarakat dan antar wilayah yang ditunjukan dari Rasio Gini Dharmasraya. Dilihat berdasarkan data tahun 2022, gini rasio Kabupaten Dharmasraya lebih rendah dari Provinsi dan Nasional. Tetapi pada tahun 2023 gini rasio Kabupaten Dharmasraya naik menjadi 0,291 dan lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat yang hanya 0,280.

4. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana.
   Tuntutan kebutuhan akan sumber daya alam semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitasnya. Namun disisi lain ketersediaan sumber daya alam bersifat tetap bahkan semakin menurun akibat eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Kondisi ini yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Dharmasraya semakin menurun.

   Tekanan lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya ditunjukkan dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang di tahun 2020 sebesar 67,94 masuk dalam kategori cukup. Namun pada tahun 2021 kembali terjadi penurunan kualiatas Udara yang mengakibatkan IKLH menurun menjadi 63,38 sebagai kategori kurang. Selanjutnya di tahun 2022 kembali terjadi sedikit kenaikan di bandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2023 IKLH Kabupaten Dharmasraya menurun menjadi 63,48 tetapi masih termasuk kategori kurang.

Selain itu dampak perubahan iklim juga semakin dirasakan di Kabupaten Dharmasraya terutama ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara, dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksikan. Kondisi tersebut akhirnya berdampak pada terjadinya bencana yang juga tidak dapat diprediksikan apalagi Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Dharmasraya yang sebesar 130,03 di tahun 2023, atau pada kategori sedang.

5. Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi.
   Dalam rangka menjawab tantangan global, perlu dioptimalkan implementasi reformasi birokrasi antara lain percepatan pelayanan publik yang tepat sasaran, penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kapasitas kelembagaan yang sesuai proses bisnis, kapasitas dan pola pikir sumber daya aparatur yang semakin adaptif dan terbuka, serta birokrasi yang kolaboratif, yang kesemuanya didukung dengan digitalisasi pemerintahan. Reformasi birokrasi ditunjukkan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dimana IRB Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 sebesar 57,28 (CC) meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 50,20 (CC). Meskipun kinerjanya semakin baik dari tahun ke tahun, namun yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana birokrasi tidak hanya tentang administrasi namun lebih mendorong agar dapat menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya

2.3.2. Permasalahan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah merupakan permasalahan dari hasil analisis gambaran aspek pelayanan umum yang meliputi seluruh urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sebagai berikut:

2.3.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
   Keberhasilan dalam pembangunan pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, berkarakter dan berdaya saing. Permasalahan pokok urusan pendidikan yang masih perlu dioptimalkan ke depan adalah kualitas penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan merata di Kabupaten Dharmasraya yang ditandai dengan permasalahan antara lain:
   - Angka rata-rata lama sekolah lebih rendah dari provinsi dan nasional;

- Belum optimalnya sarana prasarana fasilitas pembelajaran (seperti ruang kelas SD dan SMP) dalam kondisi baik;
- Masih relatif rendahnya dimensi pengetahuan/ pendidikan dibandingkan nasional dan Provinsi Sumatera Barat
- Masih kurangnya sarana dan prasarana PAUD berupa Alat Peraga Edukatif (APE), ruang kelas dan UKS
- belum maksimalnya penataan kelembagaan PAUD
- belum optimalnya pelaksanaan pendidikan ke-orangtuaan (*Parenting*) dan peran orang tua di sekolah
- Masih adanya gedung sekolah dalam kondisi rusak
- Masih kurangnya tenaga pendidik pada sekolah dasar
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung sekolah serta pengelolaan perpustakaan sekolah tingkat SD dan SLTP

8. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

a. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

- Penyebab Angka Kematian Ibu (AKI), yaitu terjadinya pendarahan saat melahirkan, usia ibu saat hamil, masih ada ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya pada trimester pertama kehamilan, masih ada persalinan ditolong oleh non kesehatan.
- Belum berjalannya sistem rujukan pada ibu bersalin, masih ada ibu yang tidak melakukan pemeriksaan rutin kepada bayi termasuk pemberian imunisasi. Masih ditemui remaja anemia, ibu hamil KEK.
- Kondisi geografis Kabupaten Dharmasraya yang merupakan perbukitan dan kondisi jalan yang tidak memadai sehingga petugas kesehatan mengalami kesulitan memberikan pelayanan kedaerah sulit/terpencil.
- Kurang memadainya sarana dan prasarana dilapangan kesehatan pada ibu dan bayi belum maksimal.

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

- Masih adanya Angka Kematian Bayi di Kabupaten Dharmasraya, disebabkan oleh penyakit infeksi dan kekurangan gizi.
- Kematian pada bayi juga disebabkan oleh adanya trauma persalinan dan kelainan bawaan yang disebabkan oleh rendahnya status gizi ibu pada saat kehamilan,
- Kurangnya jangkauan pelayanan kesehatan dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.

c. Prevalensi Malnutrisi

Masih adanya prevalensi malnutrisi di Kabupaten Dharmasraya yaitu masih ditemuinya remaja yang anemia, ibu hamil KEK, bayi BBLR yang disebabkan jika ibu hamil menderita kurang energi protein akan berpengaruh pada gangguan

fisik, mental dan kecerdasan anak, juga meningkatkan resiko bayi yang dilahirkan kurang zat besi.

d. Persentase Rumah Tangga PHBS

- masih rendahnya indikator PHBS yaitu merokok, dimana indikator merokok sangat mempengaruhi terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Kabupaten Dharmasraya sudah mengeluarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok seharusnya dengan adanya peraturan tersebut memperkuat orang tidak merokok.

e. Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani s24 jam

Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani s24 jam di Kabupaten Dharmasraya sudah semua kasus kejadian luar biasa tertangani

f. Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Permasalahan yang terjadi pada Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Kabupaten Dharmasraya adalah belum semua masyarakat yang beresiko mau memeriksakan kesehatannya secara rutin ke fasilitas kesehatan.

g. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular

Masih adanya ditemui kasus pasung pada ODGJ berat, dan masih kurangnya peranan keluarga dalam pendampingan pasien minum obat pada kasus TBC dan ODGJ berat.

h. Visite Rate

Masih kurangnya pemahaman fasilitas kesehatan dengan definisi operasional (DO) visite rate.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   - Masih rendahnya kondisi jalan mantap di Kabupaten Dharmasraya, tahun 2023, proposrsi jalan kabupaten dalam kondisi mantap baru mencapai 58,15%.
   - Pembangunan jalan tidak diiringi dengan pembangunan drainase jalan kabupaten terutama pada daerah rawan genangan
   - Sebagian besar kondisi jembatan tidak baik
   - Masih adanya jaringan irigasi yang rusak
   - Masih kurangnya dinding pengamanan sungai terutama pada kawasan perumahan dan permukiman
   - Belum seluruh rumah tangga terlayani air minum perpipaan
   - Kelembagaan pengelolaan air minum masih berupa UPT Air Minum
   - Belum optimalnya pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman;
   - rumah masyarakat sudah memiliki tangki septik tetapi belum semuanya memenuhi ketentuan teknis.
   - Terbatasnya pelayanan sedot tinja
   - Kurangnya sarana dan prasarana IPLT
   - Belum semua PD memiliki gedung miulik sendiri dan yang representatif

- Minimnya regulasi terkait bangunan gedung
- Belum adanya rencana rinci/RDTR yang ditetapkan sebagai rujukan bagi perizinan yang berskala besar, dimana RTRW merupakan rencana umum sehingga ketentuan-ketentuan rinci tidak dapat ditampilkan secara spesifik
- Belum optimalnya peran kelembagaan penataan ruang

10. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
    - Masih terdapat rumah tidak layak huni;
    - Masih belum terpenuhinya kecukupan prasarana dan sarana umum (PSU) permukiman.
    - Masih rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman akibat masih minimnya sanitasi lingkungan
    - Masih rendahnya penanganan kawasan permukiman kumuh

11. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
    - Masih adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tidak tertangani
    - Masih adanya gangguan trantibum
    - Masih kurangnya SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang trantibum
    - Wilayah kerja pemadan kebakaran belum sesuai dengan standar pelayanan.
    - Belum adanya pembentukan nagari tangguh bencana
    - Masih kurangnya SDM yang terlatih dalam menanggulangi kebencanaan
    - Belum adanya pemetaan daerah rawan bencana

12. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
    - Belum semua PD memiliki akses kaum disabilitas
    - Belum tersedianya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akurat
    - Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) rendah, hal ini terlihat dari data perkembangan IPG tahun 2018 hingga tahun 2022, maka perkembangan IPG Kabupaten Dharmasraya menunjukkan perkembangan positif, namun perkembangannya tidak sebagus nasional dan provinsi.
    - Masih adanya kasus kekerasan pada anak;
    - Partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak belum optimal;

2.3.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

13. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
    - Belum semua peserta lulusan pelatihan ditempatkan pada dunia kerja
    - Masih adanya kasus-kasus ketenagakerjaan yang belum terselesaikan.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    - Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak di lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar
    - Belum optimalnya peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga;
    - Belum optimalnya peran perempuan dan anak dalam pembangunan

15. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
    - Keragaman konsumsi pangan masih rendah
    - Kebiasaan/pola makan masyarakat yang belum sesuai dengan pola pangan harapan
    - Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pola konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
    - Pemanfaatan pangan lokal non beras sebagai sumber energi belum maksimal

16. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
    - Belum seluruhnya tanah milik pemerintah bersertifikat
    - Belum semua sekolah dan instansi pemerintah memiliki sertifikat
    - Masih adanya konflik pertanahan di masyarakat
    - Masih belum adanya pemetaan tanah milik ulayat

17. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
    - Rendahnya kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan
    - Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai pengelolaan sampah di TPA
    - Belum maksimalnya sistem pengelolaan persampahan di TPA
    - Rendahnya cakupan ketaatan usaha dan/ atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3

18. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    - Belum optimalnya capaian penerbitan kartu identitas anak
    - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencatatan kematian

19. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    - Belum semua nagari yang menyusun APB, RPJM/RKP Nagari berbasis IDM..
    - Belum berkembangnya skala usaha BUMNag
    - Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari belum berjalan secara optimal dikarenakan masih rendahnya SDM perangkat Nagari
    - Masih kurangnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat
    - Belum adanya pembangunan nagari berbasis kawasan

20. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    - Masih ada pasangan usaha subur yang belum berKB
    - Masih kurangnya tenaga PKB/PLKB

21. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
    - Masih kurangnya rambu-rambu atau perangkat jalan sehingga sering terjadi kecelakaan
    - Belum adanya dokumen kebijakan terkait lalu lintas atau master plan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ)
    - Belum adanya terminal angkutan orang

22. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
    - Masih terbatasnya informasi pemerintah daerah yang dapat diakses oleh masyarakat (keterbukaan informasi publik)
    - Belum seluruhnya sistem informasi berjalan secara terintegrasi
    - Belum seluruh nagari memiliki kelompok informasi masyarakat (KIM)
    - Belum kurang updatenya perangkat daerah memberikan informasi publik
23. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
    - Belum jelasnya regulasi yang mengatur tentang pembubaran koperasi yang tidak aktif
    - Masih rendahnya komitmen pengurus koperasi dalam peningkatan kinerja dan volume usaha
    - Belum seluruhnya UMKM dapat meningkatkan akses terhadap pasar offline dan online
    - Masih terbatasnya akses UMKM dalam mendapatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat).

24. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
    - Masih adanya regulasi yang belum mendukung dalam peningkatan investasi daerah
    - Masih terdapatnya sistem data base perizinan secara manual

25. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
    - Masih kurangnya prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional
    - Masih kurangnya pembinaan cabang olahraga prestasi
    - Belum optimalnya pemanfaatan GOR
    - Masih terdapatnya beberapa cabang olahraga yang belum memiliki pelatih bersertifikat
    - Masih kurangnya pemuda berprestasi
    - Belum optimalnya jumlah organisasi pramuka yang aktif

26. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
    - Masih kirangnya ketersediaan dan keakuratan data statistik sektoral
    - Belum handalnya pencatatan data sektoral di SKPD
    - Belum seluruh nagari dan kecamatan terbentuk sebagai nagari statistik dan kecamatan statistik

27. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
    - Keterbatasan tenaga sumber daya manusia yang mampu mengelola pengamanan aplikasi dan website sehingga harus kerjasama dengan BSSN
    - Belum terdapatnya standar keamanan informasi yang ada di Kab. Dharmasraya
    - Belum adanya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pengamanan aplikasi, server dan website

28. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
    - Masih kurangnya group kesenian yang dapat dibina
    - Masih kurangnya kesenian daerah yang dilestarikan.
    - Belum optimalnya peran serta lembaga adat dalam pemajuan kebudayaan
    - Sedikitnya Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan
    - Masih belum optimalnya inventarisasi dan observasi benda dan tak benda cagar budaya yang ditetapkan
29. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
    - Belum adanya gedung layanan perpustakaan
    - Masih rendahnya minat baca
    - Masih rendahnya layanan kunjungan ke perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling
    - Masih belum optimalnya manajemen perpustakaan (daerah, sekolah dan TBM)

30. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
    - Belum semua OPD dan nagari mengelola arsip secara baku

2.3.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

31. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
    - Belum optimalnya pengelolaan terhadap potensi perikanan
    - Relatif rendahnya produktifitas perikanan budidaya
    - Menurunnya kualitas air mengakibatkan produksi dan keanekaragaman perikanan tangkap menurun
32. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
    - Belom optimalnya inventarisasi dan pengelolaan destinasi
    - Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata
    - Belum adanya even tahunan
33. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
    - adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun
    - Belum optimalnya pemakaian benih/bibit unggul yang bersertifikat,
    - Pengelolaan limbah pertanian dan limbah ternak yang belum terkelola
34. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
    - Secara umum pasar yang ada tidak representatif
    - Pengelolaan sampah pasar yang belum optimal
    - Masih adanya alat-alat metrologi yang belum terstandar

35. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
    - Masih rendahnya daya saing produk IKM
    - Belum optimalnya pemanfaatan IKM Logam

2.3.2.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

36. Perencanaan
    - Masih kurangnya ketersediaan dan keakuratan data
    - Pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan

37. Keuangan
    - Masih tingginya ketergantungan pendanaan pembangunan daerah terhadap dana tranfer

38. Kepegawaian
    - Rendahnya jumlah PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan standard kompetensi jabatan sebagai jaminan profesionalisme PNS
    - terdapat kesenjangan antara kompetensi ASN dengan kebutuhan instansi
    - belum adanya sanksi yang tegas bagi ASN yang melanggar aturan

39. Pendidikan dan Pelatihan
    - Kurangnya komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan sumberdaya aparatur

40. Penelitian dan Pengembangan
    - Masih kurangnya lembaga untuk melakukan kerjasama penelitian
    - Masih kurangnya inovasi yang diciptakan OPD dalam pelaksanaan urusan

2.3.2.5. Unsur Pemerintahan Umum

41. Kesatuan Bangsa dan Politik
    - Belum optimalnya penanganan masalah kasus penyakit masyarakat dan Konflik Sosial
    - Belum optimalnya forum-forum Strategis Kesbangpol yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban.
    - Lemahnya system pelaporan dari nagari dan kecamatan mengenai situasi dan kondisi daerah.
    - maraknya penyalahgunaan kasus narkoba dilakukan Koordinasi dengan Instansi terkait, FORKOPIMDA dan Tokoh masyarakat adat setempat.
    - permasalahan mengenai Konflik yang terjadi mengenai batas tanah ulayat telah di adakan koordinasi dan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat

antara perusahan dengan warga masyarakat dengan melibatkan pemda dan Aparat yang berwajib.

BAB 3. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Penetapan kebijakan Kerangka Ekonomi Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi pemerintah pusat maupun Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka merumuskan kebijakan tersebut akan disajikan perbandingan antara kebijakan perekonomian nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya dengan menyajikan data eksisting tahun 2019 hingga sampai dengan 2023 serta proyeksi untuk tahun 2024 dan tahun 2025 disertai dengan analisa secara komprehensif. Sehingga dari hasil analisa tersebut akan melahirkan kebijakan yang saling mengacu dan saling mendukung untuk menciptakan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan potensi maupun permasalahan/isu strategis yang akan dihadapi ke depan.

Berikut adalah penjelasan mengenai kebiijakan kebijakan perekonomian Nasional, Provinsi Sumatera Barat maupun Kabupaten Dharmasraya akan dijelaskan masing-masing sebagai berikut :

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

3.1.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

Ketidakpastian global semakin kompleks, disebabkan oleh banyaknya risiko dari sisi ekonomi, keuangan, geopolitik, dan lingkungan. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi global melambat dengan pertumbuhan sebesar 3,2 persen dari pertumbuhan 3,5 persen di tahun 2022. Pada tahun 2024 diprakirakan pertumbuhan ekonomi global akan stagnan

pada tingkat pertumbuhan 3,2 persen. Pertumbuhan ekonomi global tersebut relatif rendah dibandingkan dengan pertumbuhan historis. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor jangka pendek, seperti masih tingginya biaya pinjaman dan kurangnya dukungan fiskal, dampak invasi Rusia ke Ukraina, lemahnya pertumbuhan produktivitas, serta meningkatnya fragmentasi geopolitik dan geoekonomi. Selain itu, eskalasi Timur Tengah utamanya Iran dan Israel juga meningkatkan tensi geopolitik dan dampak yang meluas. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang diprakirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi global dan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan negara maju.

Gambar 3-1 Pertumbuhan Ekonomi Global

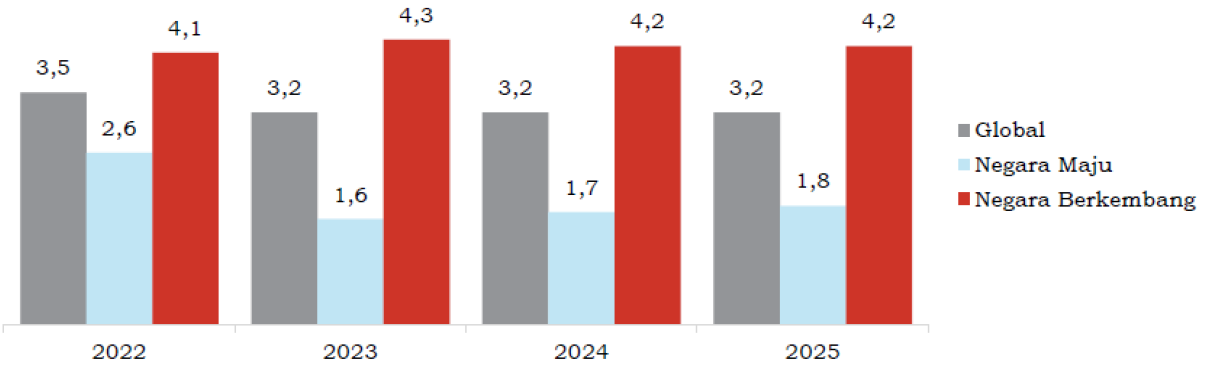

Sumber: World Economic Outlook Update, April 2024

- Aktivitas perdagangan global tahun 2023 mengalami perlambatan, tecermin dari penurunan Baltic Dry Index menjadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56 dari level rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 di antaranya disebabkan oleh pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, dan ketegangan geopolitik. World Trade Organization dalam Global Trade Outlook and Statistics April 2024 memproyeksi volume perdagangan pada tahun 2023 kembali melambat dan terkontraksi sebesar 1,2 persen, setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 9,6 persen dan 3,0 persen.
- Pada tahun 2024, perdagangan global diproyeksikan hanya akan tumbuh sebesar 2,6 persen disebabkan oleh adanya ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi Tiongkok, serta tekanan harga pangan akibat perubahan iklim. Harga komoditas global diproyeksikan akan mengalami penurunan lebih lanjut, namun masih berada di atas rata-rata harga komoditas global sebelum pandemi. Adanya peningkatan jumlah pembatasan perdagangan di negara mitra dagang berdampak pada rantai nilai global yang lebih terfragmentasi dan memicu pertumbuhan perdagangan global yang lebih lambat. Pemulihan perdagangan global pada tahun 2021 hingga 2024 diproyeksikan akan menjadi yang terlemah setelah resesi global dalam lima puluh tahun terakhir.

Tabel 3-1 Capaian dan Prakiraan Sasaran pembangunan dan Ekonomi Makro Tahun 2024-2025

No.	Indikator	Capaian				Sasaran 2024		Sasaran 2025
		2020	2021	2022	2023	Sasaran	Outlook	
Sasaran Pembangunan								
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	-2,07	3,7	5,31	5,05	5,3-5,7	5,2	5,3–5,6
2	Tingkat pengangguran terbuka (TPT	7,07	6,49	5,86	5,32	5,0-5,7	5,0-5,07	4,5-5,0
3	Rasio Gini	0,385	0,381	0,381	0,388	0,374-0,377	0,381-0,384	0,379-0,382
4	Tingkat Kemiskinan	10,91	9,71	9,57	9,36	6,5-7,5	8,5-9,0	7,8-8,0
5	Indeks Pembangunan Manusia	72,81	73,16	73,77	74,39	73,99-74,02	75,09	
6	Penurunan Emisi GRK	24,46	27,07	27,82	27,02	27,27	27,27	38,6
Indikator Pembangunan								
7	Nilai Tukat Petani (NTP)	101,65	104,64	107,33	112,46	105-108	105-108	
8	Nilai Tukar Nelayan	100,22	104,69	106,45	105,4	107-110	107-110	
Indikator Ekonomi Makro								
9	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen 9IHK) (%,yoy) Akhir Periode	1,68	1,87	5,51	2,61	1,5-3,5	2,7	1,5–3,5
10	Nilai Tukar Rupiah	14.543	14.296	14.847	15.235		15.200-15.700	15.200-15.40000
11	Cadangan Devisa (US$ miliar)	135,9	144,9	137,2	146,4	149,1-150,2	147	149,5–153,7
12	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	10,2	8	6	6,5	6,0-5,8	6,3	6,1–6,1
13	Neraca transaksi berjalan (% PDB)	-0,4	0,3	1,0	-0,1	0,5-0,4	-0,5	(0,4)–(0,2
14	Kontribusi PDB Industri pengolahan (%)	19,87	19,24	18,34	18,67		18,75	19,9–20,0
15	Kontribusi PDB Pariwisata (%)	2,24	2,3	3,6	4,1		4,5	4,6
16	Nilai devisa pariwisata (miliar US$	3,6	0,55	7,04	14,63		17,64	22,1
17	Penerimaan perpajakan (% PDB)	8,33	9,12	10,39	10,32	9,9-10,2	10,12	10,70–11,20

No.	Indikator	Capaian				Sasaran 2024		Sasaran 2025
		2020	2021	2022	2023	Sasaran	Outlook	
18	Keseimbangan primer (%PDB)	-4,11	-2,54	-0,38	0,42	(0,0)-(0,4)	-0,11	0,00–0,00
19	Surplus/defisit APBN (%PDB)	-6,14	-4,57	-2,35	-1,66	(2,2)-(2,6)	-2,29	(2,45)–(2,80)
20	Stok utang pemerintah (%PDB)	39,39	40,73	39,7	38,39	38,1-39,0	38,26	39,78–39,98
21	Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	-4,96	3,8	3,87	4,4	6,2-7,0	5,26	6,5–7,8
22	Nilai investasi PMA dan PMDN (triliun Rp)	828,33	901,02	1.207,20	1.418,87	1.450-1.650	1.450-1.650	1.868,2–1.905,6
23	Nilai realisasi PMA dan PMDN sektor sekunder (triliun Rp)	272,93	325,43	497,71	596,27	662,7-731,1	662,7-731,1	805,5–842,2

Sumber : * RKP 2025

Berdasarkan Narasi Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2025, maka dapat dilihat bahwa realisasi indikator pembangunan tahun 2020 hingga tahun 2023 terlihat adanya peningkatan kinerja pembangunan nasional, baik indikator yang dikelompokkan pada sasaran pembangunan, indikator pembangunan maupun indikator yang terdapat pada indikator makro.. Sehingga berdasarkan hasil evaluasi pembangunan hingga tahun 2023 tersebut, maka terdapat penyesuaian target (outlook) tahun 2024 dan dilanjutkan dengan penetapan target pembangunan tahun 2025.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah. "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan Gross National Income per kapita (Atlas Method) menjadi US$5.500–5.520 atau bertahan pada kategori upper-middle income countries di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2025 sebesar 5,3–5,6 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Tingkat Inflasi dijaga stabil dalam rentang 1,5-3,5 persen (yoy) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp15.000-Rp15.400 per US$.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat. Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga pada target Bank Indonesia serta peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh terjaga sejalan dengan dukungan pemerintah dalam pembangunan. Kinerja ekspor ditargetkan tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan ekspor utamanya produk industri. Sementara impor juga diprakirakan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi

3.1.1.2 Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2025

Kebijakan Fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka

mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kebijakan berfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (well-being), serta mendorong pemerataan antardaerah.
Instrumen fiskal akan diarahkan untuk menyediakan ruang memadai bagi pencapaian sasaran pembangunan dengan cara optimalisasi Pendapatan Negara (collecting more), peningkatan kualitas Belanja Negara (spending better), serta perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (innovative financing) yang dikelola secara prudent dan kredibel.

1) Pendapatan Negara dan Hibah
Pendapatan Negara dan Hibah ditargetkan mencapai 13,21–14,20 persen Produk Domestik Bruto, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar 10,70–11,20 persen Produk Domestik Bruto dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 2,50–3,00 persen Produk Domestik Bruto. Optimalisasi Pendapatan Negara diarahkan pada upaya perbaikan administrasi dan pemungutan perpajakan yang lebih efektif sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. Arah kebijakan difokuskan pada penguatan kelembagaan penerimaan negara, percepatan implementasi core tax system, penguatan kegiatan ekstensifikasi pajak, penajaman tax incentive tepat sasaran untuk mendorong sektor prioritas, serta reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sumber daya alam, optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara, pemanfaatan aset Barang Milik Negara, serta inovasi layanan.

Selain itu, upaya peningkatan penerimaan perpajakan juga dilakukan di daerah sejalan dengan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, antara lain didukung oleh Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah serta penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan.

2) Belanja Negara
Pada tahun 2025, Belanja Negara ditargetkan mencapai 15,66–17,01 persen Produk Domestik Bruto, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 11,61–12,74 persen Produk Domestik Bruto dan Transfer ke Daerah sebesar 4,05–4,27 persen Produk Domestik Bruto. Kebijakan Belanja Negara, baik Belanja Kementerian/Lembaga, Belanja Non-Kementerian/Lembaga, dan Belanja Transfer ke Daerah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dengan tetap mendorong peningkatan Kualitas Belanja Negara (spending better) supaya lebih produktif untuk mendukung prioritas pembangunan (antara lain pendidikan, kesehatan, subsidi dan perlindungan sosial tepat sasaran, infrastruktur/konektivitas, serta pembenahan kelembagaan dan regulasi) dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.

3) Defisit dan Pembiayaan Negara

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 diarahkan mendorong produktivitas dengan memberikan ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dimana Defisit Anggaran ditargetkan sebesar (2,45)–(2,80) persen Produk Domestik Bruto, dan belanja investasi below the line sebesar satu persen Produk Domestik Bruto. Dengan kebijakan tersebut, upaya perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan diarahkan pada upaya penyediaan pembiayaan yang kredibel untuk mendukung kebutuhan pembangunan baik melalui pembiayaan utang dan non-utang (optimalisasi Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha dan blended finance). Fokus pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain untuk penyediaan infrastruktur yang berkualitas, proyek-proyek yang menghasilkan imbal hasil serta memberikan efek pengganda besar terhadap perekonomian, serta diarahkan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagai agent of development yang mendukung prioritas pembangunan nasional.

Sebagai bentuk sinergi kebijakan fiskal nasional, perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan juga perlu dilakukan di tingkat pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut di antaranya melalui pemanfaatan instrumen pinjaman daerah dan obligasi/sukuk daerah untuk percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

Berdasarkan pendapatan belanja dan pembiayaan anggaran tersebut di atas, rincian sasaran fiskal tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel 2.3 berikut

Tabel 3-1 Rincian Sasaran Fiskal Tahun 2025

Uraian	Realisasi 2023	APBN 2024	Sasaran 2025
Pendapatan negara dan hibah	13,28	12,27	13,21-14,20
Penerimaan Perpajakan	10,32	10,12	10,70-11,2-0
PNBP	2,9	2,15	2,50-3,00
Belanja Negara	14,94	14,56	15,66-17,01
Belanja Pemerintah Pusat	10,72	10,81	11,61-12,74
TKD	4,22	3,76	4,05-4,27
Keseimbangan Primer	0,42	-0,11	0,00-0,00
Surplus/Defisit	-1,66	-2,29	(2,45)-(2,8)
Pembiayaan Investasi	-0,43	-0,77	(0,80)-(1,00)
Stok Utang Pemerintah	38,98	38,23	39,78-39,98

Sumber : Narasi RKP 2025

3.1.2. Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Secara keseluruhan tahun, perekonomian Sumatera Barat tumbuh kuat pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,62% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,32% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pemulihan aktivitas ekonomi yang lebih baik pasca pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di akhir tahun 2022.

Berdasarkan komponen pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 didorong oleh komponen PMTB dan Konsumsi Pemerintah. Dari sisi lapangan usaha, perbaikan kinerja ekonomi Sumatera Barat tahun 2023 terjadi pada lapangan usaha Konstruksi dan Industri Pengolahan.

Tekanan inflasi Sumatera Barat pada triwulan IV 2023 mengalami peningkatan. Inflasi pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar 2,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,94% (yoy). Peningkatan inflasi didorong oleh akselerasi konsumsi dan mobilitas masyarakat pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru sehingga menyebabkan gejolak harga utamanya komoditas pangan dan transportasi. Meningkatnya transmisi penyesuaian komponen harga yang diatur pemerintah, terutama cukai hasil tembakau, juga berpengaruh pada realisasi inflasi yang lebih tinggi di akhir tahun.

Lebih lanjut, berbagai faktor lain seperti curah hujan yang relatif tinggi, harga emas dunia yang fluktuatif, serta ketidakpastian ekonomi dan keuangan global juga menjadi pendorong inflasi gabungan Sumatera Barat. Meskipun mengalami peningkatan, inflasi gabungan Sumatera Barat pada triwulan IV 2023 mencatatkan capaian lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi Nasional sebesar 2,61% (yoy) serta berada dalam rentang sasaran inflasi yang ditetapkan sebesar 3 ± 1 % (yoy).

Tabel 3-2 Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2024-2025

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2022	2023	2024	2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,36	4,62	5,00	5,05
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	32,67	33,47	34,75	36,10
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	50,52	53,92	57,94	62,29
4	Indeks Gini (Rasio)	0,292	0,291	0,290	0,289
5	Indeks Williamson	0,316	0,321	0,320	0,319
6	Tingkat Kemiskinan (%)	6,04	5,95	5,83	5,65
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	343,82	340,37	338,70	330,84
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,28	5,94	5,75	5,55
9	IPM	75,16	75,80	76,67	77,41
	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,88	74,14	74,22	74,79

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2022	2023	2024	2025
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,10	14,11	14,12	14,13
	Rata-rata Lama Sekoh (Tahun)	9,18	9,28	9,37	9,46
	Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.130	11.380	11.547	11.719
10	Inflasi (%)	7,43	2,46	3,50	3,50

Sumber : * Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.
2) Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam middle income trap. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki backward dan forward linkage yang besar.
3) Pembangunan di sektor pertanian dan perdagangan yang merupakan sektor dengan distribusi PDRB yang dominan di Sumatera Barat diarahkan untuk peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.
4) Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Kenaikan tingkat inflasi di tahun 2022 akan terus ditekan hingga kembali ke level sebelum pandemi. Program akselerasi perekonomian dan transformasi ekonomi akan berlanjut di tahun 2024 dan 2025 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
5) Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan guna menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, menurunkan tingkat ketimpagan antar wilayah, pengurangan kemiskinan, perluasan akses dan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kuallitas Sumber Daya Manusia yang diukur melalui peningkatan nilai IPM.

3.1.3. Arah Kebijakan Perkekonomian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

Sejalan dengan menguatkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Sumatera Barat, maka perkembangan ekonomi di Kabupaten Dharmasraya juga memperlihatan perkembangan yang positif. Selanjutnya adanya peningkatan pendapatan perkapita yang sudah mencapai 55,62 juta rupiah di tahun 2023. Namun perkembangan tersebut beum dapat menekan tingkat kemiskinan maupun ketimpangan pendapatan masyarakat. Namun pada tingkat pengangguran terbuka sudah menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan tahun 2022, atau turun dari 6,23 persen menjadi 6,22 persen.

Tabel 3-3 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 s/d 2023 dan proyeksi tahun 2024 s/d 2025

No	Indikator	Realisasi			Sasaran		
		2021	2022	2023	2024	2025 RPJMD	2025 RKPD
1	Pertumbuhan PDRB (persen)	3,42	4,28	4,32	4,5	4,7	4,7
2	PDRB Perkapita ADHB (Juta rupiah)	46,52	52,12	55,62	55,95	46,74	56,00
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,63	5,56	5,56	5,4	5,92	5,3
4	Gini Rasio	0,268	0,287	0,291	0,284	0,250	0,270
5	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5,00	6,23	6,22	5,3	5,1	5,1
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,76	72,30	73,04	74,8	72,29 75	75

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024, dan hasil analisis Tim Penyusun RKPD Tahun 2025

Keterangan :

* = Proyeksi indikator makro

Berdasarkan hasil evaluasi capaian 6 (enam) indikator ekonomi makro Kabupaten Dharmasraya, maka dapat dijelaskan debagai berikut :

1. Pertumbuhan PDRB, berdasarkan perkembangan PDRB tahun 2021-2023 maka target pertumbuhan ekopnomi Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 masih dapat mengikuti target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 4,7 persen
2. PDRB perkapita, perkembangan PDRB nilai PDRB ADHB hingga tahun 2023 selalu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan atau sudah melampaui target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dimana target RPJMD di tahun 2025 semula ditetapkan sebesar 46,74 juta ditingkatkan menjadi 56 juta rupiah
3. Tingkat kemiskinan, proyeksi tingkat kemiskinan juga diproyeksikan lebih baik dari taret yang dtetapkan dalam RPJMD. Hal ini didasari oleh perkembangan hingga tahun 2023 yang masih memperlihatkan kecenderungan turun.

4. Gini rasio, sedangkan untuk indeks gini yang memperlihatkan ketimpangan pedapatan penduduk berbanding negatif dari indikator lainnya. Karena dilihat dari perkembangan hingga tahun 2023 masih belum memperlihatkan penurunan.
5. Tingkat Pengangguran Terbuka, meskipun tingkat pengangguran di Kabupaten Dharmasraya terlihat cenderung meningkat. Namun dilihat dari perkembangan perkenomian beberapa tahun belakangan. Serta optimisnya tingkat penerimaan tenaga kerja baik oleh pemerintah sendiri maupun sektor swasta di Dharmasraya masih cukup berkembang, maka diprediksi akan dapat menampung lapangan pekerjaan yang cukup signifikan dengan penurunantingkat pengangguran yang ada
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan IPM hinggga tahun 2023 terus memperlihatkan peningkatan. Meskipun peningkatan ini masih relatif lambat dibandingkan rata-rata Sumbar, sehingga di tahun sebelumnya Kabupaten Dharmasraya menempati rangking 10, namun di tahun 2023 sudah berada di rangking 11

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, dimana pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Dimana pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menjaga 3(tiga) pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Sehingga diharapkan dengan semakin baiknya pengelolaan keuangan daerah, maka pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah, dan apabila perbaikan ini dilakukan secara terus menerus maka pembangunan yang dilakukan oleh daerah dapat berjalan secara lebih efektif, efisien dan transparan.

Terkait dengan kebijakan keuangan daerah, maka pembahasan berbagai kebijakan keuangan yangterkait dengan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dimana hak dan kewajiban tersebut digambarkan ke dalam 3(tiga) struktur keuangan daerah, yaitu arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dimana pendapatan transfer ini berasal dari Pusat dan pemerintah provinsi, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 3-4 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d Tahun 2025 (Rp)

Kode Akun	Uraian Akun	2021	2022	2023	2024	2025
		Realisasi(audit)	Realisasi(audit)	Realisasi (audit)	APBD Awal	RKPD
4	PENDAPATAN DAERAH	978.920.717.102	911.076.883.279	937.513.290.366	964.168.007.612	964.011.291.277
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	82.829.461.521	108.010.790.646	115.996.029.006	105.162.132.160	113.653.143.760
4.1.01	Pajak Daerah	20.495.633.388	21.634.156.143	23.692.000.466	24.651.781.411	23.851.781.411
4.1.02	Retribusi Daerah	2.411.365.382	2.759.700.350	2.449.560.848	72.675.708.125	73.117.357.010
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.524.570.411	4.324.065.836	4.832.210.107	4.832.210.107	4.832.210.107
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	56.397.892.340	79.292.868.316	85.022.257.585	3.002.432.517	11.851.795.232
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	838.657.002.069	786.486.021.026	819.526.123.990	850.258.147.517	850.258.147.517
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	787.384.510.329	727.854.055.483	770.898.639.315	791.897.793.000	791.897.793.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	713.844.105.329	673.570.378.483	707.811.761.315	722.999.714.000	722.999.714.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	33.662.555.569	29.385.211.834	35.245.613.069	30.023.665.000	30.023.665.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	472.416.143.000	472.528.368.549	489.147.246.531	519.999.606.000	519.999.606.000
	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			300.804.874.531	422.691.705.000	422.691.705.000
	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA		-	188.342.372.000	97.307.901.000	97.307.901.000
	PENGGAJIAN FORMASI PPPK			58.668.492.000	20.734.362.000	20.734.362.000
	BIDANG PENDIDIKAN			66.922.648.000	33.343.800.000	33.343.800.000
	BIDANG KESEHATAN			26.329.033.000	16.365.536.000	16.365.536.000
	BIDANG PEKERJAAN UMUM			36.422.199.000	26.864.203.000	26.864.203.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	121.883.946.598	64.465.577.604	56.562.162.432	36.038.894.000	36.038.894.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	85.881.460.162	107.191.220.496	126.856.739.283	136.937.549.000	136.937.549.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	17.000.339.000	6.527.889.000	8.601.217.000	15.167.068.000	15.167.068.000
4.2.01.05	Dana Desa	56.540.066.000	47.755.788.000	54.485.661.000	53.731.011.000	53.731.011.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.272.491.740	58.631.965.543	48.627.484.675	58.360.354.517	58.360.354.517

Kode Akun	Uraian Akun	2021	2022	2023	2024	2025
		Realisasi(audit)	Realisasi(audit)	Realisasi (audit)	APBD Awal	RKPD
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	51.272.491.740	58.631.965.543	48.627.484.675	58.360.354.517	58.360.354.517
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	57.434.253.512	16.580.071.607	1.991.137.370	8.747.727.935	100.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	26.548.313.512	16.580.071.607	1.991.137.370	100.000.000	100.000.000
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.885.940.000	-	-	8.647.727.935	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah, dan Analisa Tim Penyusun RKPD, Tahun 2024.

Setelah melihat realisasi pendapatan daerah hingga tahun 2023, dan perkembangan tahun berjalan 2024 maka arah kebijakan pendapatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   PAD merupakan pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan telah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat, serta ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka terdapat perubahan dalam arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini memberikan peluang yang lebih besar bagi daerah meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam memperoleh pendanaan daerah sesuai potensi daerah yang ada secara optimal.

   1. Kebijakan Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

      Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam optimalisasi pajak daerah adalah :

      1. Penyempurnaan regulasi pengelolaan pendapatan daerah terutama pajak dan retribusi daerah. Diantaranya dengan penerbitan perda Nomor 1 tahun 2024 serta kerjasama dengan pihak pemerintah nagari sekaligus pemberian reward bagi pemerintah daerah capaian pajak tertinggi
      2. Melakukan inovasi untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak melalui pembayaran online/aplikasi dengan bekerjasama dengan pihak perbankan. Dengan inovasi ini wajib pajak dapat membayar pajak kapanpun dan dimanapun. Hal ini terus dioptimalkan melalui sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak
      3. Dimulainya sosialisasi serta himbauan kepada masyarakat taat pajak agar taat pajak yang dimulai dari ASN, sehingga ASN dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya agar taat pajak dan tertib dalam pembayaran pajak daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
      4. Pendataan potensi pajak dan wajib pajak sebagai dasar dalam penetapan besaran target pajak dan menghindari duplikasi database pajak daerah
      5. Penyediaan mall pelayanan publik (MPP) terkait pelayanan pendapatan daerah dan layanan keuangan daerah lainnya
      6. Pemungutan opsen pajak PKB dan BBNKB
      7. Perbaikan sarana dan prasarana pemerintah daerah yang akan digunakan oleh masyarakat yang disejalankan dengan optimalisasi pendapatan dari retribusi daerah

      Selain kebijakan diatas, beberapa strategi dan poin penting terkait dengan kebijakan pendapatan Asli Daerah diantaranya:

      1. Analisis Kebutuhan Finansial: Sebelum menetapkan kebijakan peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah biasanya melakukan analisis mendalam terkait kebutuhan finansial untuk pembangunan

infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum.

2. Penyusunan Kebijakan: Kebijakan ini melibatkan penyusunan atau revisi peraturan daerah terkait tarif dan pengenaan pajak serta retribusi. Hal ini mencakup penilaian kembali tarif yang berlaku, kemungkinan pengenalan tarif baru, dan perubahan lainnya sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial terkini.
3. Konsultasi Publik: Pemerintah daerah sering kali melibatkan konsultasi publik sebelum menetapkan kebijakan ini. Hal ini bertujuan untuk memahami pandangan dan dampak dari peningkatan pajak dan retribusi terhadap masyarakat dan pelaku usaha di wilayah tersebut.
4. Tujuan Pembangunan dan Pelayanan Publik: Peningkatan penerimaan dari pajak dan retribusi diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, dan sarana publik lainnya. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan keamanan.
5. Pengelolaan yang Efisien dan Transparan: Penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan pajak dan retribusi dengan efisien dan transparan. Ini termasuk dalam hal pemungutan yang tepat waktu, pemakaian dana yang sesuai dengan kebutuhan publik, serta memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut.
6. Pemantauan dan Evaluasi: Setelah kebijakan diterapkan, pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak dari peningkatan pajak dan retribusi tersebut. Ini dapat mencakup evaluasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, respons dari sektor bisnis, serta dampak sosial ekonomi bagi masyarakat.

B. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Dalam rangka optimalisasi PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dilakukan melalui :

1. Penambahan penyertaan modal pada BUMD untuk peningkatan deviden/ bagi hasil yang diperoleh setiap tahunnya
2. Pengelolaan aset milik daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan melalui sewa aset milik daerah kepada masyarakat/ pihak swasta, baik aset yang berupa gedung, tanah dan aset tetap lainnya
3. Kerja sama dengan pihak swasta melalui skema kerja sama atau investasi untuk mengelola sumber daya alam atau aset daerah. Hal ini dapat mengoptimalkan pengelolaan serta memperluas basis pendapatan asli daerah.

C. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari "Lain-lain PAD yang sah"

Diantara kebijakan yang akan dilakukan di tahun 2025 terkait PAD yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah yaitu :

1. Penjualan aset yang sudah tidak efisien digunakan oleh pemda, diantaranya kendaraan yang sudah tidak dapat digunakan secara optimal oleh daerah
2. Sedangkan sumber lainnya seperi pendapatan denda, jasa giro atau yang lainnya berjalan seperti ketentuan yang berlaku

2. Pendapatan transfer

   Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat, serta pendapatan transfer dari pemerintah lainnya, meskipun sebagian besar pendapatan ini sudah given berdasarkan data teknis dan besaran pendapatanyang dihasilkan oleh pemerintah pusat/ provinsi ke kabupaten Dharmasraya. Namun terdapat upaya/ kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya :

   a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

   - Untuk mendapatkan alokasi DAK Fisik dan beberapa jenis DAK Non Fisik, maka pemerintah pusat melalui Bappenas mengkoordinasikan kegiatan yang dapat diusulkan ke pemerintah pusat yang mendukung prioritas nasional sekaligus juga sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pemerintah daerah. Usulan kegiatan ini dilaksanakan melalui aplikasi Krisna berdasarkan lokasi prioritas (Lokpri) yang ditetapkan. Adapun bidang yang dapat diusulkan yaitu pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang air minum, dan bidang pemberdayaan perempuan dan anak.
   - Selanjutnya untuk optimalisasi dana bagi hasil (DBH) sawit, mengingat Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Provinsi Sumatera Barat, maka salah satu upaya adalah melalui pendataan sawit yang telah dilaksanakan di sebagian kecamatan di tahun 2024 dan akan dilanjutkan di tahun 2025. Dengan pendataan sawit ini diharapkan alokasi DBH Sawit yang diperoleh akan sangat sesuai dengan potensi dan produksi yang ada di Dharmasraya. Dimana alokasi DBH ini diperoleh dari persentase atas pendapatan negara dari bea keluar dan pungutan ekpor sawit, minyak kelapa sawit mentah (CPO), dan/atau produk turunannya. Dimana pada tahun 2023 Dharmasraya mendapatkan alokasi sebesar Rp. 10.982.777.000,- dan di tahun 2024 turun menjadi Rp 9.701.540.000,- atau turun sekitar Rp. 1.281.237.000,-. Dengan adanya pendataan sawit tersebut diharapkan akan ada penyesuaian alokasi DBH sawit yang mendekati pada potensi/ kondisi yang sebenarnya.
   - Peluang dana pusat lainnya yang dapat diusahakan adalah berupa DID yang didapatkan berdasarkan penilaian indikator kinerja makro maupun hasil penilaian tertentu yang dilakukan setiap tahunnya

   b. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

   - Salah satu peluang untuk mendapatkan pendanaan pembangunan dari proinsi adalah adanya bantuan keuangan dari provinsi, dimana bantuan keuangan ini dalam bentuk kegiatan yang pendanaannya sesuai prioritas provinsi dan sesuai dengan prioritas kabupaten dan kewenangan kabupaten.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

   Lain-lain pendapatan yang sah diperoleh dari hibah pihak ketiga kepada pemerintah daerah. Adapun hibah dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah lainnya, masyarakat, bagan/lembaga dan pihak ketiga, namun besaran yang akan diperoleh belum dapat ditentukan besarannya, karena ini sangat dipengaruhi oleh iklim

perekonomian dan perkembangan dunia usaha yang ada di wilayah Kabupaten Dharmasraya.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaranntuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Penggunaan Belanja Daerah dijelaskan sebagaimana uraian berikut ini :

A. Belanja Operasi

Belanja operasi digunakan antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

1) Belanja pegawai

Gaji dan Tunjangan yang terdiri dari gaji pokok pns/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan pph/tunjangan khusus, termasuk tunjangan gaji ketiga belas dan gaji keempat belas pnsd, pembulatan gaji, iuran asuransi jaminan kesehatan, uang paket, tunjangan badan musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan badan anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan perumahan, uang jasa pengabdian, belanja penunjang operasional pimpinan dprd, tunjangan badan legislasi, tunjangan profesi guru pnsd, tambahan penghasilan guru pnsd, tunjangan transportasi, tunjangan reses.

Tambahan Penghasilan PNS terdiri dari Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja, dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja. Selain Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai, Belanja Pegawai juga berisi alokasi belanja untuk Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. Sedangkan belanja gaji PPPK akan disesuaikan dengan alokasi DAU yang diitentukan.

Iuran Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Asuransi Jaminan Kematian, Honorarium ASN, Honorarium Non PNS, Belanja Pegawai BLUD, Belanja

Pegawai BOS Belanja Pegawai BOK, Honorarium Pelayanan Kesehatan, Uang Lembur. Selain itu dalam belanja pegawai juga dialokasikan anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

2) Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga pada tahun 2025 tidak dialokasikan.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi pada tahun 2025 tidak dialokasikan.

5) Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemeritah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka, PKK), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya serta hibah untuk pelaksanaan Pileg dan Pilkada yang akkan dilaksanakan di tahun 2024

Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Belanja Bantuan Sosial
Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Pada tahun 2023, alokasi anggaran untuk belanja bantuan sosial ditambah untuk bantuan pangan non tunai yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan keluarga miskin.

B. Belanja Modal
Belanja modal digunakan antara lain untuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringanya, dan belanja aset tetap lainnya.

C. Belanja Tak Terduga
Belanja ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya tidak biasa, tidak bisa diprediksikan dan atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan biaya administrasi pelaksanaan DAK.

D. Belanja Transfer
- Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari kabupaten ke Pemerintah Desa dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol
  Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol dihitung berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut Komposisi Belanja tahun 2020 s/d tahun 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3-5 Realisasi/Proyeksi Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 s/d 2025

Kode Akun	Uraian Akun	2021	2022	2023	2024	2025
		Realisasi(audit)	Realisasi(audit)	Realisasi (audit)	APBD Awal	RKPD
5	BELANJA DAERAH	917.048.156.326	939.371.337.181	931.495.282.969	1.075.361.835.025	953.211.291.277
5.1	BELANJA OPERASI	638.706.924.536	696.160.075.415	680.833.715.659	857.837.115.898	-
5.1.01	Belanja Pegawai	380.289.821.308	380.048.882.570	373.990.257.238	522.011.068.081	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.612.992.141	304.834.151.224	278.076.015.874	297.857.863.937	-
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	11.804.111.087	11.277.041.621	28.767.442.546	37.968.183.880	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
5.2	BELANJA MODAL	166.252.751.216	132.791.374.993	137.284.235.323	100.642.775.927	-
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.541.549.730	48.052.940.621	39.031.009.865	21.118.832.407	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.986.356.137	15.750.482.106	45.091.507.154	31.828.906.743	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.155.213.262	66.363.505.691	50.167.680.309	44.726.618.952	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.569.632.088	2.624.446.575	2.751.538.825	2.852.417.825	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	242.499.170	116.000.000	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	164.439.330	369.162.297	3.924.380.709	5.000.000.000	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	164.439.330	369.162.297	3.924.380.709	5.000.000.000	-
5.4	BELANJA TRANSFER	111.924.041.243	110.050.724.476	109.452.951.278	111.881.943.200	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	111.924.041.243	2.659.549.476	1.217.315.278	2.750.957.200	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	107.391.175.000	108.235.636.000	109.130.986.000	-

Sumber :Analisis Tim Penyusun RKPD, Tahun 2024

Adapun semakin tinggi jumlah belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terikat. Analisis terhadap realisasi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama guna mengetahui atau memastikan jumlah kebutuhan dana yang tidak bisa tidak harus dikeluarkan daerah karena kewajiban pemerintah baik karena peraturan maupun karena adanya perjanjian. Hasil perhitungan dan proyeksi belanja periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3-6 Proyeksi Belanja Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No.	Uraian	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	386.703.948.150	
	Gaji PNS (diluar bidang pendidikan dan kesehatan)	207.414.065.150	DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dikurangi gaji yang dialokasikan dari DAU kesehatan dan pendidikan
	- Jumlah Belanja gaji dan tunjangan	227.380.853.000	DAU
	- Alokasi gaji dari bidang pendidikan	13.384.529.600	belanja DAU bidang pendidikan
	- Alokasi gaji dari bidang kesehatan	6.582.258.250	belanja DAU bidang kesehatan
	Gaji PPPK	58.668.492.000	penggajian formasi PPPK
	Gaji dan Insentif Bupati dan DPRD	12.123.449.000	DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dikurangi gaji yang dialokasikan dari dak kesehatan dan pendidikan
	TPP PNS	75.281.942.000	pendapatan daerah
	TPP PPPK	33.216.000.000	pendapatan daerah
2	Belanja rutin operasional	62.980.614.380	
	honorarium pengelolaan keuangan	3.992.324.000	pendapatan daerah
	belanja rutin lainnya	58.988.290.380	pendapatan daerah
3	Belanja yang ditentukan peruntukan/ pengalokasiannya	385.916.235.872	
	Belanja DAU bidang pendidikan	66.922.648.000	DAU bidang pendidikan
	Belanja DAU bidang kesehatan	26.329.033.000	DAU bidang kesehatan
	Belanja DAU bidang pekerjaan Umum	36.422.199.000	Bidang Pekerjaan Umum
	Belanja BLUD (Puskesmas dan RSUD)	61.680.049.000	Pendapatan BLUD
	Belanja PBI KK Miskin	9.500.000.000	pendapatan daerah
	Belanja BPJS perangkat nagari	960.000.000	pendapatan asli daerah

No.	Uraian	Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Belanja mandatory penigkatan SDM	1.525.000.000	DAU
	Belanja DAK Non Fisik	68.393.962.000	DAK non fisik
	Belanja Dana Desa	52.949.599.000	dana desa
	Alokasi dana Desa	57.271.913.600	10 persen dari transfer pusat diluar dak
		2.645.407.030	10 persen dari pajak dan retribusi
	Belanja insentif PDRD	1.316.425.242	5 % dari total pajak dan retribusi
4	Belanja prioritas lainnya	35.988.000.000	
	KPBU PJU	9.300.000.000	pendapatan daerah
	penyertaan modal	1.500.000.000	pendapatan daerah
	T O T A L	846.400.798.402	
	TOTAL PENDAPATAN	964.011.291.277	
	BELANJA UNTUK PROGRAM/KEGIATAN LAINNYA	117.610.492.875	

Sumber : analisis tim penyusun, Tahun 2024

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan diatas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan belanja daerah untuk tahun 2025 sebagai berikut:

- Belanja gaji dan tunjangan untuk PNS dialokasikan untuk ASN (PNS, PPPK), Bupati dan anggota DPRD sebanyak 30 orang
- Belanja rutin dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran, serta belanja operasional lainnya
- Belanja yang ditentukan peruntukan dan/atau pengalolasiannya
- Belanja ini dialokasikan untuk belanja yang sudah ditentukan pengalokasiannya sebesar pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Belanja prioritas lainnya, pengelompokan belanja ini dialokasikan untuk belanja, serta pembiayaan KPBU PJU yang masih berlanjut di tahun 2025

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

Pengelolaran pembiayan tahun 2025 dialokasikan untuk pembiayaan Kerjasama Antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Penerangan jalan Umum, serta penambahan pembiayaan untuk penambahan modal kepada BUMD.

Tabel 3-7 Realisasi/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 s/d Tahun 2025

Kode Akun	Uraian Akun	2021	2022	2023	2024	2025
		Realisasi (audit)	Realisasi (audit)	Realisasi (audit)	APBD Awal	Ranc RKPD
6	PEMBIAYAAN DAERAH	8.334.425.206	70.206.985.983	40.412.532.080	111.193.827.413	-10.800.000.000
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	8.334.425.206	70.206.985.983	41.912.532.080	121.993.827.413	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.334.425.206	70.206.985.983	41.912.532.080	121.993.827.413	-
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	1.500.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	9.300.000.000	9.300.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
6.3	SILPA	70.206.985.983	41.912.532.080	46.430.539.477	-	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Tahun Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Tabel 3-8 Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s/d Tahun 2024

Kode Akun	Uraian Akun	2021	2022	2023	2024	2025
		Realisasi(audit)	Realisasi(audit)	Realisasi (unaudit)	APBD Awal	RKPD
4	PENDAPATAN DAERAH	978.920.717.102	911.076.883.279	937.513.290.366	964.168.007.612	964.011.291.277
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	82.829.461.521	108.010.790.646	115.996.029.006	105.162.132.160	113.653.143.760
4.1.01	Pajak Daerah	20.495.633.388	21.634.156.143	23.692.000.466	24.651.781.411	23.851.781.411
4.1.02	Retribusi Daerah	2.411.365.382	2.759.700.350	2.449.560.848	72.675.708.125	73.117.357.010
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.524.570.411	4.324.065.836	4.832.210.107	4.832.210.107	4.832.210.107
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	56.397.892.340	79.292.868.316	85.022.257.585	3.002.432.517	11.851.795.232
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	838.657.002.069	786.486.021.026	819.526.123.990	850.258.147.517	850.258.147.517
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	787.384.510.329	727.854.055.483	770.898.639.315	791.897.793.000	791.897.793.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	713.844.105.329	673.570.378.483	707.811.761.315	722.999.714.000	722.999.714.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	33.662.555.569	29.385.211.834	35.245.613.069	30.023.665.000	30.023.665.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	472.416.143.000	472.528.368.549	489.147.246.531	519.999.606.000	519.999.606.000
	DAU yang tidak ditentukan penggunaannya			300.804.874.531	422.691.705.000	422.691.705.000
	DAU yang ditentukan penggunaannya		-	188.342.372.000	97.307.901.000	97.307.901.000
	Penggajian formasi PPPK			58.668.492.000	20.734.362.000	20.734.362.000
	Bidang Pendidikan			66.922.648.000	33.343.800.000	33.343.800.000
	Bidang kesehatan			26.329.033.000	16.365.536.000	16.365.536.000
	Bidang pekerjaan umum			36.422.199.000	26.864.203.000	26.864.203.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	121.883.946.598	64.465.577.604	56.562.162.432	36.038.894.000	36.038.894.000

Kode Akun	Uraian Akun	2021	2022	2023	2024	2025
		Realisasi(audit)	Realisasi(audit)	Realisasi (unaudit)	APBD Awal	RKPD
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	85.881.460.162	107.191.220.496	126.856.739.283	136.937.549.000	136.937.549.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	17.000.339.000	6.527.889.000	8.601.217.000	15.167.068.000	15.167.068.000
4.2.01.05	Dana Desa	56.540.066.000	47.755.788.000	54.485.661.000	53.731.011.000	53.731.011.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.272.491.740	58.631.965.543	48.627.484.675	58.360.354.517	58.360.354.517
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	51.272.491.740	58.631.965.543	48.627.484.675	58.360.354.517	58.360.354.517
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	57.434.253.512	16.580.071.607	1.991.137.370	8.747.727.935	100.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	26.548.313.512	16.580.071.607	1.991.137.370	100.000.000	100.000.000
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.885.940.000	-	-	8.647.727.935	-
5	BELANJA DAERAH	917.048.156.326	939.371.337.181	931.495.282.969	1.075.361.835.025	953.211.291.277
5.1	BELANJA OPERASI	638.706.924.536	696.160.075.415	680.833.715.659	857.837.115.898	-
5.1.01	Belanja Pegawai	380.289.821.308	380.048.882.570	373.990.257.238	522.011.068.081	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.612.992.141	304.834.151.224	278.076.015.874	297.857.863.937	-
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	11.804.111.087	11.277.041.621	28.767.442.546	37.968.183.880	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Tahun Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

BAB 4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Kabupaten Dharmasraya Periode 2021-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Kabupaten Dharmasraya. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, amanat penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dokumen perencanaan strategis lainnya.

RKPD Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mempedomani pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Penyusunan RKPD tahun 2025 merupakan tahun transisi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dharmsraya periode tahun 2021-2026 dengan Bupati terpilih periode 2025-2030. Substansi sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 memperhatikan:

1. Arah kebijakan Pemerintah dalam RKP Tahun 2025;
2. Sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD dan Prioritas pembangunan Tahap IV (2020-2025);

3. Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumater Barat dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
4. Arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 guna mencapai visi misi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2025;
5. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043;
6. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten;
7. Identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan mendesak di tingkat daerah dan nasional;
8. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
9. Pokok-pokok pikiran DPRD; dan
10. Memperhatikan usulan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan program prioritas memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

(1) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM),
(2) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026;
(3) Korelasinya terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.

Guna mewujudkan pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, maka RKPD Tahun 2025 difokuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Bab sebelumnya maka isu-isu pembangunan dan permasalahan pembangunan daerah yang dapat diindentifikasi pada Penyusunan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 antara lain :

1. Transisi kepemimpinan Bupati Tahun 2021-2026 dengan Bupati Hasil Pilkada Tahun 2024;
2. Pelaksanaan awal periodesasi RPJPD Tahun 2025-2045;
3. Masih tingginya angka ketergantungan atau rendahnya kemampuan fiskal daerah dalam Pendanaan Pembangunan, serta adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat pada Kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD), diantaranya terdapatnya DAU yang hanya dapat dialokasikan pada sub kegiatan tertentu;
4. Masih kurangnya alokasi belanja untuk usulan DURKP, dan usulan yang ditampung dalam Musrenbang Kecamatan/Kabupaten;
5. Masih kurangnya konsistensi muatan RKPD sampai tahapan APBD;
6. Pemenuhan belanja dalam rangka penuntasan pemenuhan pelayanan dasar untuk pemenuhan SPM;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya periode tahun 2021-2026, maka visi RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 adalah : "**TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA**".

Untuk mengetahui gambaran Visi tersebut, maka perlu diberikan gambaran pemaknaan atas uraian visi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang lebih jelas atas kondisi atau gambaran yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJMD.

Maju : Kabupaten Dharmasraya yang lebih baik sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial yang berdaya saing pada wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat

Mandiri : Kondisi daerah yang memiliki daya tahan sosial, ekonomi dan keuangan daerah, serta pelayanaan publik yang memadai dengan pengelolaan sumber daya daerah secara optimal

Berbudaya : Masyarakat yang melestarikan nilai dan tradisi multikultural dalam berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan Iman dan Taqwa.

Untuk mencapai visi di atas, maka telah ditetapkan 6 (enam) misi dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026. Adapun misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan kemungkinan terjadi pada tahun perencanaan yang akan berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap serta memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi. Berdasarkan permasalahan pembangunan (seperti yang diurai pada Bab II), dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dharmasraya serta realita tuntutan perkembangan wilayah.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Pada dasarnya tujuan pembangunan harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 260 pasal 1 menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga program-program pembangunan daerah hendaknya diselaraskan dengan Kebijakan Pembangunan Nasional.

RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, (sekaligus) menjadi window opportunity untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas, oleh karenta itu, RKP 2025 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi.

Tema RKP 2025 “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Penekanan dari RKP Tahun2025 yaitu :

1. SDM berkualitas : SDM Berdaya Saing dan Produktif
   Transformasi Sosial :
   - Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun
   - Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan
   - Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting.

- Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif
- Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
- Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system.

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:

- Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)

2. Infrastruktur berkualitas : Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas
   Transformasi Ekonomi:
   - Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
   - Penguatan infrastruktur digital
   - Pengembangan infrastruktur transisi energi
   - Percepatan infrastruktur IKN

   Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:
   - Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir

3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan : Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan
   Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
   - Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
   - Pengembangan skema graduasi bansos
   - Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya
   - Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
   - Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
   - Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
   - Peningkatan produksi industri pengolahan
   - Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
   - Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi

Adapun sasaran pembangunan nasional Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4-1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Realisasi 2023	Target 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	5,3 – 5,6
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32[a)]	4,5 – 5,0
3	Tingkat Kemiskinan (%)	9,36[b)]	7,0 – 8,0
4	Rasio Gini (nilai)	0,388[b)]	0,379 – 0,382
5	Indeks Modal Manusia (nilai)	0,53	0,56
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	34,09[c)]	38,6

Sumber : RKP Nasional Tahun 2025

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut sebagai Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 akan diwujudkan pada akhir tahun 2026 untuk mengambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”

Perwujudan visi melalui 7 (tujuh) misi, yaitu:

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing

Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah

Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital

Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan

Misi 6 : Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan

Misi 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya

Dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, saat ini rencana pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya telah memasuki tahapan keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 berpedoman pada visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026. Adapun visi pembangunan daerah yang akan diwujudkan adalah:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA"

Visi tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) misi untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Adapun Misi bupati dan wakil bupati terpilih pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan kemungkinan terjadi pada tahun perencanaan yang akan berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap serta memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi. Berdasarkan permasalahan pembangunan, dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dharmasraya serta realita tuntutan perkembangan wilayah.

Keenam misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021–2026 dijabarkan ke dalam 8 (delapan) tujuan dan 19 (sembilan belas) sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan

sasaran pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021–2026 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut

Tabel 4-2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026

VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur	Terwujudnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
		Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman
		Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air
Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
		Meningkatnya peran perempuan dan responsif gender dalam pembangunan
Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah
		Mengurangi pengangguran
		Mengurangi kemiskinan
Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien	Mewujudkan Tata kelola	Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara
	Pemerintahan yang baik	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dalam optimalisasi pelayanan publik
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
	Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari

VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan
		Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup
		Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah
Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah	Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
		Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat

Sumber : RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

Mengacu pada arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan dampak dari kontraksi ekonomi serta pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya, serta upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan perekonomian dan infrastruktur yang merata melalui kebijakan dan strategi dan bertumpu pada kemampuan ekonomi Kabupaten Dharmasraya dan dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 mengintegrasikan menjadi Tema Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 yaitu "**Penguatan Ekonomi Inklusif Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan**".

Pemilihan tema Pembangunan Tahun 2025 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2025, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun proyeksi Target Indikator Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagaimana tabel 4.3.

Tabel 4-3 Indikator Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Indikator	Proyeksi 2025		
		RPJMD	RKPD Prov*	RKPD Kab.
1	Pertumbuhan PDRB (persen)	4,70		
2	PDRB Perkapita ADHB (Juta rupiah)	46,74		57,63
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	5,92		5,4
4	Gini Rasio	0,250		0,242
5	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5,10		5,7
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,29		76,03

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024, RPJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2021-2026 dan hasil analisis Tim Penyusun RKPD Tahun 2025

Keterangan :

* = Proyeksi indikator makro

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 yang dilihat berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun pelaksanaan 2025 dan tujuan dan sasaran RKPD 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4-4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	TUJUAN/SASARAN	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025			RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur									
1	**Tujuan : Terwujudnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas**	**Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur**	Indeks	70	**Tujuan : Terwujudnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas**	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	62.7	Penurunan target dari target RPJM disebabkan karena menurunnya alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan yang mampu dibiayai oleh APBD
	Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	65	Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	59,3	Penurunan target dari target RPJM disebabkan karena menurunnya alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan yang mampu dibiayai oleh APBD
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	95		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	80	
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	98		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	95	Penurunan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022

No	TUJUAN/SASARAN	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025			RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sasasran : Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	12,90	Sasaran : Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	23,03	Penurunan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
		Rasio pemukiman layak huni	persen	97,05		Rasio pemukiman layak huni	persen	94,25	
	Sasasran : Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	72,80	Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	81	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
		Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	persen	27,98		Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	persen	29,12	
Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia									
2	**Tujuan : Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**		72,29	**Tujuan : Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**		73,01	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
	Sasaran : Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	72,24	Sasaran : Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	72,25	
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,50	Sasaran : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,75	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
		Harapan lama sekolah	tahun	12,46		Harapan lama sekolah	tahun	12,75	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian

No	TUJUAN/SASARAN	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025			RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									target dengan capaian Tahun 2022
	Sasaran : Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	indeks	89,50	Sasaran : Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	indeks	89,34	
Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing									
3	**Tujuan : Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing**	**Pertumbuhan PDRB**	**persen**	4,70	**Tujuan : Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing**	**Pertumbuhan PDRB**	**persen**	4,50	
		Gini rasio	indeks	0,250		Gini rasio	indeks	0,284	
	Sasaran : Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	46,74	Sasaran : Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	55,95	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
		Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	persen	3,7		Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	persen	3,6	
	Sasaran : Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	5,10	Sasaran : Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	5,3	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
	Sasaran : Mengurangi kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	persen	5,92	Sasaran : Mengurangi kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	persen	5,4	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien									

No	TUJUAN/SASARAN	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025			RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	**Tujuan : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**indeks**	76	**Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**indeks**	73	
	Sasaran : Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks perilaku antikorupsi	indeks	3,578	Sasaran : Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks perilaku antikorupsi	indeks	3,45	
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP		Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP	
		Hasil evaluasi AKIP	bobot/ indeks	A		Hasil evaluasi AKIP	bobot/ indeks	BB	
		Nilai LPPD	Skor	3,8000		Nilai LPPD	Skor	3,75	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
	Sasaran : Birokrasi yang berkualitas	Indeks Kelembagaan	indeks		Sasaran : Birokrasi yang berkualitas	Indeks Kelembagaan	indeks		
		Indeks SPBE	indeks	2,725		Indeks SPBE	indeks	2,6	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
		Indeks Profesionalisme ASN	indeks	74		Indeks Profesionalisme ASN	indeks	71	
	Sasaran : Pelayanan publik yang prima	Publik service indeks	indeks	3,3	Sasaran : Pelayanan publik yang prima	Publik service indeks	indeks	3,21	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	84		Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	83	
5	**Tujuan : Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari**	**Persentase nagari mandiri**	**persen**	26,92	**Tujuan : Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan**	**Persentase nagari mandiri**	**persen**	23,07	

No	TUJUAN/SASARAN	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025			RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					potensi sumber daya nigari				
	Sasaran : Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	indeks	0,8522	Sasaran : Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	indeks	0,8437	
		Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	indeks	0,7270		Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	indeks	0,7198	
		Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	indeks	0,6131		Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	indeks	0,607	
Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan									
6	**Tujuan : Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)**	**Indeks Pembangunan berkelanjutan**	**indeks**	77,80	**Tujuan : Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)**	**Indeks Pembangunan berkelanjutan**	**indeks**	75,8	
	Sasaran : Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang	persen	20	Sasaran : Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang	persen	80	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
	Sasaran : Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	66,47	Sasaran : Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	66	
Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah									
7	**Tujuan : Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat**	**Jumlah nagari beradat dan berbudaya**	**nagari**	13	**Tujuan : Meningkatkan pembangunan mental dan**	**Jumlah nagari beradat dan berbudaya**	**nagari**	**10**	

No	TUJUAN/SASARAN	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025			RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya				**kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya**				
	Sasaran : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase peningkatan zakat	persen	2	Sasaran : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase peningkatan zakat	persen	12	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
		Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	persen	95		Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	persen	100	Peningkatan target dari target RPJMD karena Penyesuaian target dengan capaian Tahun 2022
	Sasaran : Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	nagari	13	Sasaran : Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	nagari	10	

RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 disusun pada tahun 2021 saat kondisi pandemi Covid-19, dimana penetapan proyeksi didasarkan pada kondisi hingga tahun 2020, sedangkan untuk penyusunan target pembangunan 2024 didasarkan pada realisasi 2022 dan proyeksi tahun berjalan (2023), sehingga terdapat penyeesuaian target pembangunan daerah, sehingga target 2025 lebih optimis dari pada target yang telah di tetapkan pada RPJMD tahun pelaksanaan 2025.

Dari sasaran pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaannya, sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional tahun 2025 dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun dari dukungan pemerintah kabupaten, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi.

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Pada dasarnya prioritas pembangunan daerah merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi.

Prioritas pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, Suistainable Development Goal'S (SDG's), kebijakan transformasi pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang. RKPD tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke-5 (kelima) RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026 dan pelaksanaan RPJMD transisi kepemimpinan periode RPJMD Tahun 2021-2026 dengan periodesasi RPJMD Tahun 2025-2029. Penyusunan RKPD tahun 2025 memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD Provinsi Provinsi Sumatera Barat tahun 2025. Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain :

a. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan;

b. Urgensitas penanganan permasalahan pembangunan; dan

c. Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan :

a. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2023
b. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional pada RKP Nasional Tahun 2025.
c. Sasaran pokok arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam rancangan RPJMD Tahun 2021-2026.
d. Isu Strategis, dan
e. Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Sumatera Barat maupun Tingkat Nasional.

Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan di setiap urusan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program unggulan yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut, mendukung tema pembangunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD yang merupakan benang merah menuju sasaran pembangunan. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan di tahun sebelumnya yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, akan tetapi tetap dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan.

4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tahun 2025 adalah tahun pertama untuk pemenuhan target sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2025 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 diarahkan pada untuk mendukung tema dan arah kebijakan RPJMN Tahun 2025–2029.

Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025–2029 diarahkan untuk penguatan Fondasi Transformasi yang terdiri atas:

1. Transformasi Sosial Transformasi Sosial ditempuh melalui pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, Pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi Transformasi Ekonomi ditempuh melalui hilirisasi Sumber Daya Alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola Transformasi Tata Kelola ditempuh melalui kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia Perwujudan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia ditempuh melalui memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketanggguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi ditempuh melalui memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar

Kebijakan umum pada Pokok-pokok Intervensi Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana di Seluruh Wilayah Tahun 2025, arah kebijakan umum untuk setiap wilayah berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Dilihat berdasarkan kebijakan perwilah Sumatera, Pokok-pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Sumatera Tahun 2025, dimana Provinsi Sumatear Barat,

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), pengembangan Kawasan Kepuluan Mentawai sebagai kawasan afirmasi, Daerah pengembangan Padang – Bukittinggi (Koridor Pertumbuhan Padang – Bukittinggi), Pertumbuhan pengembangan Kota Padang sebagai Kota Besar, pengembangan Kota Bukittinggi sebagai Kota Sedang dan pengembangan Kota Solok sebagai Kota Kecil. Berikut tergambar pada gambar 4.2. Kawasan Pusat Pertumbuhan, Perdesaan dan Daerah Afirmasi.

Gambar 4-2 Kawasan Pusat Pertumbuhan, Perdesaan dan Daerah Afirmasi

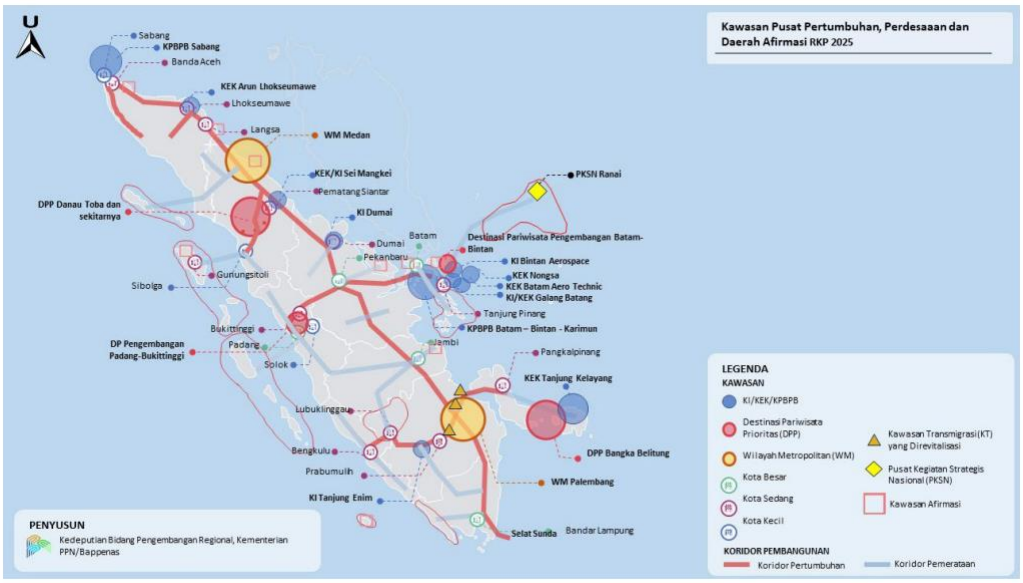

Sesuai Rancangan RKP Nasioanl tahun 2025, Tahun 2025 merupakan gerbang awal menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita luhur untuk membangun bangsa yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu tujuan utama pembangunan nasional yaitu mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia - Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai tujuan pengurangan kesenjangan antarwilayah, kebijakan pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana akan difokuskan pada pengembangan wilayah yang lebih merata dan berkeadilan, termasuk keselarasan pembangunan perkotaan, sebagai pusat aglomerasi kegiatan dan pertumbuhan, serta perdesaan, sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini juga didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan tema, target pertumbuhan dan kontribusi per wilayah pulau untuk Tahun 2025 sebagaimana termuat pada infografis di bawah ini. Penetapan ini menjadi landasan strategis dalam membangun fondasi yang kokoh bagi Indonesia Emas 2045. Sasaran pembanguan tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 4.3.

Gambar 4-3 Sasaran Pembangunan Daerah

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi | IMM: Indeks Modal Manusia |TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka

Keterangan: *) Hasil Rakortekrenbang 2024

Selain itu berdasarkan Pokok-pokok Intervensi Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana di Seluruh Wilayah Tahun 2025, Arah kebijakan umum untuk setiap wilayah berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Tabel 4-5 Agenda Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Agenda Pembangunan	Highlight Indikasi Intervensi
Transformasi Sosial	▪ Percepatan penurunan dan penuntasan stunting, terutama di Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pasaman ▪ Pengembangan perguruan tinggi STEAM unggulan bertaraf internasional pada Universitas Andalas. ▪ Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria
Tranformasi Ekonomi	• Peningkatan produktivitas padi, kelapa, hortikultura, dan peternakan secara berkelanjutan • Lanjutan pembangunan Jalan Tol Padang—Pekanbaru • Peningkatan Jalan Ruas Lubuklasiah—Surian • Pelebaran Menambah Lajur Ruas Jalan Junction (Koto Baru) - Bts. Prov. Jambi • Pembangunan Creative Hub di Kota Padang guna mendorong inkubasi kewirausahaan ekonomi kreatif • Penataan kawasan wisata Kandih di Kota Sawahlunto guna mendukung Ombilin Coal Mining Heritage • Penguatan Ekosistem Film, Animasi, Visual Arts, Seni, Budaya, Kerajinan, Kuliner, dan Pemampu Ekonomi Kreatif • Penguatan Ekosistem Pengembangan Aplikasi dan Gim

Agenda Pembangunan	Highlight Indikasi Intervensi
Transformasi Tata Kelola	Penguatan tata kelola manajemen ASN, kompetensi ASN, serta manajemen talenta dan karier ASN di lingkungan pemerintahan daerah di Sumatra Barat
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	• Penguatan Lantamal Padang dalam rangka pengamanan dan penegakan kedaulatan maritim Indonesia di Samudra Hindia • Pengembangan inklusi keuangan dan perbankan syariah di Sumatra Barat
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	• Pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang berbasis pada penguatan nilai budaya matrilineal di Perkampungan Adat Jorong Padang Ranah dan Tanah Bato Nagari Sijunjung • Pembangunan infrastruktur pengendali banjir pada Batang Agam, Batang Lembang, Batang Suliti, dan Kab. Dharmasraya • Pembangunan TPST di Tuapeijat di Kab. Kepulauan Mentawai • Pembangunan TPST, TPS3R, atau fasilitas pengolahan lainnya di Kota Padang dan Kabupaten Payakumbuh • Penyediaan SDM berkompeten, sarana, prasarana, dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan (SAR)

Sumber : Rancangan RKP Nasional Tahun 2025

RKP Tahun 2025 menjadi sangat strategis. Tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029. Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang di dalam Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Pembangunan untuk Transformasi Sosial :

a. Kesehatan untuk Semua
Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :
1) Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan
2) Investasi pelayanan kesehatan primer di Puskesmas, Pustu, dan UKBM
3) Penurunan kematian ibu melalui penguatan pelayanan kesehatan maternal dan penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif
4) Pengendalian penyakit menular terutama TB dan eliminasi penyakit tropis terabaikan terutama kusta dan Schistosomiasis
5) Penguatan pembiayaan kesehatan dan JKN.

b. Pendidikan Berkualitas yang Merata
Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :
1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
2) Restrukturisasi kewenangan pengangkatan dan distribusi guru untuk mendorong pemerataan dan kualitas pendidikan
3) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi yang berkualitas

4) Peningkatan lulusan pendidikan menengah dan tinggi (STEAM) yang produktif dan berdaya saing

c. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :

1) Pemanfaatan data sosial ekonomi penduduk Indonesia melalui satu sistem Regsosek
2) Penguatan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial, dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat
3) Pengembangan ekonomi perawatan (care economy) khususnya untuk kelompok rentan dan perempuan
4) Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan

2. Prioritas Pembangunan untuk Transformasi Ekonomi

a. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Produktivitas Ekonomi

Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :

1) Penguatan hilirisasi industri berbasis SDA (a.l nikel, tembaga, bauksit, sawit, karet, kelapa, kakao, dan rumput laut)
2) Peningkatan industri padat teknologi dan inovasi (logam dasar; kimia dasar; elektronik dan digital; kimia hilir dan farmasi; alat angkut; serta kedirgantaraan)
3) Pengembangan ekonomi biru indonesia sebagai sumber pertumbuhan baru
4) Pengembangan bioekonomi dan bioteknologi
5) Pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas, regeneratif bali dan klaster pariwisata IKN (a.l Danau Toba, Borobudur, Lombok Gili Tramena, Manado-likupang, Bangka Belitung, Wakatobi, BTS, Raja Ampat, Morotai, Bali, dan IKN)
6) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual (seni, budaya, dan kerajinan; film, animasi, dan visual arts; kuliner; serta aplikasi dan gim)
7) Pengembangan industrialisasi perikanan dan kelautan
8) Pengembangan koperasi sektor produksi
9) Peningkatan peran UMKM dalam rantai nilai industri
10) Pengembangan wirausaha berorientasi tumbuh
11) Penguatan vokasi sesuai dunia usaha
12) Peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan
13) Penciptaan ekosistem dan peningkatan anggaran iptek serta Inovasi

b. Penerapan Ekonomi Hijau

Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :

1) Penerapan ekonomi sirkular
2) Percepatan transisi energi
3) Penerapan transportasi hijau

c. Transformasi Digital

Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :

1) Pengembangan superplatform digital indonesia
2) Peningkatan kualitas infrastruktur TIK
3) Penciptaan enabler transformasi digital
4) Penguatan SDM digital
5) Peningkatan adopsi teknologi digital pada berbagai sektor

d. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :

1) Penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antar kawasan pertumbuhan ekonomi
2) Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru
3) Penguatan logistik nasional
4) Penguatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara
5) Peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai pasok antardaerah dan dengan global
6) Peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi
7) Peningkatan partisipasi indonesia dalam rantai pasok global
8) Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global

e. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :

1) Peningkatan kualitas 10 Wilayah Metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, dan Manado)
2) Pembangunan Ibu Kota Nusantara
3) Pengentasan rumah tidak layak huni
4) Pembiayaan perumahan untuk semua
5) Pengentasan permukiman kumuh
6) Penyediaan perumahan publik terjangkau

3. Prioritas Pembangunan untuk Transformasi Tata Kelola

Prioritas pembangunan untuk transformasi Tata Kelola adalah Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif, dengan beberapa intenvensi yang menjadi penekanan adalah :

1) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi nasional dan
2) penyederhanaan tata kelola regulasi;
3) Transformasi digital pelayanan publik yang berbasis transformasi
4) digital layanan pemerintah dan kompetensi digital ASN;
5) Penataan proses bisnis dan kelembagaan KL berdasarkan
6) Prioritas Nasional/ shared outcome (manajemen kinerja,
7) manajemen anggaran, Manajemen resiko, dan sistem insentif KL

8) atas pencapaian target);
9) Transformasi manajemen ASN (penataan kelembagaan,
10) manajemen talenta, pengembangan kompetensi, dan penerapan
11) sistem GRC/ Governance, Risk and Compliance);
12) Penerapan single salary system dan reformasi sistem pensiun;
13) Penguatan sistem anti korupsi dengan prioritas pembudayaan
14) anti korupsi, pencegahan korupsi dan penerapan Sistem
15) Integritas Partai Politik

4. Prioritas Pembangunan untuk Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

a. Hukum Berkeadilan, Kemanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial

Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :

1) Single prosecution system melalui penguatan kewenangan kejaksaan, kapasitas jaksa, dan pemenuhan sarana prasarana penanganan perkara
2) Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan dalam negeri, keamanan insani, keamanan laut, dan keamanan siber
3) Penguatan kebebasan sipil yang berwawasan Pancasila,
4) penguatan kesetaraan kelompok rentan untuk akses informasi dan keterwakilan politik, serta penguatan kapasitas, fungsi, dan integritas Lembaga demokrasi

b. Stabilitas Ekonomi Makro

Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :

1) Reformasi perpajakan (penambahan kelembagaan administrasi
2) perpajakan)
3) Reformasi subsidi, terutama energi terbarukan dan pupuk tepat
4) sasaran
5) Transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal
6) Pengendalian inflasi dengan fokus penyelesaian masalah
7) struktural (pasokan dan distribusi), penguatan data, serta
8) penguatan koordinasi pengendalian inflasi pusat & daerah
9) Peningkatan kontribusi keuangan syariah dan inklusi keuangan

c. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :

1) Peningkatan efektivitas kepemimpinan Indonesia di tingkat regional dan global
2) Penguatan kerja sama pembangunan internasional dan diplomasi ekonomi
3) Pemenuhan infrastruktur penopang kebijakan luar negeri
4) Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan
5) Peningkatan kemampuan pertahanan

5. Prioritas Pembangunan untuk Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

a. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :

1) Perlindungan dan pelestarian warisan budaya
2) Pembinaan Ideologi Pancasila, serta penguatan karakter dan jati
3) diri bangsa
4) Menjamin hak berkebudayaan dan pemberdayaan Masyarakat
5) Hukum Adat
6) Penguatan moderasi beragama
7) Transformasi penjaminan produk halal
8) Pengembangan dana sosial keagamaan produktif

b. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :

1) Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi,
2) penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya
3) Penguatan institusi keluarga dalam penanaman nilai, moral, etika, integritas, karakter, dan pengembangan psikososial anak
4) Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari Kekerasan
5) Pengembangan masyarakat inklusif terhadap anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya

c. Lingkungan Hidup Berkualitas

Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :

1) Pencegahan kerusakan dan konservasi ekosistem dan spesies
2) Sistem Peringatan dini *slow on set* ligkungan hidup dan peningkatan Kesehatan laut
3) Perbaikan kualitas ekosistem dan lingkungan hidup
4) Penegakan hukum lingkungan
5) Pembangunan forest dan sponge city di ibu kota nusantara
6) Percepatan Pemenuhan Sanitasi Aman dan Berkelanjutan
7) Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi Hulu-Hilir menuju Circular Economy

d. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :

1) Menjamin ketahanan energi nasional melalui peningkatan
2) ketersediaan, kemudahan akses, keterjangkauan, dan tingkat
3) penerimaan energi
4) Meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional (Kawasan
5) Sentra Produksi Pangan, pangan lokal, pangan akuatik/blue
6) foods)
7) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan (diversifikasi,
8) keamanan, dan fortifikasi pangan)
9) Penguatan tata kelola pangan (susut dan limbah pangan, serta
10) Satu Data Pangan

11) Pembangunan dan revitalisasi tampungan air alami dan buatan
12) Penuntasan pemanfaatan air baku, irigasi, dan listrik dari
13) bendungan terbangun
14) Penyediaan air baku DKI Jakarta dari wilayah sungai di Banten
15) dan Jawa Barat (Interbasin transfer)
16) Rehabilitasi hutan dan lahan
17) Pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan yang aman,
18) berkelanjutan, serta berketahanan iklim dan bencana

e. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :
1) Peningkatan ketahanan di pesisir dan laut
2) Pencegahaan penyakit menular akibat iklim
3) Pertanian ramah iklim
4) Pembangunan dan konservasi sumber daya air
5) Penurunan emisi di sektor energi, FOLU, IPPU, dan limbah domestik
6) Konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan
7) Restorasi lahan gambut dan rehabilitasi ekosistem pesisir mangrove, lamun, dan terumbu karang)
8) Peningkatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan sistem peringatan dini terpadu bencana
9) Penguatan manajemen tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana

Indikator Pembangunan untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat meliputi:

1. Rasio PDB Industri Pengolahan sebesar 20,8 %
2. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif sebesar 7,9%
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,0 %;
4. Tingkat Inflasi sebesar 2,5 ± 1,0
5. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,458
6. Persentase Penurunan Emisi GRK sebesar
   a. Kumulatif 28,12 %
   b. Tahunan 32,65 %
7. Tingkat kemiskinan sebesar 6,0-7,0 %;

4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun keempat pencapaian RPJMD tahun 2021-2026 sehingga hasil evaluasi pelaksanaan tahun pertama digunakan untuk menetapkan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan.

Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu “Akselerasi Produktivitas Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan prioritas pembabangunan:

Prioritas 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berakhlak Mulia, Sehat, Unggul Dan Berdaya Saing

Arah Kebijakan :

1. Efektifitas dan efesiensi pemanfaatan alokasi anggaran Pendidikan dan Kesehatan.
2. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial
3. Optimalisasi Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan Kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari Ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intrevensi secara kontinue (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif
4. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral dengan pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
5. Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pelaksanan Aksi Konvergensi dengan pelibatan semua pihak secara intensif dan berkelanjutan serta peningkatan komitmen Pemerintah daerah, desa dan nagari.
6. Fokus pada intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan serta Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 guna pencegahan balita stunting
7. Melakukan Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum dalam penanganan stunting.
8. Meningkatkan akses serta optimalisasi perbaikan sarana dan prasana Pendidikan SMA/SMK/SLB guna mendukung proses pembelajaran yang kondusif dan nyaman bagi siswa dan tenaga pendidik.
9. Peningkatan kapasitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta distribusi tenaga pendidik secara merata
10. Meningkatkan akses Pendidikan bagi penduduk dengan penyandang disabilitas dengan memberikan layanan penuh terutama disabilitas dalam Panti Sosial
11. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan Angkatan Kerja terutama berpendidikan menengah keatas sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri serta berbasiskan potensi daerah.

Prioritas 2: Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adaik Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah

Arah Kebijakan :

1. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang Trantib dan Damkar)
2. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfataan dan pembinaan objek Pemajuan Kebudayaan terutama dalam
2. penciptaan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari pemanfaatan Objek Pemajuan kebudayaan.
3. Menigkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan ekspresi budaya untuk mendukung penciptaan karya budaya oleh
4. masyarakat.
5. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah serta pelibatan aktif peran serta masyarakat dalam pelestarian objek Pemajuan
6. Kebudayaan dan cagar Budaya
7. Meningkatkan ketahanan keluarga, kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan dan pemenuhan hak anak
8. Menjadikan perpustakaan daerah menjadi pusat kegiatan literasi masarakat
9. Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta kerukunan antar umat beragama.
10. Meningkatkan dan Menguatkan perencanaan dan penganggaran responsive gender dan perlindungan dan pemenuhan hak
11. terhadap penyandang disabilitasi sebagai bagian dari Pengarusutamaan Pembangunan Untuk Semua

Prioritas 3 : Meningkatkan Nilai Tambah Dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan

Arah Kebijakan :

1. Mengalokasikan belanja daerah untuk sektor pertanian sebesar 10% dari APBD
2. Menyiapkan benih/bibit bermutu (pertanian, kelautan perikanan dan peternakan)
2. Meningkatkan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan
3. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian, peternakan dan kelautan dan perikanan
4. Peningkatan upaya minimalisasi resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen atau produksi baik oleh hama penyakit dan bencana alam
5. Meningkatkan efisiensi usaha pasca panen pengolahan hasil dan peningkatan mutu dan nilai tambah produksi pertanian, peternakan kelautan dan perikanan serta kehutanan
6. Diversifikasi pangan dan usaha produktif yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi

7. Meningkatkan kelancaran akses distribusi pangan dan aksesibilitasi produksi pangan
8. Optimalisasi penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian
9. Mempertahankan produksi padi sebagai lumbung nasional
10. Meningkatkan produksi jagung, ternak unggas dan kambing
11. Meningkatkan kualitas SDM Pertanian terutama dalam kemampuan dalam penguasaan teknologi serta hilirisasi produk pertanian.
12. Meningkatkan akses pemasaran produk hasil pertanian dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMDes dalam pemasaran hasil pertanian serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran hasil pertanian.

Prioritas 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital

Arah Kebijakan :

1. Mengembangkan UMKM di sekitar Kawasan ekowisata secara masif sesuai potensi masing-masing daerah.
2. Menjaga tingkat inflasi tetap pada batas wajar.
3. Penciptaan iklim investasi dan kemudahan berinvestasi.
4. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian
5. Mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif.
6. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula.
7. Meningkatkan metode pemasaran produk UMKM melalui digitalisasi dengan memanfaatkkan e-commerce yang telah ada.
8. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital.

Prioritas 5 : Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan

Arah Kebijakan :

1. Membangun industri pariwisata melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata unggulan
2. Meningkatkan atraksi seni dan budaya serta membangun suasana festival yang meriah pada pusat keramaian dan obyek wisata unggulan
3. Meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestic
4. Penguatan Brand Image Pariwisata di Sumatera Barat
5. Memperjelas segmentasi Wisatawan pada masing-masing daerah
6. Melakukan Strategi promosi efektif yang terpadu melalui public campaign dan promosi besar-besaran untuk membangun awareness masyarakat

7. Mendorong semua pelaku usaha pariwisata Sumbar (terutama obyek wisata unggulan) agar segera memenuhi sertifikasi CHSE, sertifikasi Halal serta sertifikasi/ standar internasional lainnya
8. Meningkatkan investasi pada bidang Pariwisata
9. Pengembangan Kawasan pariwisata secara terintegrasi, terpadu dan menyeluruh
10. Pemberdayaan para pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan potensi daerah

Prioritas 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan

Arah Kebijakan :

1. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang kebencanaan)
3. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi ke Kawasan sentra pertanian, industry dan pariwisata.
4. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi ke Kawasan daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan
6. Peningkatan rasio elektrifikasi untuk kelompok masyarakat tidak mampu dan daerah listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan
7. Peningkatan bauran energy dan pengembangan Energi Terbarukan
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana dalam mitigasi dan kesiapsiagaan Bencana
9. Pengendalian pencemaran, sampah dan limbah dan perusakan lingkungan hidup
10. Percepatan capaian sanitasi layak
11. Percepatan pembangunan gedung strategis provinsi
12. Penyediaan PSU kawasan pemukiman dan pengurangan luasan kawasan kumuh
13. Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, bangunan konservasi dan bangunan pengendali daya rusak air
14. Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Prioritas 7 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan kualitas ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah melalui peningkatan kompetensi ASN dan stakeholder

melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Mengoptimalkan penerapan 8 Area Perubahan Reformasi Birokasi.
3. Meningkatkan kinerja Indeks SPBE dengan menyusunan dan menetapkan kebijakan yang mengatur tentang Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.
6. Meningkatkan Optimalisasi pengunaan dan pengamanan aset daerah.
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
8. Optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah.
9. Implementasi Inovasi dan digitalisasi pada Unit kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi Sumateran Barat.

4.2.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya

Prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 dan merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021.

Selain itu prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratik, dan politik. Proses perencanaan partisipatif, teknokratik dan politik merupakan hal yang sangat penting ketika usulan perencanaan dari Musrenbang maupun penyelarasan dan sinkronisasi dengan pokok pikiran DPRD dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai arahan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 juga disusun dengan menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dengan mengacu pada tata ruang.

Dalam perencanaan pembangunan perlu merumuskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tema pembangunan dalam jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya, penjabaran tema dari program ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif dari hulu ke hilir (dalam sebuah kegiatan). Tidak luput pula, perencanaan pembangunan juga melibatkan beberapa pemangku kepentingan seperti Perangkat Daerah untuk pelaksanaan perencanaan prioritas pembangunan. Tersedianya lokasi dari prioritas

Pembangunan tersebut juga harus jelas dengan menerapkan kesatuan kewilayahan sehingga satu lokasi dengan lainnya saling berkaitan erat.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas maka pada RKPD Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2024, pembangunan Kabupaten Dharmasraya mengusung tema **"PENGUATAN EKONOMI INKLUSIF YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN".**

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain:

1. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan;
2. Urgensitas penanganan isu;dan
3. kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan

1. Visi dan Misi Pembanganan Kabupaten Dharmasraya sebagaimana RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026,
2. Isu Strategis, dan
3. Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Sumatera Barat maupun Tingkat Nasional.

Dalam penetapan prioritas pembangunan Tahun 2025, tetap mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya yang dalam disarikan delapan prioritas pembangunan yang disebut dengan astha utama kedua, dimana prioritas pembangunan ini menjadi dasar menyusun program pembangunan daerah pada Tabel 4.6. dan arah kebijakan pembangunan dapat dilihat pada Tabel 4.7 serta Arahan Program Prioritas Pembangunan dapat dilihat pada Gambar 4.8. Sedangkan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4-6 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No.	Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025
1.	Pemerataan pembangunan infrastruktur	Pemerataan pembangunan infrastruktur
2.	Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Mewujudkan ekonomi daerah yang maju
3.	Memajukan pendidikan yang berkarakter	Memajukan pendidikan yang berkarakter
4.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
6.	Pembangunan yang berkelanjutan	Pembangunan yang berkelanjutan
7.	Membangkitkan identitas daerah	Membangkitkan identitas daerah
8	Membangun berbasis nagari	Membangun berbasis nagari

Sumber : RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dan Hasil Kajian Bapperida Tahun 2024

Tabel 4-7 Arah Kebijakan Pembangunan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

NO	PRIORITAS/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	**PRIORITAS 1 : PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (MISI 1 : MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR)**			
	Meningkatnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan jalan dan jembatan	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan
			Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan	pembangunan jalan dan jembatan menuju pusat-pusat aktifitas dan perekonomian
				peningkatan kualitas jalan dan jembatan
				pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
			Penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan	peningkatan cakupan layanan air minum dan sanitasi
				pengelolaan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku dalam rangka menjaga Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (K3)
				peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya air
			Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola layanan limbah domestik	Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi
			Mendorong penguatan regulasi dalam pengelolaan dan pengolahan limbah domestik	Penguatan komitmen stakeholder dalam pelayanan sanitasi yang berkelanjutan

NO	PRIORITAS/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi	Pengembangan pola dan pendekatan pendanaan sanitasi melalui DAK dan CSR untuk menunjang pendanaan daerah
			Meningkatan pembangunan infrastruktur sanitasi (air limbah domestik dan sampah)	Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman yang terintegrasi
			Meningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan akses sanitasi yang layak dan aman	Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi
			Mengembangkan pola penyediaan dan pendanaan infrastruktur sanitasi yang inovatif dan tepat sasaran	Peningkatan peluang kerja sama dan pendanaan dalam Penyediaan infrastruktur sanitasi
		Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layah huni	Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman dan terjangkau
			Meningkatkan (perluasan) penyediaan fasilitas pembiayaan perumahan yang terjangkau	Peningkatan penyediaan perumahan layak huni
			Meningkatkan penyediaan pemukiman	Peningkatan penyediaan jaringan drainase

NO	PRIORITAS/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			yang terpadu yang didukung oleh infrastruktur dasar yang sesuai tata ruang	Meningkatkan persentase jaringan jalan yang memiliki drainase
				Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum permukiman
				Perkotaan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman	Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman
				Pelaksanaan updating data pengawasan kawasan permukiman
		Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana jaringan irigasi	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi
				Peningkatan kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan perairan lainnya
				Peningkatan kinerja layanan irigasi
				Pelaksanaan updating data daerah irigasi kewenangan kabupaten
			Meningkatkan kapasitas pengelola dan pengelolaan SDA	Peningkatan upaya penataan sungai
				Peningkatan kualitas tebing sungai
				Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sungai dan pantai
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA
				Penyusunan profil data sumberdaya air secara regular dan berkesinambungan

NO	PRIORITAS/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2	**PRIORITAS 2 : MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG MAJU (MISI 3 : MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI DAERAH YANG BERDAYA SAING)**			
	Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Meningkatkan pengembangan usaha-usaha ekonomi berbasis produk unggulan dan kemandirian pangan	peningkatan produksi, produktifitas dan kualitas produk melalui akses terhadap Teknologi
				peningakatan sarana dan prasarana, dan peningkatan akses permodalan
				Peningkatan inovasi produk unggulan dalam neningkatkan nilai tambah produk
				Peningkatan efisiensi produksi melalui pemanfaatan teknologi
				Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha
				Pemberdayaan pelaku usaha untuk untuk menembus pasar domestik
				Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan ekonomi
				Peningkatan legalitas produk unggulan daerah
				Pemantauan distribusi barang bersubsidi
				Peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen Meningkatkan kemandiran pangan
			Mengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif	pengembangan potensi pariwisata budaya dan alam
		Mengurangi pengangguran	mendorong terbukanya lapangan kerja baru berbasis padat karya	meningkatkan kapasitas balai latihan kerja

NO	PRIORITAS/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			meningkatkan keterampilan tenaga kerja	pengembangan kualitas dan jenis pelatihan bagi pencari kerja dan/atau angkatan kerja yang belum bekerja
		Mengurangi kemiskinan	Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin
				Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat miskin
				Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin
				Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin
3	**PRIORITAS 3 : MEMAJUKAN PENDIDIKAN YANG BERKARAKTER (MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA)**			
	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan inklusif	Peningkatan pembinaan dan pengembangan pembelajaran Pendidikan formal dan non formal
				peningkatan pemerataan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah
			Meningkatkan upaya pengembangan pendidikan inklusif	Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
				Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan
				Pengembangan dan Peningkatan pengelolaan sekolah inklusi
				peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan	Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah daerah
				Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan

NO	PRIORITAS/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			perempuan dan perlindungan anak	Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah
				Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat kabupaten
				Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya
				Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten
4	**PRIORITAS 4 : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT (MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA)**			
	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat berbasis gender	peningkatan pelayanan kesehatan dasar
				peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
				peningkatan layanan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak kenular
			Meningkatkan tata kelola upaya kesehatan	meningkatkan cakupan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan menuju Total coverage
				peningkatan mutu sumber daya manusia

NO	PRIORITAS/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Peningkatan dan pengendalian ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan
				Peningkatan sertifikasi dan akreditasi Layanan Kesehatan
				Meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka mendukung derajat kesehatan masyarakat
5	**PRIORITAS 5 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN)**			
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah	Peningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
				Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
				Peningkatan kemampuan fiskal daerah
				Peningkatan fungsi pengawasan pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah
		Birokrasi yang berkualitas	Meningkatkan manajemen kepegawaian	Peningkatan Rekruitment ASN sesuai dengan analisis jabatan
				Peningkatan kepastian jenjang karir ASN sesuai dengan kompetensi, pengalaman dan prestasi yang dimiliki
				Peningkatan kesejahteraan ASN sesuai dengan beban kerja dan kinerja.
				Peningkatan pembinaan disiplin kerja ASN
			meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan	Peningkatan pelatihan ASN untuk meningkatkan kompetensi dalam

NO	PRIORITAS/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				pelaksanaan tugas dan pelayanan publik
			Penataan kelembagaan serta pelayanan berbasis elektronik	Penataan kelembagaan untuk penciptaan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan
				Peningkatan sarana dan prasarana yang representatif berbasis Teknologi informasi
		Pelayanan publik yang prima	Meningkatkan sarana dan prasarana, serta ketatalaksanaan pelayanan	Penyempurnaan/Restrukturisasi organisasi pelayanan
				Peningkatan sarana dan prasarana yang representatif dan berbasis Teknologi informasi
				Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pelayanan
				Pelaksanaan pelayanan publik terpadu (mall pelayanan publik)
6	**PRIORITAS 6 : PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN (MISI 5 : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN)**			
	Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Kesesuaian penataan ruang	Menyusun regulasi perencanaan dan penataan ruang
				Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Penataan Ruang
				Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan efektivitas tata kelola dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan upaya pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup untuk mengoptimalkan pengembangan kapasitas lingkungan hidup

NO	PRIORITAS/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Peningkatan perlindungan dan pengendalian dampak lingkungan
				Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup
				Penguatan regulasi dan pengawasan kualitas lingkungan hidup
		Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	Meningkatkan efektivitas tata kelola sistem penanganan bencana daerah	Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
				Peningkatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
				Peningkatan pemulihan daerah pasca bencana
7	**PRIORITAS 7 : MEMBANGKITKAN IDENTITAS DAERAH (MISI 6 : MENINGKATKAN NILAI-NILAI AGAMA, ADAT DAN BUDAYA YANG MENCERMINKAN KEPRIBADIAN DAERAH)**			
	Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan keterpaduan dalam menggerakan pemahaman dan pengalaman nilai nilai agama	Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan
				Peningkatan pemahaman ajaran agama sejak usia dini
				Peningkatan keterpaduan pemanfaatan zakat dengan program penanganan masalah sosial dan pengentasan kemiskinan
				Peningkatan peran dan kualitas pengelolaan pendidikan agama
		Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai	Peningkatan peran lembaga adat dalam kehidupan masyarakat	Pembinaan nagari beradat dan berbudaya dengan melibatkan stakeholder terkait

NO	PRIORITAS/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat		Pembinaan dan peningkatan kapasitas pemangku kelembagaan adat dan pelaksanaan festival budaya daerah
8	**PRIORITAS 8 : MEMBANGUN BERBASIS NAGARI (MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN)**			
	Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi/lingkungan nagari	Penguatan pemerintahan nagari dalam meningkatkan Dimensi Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Permukiman untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/*SDGs*)
				Penguatan pemerintahan nagari dalam meningkatkan ketahanan Ekonomi Nagari untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/*SDGs*)
				Penguatan pemerintahan nagari dalam meningkatkan katahanan Ekologi / lingkungan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/*SDGs*)

Sumber : RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

Tabel 4-8 Arahan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	Perangkat Daerah PenanggungJawab
1	PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR				
	TUJUAN: TERWUJUDNYA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SECARA MERATA DAN BERKUALITAS	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	67	Dinas PUPR
	SASARAN: MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	60	Dinas PUPR
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	92	Dinas PUPR
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	95	Dinas PUPR
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	60	Dinas PUPR
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	Persen	92	Dinas PUPR
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	Persen	95	Dinas PUPR
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase ketersediaan Utilitas Umum (Drainase)	Persen	6,19	Dinas PUPR
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	Persen	50	Dinas PUPR
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang	Persen	20	Dinas PUPR

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	Perangkat Daerah PenanggungJawab
		memenuhi standar kompetensi			
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	Persen	92,75	Dinas PUPR
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi	Persen	90	Dinas Perkimtan
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaik an	Persen	100	Dinas Perkimtan
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaik an	Persen	100	Dinas Perkimtan
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	Persil	9	Dinas Perkimtan
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	Persil	9	Dinas Perkimtan
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaik an	Persen	100	Dinas Perkimtan
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat	Persen	60,00	Dinas Perkimtan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	Persen		Dinas Perhubungan
	SASARAN: MENINGKATNYA KUALITAS PERUMAHAN SERTA PRASARANA DAN SARANA PADA KAWASAN PEMUKIMAN	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	4,00	
		Rasio pemukiman layak huni	Persen	90	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan permukiman layak huni	Persen	92,5	Dinas Perkimtan

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	Perangkat Daerah PenanggungJawab
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	60	Dinas Perkimtan
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	Persen	100	Dinas Perkimtan
	SASARAN: MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	80	Dinas PUPR
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	77,5	Dinas PUPR
2	MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG MAJU				
	TUJUAN: MENINGKATNYA PEREKONOMIAN YANG INKLUSIF, BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	Pertumbuhan PDRB	persen	4,5	Bapperida
		Gini rasio	indek s	0,270	Bapperida
	SASARAN: MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING DAERAH	PDRB Per Kapita	Juta rupia h	57,0	Bapperida
		Rasio Net Eksporterhadap PDRB	persen	15	Bapperida
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasarrakyat yang telah direvitalisasi	paket	50	Dinas Kumperdag
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian	Orang	-	Dinas Kumperdag
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	usahamikro	70	Dinas Kumperdag
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan omzet IKM	IKM	8,75	Dinas Kumperdag

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	Perangkat Daerah PenanggungJawab
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data Informasi Industri yang ter update	Persen	-	Dinas Kumperdag
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase kelompok tani memiliki alat pertanian	Persen	-	Dinas Pertanian
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	persentase sawah terailiri irigasi	Persen	-	Dinas Pertanian
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persen		Dinas SOSP3APPKB
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah Fakir Miskin yang terdata	Persen	-	Dinas SOSP3APPKB
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah TKSK yang Terlatih	Persen	-	Dinas SOSP3APPKB
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan social	Persen	60	Dinas SOSP3APPKB
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	paket	90	Dinas Transnaker
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		-	-	Dinas Transnaker
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja yang terukur kompetensi dan Produktivitas	asesi	-	Dinas Transnaker
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah KegiatanTerpeliharanya Aplikasi Informasi Pasar Kerja	persen	-	Dinas Transnaker
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Peningkatan kapasitas kelompok penyedia pangan utama dan lainnya	kelom pok	-	Dinas Transnaker
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Akses Pangan masyarakat	Persen	85	Dinas PanganPeikanan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Nagari rawan Pangan yang tertangani	Nagari	80	Dinas PanganPeikanan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman yang beredar	Persen	90	Dinas PanganPeikanan

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	Perangkat Daerah PenanggungJawab
		dimasyarakat			
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Peningkatan jumlah koperasi sehat	Koperasi	60	Dinas Kumperdag
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik	KSP/USP	40	Dinas Kumperdag
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi yang mengalami peningkatan produktivitas usaha	Koperasi	-	Dinas Kumperdag
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan Investasi	Dok	3,5	Dinas PMPTSP
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Promosi dan kerjasama investasi	kegiatan	-	Dinas PMPTSP
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya	Persen	100	Dinas PMPTSP
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Penanaman Modal	Perusahaan	100	Dinas PMPTSP
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persen	5	Dinas Pangandan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase usaha perikanan yang berkembang	Persen	-	Dinas Pangan dan Perikanan
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Peningkatan Kawasan pengawasan	Persen	30	Dinas Pangandan Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan usaha Pengolahan dan pemasaran ikan yang berdaya saing	Persen	25	Dinas Pangandan Perikanan
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan	destinasi	100	Dinas Pangandan Perikanan
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata	Unit	-	Dinas Budparpora
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	kelom pok	50	Dinas Budparpora
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	persentase kelompok tani terbina	Persen	-	Dinas Pertanian
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	persentase kelompok tani terbina	Persen	-	Dinas Pertanian

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	Perangkat Daerah PenanggungJawab
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koofisien Variasa Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu	Indeks	-	Dinas Kumperdag
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Alat UTTP yang Beratanda tera sah	Unit	50	Dinas Kumperdag
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	Persen	80	Dinas Kumperdag
	SASARAN: MENGURANGI PENGANGGURAN	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6	Dinas Kumperdag
	SASARAN: MENGURANGI KEMISKINAN	Tingkat Kemiskinan	Persen	5.5	Dinas Kumperdag
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	74	Dinas Nakertrans
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	Persen	40	Dinas Nakertrans
3	MEMAJUKAN PENDIDIKAN YANG BERKARAKTER				
	TUJUAN: MENINGKATNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		72,29	Bapperida
	SASARAN: MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,75	Dinas Pendidikan
		Harapan lama sekolah	Tahun	12,75	Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	75	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen	100	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persen	85	Dinas Pendidikan
		APK Non Formal / Kesetaraan	-	-	-
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	dokumen	-	Dinas Pendidikan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	Persen	70	Dinas Pendidikan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Dibina	Persen	6,31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	Perangkat Daerah PenanggungJawab
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang dilstarikan	persen	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	SASARAN: MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN	Indeks Pembangunan Gender	indeks	89,5	Dinas SOSP3APPKB
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	persen	100	Dinas SOSP3APPKB
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	tingkat	Madya	Dinas SOSP3APPKB
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	persentase pengelolaan sistem data gender dan anak	Persen	64	Dinas SOSP3APPKB
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase pemenuhan hak anak	Persen	100	Dinas SOSP3APPKB
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase perlindungan Anak	Persen	-	Dinas SOSP3APPKB
	TUJUAN: MENINGKATNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		73,5	Bapperida
	SASARAN: MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Harapan Hidup	tahun	74,5	Bapperida
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	persen	100	Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasyankes dengan Standar minimal tenaga kesehatan yang terpenuhi	persen	100	Dinas Kesehatan
		Persentase Tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	persen	100	Dinas Kesehatan
		Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi	persen	100	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan BMHP di Fasyankes	persen	100	Dinas Kesehatan
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKRT	unit	15	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Nagari yang melaksanakan UKBM Aktif	persen	40	Dinas Kesehatan

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	Perangkat Daerah PenanggungJawab
		Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS	persen	100	Dinas Kesehatan
		Persentase peningkatan PHBS	persen	40	Dinas Kesehatan
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase kepesertaan KB	persen	77,5	Dinas SOSP3APPKB
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pembelian alat listrik; lampu, kabel	persen	-	Dinas SOSP3APPKB
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	terlaksanananya Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	persen	100	Dinas Budparpora
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	terlaksanananya Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	persen	100	Dinas Budparpora
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	terlaksanananya Pengembangan kapasitas kepramukaan	tahun	100	Dinas Budparpora
5	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
	TUJUAN: MEWUJUDKAN TATA KELOLAPEMERINTAHAN YANG BAIK	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	57,5	Setda
	SASARAN: BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	Indeks perilaku antikorupsi	Indeks	3,578	Inspektorat
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	Bobot	WTP	BKD
		Hasil evaluasi AKIP	bobot /indeks	BB	Setda
		Nilai LPPD	Skor	3,8	Setda
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian sasaran RPJMD	Persen	95	Bapperida
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan anggaran tepat waktu	Persen	100	BKD
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan tahunan	Indeks		Bapperida

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	Perangkat Daerah PenanggungJawab
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen		Bapperida
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku	Persen		Bapperida
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen		BKD
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang terkelola dengan baik	Persen		BKD
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja	Bobot		BKD
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	Persen		Bapperida
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat maturitas implementasi Sistem	Bobot		Inspektroat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Indeks		Inspektroat
	SASARAN: BIROKRASI YANG BERKUALITAS	Indeks Kelembagaan	Indeks		
		Indeks SPBE	Indeks		
		Indeks Profesionalisme ASN	Indeks		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Indeks		BKPSDM
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat	Persen		Dinas Kominfo
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan,	Persen		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	Perangkat Daerah PenanggungJawab
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	jumlah izin penggunaan arsip yang terkelola dengan baik sesuai dengan aturan	Izin		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	Aplikasi	100	Dinas Kominfo
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen		Setda
		Jumlah rekomendasi bantuan hukum yang diberikan	-		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks		Setda
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam	Indeks		Setda
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen		Setwan
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi	Persen		Setwan
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Persen		BKPSDM
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Profesionalitas ASN	Persen		BKPSDM
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	Persen		Kecamatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	Persen		Kecamatan

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	Perangkat Daerah PenanggungJawab
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	Persen		Kecamatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	Nagari		Kecamatan
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Konflik Sosial	Kejadian		Badan Kesbangpol
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pembinaan Partai Politik	Persen		Badan Kesbangpol
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persen		Badan Kesbangpol
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan LSM	Persen		Badan Kesbangpol
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Penyakit Masyarakat	Kasus		Badan Kesbangpol
	SASARAN : PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	Publik service indeks	Indeks		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan	Indeks		Setda
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen		Satpol PP
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase/ Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan	Persen		BPBD

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	Perangkat Daerah PenanggungJawab
		evakuasi korban bencana			
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen		BPBD
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)	Persen		BPBD
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	persentase Inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta	Persen		Satpol PP
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KTP-elektronik	Perse n	100	Dinas Dukcapil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	Persen		Dinas Dukcapil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	Persen		Dinas Dukcapil
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persen	100	Dinas Kominfo
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	Persen	100	Dinas Kominfo
6	PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN				
	TUJUAN: TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN (GREEN DEVELOPMENT)	Indeks Pembangunan berkelanjutan	Indeks		
	SASARAN: OPTIMALISASI PERENCANAAN TATA RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Kesesuaian pemanfaatan ruang	persen		
	SASARAN: MENINGKATNYA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks		

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	Perangkat Daerah PenanggungJawab
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Meningkatnya Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan yang memiliki potensi merusak lingkungan 2. Meningkatnya persentase indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan. 3. Meningkatnya sumber daya alam yang dilindungi 4. Meningkatnya luas tutupan lahan	Ha		DLH
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	Doku men	1	DLH
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Persen	-	DLH
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	persen	100	DLH
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Perusahaan	-	DLH
		Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.	-	-	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah pengakuan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	MHA	1	DLH
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan penghargaan lingkungan	Persen	100	DLH
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang tertangani	Persen	100	DLH

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	Perangkat Daerah PenanggungJawab
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya Pesentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya	Persen	100	DLH
7	MEMBANGKITKAN IDENTITAS DAERAH				
	TUJUAN: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MENTAL DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT BERDASARKAN NILAI NILAI AGAMA, ADAT, DAN BUDAYA	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	Nigari	2	
	SASARAN: MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan zakat	Persen	20	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks	80	Setda
		Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	Persen	100	Setda
	SASARAN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN PENERAPAN NILAI NILAI AGAMAN, ADAT DAN BUDAYA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	Nagari	2	Dinas Budparpora
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Terlaksanananya Pengembangan kebudayaan	Persen	100	Dinas Budparpora
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan	Jenis	16	Dinas Budparpora
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar Budaya yang lestasri	Unit	102	Dinas Budparpora
8	MEMBANGUN BERBASIS NAGARI				
	SASARAN: MENINGKATNYA KETAHANAN SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN NAGARI	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	0.860	PMD
		Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	Indeks	0.750	PMD

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	Perangkat Daerah PenanggungJawab
		Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	Indeks	0.700	PMD
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	Persen	100	Dinas PMD
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah nagari yang melakukan kerjasama	Nagari	5	Dinas PMD
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari	Persen	100	Dinas PMD

Tabel 4-9 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	**PRIORITAS 1 : PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**			
	Meningkatnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan jalan dan jembatan	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan
			Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan	pembangunan jalan dan jembatan menuju pusat-pusat aktifitas dan perekonomian
				peningkatan kualitas jalan dan jembatan
				pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
			Penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan	peningkatan cakupan layanan air minum dan sanitasi
				pengelolaan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku dalam rangka menjaga Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (K3)
				peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya air
			Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola layanan limbah domestik	Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi
			Mendorong penguatan regulasi dalam pengelolaan dan pengolahan limbah domestik	Penguatan komitmen stakeholder dalam pelayanan sanitasi yang berkelanjutan
			Penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran	Pengembangan pola dan pendekatan pendanaan sanitasi melalui DAK dan CSR untuk menunjang pendanaan daerah

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pembangunan infrastruktur sanitasi	
			Meningkatan pembangunan infrastruktur sanitasi (air limbah domestik dan sampah)	Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman yang terintegrasi
			Meningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan akses sanitasi yang layak dan aman	Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi
			Mengembangkan pola penyediaan dan pendanaan infrastruktur sanitasi yang inovatif dan tepat sasaran	Peningkatan peluang kerja sama dan pendanaan dalam Penyediaan infrastruktur sanitasi
		Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layah huni	Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman dan terjangkau
			Meningkatkan (perluasan) penyediaan fasilitas pembiayaan perumahan yang terjangkau	Peningkatan penyediaan perumahan layak huni
			Meningkatkan penyediaan pemukiman yang terpadu yang didukung oleh infrastruktur dasar yang sesuai tata ruang	Peningkatan penyediaan jaringan drainase
				Meningkatkan persentase jaringan jalan yang memiliki drainase
				Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum permukiman Perkotaan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam	Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pengelolaan lingkungan permukiman	Pelaksanaan updating data pengawasan kawasan permukiman
		Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana jaringan irigasi	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi
				Peningkatan kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan perairan lainnya
				Peningkatan kinerja layanan irigasi
				Pelaksanaan updating data daerah irigasi kewenangan kabupaten
			Meningkatkan kapasitas pengelola dan pengelolaan SDA	Peningkatan upaya penataan sungai
				Peningkatan kualitas tebing sungai
				Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sungai dan pantai
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA
				Penyusunan profil data sumberdaya air secara regular dan berkesinambungan
2	**PRIORITAS 4 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**			
	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat berbasis gender	peningkatan pelayanan kesehatan dasar
				peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
				peningkatan layanan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak kenular
			Meningkatkan tata kelola upaya kesehatan	meningkatkan cakupan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan menuju Total coverage
				peningkatan mutu sumber daya manusia
				Peningkatan dan pengendalian ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Peningkatan sertifikasi dan akreditasi Layanan Kesehatan
				Meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka mendukung derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan inklusif	Peningkatan pembinaan dan pengembangan pembelajaran Pendidikan formal dan non formal
				peningkatan pemerataan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah
			Meningkatkan upaya pengembangan pendidikan inklusif	Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
				Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan
				Pengembangan dan Peningkatan pengelolaan sekolah inklusi
				peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah daerah
				Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
				Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah
				Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat kabupaten

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya
				Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten
3	**Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing**			
	Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Meningkatkan pengembangan usaha-usaha ekonomi berbasis produk unggulan dan kemandirian pangan	peningkatan produksi, produktifitas dan kualitas produk melalui akses terhadap Teknologi
				peningakatan sarana dan prasarana, dan peningkatan akses permodalan
				Peningkatan inovasi produk unggulan dalam neningkatkan nilai tambah produk
				Peningkatan efisiensi produksi melalui pemanfaatan teknologi
				Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha
				Pemberdayaan pelaku usaha untuk untuk menembus pasar domestik
				Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan ekonomi
				Peningkatan legalitas produk unggulan daerah
				Pemantauan distribusi barang bersubsidi
				Peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen Meningkatkan kemandiran pangan

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Mengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif	pengembangan potensi pariwisata budaya dan alam
		Mengurangi pengangguran	mendorong terbukanya lapangan kerja baru berbasis padat karya	meningkatkan kapasitas balai latihan kerja
			meningkatkan keterampilan tenaga kerja	pengembangan kualitas dan jenis pelatihan bagi pencari kerja dan/atau angkatan kerja yang belum bekerja
		Mengurangi kemiskinan	Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin
				Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat miskin
				Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin
				Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin
4	**Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien**			
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah	Peningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
				Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
				Peningkatan kemampuan fiskal daerah
				Peningkatan fungsi pengawasan pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah
		Birokrasi yang berkualitas	Meningkatkan manajemen kepegawaian	Peningkatan Rekruitment ASN sesuai dengan analisis jabatan

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Peningkatan kepastian jenjang karir ASN sesuai dengan kompetensi, pengalaman dan prestasi yang dimiliki
				Peningkatan kesejahteraan ASN sesuai dengan beban kerja dan kinerja.
				Peningkatan pembinaan disiplin kerja ASN
			meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan	Peningkatan pelatihan ASN untuk meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik
			Penataan kelembagaan serta pelayanan berbasis elektronik	Penataan kelembagaan untuk penciptaan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan
				Peningkatan sarana dan prasarana yang representatif berbasis Teknologi informasi
		Pelayanan publik yang prima	Meningkatkan sarana dan prasarana, serta ketatalaksanaan pelayanan	Penyempurnaan/Restrukturisasi organisasi pelayanan
				Peningkatan sarana dan prasarana yang representatif dan berbasis Teknologi informasi
				Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pelayanan
				Pelaksanaan pelayanan publik terpadu (mall pelayanan publik)
	Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi/lingkungan nagari	Penguatan pemerintahan nagari dalam meningkatkan Dimensi Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Permukiman untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/*SDGs*)

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Penguatan pemerintahan nagari dalam meningkatkan ketahanan Ekonomi Nagari untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/*SDGs*)
				Penguatan pemerintahan nagari dalam meningkatkan katahanan Ekologi / lingkungan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/*SDGs*)
5	**Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan**			
	Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Kesesuaian penataan ruang	Menyusun regulasi perencanaan dan penataan ruang
				Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Penataan Ruang
				Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan efektivitas tata kelola dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan upaya pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup untuk mengoptimalkan pengembangan kapasitas lingkungan hidup
				Peningkatan perlindungan dan pengendalian dampak lingkungan
				Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup
				Penguatan regulasi dan pengawasan kualitas lingkungan hidup

No	Prioritas/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	Meningkatkan efektivitas tata kelola sistem penanganan bencana daerah	Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
				Peningkatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
				Peningkatan pemulihan daerah pasca bencana
6	**Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah**			
	Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan keterpaduan dalam menggerakan pemahaman dan pengalaman nilai nilai agama	Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan
				Peningkatan pemahaman ajaran agama sejak usia dini
				Peningkatan keterpaduan pemanfaatan zakat dengan program penanganan masalah sosial dan pengentasan kemiskinan
				Peningkatan peran dan kualitas pengelolaan pendidikan agama
		Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan peran lembaga adat dalam kehidupan masyarakat	Pembinaan nagari beradat dan berbudaya dengan melibatkan stakeholder terkait
				Pembinaan dan peningkatan kapasitas pemangku kelembagaan adat dan pelaksanaan festival budaya daerah

4.2.4. Penelaahan Terhadap Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Harmonisasi permasalahan dan isu pembangunan daerah yang dilakukan melalui konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan verifikasi rancangan Renja seluruh Perangkat Daerah Provinsiserta saran dan masukan dari DPRD Kabupaten Dharmasraya melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui hasil reses.

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut, diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Saran dan pendapat yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD untuk perencanaan pembangunan tahun 2025 yang telah dimasukkan kedalam e-planning Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPDRI), selanjutnya disinergikan dalam rancangan program dan kegiatan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Berdasarkan hasil reses tersebut diperoleh daftar usulan reses yang disampaikan sebagai pokok-pokok pikiran DPRD. Memahami kemampuan keuangan daerah maka dilakukan pemilahan dan pemilihan hasil reses tersebut yang disesuaikan dengan alokasi anggaran dan prioritas pembangunan daerah sehingga diperoleh usulan pokir yang sesuai dengan prioritas pembangunan. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, saran dan masukan tersebut antara lain:

1. Hasil Musrenbang diakomodir 1 usulan per nagari.
2. Pokok-pokok pikiran DPRD diakomodir berdasarkan usulan dari 30 Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya.

Adapun proses pengajuan usulan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Gambar 4-4 Flow Penyampaian Pokir Dewan Dalam SIPD.RI

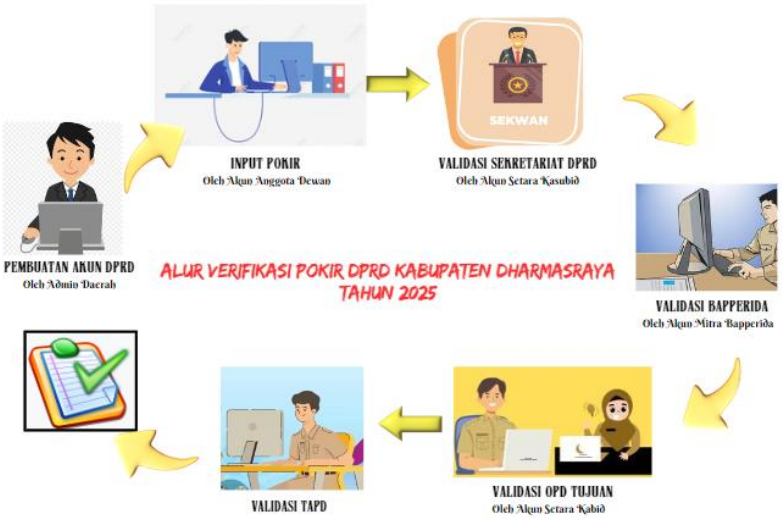

Berdasarkan hasil input Pokir dalam aplikasi SIPD-RI yang disampaikan berdasarkan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya, terdapat sebanyak 380 usulan yang telah diverifikasi oleh Bapperida dan dilaksanakan oleh 12 (dua belas) Perangkat Daerah. Untuk lebih jelasnya usulan-usulan pokir DPRD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.10:

Tabel 4-10 Daftar Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

No	OPD Pelaksana	Jumlah Usulan
1	Dinas Pendidikan	19 usulan
2	Dinas Kesehatan	9 usulan
3	Dinas PUPR	78 usulan
4	Dinas Perkimtan	83 usulan
5	Dinas SOSP3APPKB	1 usulan
6	Satpol PP	1 usulan
7	Dina Kumperdag	1 usulan
8	Dinas Budparpora	50 usulan
9	Dinas Perhubungan	3 usulan
10	Dinas Pertanian	66 usulan
11	Dinas pagan dan perikanan	16 usulan
12	Setda	53 usulan
Jumlah		**380 usulan**

Sumber : https://sipd-ri.kemendagri.go.id/

4.2.5. Penyelarasan RKPD Kabupaten Dharmasraya dengan RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, sehingga keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025 dengan sasaran.

Penyelarasan antara prioritas Nasional Tahun 2025 dengan Prioritas Provinsi Tahun 2025 serta prioritas Kabupaten Dharmasraya Tahun akan berdampak pada berjalannya prioritas nasional yang kemudian akan berjalan hingga ke tingkat daerah provinsi dan kabupaten dan agar rencana pembangunan tingkat nasional dan tingkat daerah berjalan beriringan dan tercapainya pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mnyelaraskan tema pembangunan 2025 dengan tema RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Barat.

Percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan daya saing daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi dan pengurangan kemiskinan, dalam tema pembangunan baik Nasional, Provinsi Sumatera Barat maupun Kabupaten Dharmasraya terkandung makna bahwa pembangunan diarahkan untuk percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh dengan meningkatkan daya saing daerah, peningkatan perekonomian dan semua itu diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun penyelarasan tema pembangunan dapat disajikan pada Tabel 4.11 dan Tabel 4.12.:

Tabel 4-11 Sandingan Antara Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2025		
NASIONAL (RKP)	**PROVINSI SUMATERA BARAT (RKPD PROVINSI SUMATERA BARAT)**	**KABUPATEN DHARMASRAYA (RKPD KABUPATEN DHARMASRAYA)**
"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan"	**"Akselerasi Produktivitas Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**	**"Penguatan Ekonomi Inklusif Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan"**

Tabel 4-12 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2025 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2025 dan Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Urutan	Prioritas Nasional Pada RKP 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Urutan	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Dharamsraya Tahun 2025	Urutan
1.	Prioritas Pembangunan untuk Transformasi Sosial	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Prioritas 1	Memajukan Pendidikan Yang Berkarakter	Prioritas 3

Urutan	Prioritas Nasional Pada RKP 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Urutan	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Dharamsraya Tahun 2025	Urutan
				Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Prioritas 4
2	Tranformasi Ekonomi	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3	Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Maju	Prioritas 2
		Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital	Prioritas 4		
		Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan	Prioritas 5		
3	Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Prioritas 7	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Prioritas 5
				Membangun Berbasis Nagari	Prioritas 8
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Prioritas 7	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Prioritas 5
5	Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 2	Membangkitkan Identitas Daerah	Prioritas 7
		Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Prioritas 6	Pembangunan Yang Berkelanjutan	Prioritas 6
				Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	Prioritas 1

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2025, Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Hasil Kajian Bapperida, Tahun 2024

4.2.6. Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten

Dalam merumuskan kebijakan umum terkait implementasi SPM sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah

menggunakan berbagai instrumen kebijakan, terutamanya tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, dimana indikator yang tertuang pada urusan pemerintahan yang terkait dengan SPM menjadi salah satu acuan dalam penetapan indikator kinerja maupun dalam muatan strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah yang tertuang pada RPJMD, dan serta indikator, strategi dan arah kebijakan terkait pada 7 (tujuh) perangkat daerah yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah, yang berkewajiban dalam melaksanakan SPM, yaitu :

a) Dinas Pendidikan;

b) Dinas Kesehatan;

c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

d) Dinas Perumahan, Kawasan pemukiman dan Pertanahan;

e) Dinas Satpol PP dan Kebakaran;

f) BPBD; dan

g) Dinas SOSP3APPKB.

Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesui klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Arah kebijakan yang akan menjadi panduan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dimana Warga Negara yang tidak mampu lebih diprioritaskan dalam menerima Pelayanan Dasar untuk memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara Secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Adapun kategori warga tidak mampu dimaksud adalah :

a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;

c. kondisi bencana; dan/atau

d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dibagi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah, telah dirumuskan berbagai kebijakan yang

mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan permasalahan mendasar yang ada di daerah, terutama yang terkait dengan Standar

Pada urusan pendidikan,pada tahun 2023 telah memperlihatkan capaian yang cukup memuaskan, yaitu secara keseluruhan indikator pencapaian SPM Bidang Pendidikan terealisasi sebesar 100 persen. Untuk bidang kesehatan, secara umum pencapaian indikator SPM adalah 100 persen kecuali indikator Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 99,72%.

Selanjutnya, dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, capaian SPM yaitu penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar 89,07 persen, penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik sebesar 92,50 persen.

Sedangkan pada bidang Perumahan Rakyat, bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sudah memenuhi target standar pelayanan minimum sebesar 100 persen. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan dan target penerima layanan dasar Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 4-13 Jenis Pelayanan Dasar dan Target Penerima Layanan Dasar Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi 2023	Target 2025	Batas Waktu Capaian
	Bidang Pendidikan				
1	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	persen	100	100	Setiap Tahun
a	Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI)	persen	100	100	Setiap Tahun
b	Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	persen	100	100	Setiap Tahun
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 -18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	persen	100	100	Setiap Tahun
3	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	persen	100	100	Setiap Tahun
	Bidang Kesehatan				
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun

No	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi 2023	Target 2025	Batas Waktu Capaian
2	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	99,72	100	Setiap Tahun
3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
5	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
8	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
9	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
11	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
12	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100	100	Setiap Tahun
	Bidang Urusan Pekerjaan Umum				
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	persen	89,07	100	Setiap Tahun
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	92,50	100	Setiap Tahun
	Bidang Urusan Perumahan Rakyat				
1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	persen	100	100	Setiap Tahun
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang	persen	100	100	Setiap Tahun

No	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi 2023	Target 2025	Batas Waktu Capaian
	memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni				
	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum				
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	persen	100	100	Setiap Tahun
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	100	100	Setiap Tahun
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100	100	Setiap Tahun
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100	Setiap Tahun
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	persen	100	100	Setiap Tahun
	Bidang Urusan Sosial				
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	100	100	Setiap Tahun
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	100	100	Setiap Tahun
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	100	100	Setiap Tahun
4	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	persen	100	100	Setiap Tahun
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	persen	100	100	Setiap Tahun

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

4.2.7. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025

Dalam rangka menjamin keseimbangan pembangunan daerah antar wilayah maka dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Dharamsraya turut mengacu kepada arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043 yang bertujuan untuk **Mengembangkan Kabupaten Dharmasraya Sebagai Pusat Pengembangan Wilayah Bagian Tenggara Provinsi Sumatera Barat Bertumpu Pada Potensi Sumber Daya Alam dan Budaya yang Berkelanjutan**. Untuk perencanaan tahun 2024 mengacu pada program pembangunan lima tahun pertama dalam periodesasi RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043.

Kebijakan pembangunan kewilayahan dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah dilakukan melalui Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten Dharmasraya, yaitu sebagai berikut:

4.2.7.1. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:

1. **Kawasan Strategis Sungai Rumbai**

   Kawasan Strategis Sungai Rumbai merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi yang terdapat di Kecamatan Sungai Rumbai.

   Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Sungai Rumbai adalah untuk mewujudkan kawasan pertumbuhan di wilayah perbatasan bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.

   Arah pengembangan Kawasan Strategis Sungai Rumbai meliputi:
   a. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa wilayah perbatasan yang menjadi penghubung antara kegiatan perdagangan dan jasa wilayah barat Pulau Sumatera dengan wilayah timur Pulau Sumatera; dan
   b. Mengembangkan kegiatan pendidikan untuk pelayanan wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten yang berbatasan.

2. **Kawasan Strategis Perikanan Darat**

   Pengembangan sentra perikanan darat terdapat dikawasan Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Koto Baru. Kawasan budidaya perikanan dengan bentuk budidaya kolam terdapat pada kawasan pengairan sungai Batanghari yang termasuk kedalam daerah administrasi Nagari Sikabau, Nagari Siguntur, dan Nagari Sitiung. Pengembangan dilakukan pada area yang sebagian dengan kondisi berawa yang sesuai untuk dibangun kolam perikanan. Pengembangan sentra budidaya perikanan dengan didukung oleh Balai Benih Ikan di Koto Baru dan *Bornstock Centre* di Pulau Punjung.

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Perikanan Darat meliputi:

a. Meningkatkan produksi perikanan darat di Kabupaten Dharmasraya sehingga mampu menjadi salah satu Kabupaten utama penghasil budidaya perikanan di Provinsi Sumatera Barat.
b. Mengembangkan perikanan budidaya terpadu dengan pendekatan kawasan minapolitan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan kegiatan pendukung lainnya.

Arah pengembangan Kawasan Strategis Perikanan Darat meliputi:

a. Mewujudkan kelengkapan sarana dan prasarana kawasan minapolitan budidaya perikanan.
b. Meningkatkan lahan dan produksi budidaya perikanan pada kawasan minapolitan.
c. Membangun sistem agribisnis perikanan dari budidaya sampai pemasaran produksi.
d. Memberikan insentif budidaya perikanan pada kawasan sentra budidaya dan kawasan hinterland produksi di kecamatan lain.

3. Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri

Untuk mendukung fungsi sebagai pusat pengembangan wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya berpotensi untuk pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan dan industri bahan tambang mengingat bahwa:

1. Kabupaten Dhamasraya adalah kabupaten penghasil komoditi karet dan sawit serta bahan tambang terutama batu bara dan biji besi dengan kontribusi besar di Provinsi Sumatera Barat.
2. Posisi Kabupaten Dharmasraya yang berada pada kawasan perbatasan tenggara Provinsi Sumatera Barat dan dilalui oleh jalan lintas tengah Sumatera memudahkan akses menuju outlet regional pelabuhan Teluk Bayur dan outlet regional pantai timur Sumatera.

Tema pengembangan Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri yaitu:
“Mewujudkan keselarasan antara kegiatan industri dengan kegiatan permukiman di Kabupaten Dharmasraya”.

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri yaitu:

1. Mewujudkan keserasian pergerakan kegiatan orang dan barang di wilayah Kabupaten Dharmasraya dengan cara mengarahkan pembangunan pabrik pada lokasi yang tidak menimbulkan dampak gangguan terhadap jalur utama lalu lintas umum orang.
2. Mengendalikan pembangunan lokasi pabrik agar tidak menimbulkan konflik dengan pemanfaatan lahan disekitarnya.

Jenis industri yang potensial untuk dikembangkan yaitu industri yang memberi nilai tambah bagi produksi komoditi utama Kabupaten Dharmasraya yaitu karet, sawit, batu bara, biji besi dan hasil tambang lainnya yang potensial untuk dieksploitasi. Selain itu dalam jangka panjang dimungkinkan untuk pengembangan industri pengolahan hortikultura buah-buahan.

Pembangunan pabrik dengan perlu dikendalikan bukan hanya dampak lingkungan tetapi juga dampak lalu lintasnya. Oleh karena itu perlu diarahkan pembangunan lokasi pabrik yang tidak mengganggu lingkungan dan tidak menimbulkan dampak gangguan terhadap lalu lintas umum orang.

Kawasan lokasi kegiatan industri yang dimaksud dalam RTRW Kab. Dharmasraya ini adalah kawasan lokasi pabrik bagi perusahaan individual. Kawasan lokasi kegiatan industri ini bukan dalam pengertian kawasan industri yang sudah baku definisinya seperti terdapat dalam PerMen Perind. No. 40/M-IND/PER/6/2016 yang mengartikan kawasan industri sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan pengelola kawasan industri.

Kawasan lokasi industri memenuhi kriteria lokasi sebagai berikut:

- Berada pada jalur akses regional (arteri primer atau kolektor primer).
- Optimalisasi lokasi berdasarkan sumber bahan baku dan arah pemasaran.
- Untuk industri yang polutif berjarak minimal 5 km dari kawasan permukiman.
- Tidak berada pada lahan relatif datar bukan lahan pertanian produktif.
- Tersedia sumber air baku yang mencukupi.
- Selain itu pengembangan lokasi pabrik pertimbangannya adalah untuk menghindari lalu lintas angkutan barang melewati jalan lintas Sumatera antara Sungai Rumbai – Pulau Punjung yang menjadi jalur pusat aktifitas penduduk kabupaten.

Dengan pertimbangan tersebut maka kawasan lokasi industri di Kabupaten Dharmasraya diarahkan sepanjang koridor jalan lingkar selatan dan lingkar utara kabupaten agar tidak menimbulkan dampak lalu lintas terhadap jalan lintas Sumatera yang membelah kabupaten serta dampak pencemaran dapat dilokalisir. Lokasi kawasan dibagi menjadi :

a. Kawasan bagian selatan dan timur kabupaten sepanjang koridor jalan kolektor primer lingkar selatan dan lingkar utara di Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, atau Kecamatan Padang Laweh dan Kecamatan Koto Baru.
b. Kawasan bagian utara kabupaten sepanjang koridor jalan kolektor primer (koridor jalan lingkar utara) di Kecamatan Timpeh dan kawasan bagian utara di Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sembilan Koto.

Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri, meliputi: Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sembilan Koto;, Kecamatan Timpeh,

Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh dan Kecamatan Koto Besar.

Dengan pertimbangan efisensi, meskipun lokasi pabrik telah dilokalisir tetapi pada kawasan perkebunan yang memiliki hamparan yang cukup luas dengan skala produksi yang memungkinkan untuk membangun pabrik pengolahan komoditi untuk kebutuhan sendiri dan juga untuk melayani produksi perkebunan rakyat sekitarnya maka dibolehkan untuk membangun pabrik di dalam kawasan perkebunannya, sehingga tidak menutup kemungkinan dapat dibangun pada kawasan lain yang memiliki potensi dan sesuai dengan kriteria.

Arah pengembangan Kawasan Strategis Lokasi Kegiatan Industri meliputi:
a. Mewujudkan lokasi kegiatan industri yang didukung oleh kelengkapan prasarana jaringan jalan dan sanitasi lingkungan.
b. Mewujudkan penataan pergerakan kendaraan angkutan barang dan orang yang tidak saling mengganggu.

4.2.7.2. Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

1. <u>Kawasan Strategis Wisata Air dan Budaya</u>

Potensi sumberdaya air sebagai sarana transportasi dan lokasi telah menyebabkan berkembangnya Kerajaan Dharmasraya dahulunya. Pada kondisi sekarang potensi sumberdaya air dan situs budaya dimanfaatkan untuk pengembangan wisata budaya yang terpadu dengan wisata alam untuk mewujudkan Kabupaten Dharmasraya sebaga magnet wisata sejarah dan budaya dibagian tengah Pulau Sumatera.

Tema pengembangan Kawasan Strategis Wisata Air Dan Budaya yaitu:
"Mewujudkan kawasan Sungai Batanghari dan sekitarnya yang memiliki latar belakang sejarah terbentuknya Kerajaan Dharmasraya sebagai kawasan wisata sejarah dan budaya".

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Wisata Air Dan Budaya yaitu:
a. Mengembangkan wisata air Sungai Batanghari dengan fasilitas pendukungnya.
b. Mengembangkan wisata air Sungai Batanghari yang terintegrasi dengan objek wisata alam dan budaya di kawasan sekitar sungai.

Kawasan wisata air dan budaya yang terdapat di Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sitiung dikembangkan sebagai produk wisata Kabupaten Dharmasraya yang memadukan wisata alam dengan wisata budaya. Wisata air dirancang pada ruas sungai Batanghari menghubungkan Bendungan Batu Bakawik - Sungai Dareh -

Siguntur. Pada masing-masing simpul transportasi tersebut dibangun dermaga wisata untuk melayani moda transportasi air.

Wisata air dipadukan dengan wisata budaya pada kawasan cagar budaya di Siguntur. Akses menuju kawasan cagar budaya di Siguntur dapat dicapai dengan pembangunan jembatan (gantung) melintas Sungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya dan penyeberangan melalui ponton di Pisang Barabuih. Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung dengan taman dan kegiatan kulinernya dapat dipadukan dengan kegiatan wisata air sepanjang ruas Sungai Batanghari tersebut. Pada sisi Sungai Batanghari di Sungai Dareh dilengkapi dengan plaza sebagai tempat rekreasi.

Wisata budaya mengintegrasikan kawasan historis situs bekas Kerajaan Dharmasraya di Siguntur, Padang Laweh, dan Koto Besar. Paket wisata yang ditawarkan bisa mengkaitkan seluruh kawasan yang menjadi kawasan cagar budaya tersebut.

Arahan pengembangan Kawasan Wisata Air dan Budaya yaitu:

1. Mewujudkan transportasi sungai yang dapat melayani kegiatan wisata dan pergerakan penduduk di kawasan melalui:
   a. Pembangunan dermaga wisata di Bendungan Batu Bakawik, Sungai Dareh, dan Siguntur.
   b. Pengadaan transportasi wisata sungai.
   c. Pembangunan plaza sisi sungai di Sungai Dareh
   d. Pembangunanjembatan (gantung) melintasSungai Batanghari dari Siguntur ke kawasan cagar budaya.
   e. Pembangunan jalan Siguntur –Candi – Sungai Langek – Pisang Barabuih (menyeberang melalui ponton sebagai jalur wisata).
   f. Pengembangan kawasan wisata budaya bekas Kerajaan Dharmasraya di Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar.
2. Mewujudkan kegiatan wisata air dan budaya Sungai Batanghari yang dilengkapi dengan event wisata budaya.

2. <u>Kawasan Strategis Koridor Kegiatan Masyarakat</u>

Kawasan koridor kegiatan masyarakat adalah kawasan pusat kegiatan dan pelayanan masyarakat dengan menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan area rekreasi dan olah raga. Kawasan koridor kegiatan masyarakat terdapat di sepanjang Jalur koridor Lintas Tengah Sumatera antara Pulau Punjung – Sungai Rumbai.

Tema pengembangan Kawasan Strategis Strategis Koridor Kegiatan Masyarakat yaitu: "Mewujudkan kawasan pusat kegiatan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang terintegrasi dengan mengembangkan fungsi pendidikan, kesehatan, olah raga dan rekreasi ".

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Koridor Kegiatan Masyarakat yaitu:

1. Mengembangkan kawasan pelayanan sosial dari pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan area olah raga dan rekreasi terintegrasi untuk melayani masyarakat Kabupaten Dharmasraya.
2. Mengembangkan kawasan pelayanan sosial yang mudah untuk dicapai oleh masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

Arahan pengembangan Kawasan Strategis Koridor Kegiatan Masyarakat yaitu:

1. Mewujudkan pengembangan pusat kegiatan olahraga terpadu.
2. Mewujudkan pengembangan fasilitas pendidikan tinggi khususnya bidang pertanian dan pendidikan kejuruan.
3. Mewujudkan pengembangan sarana kesehatan dengan prakarsa swasta dan masyarakat terutama untuk pelayanan wilayah bagian selatan Kabupaten Dharmasraya.

4.2.7.3. Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas:

a. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat; dan
b. Kawasan strategis keanekaragaman hayati.

1. <u>Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat</u>

Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup di Kabupaten Dharmasraya yaitu Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat di Kecamatan Asam Jujuhan.

Tujuan pengembangan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat adalah untuk melindungi keragaman hayati dan ekosistem kawasan hutan.

Arahan pengembangan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, meliputi:

a. Meningkatkan keamanan kawasan hutan dari kegiatan budidaya.
b. Pengembangan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai sumber ilmu pengetahuan dengan mengembangkan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang.

2. <u>Kawasan Strategis Keanekaragaman Hayati</u>

Pada saat ini KP Sitiung Kabupaten Dharmasraya telah memiliki kebun entres karet unggul, bibit karet unggul, bibit kelapa sawit unggul berkerjasama dengan PPKS Medan, Kebun contoh sawit unggul seluas 7 Ha, kebun buah-buahan, kebun produksi benih padi gogo, kedelai dan jagung. Selama ini KP Sitiung telah memproduksi

berbagai bibit tersebut dan disalurkan ke masyarakat sekitar Kabupaten Dharmasraya.

Untuk pengembangan lebih lanjut, rencana kawasan kebun keragaman hayati di Kabupaten Dharmasraya merupakan kebun koleksi plasma nuftah yang diarahkan terutama untuk koleksi penelitian dan pengembangan (*research and development*) plasma nuftah tanaman perkebunan, hortikultura buah-buahan, dan tanaman kehutanan yang sekaligus juga berfungsi untuk pembibitan. Kawasan kebun keragaman hayati selain sebagai sarana pendukung konservasi dan pengembangan budidaya tanaman pertanian juga dikembangkan sebagai kawasan agrowisata pertanian yang bersifat edukatif. Nama lain dari kebun yang menyimpan keragaman hayati yang lengkap yaitu Kebun Raya dengan luas lahan yang dibutuhkan lebih kurang 100 Ha. Kawasan Kebun keragaman hayati bisa dibangun bertahap dengan memulainya dalam ukuran terbatas seperti membangun Taman Keragaman Hayati (KEHATI) dengan luas minimal cukup 3 Ha.

Pembangunan kawasan perlu mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati.

Kawasan strategis keragaman hayati diarahkan pengembangannya yang terdapat di Kecamatan Sitiung, Kecamatan Timpeh dan Kecamatan Padang Laweh. Kawasan kebun keragaman hayati terhubung dengan kawasan cagar budaya Siguntur di bagian baratnya yang bisa dijadikan kesatuan kegiatan pariwisata.

Tema dan tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kebun Keragaman Hayati yaitu:

> "Mewujudkan kawasan yang keragaman hayati untuk tujuan konservasi, pendidikan, dan wisata sebagai salah satu daya tarik wisata regional Kabupaten Dharmasraya".

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Keanekaragaman Hayati yaitu mewujudkan kawasan yang keragaman hayati untuk tujuan konservasi, pendidikan, dan wisata sebagai salah satu daya tarik wisata regional kabupaten.

Arahan pengembangan Kawasan Strategis Kebun Keragaman Hayati yaitu:

1. Mewujudkan pengembangan lahan kebun plasma nutfah tanaman perkebunan dan buah-buahan.
2. Mewujudkan pengembangan wisata pendidikan berbasis keragaman hayati dan pengembangan agrowisata buah-buahan.

4.3. INOVASI PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai dengan Pasal 6 Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, menegaskan bahwa Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota sebagai calon penerima penghargaan Inovasi Daerah berupa IGA, berdasarkan hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah dengan kategori sebagai berikut:

1. Daerah provinsi terinovatif
2. Daerah kabupaten terinovatif;
3. Daerah kota terinovatif;
4. Daerah kabupaten/kota terinovatif kategori daerah tertinggal;
5. Daerah kabupaten/kota terinovatif kategori kawasan perbatasan; dan
6. Daerah kabupaten/kota terinovatif kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Adapun Skor dan Kategori Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11/2704/SJ tanggal 18 Mei tahun 2023 perihal Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2023, maka Kabupaten Dharmasraya berdasarkan SK Keputusan Mentri Dalam Negeri No. 400.1011-6287 Tahun 2023 Tentang Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023 berada pada peringkat 65 dari 415 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Pencapaian tahun 2023 sebesar 55,61 atau predikat Kabupaten inovatif. Daftar inovasi daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.14 dan Tabel 4.15.

Tabel 4-14 Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Manfaat
1.	Terwujudnya Pengelolaan Pajak Parkir Berbasis Komunitas	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	1. Mengelola pendapatan Daerah yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel; 2. Memudahkan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak; 3. Peningkatan PAD.
2.	Gerakan Seribu Nomor Induk Berusaha (GERBU NIB)	Inovasi Pelayanan Publik	1. Penertiban dalam pengurusan izin; 2. Kemudahan dalam pengurusan izin usaha 3. Memotivasi masyarakat untuk sadar izin

No	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Manfaat
3.	Laki-laki skrining dan pembinaan kesehatan selepas jum'atan itu keren di Jorong Cahaya Koto dan Cahaya Murni (L-MEN CAHAYA)	Inovasi Pelayanan Publik	Meningkatkan angka harapan hidup dan menurunkan potensi cost of illness yang dikeluarkan akibat penyakit tidak menular
4.	Izin Mudah Untuk Lanjut Usia (Imud Lansia)	Inovasi Pelayanan Publik	1. Penertiban dalam pengurusan izin;
			2. Kemudahan dalam pengurusan izin usaha;
			3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat lanjut usia untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial
			4. Penghematan biaya dan waktu dalam mengurus izin
5.	Archive Recovery Strategy (ARECOS)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagai bentuk pencegahan sebelum terjadinya bencana yang berdampak pada kerusakan arsip baik itu fisik dan informasinya
6.	Rumah Data Geospasial (Rumah Da Geo)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	1. Menerapkan Kebijakan Satu Peta Nasional atau lebih sering disebut One Map Policy yang merupakan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam hal informasi geospasial
			2. Memvisualkan program kerja yang telah dilaksanakan oleh dinas disajikan dalam bentuk peta
			3. Mempublikasikan hasil program kerja yang dimuat dalam web milik dinas
			4. Mendigitalisasi hasil program kerja, sehingga data tersebut dapat menjadi history dan dapat diwariskan

No	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Manfaat
			5. Menjadikan data geospasial sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk perumusan suatu kebijakan dalam menentukan arah pembangunan
7.	Restorasi Arsip Daerah (RESADA)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Menyelamatkan dan melestarikan dokumen/bahan bukti otentik yang mempunyai nilai guna
8.	NENAS TANAMAN PAGAR	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam pengembangan pertanian berbasis Nagari, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber ekonomi keluarga baik untuk kebutuhan konsumsi atau sumber penambah penghasilan keluarga dan menciptakan peluang usaha baru dan suasana yang kondusif dalam tatanan masyarakat melalui pendekatan sosial, ekonomi dan budaya setempat sebagai pondasi dasar menuju nagari agrowisata
9.	Deteksi Dini Benjolan pada Payudara Remaja Putri dengan SADARI (DEDEK MENARI)	Inovasi Pelayanan Publik	1. Menambah wawasan remaja putri mengenai pentingnya deteksi dini benjolan pada payudara dengan periksa payudara sendiri (SADARI) sebagai langkah awal yang dapat dilakukan secara mandiri di rumah.
			2. Remaja putri mengetahui cara bagaimana memeriksa payudara sendiri (SADARI) dengan baik dan benar.

No	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Manfaat
			3. Mengedukasi Remaja putri di wilayah kerja Puskesmas Gunung Medan untuk lebih mengenal tentang salah satu organ reproduksi mereka dan jika terdapat masalah yang ditemukan agar segera melapor ke pelayanan kesehatan terdekat.
10.	E-LEARNING PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	1. Meningkatkan pengembangan kompetensi individu PNS Kab. Dharmasraya
			2. Berjalannya kegiatan dan fungsi BKPSDM dalam pengembangan kompetensi SDM walaupun dengan dana yang terbatas
			3. Meningkatkan nilai indeks profesionalitas ASN
11.	Tokoh Masyarakat dan Pemuda Ajak Untuk Mengatasi Hipertensi (TOMAT MUDA ATASI HIPERTENSI)	Inovasi Pelayanan Publik	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk cek kesehatan secara rutin ke Fasyankes
			2. Mendeteksi secara dini penderita hipertensi
			3. Mengendalikan hipertensi
			4. Mencegah meningkatnya penderita hipertensi
			5. Mencegah terjadinya komplikasi bagi penderita hipertensi
12.	Budidaya Ikan Dalam Ember (BUDIKDAMBER)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	1. Menyediakan pangan keluarga dengan protein hewani dan sayuran dalam kondisi sehat dan segar
			2. Membantu menjaga lingkungan dengan memanfaatkan gelas plastic sebagai media tanam dan sebagai lahan pekarangan
			3. Memudahkan dalam melakukan pembinaan BUDIKDAMBER bagi pemerintah daerah dan OPD lainnya secara umum

No	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Manfaat
			4. Meningkatkan produktifitas masyarakat
			5. Meningkatkan ketahanan pangan keluarga
13.	Formulir Pelaporan Pengelolaan Lingkungan (FORPELING)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	1. Tersedianya acuan dalam penyusunan dan penyampaian laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
			2. Efisien dalam waktu penyampaian laporan (laporan dapat disampikan tanpa mengunjungi kantor Dinas Lingkungan Hidup) serta menghemat biaya pencetakan laporan (Laporan disampikan dalam bentuk file digital)
			3. Instrumen dalam meningkatkan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan sehingga tersedia data informasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh fasyankes sehingga proses pembinaan dapat dilaksanakan dengan pengawasan tidak langsung
			4. Berjalannya proses pembinaan pengelolaan lingungan hidup melalui pengawasan tidak langsung sehingga dapat menurunkan potensi pencemaran dan perusakan lingkungan dari beban pencemar yang dihasilkan oleh usaha dan/atau kegiatan
14.	Gerakan Edukasi Bagi Pelayanan Kesehatan Berisiko (GEBYAR) pada Penderita Hipertensi Melalui Kode QR	Inovasi Pelayanan Publik	1. Menambah wawasan mengenai pola hidup sehat pada hipertensi serta dampak yang ditimbulkanakibat tidak menjaga pola hidup sehat pada pasien hipertensi

No	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Manfaat
			2. Pasien mengetahui pola hidup pasien dan diharapkan dapat memotivasi pasien agar kontrol tekanan darah melalui pola hidup sehat.
			3. Keluarga mengetahui pola hidup pasien dan diharapkan dapat memotivasi pasien agar kontrol tekanan darah melalui pola hidup sehat.
15	Pengaduan Masyarakat Kasus Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PMS-PAMALI)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	1. Menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam lingkungan masyarakat dan meminimalisir kasus pencemaran dan kerusakan pada lingkungan sekitarnya
			2. meningkatkan kepedulian pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan melakukan pengelolaan limbahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
			3. Tersedianya informasi awal yang lengkap terkait kasus pengaduan sebagai bahan awal dalam tindak lanjut proses pengaduan masyarakat terhadap dugaan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan meningkatkan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen dan izin lingkungan
			4. Berjalannya proses pembinaan pengelolaan lingungan hidup melalui pengawasan tidak langsung sehingga dapat menurunkan potensi pencemaran dan perusakan lingkungan dari beban pencemar yang dihasilkan oleh usaha dan/atau kegiatan

No	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Manfaat
16.	Kamis berkah konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri di sekolah (KABASIRAH)	Inovasi Pelayanan Publik	1.Semua remaja putri yang ada di wilayah kerja UPT Puskesmas Sungai Rumbai mendapatkan Tablet Tambah Darah setiap hari Kamis yang langsung dikonsumsi secara bersama
			2. Remaja putri bisa memahami pentingnya konsumsi Tablet Tambah Darah sehingga terhindar dari anemia
			3. Remaja putri yang dinyatakan anemia setelah dilakukan pemeriksaan Hb (Hemoglobin) memiliki motivasi lebih untuk konsumsi Tablet Tambah Darah
			4. Membantu pemerintahan daerah dalam penanganan kejadian Stunting dengan mencegah sedini mungkin melalui pendistribusian tablet tambah darah di sekolah dan mewujudkan remaja bebas anemia menuju 2024 Zero Stunting

No	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Manfaat
17.	Gerakan Nagari Bersih Sehat Teduh dan Indah (GENARSIH SEHATI)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	membantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam gerakan masif terhadap pengolahan sampah, meningkatkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dimana Nagari-Nagari yang menerapkan inovasi Genarsih Sehati bisa diusulkan dalam program Kampung iklim, menjadi salah satu indikator penilaian dalam Adipura, serta secara tidak langsung akan turut mempengaruhi peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten. Disamping itu, juga mendorong terbentuknya kelompok peduli lingkungan di Nagari sehingga masyarakat aktif mengelola sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat dan Nagari
18.	Sistem Informasi Lingkungan Hidup Berbasis Online (SIMPELO)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	1. Memudahkan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam memperoleh informasi terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya terkait proses pengurusan peretujuan lingkungan serta dapat melakukan pengurusan persetujuan lingkungan secara online tanpa harus datang langsung ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup

No	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Manfaat
			2. Tersedianya sarana untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan terkait pelayanan perizinan secara online dan penyediaan informasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
			3. Adanya ketersediaan informasi dan aplikasi SIMPELO terkait proses pengurusan peretujuan lingkungan dan persetujuan teknis dapat meningkatkan ketaatan pelaku usaha dalam melakukan pengurusan perizinan lingkungan
19.	Ayo Tingkatkan Upaya Percepatan dan Penurunan Stunting (Ayu Ting-Ting)	Inovasi Pelayanan Publik	1. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya pencegahan stunting sejak dini
			2. Meningkatkan komitmen pemerintah dari berbagai lintas sektor untuk bersama-sama bergerak dalam upaya percepatan penurunan srunting secara holistic, integrative dan berkualitas
			3. Dapat mewujudkan visi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan Kualitas Sumber daya manusia
20.	Layanan Kunjungan Rumah dan Pengurusan Kartu BPJS Pada Pasien Jiwa (LASKAR JIWA)	Inovasi Pelayanan Publik	1. Dapat medorong terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkualitas pada ODGJ
			2. Mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya kepemilikan kartu BPJS
			3. Meningkatkan komitmen pemerintah dari berbagai lintas sektor untuk bersama-sama bergerak dalam upaya membantu menurunkan angka kekambuhan ODGJ berat dengan kepatuhan minum

No	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Manfaat
			obat dan kepemilikan kartu BPJS bagi ODGJ
			4. Dapat mewujudkan visi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan Kualitas Sumber daya manusia dengan meningkatnya kesehatan jiwa.
21.	"Bunda, Abiba" (Aku Bisa Baca)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	1. Menumbuhkan minat baca anak sejak dini
			2. Membiasakan guru serta orang tua membaca buku bersama anak
			3. Mempererat hubungan sosial emosianal antara anak dan orang tua
22.	Perizinan Keliling Nagari (Peri Keling)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Mempermudah masyarakat dalam memperoleh izin usaha, hemat biaya, dan mempersingkat waktu sehingga tercapai target perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan meningkatkan investasi di kabupaten Dharmasraya

No	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Manfaat
23.	Sawah Asri Berbunga	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Manfaat refugia sebagai area konservasi musuh alami di sawah yaitu sebagai tanaman perangkap hama, tanaman penolak hama, tempat berlindung, menarik musuh alami untuk hidup dan berkembangbiak di area tersebut karena menyediakan sumber nutrisi dan energi seperti nektar, serbuk madu dan embun madu yang dibutuhkan oleh musuh alami sehingga kehadiran musuh alami dapat menyeimbangkan populasi hama pada batas yang tidak merugikan. Selain itu refugia dapat memperindah lahan pertanian dengan warna-warni bunga yang cantik sehingga dapat juga menjadi objek wisata atau agrowisata
24.	SIGADINK EMAS (Inovasi Nagari Mandiri Administrasi Kependudukan Membahagiakan Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	1. Aksesibilitas yang lebih baik 2. Efisiensi waktu 3. Penghematan biaya 4. Peningkatan pelayanan publik 5. Akurasi data yang lebih baik 6. Pemberdayaan masyarakat
25.	Gerakan Inovasi Untuk Dharmasraya (Aksi Udha)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	1. Memacu dan memotivasi Perangkat Daerah dan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi sesuai dengan karakteristik masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah

No	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Manfaat
			2. Mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan masyarakat yang efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Dharmasraya untuk mewujudkan penerapan Good Governance
			3. Meningkatkan perluasan informasi mengenai kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan unsur masyarakat lainnya kepada masyarakat luas
			4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses kreatif dan inovatif sebagai wujud keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
			5. Memberikan penghargaan kepada unsur masyarakat dan Perangkat Daerah yang berhasil menerapkan kreativitas dan inovasi dalam memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat serta sebagai reinforcement (penguatan) kepada Perangkat daerah dan masyarakat untuk menumbuhkan budaya inovasi di lingkungan masing-masing

No	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Manfaat
26.	Klinik Belajar (Kejar)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	1. menfasilitasi, memberikan layanan kepada pendidik peserta didik, dan tenaga kependidikan dalam mengaktifkan akun belajar.id untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat dari kementrian yang dikemas dalam satu Aplikasi. Dalam proses pembelajaran akun belajar.id sangat bermanfaat untuk pengembangan diri dengan fasilitas dapat mengakses berbagai platform digital kementerian. sehingga bisa membantu meningkatkan keterampilan belajar, perluasan akses informasi pembelajaran dan penyelesaian kesulitan belajar di sekolah
			2. membantu guru menyajikan pembelajaran yang kreatif
			3. membimbing siswa pada program KIHAJAR STEM
27.	Bulan Reformasi Birokrasi	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	1. Memberikan Inovasi kepada semua OPD untuk mengimplementasikan reformasi Birokrasi di OPD masing - masing
			2. Mendorong Peningkatan indek Reformasi Birokrasi
			3. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan terkait Reformasi Birokrasi
28.	Keliling Pembangunan Nagari (Keliling Pagar Dharmasraya)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	1. Mengoptimalkan pengwasan kepada nagari
			2. Meningkatkan pemahaman tentang aturan, karena aturan yang dibuat pusat seiring waktu berjalan seiring adanya perubahan
			3. Terselenggaranya standar pelayanan peerintahan yang optimal

No	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Manfaat
29.	Bidadari Keluarga (Bidan Datang dengan Asuhan Mandiri Pada Keluarga)	Inovasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar di Bidang Kesehatan Masyarakat
			2. Meningkatkan pencapaian SPM di bidang kesehatan masyarakat
			3. Mewujudkan gerakan masyarakat hidup sehat
30.	Nagari Oke TBC	Inovasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pelayanan TBC untuk meminimalisir kasus TBC. Sehingga bagi masyarakat yang mempunyai gejala TBC seperti: Batuk lebih dari 2 minggu, demam, penurunan berat badan, bisa langsung menginformasikan kepada kader TBC yang ada di Nagari.
31.	Generasi Izin Urus Sendiri (Genius)	Inovasi Pelayanan Publik	2. Generasi muda yang berkualitas, Generasi milenial yang mempunyai kemampuan digitalisasi untuk perkembangan teknologi, Penghematan biaya dan waktu pengurursan izin, Tercapainya target pelayanan perizinan dan non perizinan PMPTSP
32.	Sistem Pelayanan Tera/Tera Ulang Berbasis Digital	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	1. Mempermudah pemilik UTTP untuk mengajukan permohonan tera / tera ulang.
			2. Mempercepat waktu proses administrasi tera / tera ulang
			3. Meningkatkan minat pemilik UTTP untuk mengajukan permohonan tera / tera ulang dengan kemudahan proses pelayanan.

No	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Manfaat
33.	GO_PAS KURMA MODIS	Inovasi Pelayanan Publik	pasien yang kurang mampu dapat melaksanakan cuci darah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh unit Haemodialisa RSUD Sungai Dareh
34.	Budidaya Ikan Dalam Pekarangan	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	sarana pendukung seperti kolam terpal, penyediaann bibit ikan, pakan dan lain sebagai nya serta dengan diadakan pelatihan dari dinas pangan dan perikanan kabupaten dharmasraya metode budidaya ikan secara benar dan juga memberikan bantuan bibit ikan. Dan perubahan yang sudah di capai setelah inovasi implementasi kelompok budidaya ikan untuk menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan usaha rumah tangga serta Pemanfaatan lahan perkarangan dapat dijadikan sebagai sumber bahan pangan sehat dan sumber pendapatan alternative untuk usaha rumah tangga
35.	Pembuatan Pakan Dari Limbah Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	1. terbantunya kelompok budidaya dalam menekan biaya operasional pakan
			2. terbukanya usaha baru untuk kelompok budidaya ikan
36.	Lubuk Larangan Kampung Surau Bersih dan Ekonomis	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	1. Terjaganya perairan umum
			2. Meningkatkan ekonomi masyarakat
			3. memfasilitasi nagari nagari yang ingin membentuk kawasan perairan umum (lubuk larangan beserta PokMasWasnya)
37.			1. Melahirkan inovasi OPD

No	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Manfaat
	Gerakan Sebulan Menggagas Ide Inovasi (Gebug-Den)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	2. Mempermudah OPD dalam pencapaian target kinerja 3. Meningkatkan Indeks Inovasi Daerah (Innovative Government Award).
38.	Konsultasi Pelayanan Keliling Sahabat Perempuan dan Anak (Saling Sapa)	Inovasi Pelayanan Publik	menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan edukasi, informasi, konsultasi masalah keluarga demi meningkatkan kualitas pengasuhan dalam keluarga
39.	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Biji Salak Jadi The dan Kopi (UP2K Bisa TOP)	Inovasi Pelayanan Publik	1. Meningkatkan pendapatan Keluarga 2. Meningkatkan pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan untuk Berperilaku sehat 3. Meningkatkan Produktifitas sehingga menjadi Keluarga yang Sejahtera 4. Mengembangkan Kreatifitas bagi para pengangguran dengan mengikuti kegiatan Kelompok usaha peningkatan pendapatan Keluarga yang terjadwal 5. Menciptakan lapangan pekerjaan baru dan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki hingga akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi Keluarga dan Masyarakat. 6. Berkurangnya Kesenjangan antara si kaya dan si miskin yakni dengan peningkatan pendapatan simiskin dengan memanfaatkan segala potensi dan kemampuan yang ada untuk mengansur-ansur

No	Nama Inovasi	Jenis Inovasi	Manfaat
			mengurangi kesenjangan yang ada
			7. Kemitraan untuk mencapai tujuan yakni bermitra dengan Dunia Usaha terkai yang ada di Daerah
40.	Zero Kemiskinan Keluarga Berdaya Masyarakat Berdaya Dengan Posdaya (Oke Gaya Sya DE POSDAYA)	Inovasi Pelayanan Publik	1. Kesejahteraan Sosial Masyarakat segera terwujud
			2. Membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya
			3. Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran
			4. Masyarakat berdaya dalam mengatasi ketimpangan ekonomi sebagai akibat pandemi covid 19
41.	Sungai Limau Peduli Secibit Jadi Bukit (Siul Sedikit)	Inovasi Pelayanan Publik	Mampu menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesejahteraan oleh, dari dan untuk mereka sendiri. Inovasi ini memberikan manfaat berupa solusi dan pemecahan masalah agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang mencolok, Kesejahteraan Sosial Masyarakat segera terwujud dan Membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya

Sumber : Bapperida Tahun 2024

Tabel 4-15 Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

NO	NAMA INOVASI	OPD PENGAMPU
1	KLINIK KOKOCA (Klinik Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2	SI-PINTAR (Sistem Informasi Peluang Investasi Tata Ruang)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	SIKEMAD (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat Online DPMPTSP)	
4	SIPEMAIN (Sistem Pengaduan Masyarakat Perizinan Online DPMPTSP)	
5	LARI PATAS TUNTAS (Layanan Perizinan Tanpa Batas Untuk Disabilitas)	
6	LAF YU (Layanan Full Senyum)	
7	LAH DAKEK (Lihat Mudah Data Kepegawaian Kita)	
8	SIAP PAK KADIS (Sistem Informasi Absesnsi Pegawai Paling Ampuh Untuk Kerja Disiplin)	
9	MANCING PALALA (Makan Ikan Cegah Stanting Pada Panen Lubuk Larangan)	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
10	Kampung Ikan Garing	
11	GAGAL PISAH (Gerakan Keluarga Sadar Memilah Sampah)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	Klik Rumah Saya (Klinik Rumah Sehat Swadaya)	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
13	STIGMA METER (Strategi Optimalisasi Kegiatan Melalui Sistem Terintegrasi)	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
14	SIPANDU (Sistem Informasi Perjalanan Dinas Terpadu)	
15	STAN KOPI (Sistem Pelayanan Koperasi Secara Digital)	
16	CeCe GeMMes (Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Pada Generasi Muda Melalui Media Sosial)	DINAS PERHUBUNGAN
17	BaBinhub (Bantuan, Pembinaan dan Informasi Perhubungan)	
18	Si-Praja GeMa (Sistem Informasi Prasarana Jalan Via *Google Maps*)	
19	LEEXWIFA (Learning Experience With Father)	DINAS PENDIDIKAN
20	SATUKA (Sarana Pembentukan Karakter)	
21	BERCANDA (Bermain Roda Baca dan Angka)	
22	MARKISA (Mari kita makan sayur dan buah)	
23	Game Cuak	
24	Si Gemoy	
25	Program PDKS	

NO	NAMA INOVASI	OPD PENGAMPU
	(Program Peningkatan dan Karakter Siswa)	
26	GESIT BUNTAGI (gerakan siswa terampil berkebun dan taman gizi)	
27	JUMPA BERLIAN (JUMAT PAGI BERSIH LINGKUNGAN)	
28	KomBel "MemPeng" Membangun Pengetahuan	
29	New Class	
30	GERAKAN STOP BULLYING (GASING)	
31	Tuntas baca Alquran melalui tutor sebaya	
32	PENGEMBANGAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERBASIS ANDROID	
33	PEMBELAJARAN DIFERENSIASI YANG NYAMAN DAN MENYENANGKAN	
34	SAKE SAKA (Satu Kelas Satu Karya)	
35	PARAK LASIH (Pagi bergerak, sekolah bersih)	
36	Pemanfaatan PANKREAS (Papan Kreasi Siswa) untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa UPT SMP N 3 Koto Salak	
37	K-IDOL (Kelas Inovatif Digital OffLine)	
38	SIMPUKDI (Simpanan Penebusan Pupuk Bersubsidi)	DINAS PERTANIAN
39	WANGI BUGAR (Warung Tani Ibu-ibu Nagari)	
40	SITERASI KESAYAT (Sistem Registrasi Kebun Sawit Rakyat)	
41	SIMPELA FOR NASI (Sistem Pengelolan Informasi Dinas Pertanian)	
42	PATWAL MILITER (Patut Kawal Ibu Hamil Baca Buku KIA Terintegrasi)	DINAS KESEHATAN
43	SUMBAR RANCAK (Surat Untuk Mengabarkan Rencana Imunisasi Anak)	
44	COMENT BELA (Coaching, Mentoring dan Belajar Mandiri)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
45	SeRaSi (Sistem Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Pra Pensiun)	
46	SPRIT (Sistem Perjalanan Dinas Terpadu)	BADAN KEUANGAN DAERAH
47	BAPANTUN ASN (Bayar Pajak Tepat Waktu ASN)	
48	BULAN (Buku Bajalan)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49	LINK TERPADU (Layanan Informasi Kearsipan Terpadu)	
50	SAHABAT (Jasa Penghantaran Obat)	RSUD SUNGAI DAREH
51	HELLO PASPOR	

NO	NAMA INOVASI	OPD PENGAMPU
	(Hello Pasien Post Rawatan)	
52	SIKUMBANG JATI (Awasi kesehatan dan tumbuh kembang remaja putri)	UPT PUSKESMAS SIALANG
53	MARIMAS CEKDAH (Mari ke puskesmas cek dahak)	
54	SIMANTU KIA (Sistem melayani terpadu kesehatan ibu dan anak)	
55	INTIP MAS (Informasi Terintegrasi dan Pengaduan puskesMAS)	UPT PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI
56	SERUNI IKAN KAKAP (Sertifikat Imunisasi Dasar Lengkap)	
57	MARATO PASANG ANTENA (Manajemen Pelaporan Terpadu Obat Puskesmas dan Jaringan Melalui Rangkaian Microsoft Excel Sederhana)	UPT PUSKESMAS SITIUNG 1
58	LAGUKU KIAN PADU (Layanan USG, Bedah Buku KIA dan ANC terpadu)	
59	DESERTASI (Barcode dan sertifikat Asi Eksklusif)	
60	BERITA SI TB (Bersama Nagari Kita Eliminasi TB)	UPT PUSKESMAS TIMPEH
61	GALI CINTAKU (Keluarga Peduli Catatan Imunisasi Dasar dan Lanjutan Untuk Kunjungan Ulang)	
62	GERTAK TB BUK DELA DAN BANG AMPUN (Gerakan Serentak Pasien TB Buka Jendela dan Lobang Penampung)	UPT PUSKESMAS KOTO BESAR
63	GERPAK BANG PASI (Gerakan Cepat Penimbangan dan Imunisasi)	UPT PUSKESMAS SITIUNG II
64	CETING DEKAN LAMA (Cegah Stunting dengan Perbaikan Pola Makan)	UPT PUSKESMAS SUNGAI DAREH
65	STUDIO IBU HAMIL (Skrinning Triple Eliminasi, Ungkap, Dekap, Intervensi Menuju Zero Ibu Hamil)	
66	SIMANDA TUA MAS SD (Sistem Manajemen Data Tata Usaha Puskesmas Sungai Dareh)	
67	GERTAK BUNTING (Gerakan Serentak Serbu Stunting)	UPT PUSKESMAS BERINGIN SAKTI
68	SERULING TANGKIT (Seruan Keliling Tanggap Penyakit)	
69	CENTING MANISE (Cegah anemia dan stunting dengan makan bergizi dan suplementasi Fe)	UPT PUSKESMAS SITIUNG IV
70	PARE BORING (Pantau Faktor Resiko PTM dengan buku monitoring)	
71	IKAN PATIN (Ikrar kesehatan pada calon pengantin)	
72	CINTIA RINDU	

NO	NAMA INOVASI	OPD PENGAMPU
	(Cegah Infeksi TB anak dengan skrining di Posyandu)	
73	APEL MENTAH (Alarm peduli menurunkan kematian ibu hamil)	
74	SEIMBANG (Sertifikat bayi dengan imunisasi booster lengkap)	
75	PENERAPAN TELENURSING KACIO SMART (Edukasi *Tuberculosis Online Short Message Real Time*)	RSUD SUNGAI RUMBAI

BAB 5. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025

Pada bab ini disajikan rekapitulasi program dan kegiatan daerah berikut dengan jumlah pagu indikatif masing-masing program yang direncanakan. Secara eksplisit juga memuat matrik tentang rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Dalam matrik rencana kerja ini memuat program pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang mempedomani visi, misi, program kegiatan strategis Kepala Daerah terpilih dan sudah dikelompokkan berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar serta Urusan Pilihan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2024 menurut Bidang Urusan lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat diuraikan program dan pagu indikatif dengan menggunakan nomenklatur sesuai pemutakhiran terhadap Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 5.1.:

Tabel 5-1 Rekapitulasi Pagu Indikatif RKPD Tahun 2025

No	Kode		OPD/ Urusan	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*
1			**Dinas Pendidikan**	**327.217.113.971**
	1	*01*	*Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan*	*327.217.113.971*
2			**Dinas Kesehatan (beserta seluruh UPTD/BLUD)**	**355.073.273.320**
			Dinas Kesehatan	166.704.590.625
			Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	155.441.048.000
			Laboratorium Kesehatan Daerah	375.000.000
			Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai	7.200.000.000
			Puskesmas Sungai Limau	1.179.286.246
			Puskesmas Sitiung I	2.479.284.095
			Puskesmas Tiumang	1.604.150.000
			Puskesmas Silago	1.587.880.156
			Puskesmas Sialang	1.438.202.000
			Puskesmas Sitiung II	1.547.522.223
			Puskesmas Padang Laweh	1.246.471.812
			Puskesmas Koto Besar	1.691.500.000
			Puskesmas Koto Baru	2.917.213.963
			Puskesmas Sungai Rumbai	2.281.730.000
			Puskesmas Gunung Medan	1.467.372.000
			Puskesmas Sungai Dareh	2.872.005.200
			Puskesmas Timpeh	1.791.317.000
			Puskesmas Beringin Sakti	1.248.700.000
	1	*02*	*Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan*	*355.073.273.320*
3			**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang**	**80.190.181.790**
	1	*03*	*Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang*	*80.190.181.790*
4			**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**	**11.387.199.056**
	1	*04*	*Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman*	*11.087.199.056*
	2	*10*	*Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan*	*300.000.000*
5			**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**	**11.832.930.814**
	1	*05*	*Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat*	*11.832.930.814*
6			**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**3.077.921.000**
	1	*05*	*Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat*	*3.077.921.000*
7			**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**10.438.910.364**
	1	*06*	*Urusan Pemerintahan Bidang Sosial*	*5.278.962.114*
	2	*08*	*Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*	*1.039.978.250*
	2	*14*	*Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana*	*4.119.970.000*

No	Kode		OPD/ Urusan	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*
8			**Dinas Pangan dan Perikanan**	**5.355.100.000**
	2	*09*	*Urusan Pemerintahan Bidang Pangan*	*4.712.100.000*
	3	*25*	*Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan*	*643.000.000*
9			**Dinas Lingkungan Hidup**	**6.649.863.275**
	2	*11*	*Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup*	*6.649.863.275*
10			**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**5.035.654.994**
	2	*12*	*Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*	*5.035.654.994*
11			**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**5.848.658.000**
	2	*13*	*Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa*	*5.848.658.000*
12			**Dinas Perhubungan**	**14.171.294.970**
	2	*15*	*Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan*	*14.171.294.970*
13			**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**5.985.790.200**
	2	*16*	*Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika*	*5.785.790.200*
	2	*20*	*Urusan Pemerintahan Bidang Statistik*	*100.000.000*
	2	*21*	*Urusan Pemerintahan Bidang Persandian*	*100.000.000*
14			**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan**	**5.500.000.000**
	2	*17*	*Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah*	*4.265.500.000*
	3	*30*	*Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan*	*800.000.000*
	3	*31*	*Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian*	*434.500.000*
15			**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**6.200.000.000**
	2	*18*	*Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal*	*6.200.000.000*
16			**Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**	**15.892.900.000**
	2	*19*	*Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga*	*3.226.700.000*
	2	*22*	*Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan*	*11.646.200.000*
	3	*26*	*Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata*	*1.020.000.000*
17			**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**4.077.413.850**
	2	*23*	*Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan*	*3.897.441.850*
	2	*24*	*Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan*	*179.972.000*
18			**Dinas Pertanian**	**22.072.854.800**
	3	*27*	*Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian*	*22.072.854.800*
19			**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**6.435.994.250**
	2	*07*	*Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja*	*6.435.994.250*
20			**Sekretariat Daerah**	**46.784.905.672**
	4	*01*	*Sekretariat Daerah*	*46.784.905.672*
21			**Sekretariat DPRD**	**42.000.000.000**
	4	*02*	*Sekretariat Dprd*	*42.000.000.000*
22			**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**	**5.161.811.350**
	5	*01*	*Perencanaan*	*4.731.811.350*

No	Kode		OPD/ Urusan	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*
	5	*05*	*Penelitian Dan Pengembangan*	*430.000.000*
23			**Badan Keuangan Daerah**	**130.470.096.585**
	5	*02*	*Keuangan*	*130.470.096.585*
24			**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**8.356.050.000**
	5	*03*	*Kepegawaian*	*7.154.050.000*
	5	*04*	*Pendidikan Dan Pelatihan*	*1.202.000.000*
25			**Inspektorat Kabupaten**	**12.741.081.450**
	6	*01*	*Inspektorat Daerah*	*12.741.081.450*
26			**Kecamatan Pulau Punjung**	**2.710.009.950**
27			**Kecamatan Sitiung**	**2.400.000.000**
28			**Kecamatan Koto Baru**	**2.352.831.700**
29			**Kecamatan Sungai Rumbai**	**2.000.000.000**
30			**Kecamatan Sembilan Koto**	**2.246.986.000**
31			**Kecamatan Timpeh**	**1.852.023.550**
32			**Kecamatan Koto Salak**	**1.666.664.200**
33			**Kecamatan Asam Jujuhan**	**1.338.242.000**
34			**Kecamatan Koto Besar**	**2.156.759.600**
35			**Kecamatan Padang Laweh**	**1.584.700.800**
36			**Kecamatan Tiumang**	**2.400.000.000**
	7	*01*	*Kecamatan*	*22.708.217.800*
37			**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**25.990.727.230**
	8	*01*	*Kesatuan Bangsa Dan Politik*	*25.990.727.230*
J U M L A H				**1.196.655.944.741**

Tabel 5.2 PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. DHARMASRAYA
TAHUN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Dinas Pendidikan						**327.217.113.971**							**327.597.113.971**	**DINAS PENDIDIKAN**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**327.217.113.971**							**327.597.113.971**	**DINAS PENDIDIKAN**
	1 01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**327.217.113.971**							**327.597.113.971**	**DINAS PENDIDIKAN**
1	**1 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administasi perkantoran**	**-**			**100 persen**	**271.177.873.811**						**-**	**271.177.873.811**	**DINAS PENDIDIKAN**
	1 01 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 tahun	52.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	52.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.0 0001 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.0 0006 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	4		50.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			1739/14 Orang/ Bulan	266.051.803.011			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	266.051.803.011	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.0 0001 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1739 Orang/14 Bulan Orang/bulan	266.051.803.011	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		266.051.803.011	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-			12 Laporan	2.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	2.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-			100 Laporan 12 Paket 12 Paket 40 Paket 12 Paket	210.425.200			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	210.425.200	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	35.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		35.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		20.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 01 01 2.0 0005 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	40.451.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		40.451.200	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.0 0009 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	99.974.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		99.974.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			2 uni 1 Unit	180.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	180.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.0 0001 7	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.0 0005 7	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.0 0009 7	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	90.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		90.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.0 0010 7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		50.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			12 Laporan 12 Laporan	4.558.145.600			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	4.558.145.600	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.0 8 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.0 8 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	140.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		140.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.0 8 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4.414.145.600	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.414.145.600	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin	-			1 Unit 36 Unit 1 Unit 30 Unit	123.500.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	123.500.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.0 9 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	16.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.0 9 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	51.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		51.500.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 01 01 2.0 0006 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		6.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 01 2.0 0009 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		50.000.000	DINAS PENDIDIKAN
2	**1 01 02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI** **Persentase pespustakaan sekolah dengan manajemen baik**	**100persen** **100persen** **100persen** **100persen**			**108,94 Persen** **85 persen**	**55.889.240.160**						**100persen** **100persen** **100persen** **100persen**	**56.269.240.160**	**DINAS PENDIDIKAN**
	1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil	-			1 Dokumen 4 Kegiatan 2 Konten Digital 3 Paket 50 Orang 50 Orang 20 Paket 2 Ruang 5 Ruang 4762 Peserta Didik 8 Ruang 8 Ruang 3 Ruang 3 Ruang 5 Unit 1 Unit 155 Satuan Pendidikan 167 Satuan Pendidikan 200 Peserta Didik	33.027.900.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	-	33.487.900.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 0001 1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	380.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		380.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 01 02 2.0 1 0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				4 Ruang	640.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		640.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	480.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		480.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	480.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		480.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	800.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		800.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	240.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		240.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	330.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		330.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	750.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		750.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 01 02 2.0 1 0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		50.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				3 Paket	147.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		147.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				10 Paket	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta Didik	35.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		35.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				50 Orang	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				168 Satuan Pendidikan	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		25.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 01 02 2.0 1 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				168 Satuan Pendidikan	24.794.900.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		24.794.900.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				168 Orang	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				2 Ruang	520.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		520.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				168 Orang	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		5.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 01 02 2.0 1 0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Dokumen	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				168 Komunitas	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				2 Paket	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				4 Kegiatan	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0044	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				2 Ruang	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				87 Buku	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				20 Paket	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 01 02 2.0 1 0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	240.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		720.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				168 Satuan Pendidikan	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				4762 Peserta Didik	2.451.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		2.451.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 1 0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang	-			2 Paket 1 Dokumen 4 Kegiatan 2 Konten Digital 1 Ruang 3 Paket 200 Orang 50 Orang 2 Ruang 1 Ruang 2952 peserta 33 Satuan Pendidikan 1 Ruang 1 Ruang 2 Ruang 3 Ruang 2 Ruang 2 Unit 1 Unit 33 Satuan Pendidikan 40 Satuan Pendidikan 200 Peserta Didik	14.837.880.660			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	-	14.817.880.660	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	310.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		310.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		50.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				3 Ruang	420.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		420.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	310.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		310.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 01 02 2.0 2 0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	340.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		340.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 2 0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 2 0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	207.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		207.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 2 0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	230.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		230.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 2 0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	130.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		130.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 2 0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				3 Paket	147.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		147.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 2 0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				40 Paket	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 01 02 2.0 2 0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2952 Peserta Didik	1.648.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		1.648.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 2 0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta Didik	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 2 0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				50 Orang	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 2 0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 2 0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				33 Satuan Pendidikan	22.980.660	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		22.980.660	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 2 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				40 Satuan Pendidikan	9.993.900.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		9.993.900.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 2 0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				40 Orang	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 01 02 2.02 0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				40 Orang	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		5.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				40 Komunitas	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				4 Kegiatan	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.02 0056	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				40 Ruang	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 01 02 2.0 2 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				40 Satuan Pendidikan	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 2 0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	250.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 2 0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 2 0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				80 Buku	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 2 0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 2 0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	120.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		120.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 2 0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	114.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		114.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 01 02 2.02 0068	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				2 Paket	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-			1 Paket 17 Paket 80 Buku 3 Dokumen 4 Kegiatan 2 Dokumen 17 Komunitas 2 Paket 17 Orang 16 Satuan Pendidikan 266 Satuan Pendidikan 100 Orang 50 Orang 50 Paket 1150 Peserta Didik 16 Satuan Pendidikan 2 Ruang 2 Ruang 3 Ruang 6 Unit 1 Unit 1 Unit 17 Orang	6.804.600.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	-	6.784.600.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				6 Unit	330.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		330.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				2 Paket	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		50.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 01 02 2.0 3 0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia				17 Paket	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 3 0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1150 Peserta Didik	300.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 3 0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				50 Orang	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 3 0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	178.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		178.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 3 0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				16 Satuan Pendidikan	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		25.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 3 0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				266 Satuan Pendidikan	4.281.600.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		4.281.600.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 3 0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				17 Orang	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 01 02 2.03 0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				17 Orang	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		20.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				3 Dokumen	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		5.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	340.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		340.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				17 Komunitas	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	510.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		510.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 01 02 2.03 0032	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				17 Ruang	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				80 Buku	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				4 Kegiatan	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	170.000.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		170.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				50 Paket	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.03 0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		50.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 01 02 2.0 0046 3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				1 Paket	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 0047 3	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				16 Satuan Pendidikan	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		20.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 0049 3	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Ruang	180.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		180.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-			150 Orang 150 Orang 30 Orang 1 Unit 1 Unit 30 Peserta Didik 9 Satuan Pendidikan	1.218.859.500			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	-	1.178.859.500	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 0010 4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				10 Peserta Didik	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		-	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 01 02 2.0 4 0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				150 Orang	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 4 0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 4 0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				9 Satuan Pendidikan	908.859.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		908.859.500	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 4 0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				25 Orang	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 4 0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 4 0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				12 Dokumen	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.0 4 0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	90.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		90.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 01 02 2.04 0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		-	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				30 Peserta Didik	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				1 Paket	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		30.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 02 2.04 0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		-	DINAS PENDIDIKAN
3	**1 01 03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI**	**100persen 100persen 100persen 100persen**			**107,3 Persen 108,94 Persen**	**90.000.000**						**100persen 100persen 100persen 100persen**	**90.000.000**	**DINAS PENDIDIKAN**
	1 01 03 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	-			1 Dokumen 180 Orang	30.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	-	30.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 01 03 2.0 1 0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				0 Buku	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 03 2.0 1 0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				180 Orang	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 03 2.0 1 0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 03 2.0 2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	-			1 Dokumen	60.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	-	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 03 2.0 2 0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				25 Buku	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 03 2.0 2 0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		50.000.000	DINAS PENDIDIKAN
4	**1 01 04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) Non Formal/Kesetaraan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD**	**100persen 100persen 100persen 100persen 99persen 100persen**			**100 Persen 107,3 Persen 108,94 Persen 78 Persen**	**60.000.000**						**100persen 100persen 100persen 100persen 99persen 100persen**	**60.000.000**	**DINAS PENDIDIKAN**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-			1 Dokumen	60.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah	-	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 04 2.01 0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1 01 04 2.01 0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Laporan	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah		50.000.000	DINAS PENDIDIKAN
		Dinas Kesehatan						**166.704.590.625**							**172.841.425.277**	**DINAS KESEHATAN**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**166.704.590.625**							**172.841.425.277**	**DINAS KESEHATAN**
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**166.704.590.625**							**172.841.425.277**	**DINAS KESEHATAN**
5	**1 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**100 Persen**			**100 Persen**	**83.346.107.625**						**100 Persen**	**84.168.624.477**	**DINAS KESEHATAN**
	1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	367.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	480.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	115.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	27.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		35.000.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 01 2.0 1 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	45.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		125.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 1 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	45.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		70.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 1 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	135.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		150.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	77.686.065.654			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	78.554.909.469	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 2 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				732 Orang/bulan	77.659.822.154	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		78.525.804.369	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 2 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	14.641.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.105.100	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 2 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	6.602.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		7.000.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 02 01 2.0 0004 2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		6.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			100 Persen	35.980.750			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	37.078.825	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 0001 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.660.250	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.026.275	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 0004 3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		25.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 0006 3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	7.320.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		8.052.550	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 tahun	172.030.929			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	189.655.630	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 0001 5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	81.746.329	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		96.887.470	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 01 2.0 5 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	8.784.600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		9.663.060	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 5 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	26.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		27.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 5 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	39.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		40.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 5 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	15.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.105.100	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 tahun	587.074.632			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	618.110.587	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 6 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.689.374	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		12.858.312	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 6 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	278.456.070	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		256.630.168	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 01 2.0 6 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	13.176.900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		14.494.590	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 6 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.955.643	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		24.151.208	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 6 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	53.204.707	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		80.525.178	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 6 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	193.950.938	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA BAGI HASIL (DBH), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		213.346.031	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 6 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	14.641.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.105.100	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 tahun	340.457.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	340.457.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 7 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				82 Unit	65.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		65.000.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 01 2.0 0006 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	275.457.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		275.457.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	3.774.570.460			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	3.492.227.506	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 8 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.198.960	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		7.018.856	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 8 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	161.051.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		177.156.100	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 8 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	7.320.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		8.052.550	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 8 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.600.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.300.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	367.928.200			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	441.185.460	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 02 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		20.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	145.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		151.913.440	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		60.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	2.928.200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.221.020	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	75.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		81.051.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	75.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		125.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	-			100 Persen	15.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	15.000.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 01 2.1 0001 0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				16 Unit Kerja	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.000.000	DINAS KESEHATAN
6	**1 02 02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jenis Pelayanan SPM 100% Akreditasi Labor Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi**	**29119orang 2unit 9unit 1unit 12jenis**			**12 Indikator 1 Unit 26693 Peserta 7 Unit**	**79.775.043.000**						**29119 orang 0unit 9unit 0unit 12jenis**	**84.874.500.000**	**DINAS KESEHATAN**
	1 02 02 2.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	AVLOS BOR BTO GDR NDR Persentase FKTL yang melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Persentase puskesmas dengan sarana sesuai standar TOI	-			5.5 Persen 63.4 Persen 45 Persen 35 Persen 14.5 Persen 100 Persen 75 Persen 3 Persen	43.197.543.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	44.675.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.0 1 0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				3 Unit	4.300.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		4.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.0 1 0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				2 Unit	460.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		460.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.0 1 0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				6 Unit	4.587.543.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Koto Salak Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		5.400.000.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 02 2.0 1 0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	1.800.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		2.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.0 1 0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	1.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		1.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.0 1 0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				4 Unit	4.200.000.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Koto Salak Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		1.600.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.0 1 0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				5 Unit	1.900.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		2.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.0 1 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				32 Unit	4.500.000.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN INTERVENSI STUNTING	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		4.600.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.0 1 0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				1 Unit	1.100.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		1.165.000.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 02 02 2.01 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	400.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		400.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.01 0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				35 Unit	3.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai Timur	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		5.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.01 0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	15.850.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KEFARMASIAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		16.950.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.01 0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				51253 Keluarga	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Cakupan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB Cakupan Penemuan dan Penanganan orang dengan gangguan jiwa berat (per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes melitus (golongan umur ≥15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥15 tahun) Jumlah daerah terpencil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah kelompok ASMAN yang dibina Jumlah kelompok yang melaksanakan tes kebugaran BBTT Jumlah nagari sadar gizi Jumlah nagari yang melaksanakan STBM Peningkatan indeks keluarga sehat (IKS) Persentase balita di timbang di posyandu Persentase balita yang di MTBS / MTBM	-			100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 6 Persen 30 Kelomok 9 Kelomok 40 Nagari 36 Nagari 0.5 Persen 80 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 46 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 50 Persen 14 Persen 100 Persen 100 Persen 6 Persen 100 Persen 56 Persen 100 Persen	36.187.500.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	39.774.500.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 02 2.0 0001 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6331 Orang	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		600.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.0 0002 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6043 Orang	250.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		300.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.0 0003 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5617 Orang	250.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		250.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.0 0004 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				28073 Orang	125.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		125.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.0 0005 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				42928 Orang	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.0 0006 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Rp 70,000,000 Orang	65.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		70.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.0 0007 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				22421 Orang	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		100.000.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 02 02 2.02 0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				48971 Orang	110.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		110.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Rp 95,000,000 Orang	95.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		95.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				606 Orang	65.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		65.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3914 Orang	125.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		125.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5219 Orang	115.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		115.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		200.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	105.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		112.000.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	322.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		352.500.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	75.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		85.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	135.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		145.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	155.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		175.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	115.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		115.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				45 Orang	85.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		100.000.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				70 Orang	75.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		75.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 Dokumen	90.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	135.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		135.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	16.500.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		17.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		20.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	125.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		150.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	4.500.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		5.000.000.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	11.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		13.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	400.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		400.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDITASI PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		200.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	95.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		95.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	95.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		95.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				50 Orang	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		65.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase RS dan Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan	-			100 Persen	170.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	190.000.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	170.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		190.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana fasyankes yang memenuhi standar perizinan Persentase sarana fasyankes yang teregistrasi	-			100 Persen 100 Persen	220.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	235.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.04 0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				1 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.04 0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 Unit	70.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		85.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.04 0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		50.000.000	DINAS KESEHATAN
7	**1 02 03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi Persentase Fasyankes dengan Standar minimal tenaga kesehatan yang terpenuhi**	**100persen 100persen 100persen 100persen**			**100 Persen 90 Persen**	**2.513.240.000**						**100persen 100persen 100persen 100persen**	**2.713.240.000**	**DINAS KESEHATAN**
	1 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan tersertifikasi	-			100 Persen	161.400.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	-	161.400.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 03 2.0 1 0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	75.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		75.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 03 2.0 1 0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	86.400.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		86.400.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 03 2.0 2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Monitoring dan Evaluasi kebutuhan tenaga di Fasyankes sesuai dengan standar Persentase pemenuhan tenaga di Fasyankes sesuai dengan standar Persentase Perencanaan kebutuhan tenaga di Fasyankes sesuai dengan standar	-			100 Persen 90 Persen 100 Persen	51.840.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	-	51.840.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 03 2.0 2 0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	51.840.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		51.840.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 03 2.0 3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanaga yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti Diklat fungsional Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan	-			40 Persen 15 Persen 45 Persen	2.300.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	-	2.500.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 03 2.0 3 0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				1 Orang	2.300.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		2.500.000.000	DINAS KESEHATAN
8	**1 02 04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sarana yang tersertifikasi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PKRT**	**100persen 100persen 15unit**			**100 Persen 15 Puskesmas**	**655.200.000**						**100persen 100persen 15unit**	**670.060.800**	**DINAS KESEHATAN**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemberian informasi obat (PIO) Sosialisasi Agent of Change (AoC) pada Apoteker	-			100 Persen 30 Orang	429.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	-	429.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 04 2.01 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	429.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		429.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 04 2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah sampel PKRT yang dicurigai mengandung bahan berbahaya yang diperiksa Jumlah Sarana PKRT yang tersertifikasi Puskesmas yang melaksanakan sosialisasi PKRT sesuai standar kesehatan	-			1 sampel 100 sarana 15 Puskesmas	32.280.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	-	40.736.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 04 2.02 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				1 Dokumen	32.280.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		40.736.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Sosialisasi penyuluhan keamanan pangan pada PIRT	-			160 PIRT	48.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	-	48.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 04 2.03 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	48.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		48.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah depot air minum (DAM) yang memiliki izin Jumlah TFU dan TPM yang laik hygiene sanitasi	-			70 angka 378 angka	95.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	-	100.000.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 04 2.0 0001 4	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	95.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 04 2.0 5	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase pembinaan dan pengawasan makanan minuman di pasar tradisional dan Sentra Makanan	-			100 Persen	25.920.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	-	27.324.800	DINAS KESEHATAN
	1 02 04 2.0 0001 5	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	25.920.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		27.324.800	DINAS KESEHATAN
	1 02 04 2.0 6	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah sampel makanan minuman yang dicurigai mengandung bahan berbahaya yang diperiksa	-			60 sampel	25.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	-	25.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 04 2.0 0001 6	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				1 Unit	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		25.000.000	DINAS KESEHATAN
9	**1 02 05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS Persentase peningkatan PHBS**	**100persen 45persen 45persen**			**100 Persen 40 Persen**	**415.000.000**						**100persen 45persen 44persen**	**415.000.000**	**DINAS KESEHATAN**
	1 02 05 2.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan promosi kesehatan Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan PKRS	-			100 Persen 100 Persen	155.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	155.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 05 2.0 0001 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	155.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		155.000.000	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang berperilaku hidup bersih dan sehat	-			20542 KK	135.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	135.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 05 2.02 0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	135.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		135.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nagari Siaga Aktif Jumlah Nagari yang melaksanakan Germas Aktif	-			35 Nagari 60 Nagari	125.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	-	125.000.000	DINAS KESEHATAN
	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	125.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		125.000.000	DINAS KESEHATAN
		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh						**155.441.048.000**							**153.735.349.000**	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**155.441.048.000**							**153.735.349.000**	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH**
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**155.441.048.000**							**153.735.349.000**	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH**
10	**1 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**36.335.349.000**						-	**35.535.349.000**	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH**
	1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			371 orang/bulan	35.535.349.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	35.535.349.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				262 Orang/bulan	35.535.349.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		35.535.349.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tarlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 tahun	800.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1 02 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	800.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
11	**1 02 02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-			-	**119.105.699.000**						-	**118.200.000.000**	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH**
	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang memenuhi Rasio Tempat Tidur terhadap Jumlah penduduk Minimal 1:1000 Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-			3 unit 114 unit 3 unit 6 unit	49.105.699.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	43.200.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1 02 02 2.01 0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				3 Unit	500.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		1.200.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1 02 02 2.01 0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				6 Unit	1.017.062.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		15.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1 02 02 2.01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				117 Unit	39.605.220.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		18.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 02 2.01 0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				3 Unit	7.983.417.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		9.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-			4 dokumen	70.000.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	75.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
	1 02 02 2.02 0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4 Dokumen	70.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		75.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH
		Laboratorium Kesehatan Daerah						**375.000.000**							**430.000.000**	**LABORATORIUM KESEHATAN**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**375.000.000**							**430.000.000**	**LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**375.000.000**							**430.000.000**	**LABORATORIUM KESEHATAN**
12	**1 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**100 persen**			**100 persen**	**175.000.000**						**100 persen**	**180.000.000**	**LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tarlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 tahun	175.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	180.000.000	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	175.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		180.000.000	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
13	**1 02 02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-			-	**200.000.000**						-	**250.000.000**	**LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	-			1 Tahun	200.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	-	250.000.000	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat		250.000.000	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai						**7.200.000.000**							**7.200.000.000**	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI RUMBAI**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.200.000.000**							**7.200.000.000**	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI RUMBAI**
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**7.200.000.000**							**7.200.000.000**	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI RUMBAI**
14	**1 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase pelaksanaan Pelayananan SPM**	**100 persen**			**100 persen**	**7.200.000.000**						**100 persen**	**7.200.000.000**	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI RUMBAI**
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	7.200.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	7.200.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI RUMBAI
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	7.200.000.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		7.200.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI RUMBAI
		Puskesmas Sungai Limau						**1.179.286.246**							**1.179.286.246**	**PUSKESMAS SUNGAI LIMAU**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.179.286.246**							**1.179.286.246**	**PUSKESMAS SUNGAI LIMAU**
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.179.286.246**							**1.179.286.246**	**PUSKESMAS SUNGAI LIMAU**
15	**1 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**439.786.246**						-	**439.786.246**	**PUSKESMAS SUNGAI LIMAU**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	439.786.246			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	439.786.246	PUSKESMAS SUNGAI LIMAU
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	439.786.246	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		439.786.246	PUSKESMAS SUNGAI LIMAU
16	**1 02 02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**persentase pelaksanaan pelayanan SPM**	**100 persen**			**100 persen**	**739.500.000**						**100 persen**	**739.500.000**	**PUSKESMAS SUNGAI LIMAU**
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga TB Cakupan penemuan dan penanganan penderita diabetes mellitus (golongan umur ≥ 15 tahun) Cakupan penemuan dan penanganan penderita hipertensi (golongan umur ≥ 15 tahun) Persentase ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan (KF) Persentase ketersediaan media promosi di puskesmas Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Persentase lansia mendapatkan	-			100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 46 persen 100 persen 100 persen	739.500.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	739.500.000	PUSKESMAS SUNGAI LIMAU
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	739.500.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		739.500.000	PUSKESMAS SUNGAI LIMAU
		Puskesmas Sitiung I						**2.479.284.095**							**2.479.284.095**	**PUSKESMAS**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.479.284.095**							**2.479.284.095**	**PUSKESMAS SITIUNG I**
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.479.284.095**							**2.479.284.095**	**PUSKESMAS SITIUNG I**
17	**1 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.632.849.095**						**-**	**1.632.849.095**	**PUSKESMAS SITIUNG I**
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.632.849.095			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	1.632.849.095	PUSKESMAS SITIUNG I

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 01 2.1 0 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.632.849.095	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		1.632.849.095	PUSKESMAS SITIUNG I
18	**1 02 02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-			-	**846.435.000**						-	**846.435.000**	**PUSKESMAS SITIUNG I**
	1 02 02 2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	846.435.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	846.435.000	PUSKESMAS SITIUNG I
	1 02 02 2.0 2 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	846.435.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sungai Duo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		846.435.000	PUSKESMAS SITIUNG I
		Puskesmas Tiumang						**1.604.150.000**							**1.604.150.000**	**PUSKESMAS TIUMANG**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.604.150.000**							**1.604.150.000**	**PUSKESMAS TIUMANG**
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.604.150.000**							**1.604.150.000**	**PUSKESMAS TIUMANG**
19	**1 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**760.050.000**						-	**760.050.000**	**PUSKESMAS TIUMANG**
	1 02 01 2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	760.050.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	760.050.000	PUSKESMAS TIUMANG
	1 02 01 2.1 0 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	760.050.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		760.050.000	PUSKESMAS TIUMANG
20	**1 02 02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-			-	**844.100.000**						-	**844.100.000**	**PUSKESMAS TIUMANG**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	844.100.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	844.100.000	PUSKESMAS TIUMANG
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	844.100.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		844.100.000	PUSKESMAS TIUMANG
		Puskesmas Silago						**1.587.880.156**							**1.587.880.156**	**PUSKESMAS**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.587.880.156**							**1.587.880.156**	**PUSKESMAS SILAGO**
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.587.880.156**							**1.587.880.156**	**PUSKESMAS SILAGO**
21	**1 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**909.475.156**						-	**909.475.156**	**PUSKESMAS SILAGO**
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	909.475.156			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	909.475.156	PUSKESMAS SILAGO
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	909.475.156	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		909.475.156	PUSKESMAS SILAGO
22	**1 02 02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-			-	**678.405.000**						-	**678.405.000**	**PUSKESMAS SILAGO**
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	678.405.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	678.405.000	PUSKESMAS SILAGO
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	678.405.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		678.405.000	PUSKESMAS SILAGO

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Puskesmas Sialang						**1.438.202.000**							**1.438.202.000**	**PUSKESMAS**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.438.202.000**							**1.438.202.000**	**PUSKESMAS SIALANG**
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.438.202.000**							**1.438.202.000**	**PUSKESMAS SIALANG**
23	**1 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**792.630.000**						-	**792.630.000**	**PUSKESMAS SIALANG**
	1 02 01 2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	792.630.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	792.630.000	PUSKESMAS SIALANG
	1 02 01 2.1 0 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	792.630.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		792.630.000	PUSKESMAS SIALANG
24	**1 02 02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-			-	**645.572.000**						-	**645.572.000**	**PUSKESMAS SIALANG**
	1 02 02 2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	645.572.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	645.572.000	PUSKESMAS SIALANG
	1 02 02 2.0 2 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	645.572.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		645.572.000	PUSKESMAS SIALANG
		Puskesmas Sitiung II						**1.547.522.223**							**1.547.522.223**	**PUSKESMAS SITIUNG II**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.547.522.223**							**1.547.522.223**	**PUSKESMAS SITIUNG II**
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.547.522.223**							**1.547.522.223**	**PUSKESMAS SITIUNG II**
25	**1 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**908.022.223**						-	**908.022.223**	**PUSKESMAS SITIUNG II**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 01 2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	908.022.223			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	908.022.223	PUSKESMAS SITIUNG II
	1 02 01 2.1 0 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	908.022.223	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		908.022.223	PUSKESMAS SITIUNG II
26	**1 02 02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-			-	**639.500.000**						-	**639.500.000**	**PUSKESMAS SITIUNG II**
	1 02 02 2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	639.500.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	639.500.000	PUSKESMAS SITIUNG II
	1 02 02 2.0 2 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	639.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		639.500.000	PUSKESMAS SITIUNG II
		Puskesmas Padang Laweh						**1.246.471.812**							**1.246.471.812**	**PUSKESMAS PADANG LAWEH**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.246.471.812**							**1.246.471.812**	**PUSKESMAS PADANG LAWEH**
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.246.471.812**							**1.246.471.812**	**PUSKESMAS PADANG LAWEH**
27	**1 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**616.834.812**						-	**616.834.812**	**PUSKESMAS PADANG LAWEH**
	1 02 01 2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	616.834.812			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	616.834.812	PUSKESMAS PADANG LAWEH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 01 2.1 0 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	616.834.812	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		616.834.812	PUSKESMAS PADANG LAWEH
28	**1 02 02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-			-	**629.637.000**						-	**629.637.000**	**PUSKESMAS PADANG LAWEH**
	1 02 02 2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	629.637.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	629.637.000	PUSKESMAS PADANG LAWEH
	1 02 02 2.0 2 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	629.637.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		629.637.000	PUSKESMAS PADANG LAWEH
		Puskesmas Koto Besar						**1.691.500.000**							**1.691.500.000**	**PUSKESMAS KOTO BESAR**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.691.500.000**							**1.691.500.000**	**PUSKESMAS KOTO BESAR**
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.691.500.000**							**1.691.500.000**	**PUSKESMAS KOTO BESAR**
29	**1 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**1.018.000.000**						-	**1.018.000.000**	**PUSKESMAS KOTO BESAR**
	1 02 01 2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.018.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	1.018.000.000	PUSKESMAS KOTO BESAR
	1 02 01 2.1 0 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				2 Unit Kerja	1.018.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		1.018.000.000	PUSKESMAS KOTO BESAR
30	**1 02 02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-			-	**673.500.000**						-	**673.500.000**	**PUSKESMAS KOTO BESAR**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	673.500.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	673.500.000	PUSKESMAS KOTO BESAR
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	673.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		673.500.000	PUSKESMAS KOTO BESAR
		Puskesmas Koto Baru						**2.917.213.963**							**2.917.213.963**	**PUSKESMAS KOTO BARU**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.917.213.963**							**2.917.213.963**	**PUSKESMAS KOTO BARU**
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.917.213.963**							**2.917.213.963**	**PUSKESMAS KOTO BARU**
31	**1 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**2.045.227.963**						-	**2.045.227.963**	**PUSKESMAS KOTO BARU**
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.045.227.963			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	2.045.227.963	PUSKESMAS KOTO BARU
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.045.227.963	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		2.045.227.963	PUSKESMAS KOTO BARU
32	**1 02 02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-			-	**871.986.000**						-	**871.986.000**	**PUSKESMAS KOTO BARU**
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	871.986.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	871.986.000	PUSKESMAS KOTO BARU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	871.986.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		871.986.000	PUSKESMAS KOTO BARU
		Puskesmas Sungai Rumbai						**2.281.730.000**							**2.281.730.000**	**PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.281.730.000**							**2.281.730.000**	**PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI**
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.281.730.000**							**2.281.730.000**	**PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI**
33	**1 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**1.423.000.000**						-	**1.423.000.000**	**PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI**
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.423.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	1.423.000.000	PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.423.000.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		1.423.000.000	PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI
34	**1 02 02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-			-	**858.730.000**						-	**858.730.000**	**PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI**
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	858.730.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	858.730.000	PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI
	1 02 02 2.02 0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	858.730.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		858.730.000	PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI
		Puskesmas Gunung Medan						**1.467.372.000**							**1.467.372.000**	**PUSKESMAS GUNUNG MEDAN**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.467.372.000**							**1.467.372.000**	**PUSKESMAS GUNUNG MEDAN**
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.467.372.000**							**1.467.372.000**	**PUSKESMAS GUNUNG MEDAN**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
35	**1 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**800.000.000**						-	**800.000.000**	**PUSKESMAS GUNUNG MEDAN**
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	800.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	800.000.000	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	800.000.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		800.000.000	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
36	**1 02 02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-			-	**667.372.000**						-	**667.372.000**	**PUSKESMAS GUNUNG MEDAN**
	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	667.372.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	-	667.372.000	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
	1 02 02 2.01 0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	667.372.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-		667.372.000	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN
		Puskesmas Sungai Dareh						**2.872.005.200**							**2.872.005.200**	**PUSKESMAS SUNGAI DAREH**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.872.005.200**							**2.872.005.200**	**PUSKESMAS SUNGAI DAREH**
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.872.005.200**							**2.872.005.200**	**PUSKESMAS SUNGAI DAREH**
37	**1 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**2.031.955.200**						-	**2.031.955.200**	**PUSKESMAS SUNGAI DAREH**
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.031.955.200			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	2.031.955.200	PUSKESMAS SUNGAI DAREH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 01 2.1 0001 0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.031.955.200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		2.031.955.200	PUSKESMAS SUNGAI DAREH
38	**1 02 02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-			-	**840.050.000**						-	**840.050.000**	**PUSKESMAS SUNGAI DAREH**
	1 02 02 2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	840.050.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	840.050.000	PUSKESMAS SUNGAI DAREH
	1 02 02 2.0 0033 2	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	840.050.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		840.050.000	PUSKESMAS SUNGAI DAREH
		Puskesmas Timpeh						**1.791.317.000**							**1.791.317.000**	**PUSKESMAS**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.791.317.000**							**1.791.317.000**	**PUSKESMAS TIMPEH**
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.791.317.000**							**1.791.317.000**	**PUSKESMAS TIMPEH**
39	**1 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**993.617.000**						-	**993.617.000**	**PUSKESMAS TIMPEH**
	1 02 01 2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	993.617.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	993.617.000	PUSKESMAS TIMPEH
	1 02 01 2.1 0001 0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	993.617.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		993.617.000	PUSKESMAS TIMPEH
40	**1 02 02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-			-	**797.700.000**						-	**797.700.000**	**PUSKESMAS TIMPEH**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	797.700.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	797.700.000	PUSKESMAS TIMPEH
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	797.700.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		797.700.000	PUSKESMAS TIMPEH
		Puskesmas Beringin Sakti						**1.248.700.000**							**1.248.700.000**	**PUSKESMAS BERINGIN SAKTI**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.248.700.000**							**1.248.700.000**	**PUSKESMAS BERINGIN SAKTI**
	1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.248.700.000**							**1.248.700.000**	**PUSKESMAS BERINGIN SAKTI**
41	**1 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**642.000.000**						-	**642.000.000**	**PUSKESMAS BERINGIN SAKTI**
	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	642.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	642.000.000	PUSKESMAS BERINGIN SAKTI
	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	642.000.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		642.000.000	PUSKESMAS BERINGIN SAKTI
42	**1 02 02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-			-	**606.700.000**						-	**606.700.000**	**PUSKESMAS BERINGIN SAKTI**
	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	606.700.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	-	606.700.000	PUSKESMAS BERINGIN SAKTI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	606.700.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan		606.700.000	PUSKESMAS BERINGIN SAKTI
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang						**80.190.181.790**							**106.960.395.650**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**80.190.181.790**							**106.960.395.650**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**
	1 03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**80.190.181.790**							**106.960.395.650**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**
43	**1 03 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-			**1 Tahun**	**11.785.181.790**						-	**11.755.395.650**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**
	1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-			7 laporan	24.934.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	24.934.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	24.934.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		24.934.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			58 orang	5.928.556.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	5.928.556.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	5.928.556.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.928.556.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			12 dokumen 12 lLaporan 12 paket 12 paket 12 paket 20 unit 20 paket 12 paket 4 unit 1 unit 15 unit	629.686.190			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	599.900.050	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.000.700	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.000.700	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 unit Paket	273.446.140	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		243.660.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	15.957.350	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.957.350	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 03 01 2.0 0004 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		30.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.0 0005 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	41.250.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		41.250.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.0 0006 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.0 0009 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	259.032.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		259.032.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			148 unit	850.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	850.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.0 0002 7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	550.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		550.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 03 01 2.0 0005 7	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				96 Unit	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.0 0006 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				47 Unit	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			12 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan 500 Dokumen	3.250.855.600			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	3.250.855.600	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.0 0001 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	5.100.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.100.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.0 0002 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	750.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		750.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.0 0003 8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 03 01 2.0 8 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.490.755.600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.490.755.600	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung	-			23 unit 51 unit 1 unit 150 unit 1 Unit	1.101.150.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	1.101.150.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.0 9 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.150.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		36.150.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.0 9 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				51 Unit	350.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.0 9 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				23 Unit	500.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.0 9 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				150 Unit	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 03 01 2.0 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
44	**1 03 02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	-	-			-	**9.000.000.000**						-	**9.000.000.000**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**
	1 03 02 2.0 1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.000.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Menurunnya luas wilayah terdampak daya rusak air	-	5.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 02 2.0 0073 1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				31,25 KM	1.500.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Menurunnya luas wilayah terdampak daya rusak air		1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 02 2.0 0093 1	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				41,67 KM	2.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Menurunnya luas wilayah terdampak daya rusak air		2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 02 2.0 0109 1	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	0				0,40 0	1.500.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Menurunnya luas wilayah terdampak daya rusak air		1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 02 2.0 2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Daerah Irigasi Permukaan yang Dibangun Luas Daerah Irigasi Permukaan yang di pelihara Luas Daerah Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	-			60 Ha 100 Ha 40 Ha	4.000.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	-	4.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 03 02 2.0 0002 2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				60 Ha KM	1.500.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air		1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 02 2.0 0008 2	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				40 Ha KM	1.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air		1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 02 2.0 0021 2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				100 Ha KM	1.500.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air		1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
45	**1 03 03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten**	**60 persen**			**60 persen**	**3.530.000.000**						**60 persen**	**3.330.000.000**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**
	1 03 03 2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak melalui jaringan perpipaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-				1518 Rumah Tangga 4 Unit 1 Unit 4 lokasi Liter/Detik 1 Lembaga 2 Dokumen 1000 Meter SR	3.530.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	-	3.330.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 03 03 2.0 1 0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Lembaga	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 03 2.0 1 0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				50 Orang	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 03 2.0 1 0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				2 Dokumen	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Padukuan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 03 2.0 1 0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				4 lokasi Liter/Detik	2.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 03 2.0 1 0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				4 Unit	700.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 03 2.0 1 0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				1 Unit	250.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 03 03 2.0 0032 1	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1000 Meter SR	230.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		230.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
46	**1 03 04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase pengembangan kinerja pengelolaan persampahan**	**-**			**60 persend**	**730.000.000**						**-**	**730.000.000**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**
	1 03 04 2.0 1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	-			2 dokumen 50 orang	730.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	-	730.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 04 2.0 0011 1	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan				50 Orang	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		30.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 04 2.0 0015 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				2 Dokumen	700.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
47	**1 03 05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**	**92 persen**			**92 persen**	**485.000.000**						**92 persen**	**485.000.000**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**
	1 03 05 2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun umlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja umlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-			12 M3/hari 100 Rumah Tangga 1 unit	485.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik	-	485.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 05 2.0 0033 1	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				100 Rumah Tangga	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 03 05 2.0 1 0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun				12 M^3/Hari	35.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		35.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 05 2.0 1 0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 05 2.0 1 0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				50 Orang	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya layanan penyediaan air minum dan air limbah domestik		100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
48	**1 03 07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Persentase Infrastruktur Permukiman dalam kondisi baik**	-			**78 persen**	**2.000.000.000**						-	**2.000.000.000**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**
	1 03 07 2.0 1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	-			4 lokasi liter/detik	2.000.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor	-	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 07 2.0 1 0021	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun				4 lokasi Liter/Detik	2.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Gunung Medan Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Simalidu Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Tinggi Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Bonjol	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor		2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
49	**1 03 08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor** **Persentase Bangunan Yang Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan** **Persentase Bangunan Pemerintahan Berfungsi Baik**	-			**70,27 persen** **70 persen** **85 persen**	**6.710.000.000**						-	**6.710.000.000**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 03 08 2.0 1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-			12 unit 1 Bangunan Gedung 131 Dokumen 11 Bangunan Gedung Nega	6.710.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor	-	6.710.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 08 2.0 0014 1	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)				40 Bangunan Gedung Negara	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor		150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 08 2.0 0017 1	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				11 Bangunan Gedung	4.760.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor		4.760.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 08 2.0 0018 1	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				1 Bangunan Gedung	1.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor		1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 08 2.0 0023 1	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				131 Dokumen	800.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor		800.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
50	**1 03 10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap**	**73 55persen**			**53,85 persen 72,70 persen**	**40.700.000.000**						**73 55persen**	**67.700.000.000**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 03 10 2.0 1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	pembangunan, pelebaran, pemeliharaan rutin, surver kondisi jalan pemeliharaan berkala jembatan	-			240 KM 30 Unit	40.700.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan	-	67.700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 10 2.0 1 0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				8 KM	23.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SAWIT, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM, DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan		50.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 10 2.0 1 0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				2 KM	8.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan		8.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 10 2.0 1 0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun				32 meter dan 2 paket Jembatan	6.400.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan		6.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 10 2.0 1 0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala				30 unit Jembatan	1.200.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan		1.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 03 10 2.0 0043 1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				3 Paket KM	300.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan		300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 10 2.0 0046 1	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				240 KM	1.800.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan jembatan		1.800.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
51	**1 03 11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Jasa Konstruksi**	**-**			**36,90 persen**	**450.000.000**						**-**	**450.000.000**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**
	1 03 11 2.0 1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelaku jasa kontruksi yang terlatih	-			250 orang	200.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor	-	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 11 2.0 0010 1	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				200 Orang	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor		100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 11 2.0 0016 1	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				50 Orang	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor		100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 11 2.0 2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Jasa konstruksi yang terlatih	-			1 Dokumen	100.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor	-	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 03 11 2.0 0013 2	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor		100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 11 2.0 0004	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	-			50 orang 200 orang	150.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor	-	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 11 2.0 0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Dokumen Paket Pekerjaan	75.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor		75.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 11 2.0 0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk				1 Dokumen Bangunan Konstruksi	75.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung kantor		75.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
52	**1 03 12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase kualitas penyelenggaraan pemanfaatan dan pengendalian ruang Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Persentase Ketersediaan Dokumen Peraturan tentang rencana tata ruang daerah**	-			**15 persen 20 persen 50 persen**	**4.800.000.000**						-	**4.800.000.000**	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG**
	1 03 12 2.0 1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kot Jumlah dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	-			2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	1.200.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	-	1.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 03 12 2.0 0003 1	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	500.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang		500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 12 2.0 0005 1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				2 Dokumen	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang		100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 12 2.0 0006 1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	500.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang		500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 12 2.0 0009 1	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi				2 Dokumen	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang		100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 12 2.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	-			2 laporan	3.000.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	-	3.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 12 2.0 0005 2	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	3.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang		3.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	200.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	-	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 12 2.03 0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Dokumen	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang		200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	-			1 Dokumen	400.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	-	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
	1 03 12 2.04 0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	400.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang		400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan						**11.387.199.056**							**12.213.000.000**	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.087.199.056**							**11.863.000.000**	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN**
	1 04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**11.087.199.056**							**11.863.000.000**	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN**
53	**1 04 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**-**			**A nilai**	**3.097.855.000**						**-**	**3.237.000.000**	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN**
	1 04 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-			16 orang	1.890.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	1.990.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 04 01 2.0 0001 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1.890.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.990.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis	-			3 orang	30.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	40.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.0 0009 5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		40.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya Pemenuhan Administrasi Perkantoran	-			12 bulan	299.855.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	350.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.0 0001 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	9.855.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.0 0002 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	40.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		50.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 04 01 2.0 0003 6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		30.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.0 0004 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		40.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.0 0005 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	40.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		40.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.0 0009 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160 Laporan	160.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		180.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah tersedianya paket pengadaan barang Aset Milik Daerah	-			9 unit	160.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	130.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.0 0005 7	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		70.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 04 01 2.0 0006 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		60.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			12 Laporan	516.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	517.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.0 0001 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		7.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.0 0002 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		30.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.0 0004 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	480.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		480.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	-			12 bulan	202.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	210.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 04 01 2.0 0001 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	12.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		20.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.0 0002 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	40.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		50.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.0 0006 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		50.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 01 2.0 0009 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		90.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
54	**1 04 02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah**	-			**100 persen**	**349.500.000**						-	**466.000.000**	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN**
	1 04 02 2.0 1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-			1 dokumen	3.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman	-	5.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 02 2.0 0009 1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				11 Dokumen	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		5.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 04 02 2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah orang/sukarelawan yang mengikuti sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota	-			40 orang	1.500.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman	-	4.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 02 2.02 0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				20 Orang	1.500.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Banai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		4.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	-			4 rumah	200.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman	-	250.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 02 2.03 0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				3 Unit Rumah	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		250.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 02 2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-			1 dokumen	2.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman	-	7.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 02 2.04 0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				3 Dokumen	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		7.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 04 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun jumlah rumah khusus yang difasilitasi pengelolaan kelembagaannya termasuk pemeliharaan jumlah rumah susun yang difasilitasi pengelolaan kelembagaanya termasuk pemeliharaannya	-			1 rumah susun 1 1 rumah khusus 1 rumah susun	140.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Menurunnya jumlah rumah tangga yang tidak memiliki hunian/tempat tinggal (backlog)	-	150.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 02 2.05 0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				12 Laporan	140.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Menurunnya jumlah rumah tangga yang tidak memiliki hunian/tempat tinggal (backlog)		150.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-			12 bulan	3.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	-	50.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 02 2.06 0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				20 Dokumen	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau		50.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
55	**1 04 03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	-	-			-	**120.000.000**						-	**110.000.000**	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN**
	1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	jumlah dokumen hasil survei lokasi perumahan dan permukiman kumuh	-			1 dokumen	120.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman	-	110.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 03 2.02 0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				2 Dokumen	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		30.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 04 03 2.02 0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				11 Dokumen	70.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		80.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
56	**1 04 04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	-	-			-	**520.000.000**						-	**550.000.000**	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN**
	1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	jumlah ketersediaan rumah layak huni diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Hektar	-			15 rumah	520.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman	-	550.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 04 2.01 0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				2 Unit Rumah	520.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		550.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
57	**1 04 05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	-	-			-	**6.999.844.056**						-	**7.500.000.000**	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN**
	1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi perumahan dan kawasan permukiman yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjan fungsi hunian	-			50 lokasi	6.999.844.056			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman	-	7.500.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1 04 05 2.01 0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				52 Lokasi	6.999.844.056	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas rumah dan perumahan serta kawasan permukiman		7.500.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**300.000.000**							**350.000.000**	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN**
	2 10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**300.000.000**							**350.000.000**	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
58	**2 10 04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase penyelesaian/fasilitasi kasus tanah Pemerintah**	-			**100 Persen**	**100.000.000**						-	**150.000.000**	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN**
	2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian/fasilitasi kasus tanah Pemerintah	-			100 Persen	100.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat dan Pemerintah Daerah	-	150.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2 10 04 2.01 0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20 Berita Acara	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat dan Pemerintah Daerah		50.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2 10 04 2.01 0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20 Dokumen	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat dan Pemerintah Daerah		100.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
59	**2 10 06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Tersedianya tanah objek landreform (TOL) yang siap direstribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**	-			**10 Bidang**	**100.000.000**						-	**100.000.000**	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**
	2 10 06 2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerima tanah objek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 hektar	-			10 Bidang	100.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat dan Pemerintah Daerah	-	100.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2 10 06 2.01 0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				1 Dokumen	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat dan Pemerintah Daerah		100.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
60	**2 10 09**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	-	-				**100.000.000**						-	**100.000.000**	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 10 09 2.0 1	Penerbitan Izin Membuka Tanah	-	-			-	100.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat dan Pemerintah Daerah	-	100.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2 10 09 2.0 0001 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah				1 Dokumen	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Inventarisasi kepemilikan tanah masyarakat dan Pemerintah Daerah		100.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran						**11.832.930.814**							**12.836.000.000**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.832.930.814**							**12.836.000.000**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
	1 05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**11.832.930.814**							**12.836.000.000**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
61	**1 05 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**100 persen**			**100 persen**	**8.978.000.000**						**100 persen**	**9.711.000.000**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
	1 05 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	-			1 tahun	4.400.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	4.500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.0 0001 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	4.400.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	116.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	150.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 05 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	116.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		150.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	145.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	222.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		30.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		25.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		17.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 05 01 2.0 0009 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	80.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		120.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	76.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	15.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.0 0006 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	76.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.092.500.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	4.646.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.0 0001 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		6.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.0 0002 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	37.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		40.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.0 0004 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4.050.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.600.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	148.500.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	177.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	17.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		17.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	125.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		150.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
62	**1 05 02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-			-	**355.000.000**						-	**415.000.000**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
	1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	253.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	-	285.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 02 2.01 0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				50 Orang	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		75.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 05 02 2.0 0015 1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				12 laporan	195.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 02 2.0 0017 1	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				2 Laporan	8.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 02 2.0 2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-				87.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	-	110.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 02 2.0 0010 2	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		30.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 02 2.0 0011 2	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	62.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		80.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 02 2.0 3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-			-	15.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	-	20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 02 2.0 0006 3	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				2 Laporan	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
63	**1 05 04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	-	-			-	**2.499.930.814**						-	**2.710.000.000**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 05 04 2.0 1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.494.930.814			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas S. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non Kebakaran	-	2.700.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 04 2.0 0002 1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				52 Laporan	170.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas S. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non Kebakaran		200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 04 2.0 0017 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				33 Unit	2.324.930.814	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas S. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non Kebakaran		2.500.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 04 2.0 2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-				3.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas S. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	5.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 04 2.0 0001 2	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas S. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		5.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 04 2.0 3	Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-			-	2.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas S. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	5.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1 05 04 2.0 0001 3	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				1 Dokumen	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas S. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		5.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah						**3.077.921.000**							**3.016.500.000**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.077.921.000**							**3.016.500.000**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**
	1 05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**3.077.921.000**							**3.016.500.000**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
64	**1 05 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	-			**100 persen**	**2.460.967.426**						-	**2.531.500.000**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**
	1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan PD	-			100 persen	1.393.967.426			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	1.350.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.393.967.426	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.350.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	194.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	241.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		45.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		6.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	45.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		60.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 05 01 2.0 0005 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		33.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.0 0009 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	80.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		92.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	-			100 Persen	113.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	115.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.0 0005 7	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				37 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		40.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.0 0006 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	63.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		75.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	619.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	640.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.0 0002 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	19.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		20.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.0 0004 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	600.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		620.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 05 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			100 Persen	141.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	185.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.0 9 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.0 9 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		85.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.0 9 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.0 9 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		17.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 01 2.0 9 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		65.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
65	**1 05 03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase pelaksanaan penanggulangan bencana**	**100 Persen**			**100 Persen**	**616.953.574**						**100 Persen**	**485.000.000**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**
	1 05 03 2.0 1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana	-			150 Orang	39.150.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	-	60.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 05 03 2.0 1 0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				200 Orang	39.150.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana		60.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.0 2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-			150 Orang	461.597.574			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	-	185.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.0 2 0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				3 Unit	12.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana		20.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.0 2 0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				150 Orang	19.250.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana		55.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.0 2 0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				30 Orang	12.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana		15.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.0 2 0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	186.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana		-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.0 2 0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				1 laporan	4.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana		35.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.0 2 0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	186.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana		-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 05 03 2.0 0028 2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				1 Kawasan	40.847.574	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Koto Nan Empat Dibawuh Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana		60.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.0 3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah/ Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-			500 Orang	74.206.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	170.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.0 0001 3	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				1 Laporan	7.200.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana		20.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.0 0002 3	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	7.006.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana		50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.0 0003 3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				500 Orang	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana		75.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.0 0012 3	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana		25.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.0 4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	-			3 Kegiatan	42.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	-	70.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.0 0003 4	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				4 Dokumen	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana		25.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 05 03 2.04 0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				2 Kegiatan	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana		25.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1 05 03 2.04 0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				2 Dokumen	12.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana		20.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						**10.438.910.364**							**17.365.385.800**	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.278.962.114**							**10.340.135.800**	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	1 06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**5.278.962.114**							**10.340.135.800**	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
66	**1 06 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase pemenuhan adminitrasi perkantoran**	**100 persen**			**100 persen**	**4.662.995.600**						**100 persen**	**6.045.135.800**	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	-			12 bulan	3.291.328.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	4.000.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 06 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	3.291.328.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.000.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran	-			100 persen	247.743.500			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	320.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	44.034.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	7.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	26.730.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		20.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	26.569.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		30.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	06 01 2.0 0009 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	137.910.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		200.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	06 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	-			100 persen	78.900.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	282.400.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	06 01 2.0 0005 7	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				16 Unit	31.900.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		22.600.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	06 01 2.0 0006 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	47.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		259.800.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	06 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 persen	831.754.500			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	912.735.800	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	06 01 2.0 0001 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	06 01 2.0 0002 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	69.993.300	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		80.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 06 01 2.0 0004 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	757.761.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		827.735.800	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	-			100 persen	213.269.600			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	530.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.0 0001 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	16.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		20.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.0 0002 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				80 Unit	190.769.600	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		200.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.0 0006 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 01 2.0 0009 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		300.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
67	**1 06 02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**persentase kesejahteraan sosial**	**100 persen**			**100 persen**	**75.984.079**						**100 persen**	**270.000.000**	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang terlatih	-			85 persen	75.984.079			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial	-	270.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 02 2.03 0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Orang	60.984.150	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial		150.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 02 2.03 0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Lembaga	14.999.929	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial		120.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
68	**1 06 04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti**	**100 persen**			**100 persen**	**363.023.835**						**100 persen**	**1.045.000.000**	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-			100 persen	321.763.835			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana	-	860.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.01 0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	13.105.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana		137.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.01 0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	7.746.885	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana		70.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 06 04 2.01 0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Orang	8.888.750	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana		65.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.01 0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana		50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.01 0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	93.450.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana		90.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.01 0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	76.380.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana		125.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.01 0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	3.039.750	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana		17.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.01 0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	100.156.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana		90.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.01 0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	4.513.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana		20.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 06 04 2.01 0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	2.745.050	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana		120.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.01 0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Orang	5.130.900	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana		15.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.01 0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Orang	3.607.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan korban bencana		60.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	-			60 persen	41.260.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana	-	185.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.02 0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				700 Orang	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana		125.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 04 2.02 0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	11.260.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana		60.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
69	**1 06 05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase perlindungan dan jaminan sosial**	**85 persen**			**85 persen**	**99.410.150**						**85 persen**	**2.300.000.000**	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terverivali dan validasi data DTKS Kab. Dharmasraya serta Tersalurnya bantuan sosial kepada KPM PKH	-			134068 jiwa	99.410.150			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menurunnya masalah Kesejahteraan Sosial	-	2.300.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 05 2.02 0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				25103 Keluarga	44.999.670	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menurunnya masalah Kesejahteraan Sosial		500.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 05 2.02 0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				6531 Keluarga	29.411.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menurunnya masalah Kesejahteraan Sosial		700.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 05 2.02 0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				62 Orang	24.998.980	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Menurunnya masalah Kesejahteraan Sosial		1.100.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
70	**1 06 06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan**	**75 persen**			**75 persen**	**77.548.450**						**75 persen**	**680.000.000**	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	-			100 persen	77.548.450			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana	-	680.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 06 2.01 0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	49.935.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana		240.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1 06 06 2.01 0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	8.804.950	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana		200.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 06 2.01 0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Unit	8.153.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana		130.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 06 2.01 0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	6.337.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana		45.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1 06 06 2.01 0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	4.317.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana		65.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.159.948.250**							**7.025.250.000**	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	2 08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**1.039.978.250**							**2.018.400.000**	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
71	**2 08 02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah**	**100 persen**			**100 persen**	**419.519.550**						**100 persen**	**800.000.000**	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah focal point perangkat daerah yang mendapat pelatihan	-			38 perangkat daerah	419.519.550			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	-	800.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 02 2.03 0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				17 Lembaga	409.994.550	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan		650.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 02 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				38 Orang	9.525.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan		150.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
72	**2 08 03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**persentase perlindungan perempuan**	**90 persen**			**90 persen**	**91.510.300**						**90 persen**	**245.000.000**	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	-			5 kegiatan	26.600.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	-	25.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 03 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	26.600.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		25.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang sesuai standar	-			100 persen	64.910.300			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	-	220.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 08 03 2.02 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				23 Layanan	64.910.300	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		220.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
73	**2 08 04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**persentase peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak**	**-**			**75 persen**	**34.692.700**						**-**	**180.000.000**	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak	-			15 Kegiatan	34.692.700			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	-	180.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 04 2.01 0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Perangkat Daerah	34.692.700	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan		180.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
74	**2 08 06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**persentase pemenuhan hak anak**	**100 persen**			**100 persen**	**55.766.000**						**100 persen**	**300.000.000**	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	2 08 06 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian Kabupaten Layak Anak	-			Madya Predikat/Nilai	55.766.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	-	300.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 06 2.01 0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				2 Organisasi	55.766.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		300.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
75	**2 08 07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase layanan perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus**	-			**100 persen**	**438.489.700**						-	**493.400.000**	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	2 08 07 2.0 1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pencegahan kekerasan pada anak	-			16 Kegiatan	103.400.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	-	105.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 07 2.0 0004 1	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				1364 Orang	103.400.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak		105.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 07 2.0 2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan perlindungan khusus anak yang sesuai standar	-			100 persen	246.689.700			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	-	300.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 07 2.0 0007 2	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				90 Layanan	246.689.700	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak		300.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 07 2.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan perlindungan khusus anak yang sesuai standar	-			75 persen	88.400.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	-	88.400.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 08 07 2.0 0006 3	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				245 Orang	88.400.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak		88.400.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**4.119.970.000**							**5.006.850.000**	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
76	**2 14 02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**persentase data kependudukan**	**100 persen**			**100 persen**	**222.000.000**						**100 persen**	**407.000.000**	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terbitnya Jukla/ Juknis kegiatan	-			75 persen	30.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	-	155.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 02 2.01 0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				3 Satuan Pendidikan	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga		155.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi keluarga	-			80 persen	192.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	-	252.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 02 2.02 0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				24 Laporan	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga		120.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 02 2.02 0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				132 Dokumen	132.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga		132.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
77	**2 14 03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**persentase peningkatan kepesertaan KB**	**95 persen**			**95 persen**	**2.684.470.000**						**95 persen**	**3.026.350.000**	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dari kegiatan edukasi tentang program Bangga Kencana	-			85 persen	1.200.600.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi	-	1.310.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.01 0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				132 Laporan	140.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		200.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.01 0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				11 Laporan	545.600.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		600.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.01 0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				110 Laporan	165.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		210.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.01 0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				3 Dokumen	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		100.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.01 0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				4 Organisasi	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		200.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 14 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah petugas penyuluh KB/ Petugas lapangan Keluarga Berencana dalam menjalankan program Bangga Kencana	-			21 penyuluh	156.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi	-	279.600.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.02 0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				156 Orang	156.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		279.600.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhi kebutuhan Alokon di semua Faskes	-			20 faskes	898.620.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi	-	935.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.03 0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				24 Laporan	21.600.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		25.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.03 0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				2720 Orang	857.220.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		900.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.03 0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				24 Laporan	19.800.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		10.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB dalam pelaksanaan program Bangga Kencana	-			52 kampung KB	429.250.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi	-	501.750.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 14 03 2.04 0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	3.750.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		3.750.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 03 2.04 0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				39 Kampung	425.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi		498.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
78	**2 14 04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**persentase kelompok tribina yang aktif**	**100 persen**			**100 persen**	**1.213.500.000**						**100 persen**	**1.573.500.000**	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
	2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan pengetahuan keluarga	-			85 persen	300.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	-	660.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 04 2.01 0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				10 Unit	300.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga		660.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 04 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase peningkatan peran serta organisasi organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	-			75 persen	913.500.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	-	913.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2 14 04 2.02 0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				6995 laporan	435.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga		435.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 14 04 2.02 0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				6995 laporan	478.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kesejahteraan keluarga		478.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Dinas Pangan dan Perikanan						**5.355.100.000**							**5.355.100.000**	**DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.712.100.000**							**4.712.100.000**	**DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**
	2 09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**4.712.100.000**							**4.712.100.000**	**DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**
79	**2 09 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran**	**100 Persen**			**100 Persen**	**4.407.100.000**						**100 Persen**	**4.407.100.000**	**DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**
	2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	-			100 Persen	3.000.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	3.000.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	3.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.000.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Kebutuhan Administrasi umum	-			100 Persen	199.800.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	199.800.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4.300.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.300.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		25.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 09 01 2.0 0003 6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	5.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.500.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.0 0004 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				800 Paket	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.0 0005 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.0 0009 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		100.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	-			12 Unit	50.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.0 0006 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan	-			100 Persen	912.300.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	912.300.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.0 0001 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.300.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.300.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 09 01 2.0 8 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		60.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.0 8 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	850.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		850.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	-			26 Unit	245.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	245.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.0 9 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		25.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.0 9 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	130.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		130.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.0 9 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				2 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.0 9 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	7.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		7.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 01 2.0 9 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	33.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		33.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
80	**2 09 03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Akses Pangan Masyarakat**	**85 Persen**			**85 Persen**	**190.000.000**						**85 Persen**	**190.000.000**	**DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**
	2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Kenaikan Harga Pangan Pokok	-			<10 Persen	55.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Ketersediaan pangan	-	55.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 03 2.01 0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan				2 Dokumen	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Ketersediaan pangan		25.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 03 2.01 0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Ketersediaan pangan		30.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	-			47 Persen	50.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	-	50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 03 2.02 0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				5 Ton	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Ketersediaan Pangan		50.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Dharmasraya	-			90 Skor	85.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	-	85.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 03 2.04 0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan		10.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 09 03 2.0 0002 4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	75.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan		75.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
81	**2 09 04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Penanganan Nagari Rawan Pangan**	**80 Persen**			**80 Persen**	**80.000.000**						**80 Persen**	**80.000.000**	**DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**
	2 09 04 2.0 2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Rawan Pangan yang Tertangani	-			200 KK	80.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	-	80.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 04 2.0 0002 2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	80.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Ketersediaan Pangan		80.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
82	**2 09 05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan Aman yang Beredar dimasyarakat**	**90 Persen**			**90 Persen**	**35.000.000**						**90 Persen**	**35.000.000**	**DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**
	2 09 05 2.0 1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	-			11 Kecamatan	35.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	-	35.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	2 09 05 2.0 0004 1	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	35.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan		35.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**643.000.000**							**643.000.000**	**DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**
	3 25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**643.000.000**							**643.000.000**	**DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**
83	**3 25 03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase pengelolaan perikanan tangkap**	**5 Persen**			**5 Persen**	**63.000.000**						**5 Persen**	**63.000.000**	**DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**
	3 25 03 2.0 2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penumbuhan kelembagaan nelayan ikan	-			5 Kelompok	63.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Produksi Perikanan	-	63.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	3 25 03 2.0 0001 2	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				30 Orang	63.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Produksi Perikanan		63.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
84	**3 25 04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase usaha perikanan yang berkembang**	**45 Persen**			**45 Persen**	**530.000.000**						**45 Persen**	**530.000.000**	**DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**
	3 25 04 2.0 2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pokdakan yang di dampingi	-			120 Kelompok	120.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Produksi Perikanan	-	120.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3 25 04 2.0 0001 2	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				12 Kelompok	65.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Produksi Perikanan		65.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3 25 04 2.0 0004 2	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				10 Kelompok	55.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Produksi Perikanan		55.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3 25 04 2.0 4	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pengelolaan pembudidayaan ikan	-			35 Persen	410.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Produksi Perikanan	-	410.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3 25 04 2.0 0002 4	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				6 Unit	260.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Produksi Perikanan		260.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3 25 04 2.0 0009 4	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Produksi Perikanan		150.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
85	**3 25 05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Persentase peningkatan kawasan pengawasan**	**30 Persen**			**30 Persen**	**25.000.000**						**30 Persen**	**25.000.000**	**DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	3 25 05 2.0 1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan konservasi perairan umum yang aktif	-			3 kawasan	25.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Produksi Perikanan	-	25.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3 25 05 2.0 0007 1	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				1 Pelaku Usaha	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Produksi Perikanan		25.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
86	**3 25 06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase peningkatan usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang berdaya saing**	**25 Persen**			**25 Persen**	**25.000.000**						**25 Persen**	**25.000.000**	**DINAS PANGAN DAN PERIKANAN**
	3 25 06 2.0 3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan dan konsumsi	-			25 Persen	25.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Produksi Perikanan	-	25.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
	3 25 06 2.0 0001 3	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Ton	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya Produksi Perikanan		25.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
		Dinas Lingkungan Hidup						**6.649.863.275**							**8.445.000.000**	**DINAS LINGKUNGAN**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.649.863.275**							**8.445.000.000**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
	2 11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**6.649.863.275**							**8.445.000.000**	**DINAS LINGKUNGAN**
87	**2 11 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya**	**-**			**100 Persen**	**5.099.223.800**						**-**	**5.017.000.000**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
	2 11 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	-			24 orang	2.751.906.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	2.850.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.0 0001 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	2.751.906.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.850.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup yang terpenuhi	-			6 jenis	196.010.400			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	213.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.010.400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		6.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	45.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		45.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	12.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	22.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		22.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	22.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	90.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			38 unit	647.770.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	355.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 11 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				18 Unit	24.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				37 Unit	205.150.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	393.620.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan Dinas Lingkungan Hidup yang dipenuhi	-			4 Jenis	1.380.357.400			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	1.454.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	48.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan Laporan	1.328.357.400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.400.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis BMD di Dinas Lingkungan Hidup yang terpelihara	-			3 Jenis	123.180.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	145.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	17.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		20.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	63.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		65.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	23.380.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	19.800.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
88	**2 11 02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup**	**2 Dokumen**			**2 Dokumen**	**472.695.200**						**2 Dokumen**	**635.000.000**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
	2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLHKabupaten/Kota	-			2 Dokumen	172.695.200			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan	-	335.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 02 2.01 0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				2 Dokumen	29.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan		35.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 11 02 2.0 0006 1	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	143.695.200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan		300.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 02 2.0 0002	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang tersusun	-			2 dokumen	300.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan	-	300.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 02 2.0 0002 2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	300.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan		300.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
89	**2 11 03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**66.47 Indeks**			**66.47 Indeks**	**236.000.000**						**66.47 Indeks**	**243.000.000**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
	2 11 03 2.0 0001	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks Kualitas Udara	-			56,5 Indeks 51,36 Indeks 84,05 Indeks	183.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan	-	190.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.0 0001 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				27 Dokumen	58.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan		60.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.0 0002 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				4 Dokumen	47.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan		50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.0 0015 1	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				26 Dokumen	78.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan		80.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	-			1 Titik	53.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan	-	53.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 03 2.02 0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				1 Titik	53.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan		53.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
90	**2 11 04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Terciptanya lingkungan yang hijau dan asri di kabupaten Dharmasraya**	**7 Kawasan**			**7 Kawasan**	**80.000.000**						**7 Kawasan**	**600.000.000**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
	2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Ruang Terbuka Hijau yang Terkelola	-			11 Ha	80.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pemeliharaan dan konservasi SDA dan lingkungan hidup	-	600.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 04 2.01 0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Ha	80.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pemeliharaan dan konservasi SDA dan lingkungan hidup		600.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
91	**2 11 05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 serta yang memiliki izin pengelolaan limbah B3**	**100 Persen**			**100 Persen**	**20.000.000**						**100 Persen**	**25.000.000**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
	2 11 05 2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3	-			20 Usaha/Kegiatan	20.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah B3	-	25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 05 2.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				20 Dokumen	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah B3		25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
92	**2 11 06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH di Kab. Dharmasraya**	**100 Persen**			**100 Persen**	**52.000.000**						**100 Persen**	**60.000.000**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 11 06 2.0 1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Kab. Dharmasraya	-			100 Persen	52.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan	-	60.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 06 2.0 0001 1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				8 Dokumen	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan		30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 06 2.0 0009 1	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				15 Badan Usaha	27.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan		30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
93	**2 11 07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Terpeliharanya dan Lestarinya keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat di Kab. Dharmasraya**	**1 MHA/Kearifan Lokal**			**1 MHA/Kearifan Lokal**	**10.000.000**						**1 MHA/Kearifan Lokal**	**15.000.000**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
	2 11 07 2.0 2	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terlaksananya Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA	-			1 Kelompok	10.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pemeliharaan dan konservasi SDA dan lingkungan hidup	-	15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 07 2.0 0001 2	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				1 Dokumen	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pemeliharaan dan konservasi SDA dan lingkungan hidup		15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
94	**2 11 08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Meningkatnya kepedulian masyarakat kab. Dharmasraya terhadap lingkungan hidup**	**-**			**100 Persen**	**65.000.000**						**-**	**430.000.000**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
	2 11 08 2.0 1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang terlaksana	-			15 Kali	65.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pemeliharaan dan konservasi SDA dan lingkungan hidup	-	430.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 08 2.0 0002 1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				5 Dokumen	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pemeliharaan dan konservasi SDA dan lingkungan hidup		100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 11 08 2.0 0003 1	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				200 Orang	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pemeliharaan dan konservasi SDA dan lingkungan hidup		280.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 08 2.0 0005 1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				10 Lembaga	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pemeliharaan dan konservasi SDA dan lingkungan hidup		50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
95	**2 11 09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Terlaksananya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata) di Sekolah**	**5 Sekolah**			**5 Sekolah**	**20.000.000**						**5 Sekolah**	**25.000.000**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
	2 11 09 2.0 1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah/entitas yang melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	-			5 Sekolah	20.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pemeliharaan dan konservasi SDA dan lingkungan hidup	-	25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 09 2.0 0001 1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				5 Entitas	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pemeliharaan dan konservasi SDA dan lingkungan hidup		25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
96	**2 11 10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengaduan yang tertangani**	**100 Persen**			**100 Persen**	**20.000.000**						**100 Persen**	**25.000.000**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
	2 11 10 2.0 1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang tertangani	-			4 Kasus	20.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan	-	25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 10 2.0 0004 1	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				4 Pengaduan	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan		25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
97	**2 11 11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Terkelolanya sampah di Kabupaten Dharmasraya**	**70 Persen**			**70 Persen**	**574.944.275**						**70 Persen**	**1.370.000.000**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
	2 11 11 2.0 1	Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Penanganan sampah Terlaksananya Pengurangan sampah	-			70 Persen 30 Persen	574.944.275			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah B3	-	1.370.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 11 11 2.0 0004 1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				52 Kelompok	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah B3		30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.0 0005 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				52 Dokumen	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah B3		20.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.0 0007 1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				4 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah B3		500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.0 0009 1	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				23 Unit	149.250.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah B3		200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.0 0017 1	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				52000 Ton	300.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah B3		550.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.0 0018 1	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				1 Laporan	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah B3		50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 11 11 2.0 0020 1	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				52000 Ton	10.694.275	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah B3		20.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						**5.035.654.994**							**4.915.500.000**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.035.654.994**							**4.915.500.000**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**5.035.654.994**							**4.915.500.000**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN**
98	**2 12 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**4.315.654.994**						-	**4.230.500.000**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN**
	2 12 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.0 1 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.0 1 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.0 1 0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				4 Dokumen	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.030.154.994			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	3.030.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.0 2 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	3.000.154.994	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.000.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.0 2 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.0 2 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 12 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	45.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	45.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	490.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	415.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 Paket	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	220.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		200.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 12 01 2.0 6 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.0 6 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				600 Paket	40.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.0 6 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				40 Paket	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.0 6 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		150.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	160.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	170.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.0 7 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	40.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.0 7 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.0 7 0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				15 Unit	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	310.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	310.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 12 01 2.0 8 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.0 8 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.0 8 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		200.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	220.500.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	210.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.0 9 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	16.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.0 9 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	64.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		64.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.0 9 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	40.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.0 9 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.1 3	Penataan Organisasi	-	-			-	10.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 12 01 2.13 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				6 Dokumen	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
99	**2 12 02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	-	-			-	**205.000.000**						-	**175.000.000**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN**
	2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	60.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	-	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.01 0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1000 Dokumen	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.01 0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	20.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	-	20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.02 0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun				2 Dokumen	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	105.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	-	85.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.03 0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.03 0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				10000 Dokumen	40.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 12 02 2.03 0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	35.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	20.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	-	20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 02 2.04 0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
##	**2 12 03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	-	-			-	**270.000.000**						-	**260.000.000**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN**
	2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	60.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	-	60.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 03 2.01 0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				5000 Dokumen	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 03 2.01 0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				12 Layanan	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 03 2.01 0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun				12 Dokumen	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 03 2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	90.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	-	80.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 12 03 2.02 0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				12 Laporan	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 03 2.02 0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil				12 Laporan	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 03 2.02 0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				12 Laporan	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 03 2.02 0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				12 Laporan	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 03 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	120.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	-	120.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 03 2.03 0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan				12 Laporan	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 03 2.03 0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				12 Laporan	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
##	**2 12 04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	-	-			-	**200.000.000**						-	**200.000.000**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN**
	2 12 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-			-	110.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	-	110.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 12 04 2.0 0001 1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	40.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 04 2.0 0002 1	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				12 Dokumen	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 04 2.0 0003 1	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				12 Laporan	40.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 04 2.0 3	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	60.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	-	60.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 04 2.0 0001 3	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 04 2.0 0003 3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 04 2.0 0005 3	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 04 2.0 4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	30.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pendaftaran penduduk	-	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 04 2.0 0003 4	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				12 Laporan	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pendaftaran penduduk		30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
##	**2 12 05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	-	-			-	**45.000.000**						-	**50.000.000**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 12 05 2.0 1	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-			-	45.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	-	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 05 2.0 0001 1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 05 2.0 0002 1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				30 Dokumen	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						**5.848.658.000**							**5.623.263.000**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.848.658.000**							**5.623.263.000**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
	2 13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**5.848.658.000**							**5.623.263.000**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
##	**2 13 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**			**100 %**	**4.124.658.000**						**-**	**4.193.263.000**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
	2 13 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Menerima Gaji dan Tunjangan	-			25 orang	3.321.763.000			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	3.321.763.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.0 0001 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	3.321.763.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.321.763.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	222.895.000			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	249.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.0 0001 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		6.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 13 01 2.0 6 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.0 6 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	13.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.0 6 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.0 6 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	25.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		27.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.0 6 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	133.895.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	25.000.000			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.0 7 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	413.000.000			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	417.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.0 8 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 13 01 2.0 0002 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	45.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		47.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.0 0004 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	364.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		365.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	142.000.000			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	155.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.0 0001 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	17.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.0 0002 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	120.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		125.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 01 2.0 0006 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				39 Unit	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
##	**2 13 02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Prsentae Nagari Mandiri**	**-**			**80 persen**	**200.000.000**						**-**	**-**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
	2 13 02 2.0 1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Nagari Mandiri	-			45 nagari	200.000.000			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa	-	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 02 2.0 0006 1	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				1 Unit	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
##	**2 13 03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase Fasilitasi Peningkatan Kerja sama Desa**	**-**			**100 %**	**33.000.000**						**-**	**40.000.000**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 13 03 2.0 1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Fasilitasi Kerja sama Antar Nagari	-			100 %	33.000.000			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatkan kerjasama antar nagari dan atau pihak ketiga	-	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 03 2.0 0002 1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				5 Dokumen	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatkan kerjasama antar nagari dan atau pihak ketiga		20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 03 2.0 0003 1	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				2 Dokumen	18.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatkan kerjasama antar nagari dan atau pihak ketiga		20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
##	**2 13 04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa**	**100 %**			**100 %**	**491.000.000**						**100 %**	**430.000.000**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
	2 13 04 2.0 1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-			52 Nagari	491.000.000			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa	-	430.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 04 2.0 0001 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				3 Dokumen	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa		250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 04 2.0 0002 1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				2 Dokumen	75.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 04 2.0 0005 1	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				156 Orang	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 04 2.0 0008 1	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				52 Dokumen	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa		120.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 13 04 2.0 1 0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				2 Dokumen	56.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa		60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
##	**2 13 05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarakat Hukum Adat**	-			**100 %**	**1.000.000.000**						-	**960.000.000**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
	2 13 05 2.0 1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	-			100 %	1.000.000.000			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa	-	960.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 05 2.0 1 0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				3 Dokumen	900.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa		900.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 05 2.0 1 0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				370 Lembaga	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 8. Membangun berbasis nagari	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa		60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2 13 05 2.0 1 0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				11 Laporan	40.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Dinas Perhubungan						**14.171.294.970**							**15.988.424.467**	**DINAS PERHUBUNGAN**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.171.294.970**							**15.988.424.467**	**DINAS PERHUBUNGAN**
	2 15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**14.171.294.970**							**15.988.424.467**	**DINAS PERHUBUNGAN**
##	**2 15 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100 Persen**			**100 Persen**	**11.990.307.570**						**100 Persen**	**13.189.338.327**	**DINAS PERHUBUNGAN**
	2 15 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyusunan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah undefined	-			5 Laporan 5 Dokumen	60.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	66.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 15 01 2.0 0001 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.0 0006 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		11.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			33 Orang/bulan	3.962.003.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	4.358.203.300	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.0 0001 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	3.952.003.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.347.203.300	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.0 0002 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		11.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			60 orang	50.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 15 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				60 Orang	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instansi Listrik/ Penerangam bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-			100 Laporan 2 paket 11 paket 13 paket 71 paket 39 Paket	296.634.200			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	326.297.620	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				71 Paket	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		33.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				39 Paket	13.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		14.850.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	27.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		29.700.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 15 01 2.0 0005 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	14.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.950.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.0 0009 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	176.634.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		194.297.620	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.0 0010 6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6 Dokumen	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		33.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			2 Unit	595.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	654.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.0 0002 7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		110.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.0 0005 7	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 15 01 2.0 0006 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	120.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		132.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.0 0009 7	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		110.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.0 0010 7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		27.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.0 0011 7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		220.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-				12 Laporan 14 Laporan 400 Laporan	6.537.982.720			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	7.191.780.992	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.0 0001 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.400.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 15 01 2.0 0002 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	3.835.205.320	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.218.725.852	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.0 0004 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				14 Laporan	2.698.777.400	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.968.655.140	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-			9 Unit 1 Unit 45 Unit	488.687.650			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	537.556.415	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.0 0001 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	17.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		19.250.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.0 0002 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	276.187.650	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		303.806.415	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.0 0006 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.500.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 15 01 2.0 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	170.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		187.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 01 2.0 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		11.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
##	**2 15 02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase capaian program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan**	**100 Persen**			**100 Persen**	**2.180.987.400**						**100 Persen**	**2.799.086.140**	**DINAS PERHUBUNGAN**
	2 15 02 2.0 1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase capaian dokumen penetapan rencana induk jaringan LLAJ /Kota	-			1 Dokumen	100.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	-	110.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.0 0001 1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		110.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.0 2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-			451 Unit 210 Unit	500.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	-	550.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.0 0001 2	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				2 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		110.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 15 02 2.0 0002 2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				451 Unit	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		220.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.0 0004 2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				210 Unit	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		220.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.0 5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	-			10 Unit	325.987.400			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	-	358.586.140	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.0 0001 5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				5 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		110.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.0 0002 5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.0 0004 5	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1600 Dokumen	40.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		44.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 15 02 2.0 0007 5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	105.987.400	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		116.586.140	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.0 0009 5	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		33.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.0 6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-			1 Laporan	50.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	-	55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.0 0015 6	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.0 7	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	-			1 Laporan	20.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	-	22.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.0 0003 7	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		22.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	-			12 Laporan	185.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	-	203.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.08 0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				12 Laporan	185.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		203.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	-			2 Unit	1.000.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	-	1.500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2 15 02 2.09 0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Unit	1.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi		1.500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Dinas Komunikasi dan Informatika						**5.985.790.200**							**7.598.566.997**	**DINAS KOMUNIKASI DAN**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.985.790.200**							**7.598.566.997**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	2 16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**5.785.790.200**							**7.241.566.997**	**DINAS KOMUNIKASI DAN**
##	**2 16 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo**	**100 %**			**100 %**	**4.769.992.387**						**100 %**	**5.345.366.997**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengisian data statistik sektoral Penyusunan Buku SAKIP, Renstra, Renja, LPPD, LKPJ Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	-			1 unit 4 Dokumen 89 % 97 %	50.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Data dan Informasi	-	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.01 0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				5 Data	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Data dan Informasi		100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN 23 orang	-			21 orang	2.814.183.330			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	2.870.466.997	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	2.814.183.330	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.870.466.997	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diklat yang diikuti Staf Diskominfo	-			5 Orang	10.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ATK Kantor Fotokopi, Jilid dan Cetak gelas, piring, galon air minum, dispenser, Air Minum isi ulang, gas isi ulang dll Jumlah Tamu ke Diskominfo Kabel cok round, bola lampu listrik, fetting, dll Pelatihan aplikasi baru yang dilaksanakan OPD lain Pengadaan printer, komputer, laptop, sound system, dll Rapat Koordinasi ke luar dan dalam daerah	-			30 Jenis 3 Jenis 8 Jenis 50 Orang 10 Jenis 2 Aplikasi 6 Jenis 50 Orang	183.659.457			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	330.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.247.296	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.412.161	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 16 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		35.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Gedung Command Center th 1 Kendaraan Roda 4 (1 unit) Meja Kursi, Lemari, Kursi Rapat, dll Roda 2 Saarana dan Prasarana Gedung Command Center th 2	-			0 Unit 0 Unit 5 Unit 1 Unit 5 Unit	165.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	310.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				19 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		230.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Materai Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop, dll Surat Terkirim Tagihan Listrik 2 unit, Tagihan Internet 1 Tahun THL 13 orang, Programmer 2 orang, K3 1 orang, Sopir 1 Orang, Penjaga Kantor 1 orang	-			500 Materai 5 Jenis 40 Surat 1 Tahun 18 Orang	1.191.649.600			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	1.192.900.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.100.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 16 01 2.0 8 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	700.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		700.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.0 8 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.100.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.0 8 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	482.649.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		483.700.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jaringan internet Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (2 unit) Videotron (1 unit)	-			1 unit 1 Tahun 1 unit	355.500.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	527.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.0 9 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	17.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		18.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.0 9 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	38.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		39.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.0 9 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		350.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.0 9 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		120.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 01 2.0 9 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
##	**2 16 02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat**	-			**95 persen**	**885.797.813**						-	**1.642.200.000**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 16 02 2.0 1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi (SDM) Kelompok informasi masyarakat Kontrak Media Perda/Perbup tentang SPBE Persentase Informasi yang dipublish melalui media elektronik (PPID)	-			118 Unit 9 Kelompok 40 Kelompok 10 Media 1 Perbup 6 jenis	885.797.813			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyebaran informasi publik terhadap kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	-	1.642.200.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 02 2.0 0014 1	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				49 Laporan	475.797.813	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyebaran informasi publik terhadap kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah		1.020.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 02 2.0 0017 1	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				20 Permohonan	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyebaran informasi publik terhadap kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah		51.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 02 2.0 0021 1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				6 Media	300.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyebaran informasi publik terhadap kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah		510.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 02 2.0 0024 1	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				40 Orang	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyebaran informasi publik terhadap kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah		61.200.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
##	**2 16 03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik**	**-**			**25 aplikasi**	**130.000.000**						**-**	**254.000.000**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	2 16 03 2.0 2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Integrasi Rumah Data Sosialisasi Aplikasi baru	-			61 Unit 25 Aplikasi	130.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	-	254.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 03 2.0 0015 2	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 dokumen Laporan	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik		50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 03 2.0 0020 2	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				3 Aplikasi	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik		153.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 16 03 2.0 0025 2	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				1 Layanan	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sikabau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik		51.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**100.000.000**							**102.000.000**	**DINAS KOMUNIKASI DAN**
##	**2 20 02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Ketersediaan dan ketepatan Data Statistik Sektoral**	-			95 %	**100.000.000**						-	**102.000.000**	**DINAS KOMUNIKASI DAN**
	2 20 02 2.0 1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah buku/dokumen metadata statistik sektoral jumlah diklat, pelatihan, bimtek petugas statistik OPD produsen data dan wali data pendukung Jumlah Kecamatan Statistik Jumlah nagari Statistik Jumlah survey dan rekomendasi BPS	-			5 Dokumen 130 orang 9 Kecamatan 46 Nagari 15 kegiatan	100.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya ketersediaan dan ketepatan data statistik sektoral untuk dasar pengambilan kebijakan pembangunan	-	102.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 20 02 2.0 0007 1	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				52 Orang	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya ketersediaan dan ketepatan data statistik sektoral untuk dasar pengambilan kebijakan pembangunan		51.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 20 02 2.0 0010 1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				3 Dokumen	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya ketersediaan dan ketepatan data statistik sektoral untuk dasar pengambilan kebijakan pembangunan		51.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**100.000.000**							**255.000.000**	**DINAS KOMUNIKASI DAN**
##	**2 21 02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Keamanan sistem elektronik yang digunakan pemerintah daerah**	**38 %**			**38 %**	**100.000.000**						**38 %**	**255.000.000**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
	2 21 02 2.0 1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Asesment Aplikasi oleh BSSN Jumlah Asesment website oleh BSSN	-			20 aplikasi 50 Unit	50.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatnya keamanan pelayanan pemerintah yang berbasis aplikasi	-	102.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 21 02 2.0 0004 1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				38 Perangkat Daerah	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatnya keamanan pelayanan pemerintah yang berbasis aplikasi		102.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 21 02 2.0 2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	-			80 %	50.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatnya keamanan pelayanan pemerintah yang berbasis aplikasi	-	153.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 21 02 2.0 0001 2	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				38 Perangkat Daerah	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	meningkatnya keamanan pelayanan pemerintah yang berbasis aplikasi		153.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan						**5.500.000.000**							**6.902.500.000**	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.265.500.000**							**5.432.500.000**	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**
	2 17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**4.265.500.000**							**5.432.500.000**	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**
##	**2 17 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Penigkatan Kualitas tata laksana reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah**	-			**100 %**	**3.973.837.500**						-	**5.119.500.000**	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**
	2 17 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penigkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	51.562.500			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	48.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.0 0001 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	27.562.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		28.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.0 0006 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	24.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		20.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	2.131.762.500			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	3.008.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.0 0001 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	2.123.851.063	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.000.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.0 0007 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				20 Laporan	7.911.437	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		8.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 17 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			100 %	8.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	9.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	8.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		9.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-			100 %	10.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	15.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.04 0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				2 Dokumen	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	20.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	35.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		35.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penigkatan Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	330.418.750			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	419.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				16 Paket	4.858.750	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 17 01 2.0 6 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				80 Paket	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		60.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.0 6 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				26 Paket	28.665.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		30.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.0 6 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	40.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		60.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.0 6 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	41.895.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		45.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.0 6 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		200.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.0 6 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		20.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	495.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	535.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.0 7 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	330.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		335.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 17 01 2.0 0005 7	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	40.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas S. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		50.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.0 0006 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21 Unit	80.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas S. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		90.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.0 0011 7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	45.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas S. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		60.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Urusan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	756.331.250			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas S. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	861.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.0 8 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.063.750	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas S. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		6.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.0 8 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	226.012.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas S. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		230.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.0 8 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	24.255.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas S. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		25.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.0 8 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	500.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas S. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		600.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 17 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	170.762.500			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	189.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.0 9 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	20.562.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		25.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.0 9 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	53.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		55.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.0 9 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				51 Unit	22.050.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		24.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.0 9 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	25.150.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		30.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 01 2.0 9 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		55.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
##	**2 17 02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**	**-**			**100 %**	**50.000.000**						-	**55.000.000**	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**
	2 17 02 2.0 1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	50.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Fasilitasi dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro yang berdaya saing	-	55.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 17 02 2.0 0001 1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				25 Unit Usaha	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Fasilitasi dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro yang berdaya saing		55.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
##	**2 17 04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik**	**40 KSP/USP**			**40 KSP/USP**	**71.662.500**						**40 KSP/USP**	**73.000.000**	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**
	2 17 04 2.0 1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	71.662.500			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Fasilitasi dan Penguatan kelembagaan koperasi yang berdaya saing	-	73.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 04 2.0 0001 1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				10 Unit Usaha	71.662.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Fasilitasi dan Penguatan kelembagaan koperasi yang berdaya saing		73.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
##	**2 17 05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Peningkatan Kapasitasdan kompetensi Perkoperasian bagi Koperasi**	**100 %**			**100 %**	**50.000.000**						**100 %**	**55.000.000**	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**
	2 17 05 2.0 1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	50.000.000			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Fasilitasi dan Penguatan kelembagaan koperasi yang berdaya saing	-	55.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 05 2.0 0001 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				67 Orang	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Fasilitasi dan Penguatan kelembagaan koperasi yang berdaya saing		55.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
##	**2 17 07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Peningkatan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	**100 %**			**100 %**	**120.000.000**						**100 %**	**130.000.000**	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 17 07 2.0 1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-			100 %	120.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Fasilitasi dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro yang berdaya saing	-	130.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 07 2.0 0002 1	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				90 Unit Usaha	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Fasilitasi dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro yang berdaya saing		55.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2 17 07 2.0 0004 1	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				90 Unit Usaha	70.000.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	PAJAK DAERAH	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Fasilitasi dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro yang berdaya saing		75.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.234.500.000**							**1.470.000.000**	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**
	3 30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**800.000.000**							**915.000.000**	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**
##	**3 30 03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Peningkatan Kuantitas dan kualitas Sarana Distribusi Perdagangan**	**100 %**			**100 %**	**410.000.000**						**100 %**	**445.000.000**	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**
	3 30 03 2.0 1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksanya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-			100 %	350.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat	-	380.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 30 03 2.0 0001 1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				6 Unit	300.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat		310.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	3 30 03 2.0 1 0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				12 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat		70.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 30 03 2.0 2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-			100 %	60.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat	-	65.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 30 03 2.0 2 0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat		65.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
##	**3 30 04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Terciptanya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Parenting**	**100 %**			**100 %**	**200.000.000**						**100 %**	**250.000.000**	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**
	3 30 04 2.0 1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-			100 %	50.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat	-	60.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 30 04 2.0 1 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat		60.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 30 04 2.0 2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terjaminnya Persediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-			100 %	90.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat	-	120.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 30 04 2.0 2 0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	40.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat		60.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	3 30 04 2.0 0003 2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				5 Laporan	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat		60.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 30 04 2.0 3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	60.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat	-	70.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 30 04 2.0 0003 3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat		70.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
##	**3 30 06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Peningkatan terciptanya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	**100 %**			**100 %**	**130.000.000**						**100 %**	**150.000.000**	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**
	3 30 06 2.0 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-			100 %	130.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan pasar tertib ukur menuju terwujudnya Daerah Tertib Ukur	-	150.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 30 06 2.0 0001 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				800 Unit	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan pasar tertib ukur menuju terwujudnya Daerah Tertib Ukur		65.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 30 06 2.0 0002 1	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				50 Orang	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan pasar tertib ukur menuju terwujudnya Daerah Tertib Ukur		60.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 30 06 2.0 0003 1	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				50 Unit	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan pasar tertib ukur menuju terwujudnya Daerah Tertib Ukur		25.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
##	**3 30 07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri**	**-**			**100 %**	**60.000.000**						-	**70.000.000**	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	3 30 07 2.0 1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlakasananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-			100 %	60.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat	-	70.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 30 07 2.0 0005 1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				1 UMKM	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat		70.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**434.500.000**							**555.000.000**	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**
##	**3 31 02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Peningkatan Perencanaan dan Pemebangunan Industri Persentase peningkatan omzet IKM**	**339IKM**			**100 % 298 IKM**	**350.000.000**						**339IKM**	**460.000.000**	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**
	3 31 02 2.0 1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-			100 %	350.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan daya saing IKM	-	460.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 31 02 2.0 0004 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				50 Dokumen	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan daya saing IKM		150.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 31 02 2.0 0005 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				80 Dokumen	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 6. Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan daya saing IKM		160.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 31 02 2.0 0006 1	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				8 Dokumen	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatkan daya saing IKM		150.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
##	**3 31 04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase data Informasi Industri yang ter update**	**-persen**			**100 % 100 persen**	**84.500.000**						**-persen**	**95.000.000**	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	3 31 04 2.0 1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedinya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-			100 %	84.500.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatkan daya saing IKM	-	95.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 31 04 2.0 0001 1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				24 Dokumen	40.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatkan daya saing IKM		45.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3 31 04 2.0 0003 1	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				11 Dokumen	44.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatkan daya saing IKM		50.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						**6.200.000.000**							**7.238.489.438**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.200.000.000**							**7.238.489.438**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**
	2 18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**6.200.000.000**							**7.238.489.438**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**
##	**2 18 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana**	-			**100 persen**	**5.094.334.100**						-	**5.755.557.000**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**
	2 18 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	6.655.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	7.320.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.0 0001 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6.655.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		7.320.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			20 Orang/bulan	2.308.339.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	2.423.755.950	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 18 01 2.0 0001 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2.308.339.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.423.755.950	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	-			1 Laporan undefined undefined 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 20 Orang/bulan	268.991.250			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	304.889.800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.0 0001 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.455.250	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.0 0002 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	44.775.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		49.252.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.0 0003 6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	17.115.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		18.827.250	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.0 0004 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	26.999.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		29.698.900	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.0 0005 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	36.696.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		40.366.150	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 18 01 2.0 0009 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	137.950.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		151.745.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah paket Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-			44 Unit 57 Unit 1 Paket 2 Unit	1.700.326.350			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	2.138.400.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.0 0002 7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	294.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		323.400.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.0 0005 7	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				54 Unit	154.600.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		170.060.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.0 0006 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				69 Unit	1.045.400.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.149.940.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.0 0010 7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	206.326.350	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		495.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			12 Laporan	565.090.500			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	621.599.550	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.0 0001 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.400.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.0 0002 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	105.415.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		115.957.050	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 18 01 2.0 0003 8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	15.660.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		17.226.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.0 0004 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	440.015.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		484.016.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara/diservice Pemeliharaa AC ruangan pemeliharaan laptop/pc	-			1 Unit 9 Unit 1 Unit 12 Unit 30 Unit	244.932.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	259.591.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.0 0001 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		23.650.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.0 0002 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	53.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		44.550.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.0 0005 9	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	2.440.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.0 0006 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				51 Unit	30.940.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		34.034.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2.0 0009 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	143.052.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		157.357.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
##	**2 18 02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase pertumbuhan Investasi**	**2 dokumen**			**2 dokumen**	**6.000.000**						**2 dokumen**	**181.500.000**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**
	2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya regulasi yang dapat mendorong daya saing penanaman modal	-			2 dokumen	1.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif	-	181.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 02 2.01 0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif		181.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	persentase pemetaan potensi investasi daerah	-			100 persen	5.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 02 2.02 0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif		-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
##	**2 18 03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Promosi dan kerjasama investasi**	**4 kegiatan**			**4 kegiatan**	**402.556.250**						**4 kegiatan**	**442.811.875**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**
	2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi pemasaran investasi penanaman modal dalam bentuk event, expo dan pameran	-			4 kegiatan	402.556.250			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif	-	442.811.875	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 03 2.01 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	375.056.250	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif		412.561.875	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 03 2.01 0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	27.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif		30.250.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
##	**2 18 04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMPTSP sesuai peruntukanya**	**100persen**			**100 persen 100 persen**	**116.017.650**						**100persen**	**187.519.363**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 18 04 2.0 1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	-			100 persen	116.017.650			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif	-	187.519.363	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 04 2.0 0005 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	70.018.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif		77.019.800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 04 2.0 0006 1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2000 Pelaku Usaha	39.999.650	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif		49.999.563	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 04 2.0 0007 1	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				100 Pelaku Usaha	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif		27.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 04 2.0 0008 1	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				12 Kegiatan Usaha	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif		33.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
##	**2 18 05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Cakupan Pengendalian Penanaman Modal**	**100 persen**			**100 persen**	**580.092.000**						**100 persen**	**638.101.200**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**
	2 18 05 2.0 1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pada Perusahaan	-			220 perusahaan	580.092.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif	-	638.101.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 05 2.0 0004 1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				10 Kegiatan Usaha.	87.013.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif		95.714.300	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 05 2.0 0005 1	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				450 Pelaku Usaha	319.052.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif		350.957.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 18 05 2.0 0006 1	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				285 Kegiatan Usaha	174.027.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif		191.429.700	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
##	**2 18 06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	-	-			-	**1.000.000**						-	**33.000.000**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**
	2 18 06 2.0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif	-	33.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 06 2.0 0002 1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				4 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif		33.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga						**15.892.900.000**							**16.285.320.000**	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.872.900.000**							**15.163.320.000**	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN**
	2 19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**3.226.700.000**							**2.645.500.000**	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN**
##	**2 19 02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Terselenggaranya Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan**	**100 %**			**100 %**	**485.000.000**						**100 %**	**533.500.000**	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN**
	2 19 02 2.0 1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-			2 Kegiatan	485.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	-	533.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 02 2.0 0011 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				60 Orang	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan		220.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 19 02 2.01 0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				265 Orang	75.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan		82.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 02 2.01 0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				78 Orang	210.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan		231.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
##	**2 19 03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Terwujudnya Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan**	**100 %**			**100 %**	**2.041.700.000**						**100 %**	**1.342.000.000**	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN**
	2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Olahraga	-			2 Kegiatan	1.121.700.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi olahraga	-	330.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 03 2.01 0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				2 Unit	1.071.700.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi olahraga		275.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 03 2.01 0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				5 Dokumen	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi olahraga		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselengaranya Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten dan Porprov	-			7 Kegiatan	400.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi olahraga	-	440.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 19 03 2.0 0004 2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				3 Kegiatan	250.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi olahraga		275.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 03 2.0 0006 2	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				147 Orang	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi olahraga		165.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 03 2.0 3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten yang Dilakukan Pembinaan	-			25 Orang	375.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi olahraga	-	412.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 03 2.0 0007 3	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga				5 Orang	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi olahraga		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 03 2.0 0009 3	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				250 Orang	250.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi olahraga		275.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 03 2.0 0010 3	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				1 Dokumen	75.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi olahraga		82.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 03 2.0 4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-			10 Organisasi	35.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi olahraga	-	38.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 19 03 2.0 0006 4	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	35.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi olahraga		38.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 03 2.0 5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya kegiatan multi event dan olahraga rekreasi Olahraga Rekreasi	-			7 Kegiatan	110.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi olahraga	-	121.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 03 2.0 0006 5	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				7 Laporan	110.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan pemasyarakatan olah raga dan prestasi olahraga		121.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
##	**2 19 04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase organisasi pramuka yang aktif**	**100 %**			**100 %**	**700.000.000**						**100 %**	**770.000.000**	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN**
	2 19 04 2.0 1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	-			5 organisasi	700.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan pramuka dalam masyarakat	-	770.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 04 2.0 0002 1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan pramuka dalam masyarakat		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 04 2.0 0003 1	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				20 Orang	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan pramuka dalam masyarakat		27.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 19 04 2.0 1 0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				10 Laporan	250.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan pramuka dalam masyarakat		275.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 04 2.0 1 0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				25 Unit	75.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan pramuka dalam masyarakat		82.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 19 04 2.0 1 0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				15 Organisasi	300.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan pramuka dalam masyarakat		330.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**11.646.200.000**							**12.517.820.000**	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN**
##	**2 22 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**100 persen**			**100 persen**	**4.571.200.000**						**100 persen**	**5.055.320.000**	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN**
	2 22 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersedia	-			1 Dokumen	40.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	22.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.0 1 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	40.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		22.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan PD	-			1 Tahun	3.200.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	3.520.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 22 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	3.200.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.520.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Laporan	13.200.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	14.520.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				22 Paket	13.200.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		14.520.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Tahun	231.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	254.100.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		6.600.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		33.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		22.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		22.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 22 01 2.0 0005 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		22.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.0 0009 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	120.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		132.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.0 0010 6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			4 Unit	110.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	121.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.0 0001 7	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		66.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.0 0006 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 bulan	822.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	953.700.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.0 0001 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 22 01 2.0 8 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		165.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.0 8 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	17.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		18.700.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.0 8 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	650.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		715.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			8 Unit	155.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	170.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.0 9 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		27.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.0 9 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.0 9 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		11.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 01 2.0 9 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		22.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 22 01 2.0 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
##	**2 22 02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan**	-			**100 %**	**4.700.000.000**						-	**4.850.000.000**	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN**
	2 22 02 2.0 1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten	-			1 Tahun	450.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian seni daerah	-	330.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 02 2.0 0001 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				10 Objek	250.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian seni daerah		275.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 02 2.0 0002 1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				15 Orang	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian seni daerah		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 02 2.0 2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kesenian Daerah yang dilestarikan	-			15 Jenis	1.750.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian seni daerah	-	1.760.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 02 2.0 0001 2	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				5 Objek	1.500.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian seni daerah		1.650.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 02 2.0 0003 2	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				3 Sertifikat	250.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian seni daerah		110.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten	-			11 Lembaga adat	2.500.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya fungsi adat dalam kehidupan masyarakat	-	2.760.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 02 2.03 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				10 Objek	250.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya fungsi adat dalam kehidupan masyarakat		275.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 02 2.03 0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				500 Orang	750.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya fungsi adat dalam kehidupan masyarakat		825.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 02 2.03 0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				11 Unit	1.500.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya fungsi adat dalam kehidupan masyarakat		1.660.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
##	**2 22 03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Meningkatnya Pengembangan Kesenian**	**-**			**100 %**	**1.750.000.000**						**-**	**1.925.000.000**	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN**
	2 22 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah group kesenian daerah yang dibina	-			40 Grup	1.750.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian seni daerah	-	1.925.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 03 2.01 0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				150 Orang	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian seni daerah		220.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 03 2.01 0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				10 Sertifikat	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian seni daerah		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 22 03 2.0 0003 1	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	1.500.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian seni daerah		1.650.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
##	**2 22 04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Terwujudnya Pembinaan Sejarah**	-			**100 %**	**100.000.000**						-	**110.000.000**	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN**
	2 22 04 2.0 1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten yang dibina	-			50 orang	100.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian cagar budaya	-	110.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 04 2.0 0001 1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				50 Orang	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian cagar budaya		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 04 2.0 0003 1	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian cagar budaya		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
##	**2 22 05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Jumlah cagar Budaya yang lestasrikan**	-			**102 Unit**	**375.000.000**						-	**412.500.000**	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN**
	2 22 05 2.0 1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar Budaya yang ditetapkan	-			10 Unit	300.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian cagar budaya	-	330.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 05 2.0 0001 1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				5 Objek	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian cagar budaya		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 05 2.0 0002 1	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				10 Objek	250.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian cagar budaya		275.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 22 05 2.0 2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	-			104 Objek	75.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian cagar budaya	-	82.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 05 2.0 0001 2	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				104 Objek	75.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian cagar budaya		82.500.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
##	**2 22 06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Terwujudnya Pengelolaan Permuseuman**	**-**			**1 Museum**	**150.000.000**						**-**	**165.000.000**	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN**
	2 22 06 2.0 1	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	-			2 Orang	150.000.000			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian cagar budaya	-	165.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 06 2.0 0002 1	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				2 Orang	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian cagar budaya		55.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2 22 06 2.0 0004 1	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatnya pelestarian cagar budaya		110.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.020.000.000**							**1.122.000.000**	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN**
	3 26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**1.020.000.000**							**1.122.000.000**	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN**
##	**3 26 02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Meningkatnya Kunjungan Wisatawan (domistik dan mancanegara)**	**-**			**100 %**	**150.000.000**						**-**	**165.000.000**	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN**
	3 26 02 2.0 3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	-			20 Lokasi	150.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif	-	165.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	3 26 02 2.0 0003 3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				20 Lokasi	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif		165.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
##	**3 26 03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan Nasional**	-			**100 %**	**570.000.000**						-	**627.000.000**	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN**
	3 26 03 2.0 1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	-			2 Kegiatan	570.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif	-	627.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3 26 03 2.0 0006 1	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Kegiatan	570.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif		627.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
##	**3 26 05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Peningkatan Jumlah devisa sektor pariwisata**	-			**100 %**	**300.000.000**						-	**330.000.000**	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN**
	3 26 05 2.0 1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-			156 Orang	300.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif	-	330.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3 26 05 2.0 0006 1	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				156 Orang	300.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 7. Membangkitkan identitas daerah	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan industri pariwisata yang inovatif		330.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						**4.077.413.850**							**3.973.876.250**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.077.413.850**							**3.973.876.250**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	2 23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**3.897.441.850**							**3.793.904.250**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
##	**2 23 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran**	**100 Persen**			**100 Persen**	**3.732.451.800**						**100 Persen**	**3.628.914.200**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 23 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			23 orang	2.808.115.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	2.808.115.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	2.808.115.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.808.115.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-			1 paket	161.015.600			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	58.478.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	26.057.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		23.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.758.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		21.758.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	13.720.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		13.720.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	99.480.600	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 23 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			111 Unit	111.350.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	110.350.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				49 Unit	16.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				49 Unit	44.350.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		44.350.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			12 Laporan	360.891.200			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	360.891.200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 23 01 2.0 8 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.0 8 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	40.800.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		40.800.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.0 8 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	318.091.200	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		318.091.200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			78 unit	291.080.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	291.080.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.0 9 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	16.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.0 9 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	58.120.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		58.120.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 01 2.0 9 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				78 Unit	16.980.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.980.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 23 01 2.0 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	199.980.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		199.980.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
##	**2 23 02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Jumlah Perpustakaan Yang Dibina**	**6.31 persen**			**6.31 persen**	**164.990.050**						**6.31 persen**	**164.990.050**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
	2 23 02 2.0 1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	-			23 Perpustakaan	119.880.050			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	-	119.880.050	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.0 0004 1	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				20 Perpustakaan	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat		5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.0 0011 1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				10 Perpustakaan	39.884.800	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat		39.884.800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.0 0012 1	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				65 Layanan	59.995.250	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat		59.995.250	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.0 0016 1	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 Orang	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat		5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.0 0018 1	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1000 Eksemplar	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat		5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 23 02 2.0 1 0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				30 Perpustakaan	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat		5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.0 2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan bertambahnya minat dan budaya baca di Kabupaten Dharmasraya	-			400 Orang	45.110.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	-	45.110.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.0 2 0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				20 Orang	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat		5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.0 2 0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				10 Perpustakaan	30.110.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat		30.110.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.0 2 0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				3 Perpustakaan	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat		5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 23 02 2.0 2 0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				20 Orang	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat		5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**179.972.000**							**179.972.000**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
##	**2 24 02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Terwujud Penyelenggaraan kearsipan Yang Patuh dan Taat Terhadap Uu**	**1 Dokumen**			**1 Dokumen**	**179.972.000**						**1 Dokumen**	**179.972.000**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 24 02 2.0 1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Dinas Yang Diciptakan Dan Digunakan	-			30 Berkas	164.032.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu	-	164.032.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 02 2.0 1 0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				30 Berkas	88.277.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu		88.277.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 02 2.0 1 0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				120 Berkas	32.726.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu		32.726.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 02 2.0 1 0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				38 Laporan	43.029.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu		43.029.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 02 2.0 3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-			1 Layanan	15.940.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu	-	15.940.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2 24 02 2.0 3 0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				1 Pengguna	15.940.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Padang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu		15.940.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Dinas Pertanian						**22.072.854.800**							**23.099.334.660**	**DINAS PERTANIAN**
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**22.072.854.800**							**23.099.334.660**	**DINAS PERTANIAN**
	3 27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**22.072.854.800**							**23.099.334.660**	**DINAS PERTANIAN**
##	**3 27 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**-**			**100 %**	**16.092.854.800**						**-**	**16.933.834.660**	**DINAS PERTANIAN**
	3 27 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Honorarium ASN	-			12 Bulan	13.168.854.800			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	13.813.653.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.0 2 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				119 Orang/bulan	13.168.854.800	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		13.813.653.000	DINAS PERTANIAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3 27 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan administrasi Umum	-			12 Bulan	411.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	394.800.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	8.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		8.400.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		57.750.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				18 Paket	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.750.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	33.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		34.650.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		31.500.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	275.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		246.750.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	-			13 Unit	155.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	157.500.000	DINAS PERTANIAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	3 27 01 2.0 0006 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	155.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		157.500.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan jasa Penunjang Perkantoran	-			12 Bulan	1.674.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	1.833.509.660	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.0 0001 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.400.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.0 0002 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	140.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		147.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.0 0004 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.530.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.682.109.660	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	-			140 Unit	684.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	734.372.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.0 0001 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	14.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		15.400.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.0 0002 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				138 Unit	300.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		329.472.000	DINAS PERTANIAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	3 27 01 2.0 0006 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		22.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 01 2.0 0009 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	350.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		367.500.000	DINAS PERTANIAN
##	**3 27 02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Sarana Pertanian**	**10 %**			**10 %**	**900.000.000**						**10 %**	**932.500.000**	**DINAS PERTANIAN**
	3 27 02 2.0 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-			10 %	150.000.000			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan	-	152.250.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 02 2.0 0002 1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				4 Laporan	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		152.250.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 02 2.0 2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, perkebunan dan Hortikultura	-			10 %	250.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan	-	260.500.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 02 2.0 0002 2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				4 Dokumen	125.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		125.500.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 02 2.0 0003 2	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				4 Dokumen	125.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		135.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 02 2.0 6	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan populasi ternak	-			10 %	500.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	-	519.750.000	DINAS PERTANIAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	3 27 02 2.06 0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				30 Ekor	500.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH		519.750.000	DINAS PERTANIAN
##	**3 27 03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Prasarana pertanian**	**10 %**			**10 %**	**3.950.000.000**						**10 %**	**4.724.000.000**	**DINAS PERTANIAN**
	3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan	-			4 Dokumen	600.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan	-	635.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 03 2.01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				4 Laporan	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		110.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 03 2.01 0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan				1 Dokumen	300.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		315.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 03 2.01 0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				4 Dokumen	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		210.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan dipelihara	-			29 Unit	3.350.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan	-	4.089.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 03 2.02 0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				6 Unit	800.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		840.000.000	DINAS PERTANIAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	3 27 03 2.02 0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				14 Unit	2.100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		2.730.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 03 2.02 0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		210.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 03 2.02 0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi				1 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		100.500.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 03 2.02 0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				6 Unit	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		156.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 03 2.02 0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		52.500.000	DINAS PERTANIAN
##	**3 27 04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Peningkatan Produksi Daging**	**10 %**			**10 %**	**130.000.000**						**10 %**	**136.500.000**	**DINAS PERTANIAN**
	3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular	-			100 %	100.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	-	105.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 04 2.01 0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				4 Laporan	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH		105.000.000	DINAS PERTANIAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	3 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesmavet	-			10 Unit	30.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	-	31.500.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 04 2.04 0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				4 Laporan	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH		31.500.000	DINAS PERTANIAN
##	**3 27 05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Pengendalian penanggulangan bencana Pertanian**	**100 %**			**100 %**	**50.000.000**						**100 %**	**52.500.000**	**DINAS PERTANIAN**
	3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah area asuransi usaha tani yang mendapat subsidi	-			500 Ha	50.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan	-	52.500.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 05 2.01 0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				4 Laporan	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		52.500.000	DINAS PERTANIAN
##	**3 27 07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Peningkatan Kapassitas SDM Penyuluh Pertanian**	**75 %**			**75 %**	**950.000.000**						**75 %**	**320.000.000**	**DINAS PERTANIAN**
	3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Fasilitasi bagi Penyuluhan Pertanian	-			100 %	950.000.000			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan	-	320.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 07 2.01 0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				11 Unit	750.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		110.000.000	DINAS PERTANIAN
	3 27 07 2.01 0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				1 Unit	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		157.500.000	DINAS PERTANIAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	3 27 07 2.01 0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				65 Orang	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Perkebunan		52.500.000	DINAS PERTANIAN
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						**6.435.994.250**							**6.619.259.500**	**DINAS TENAGA KERJA DAN**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.435.994.250**							**6.619.259.500**	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
	2 07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**6.435.994.250**							**6.619.259.500**	**DINAS TENAGA KERJA DAN**
##	**2 07 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**100 persen**			**100 persen**	**5.069.467.350**						**100 persen**	**5.112.225.500**	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
	2 07 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			1 tahun	4.349.517.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	-	-	4.349.517.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	4.349.517.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	-		4.349.517.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Tahun	202.449.850			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	-	-	220.558.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5.031.900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	-		10.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	28.958.950	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	-		29.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 07 01 2.0 6 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	-		5.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 01 2.0 6 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	13.510.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	-		16.510.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 01 2.0 6 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	10.048.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	-		10.048.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 01 2.0 6 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	139.901.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	-		150.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	-			23 Unit 6 Unit	98.600.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	-	-	112.250.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 01 2.0 7 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	-		50.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 01 2.0 7 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	48.600.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	-		62.250.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 Bulan	359.130.500			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	-	-	370.130.500	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	-		4.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	57.995.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	-		67.995.500	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	298.135.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	-		298.135.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan baik	-			38 Unit	59.770.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	-	-	59.770.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	-		4.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	36.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	-		36.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 07 01 2.0 0006 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	19.770.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	-		19.770.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
##	**2 07 03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Pengangguran yang Kompeten dan sudah Bekerja**	**80,25 persen**			**80,25 persen**	**225.000.000**						**80,25 persen**	**300.000.000**	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
	2 07 03 2.0 1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi yang terlaksana	-			2 Paket	225.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	-	300.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 03 2.0 0001 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				20 Orang	225.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja		300.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
##	**2 07 04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenga Kerja yang ditempatkan**	**30,54 persen**			**30,54 persen**	**400.000.000**						**30,54 persen**	**400.000.000**	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
	2 07 04 2.0 1	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui AKAD dan AKL	-			180 Orang	200.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Terwujudnya Kesempatan Kerja	-	200.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 04 2.0 0002 1	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				180 Orang	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Terwujudnya Kesempatan Kerja		200.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 04 2.0 3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar di Sisnaker	-			100 Orang	200.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Terwujudnya Kesempatan Kerja	-	200.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 07 04 2.03 0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				100 Orang	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Terwujudnya Kesempatan Kerja		200.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
##	**2 07 05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak**	**90 persen**			**90 persen**	**741.526.900**						**90 persen**	**807.034.000**	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
	2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama	-			3 PP/PKB	270.086.900			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh	-	280.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 05 2.01 0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				30 Perusahaan	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh		100.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 05 2.01 0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				10 Perusahaan	50.086.900	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh		60.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 05 2.01 0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				12 Laporan	120.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh		120.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus yang terselesaikan Jumlah Pekerja yang mendapatkan Bantuan Iuran Jamsostek Rekomendasi LKS Tripartit	-			50 Kasus 5200 Orang 2 Dokumen	471.440.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh	-	527.034.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 05 2.02 0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				50 Perkara	72.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh		75.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 07 05 2.02 0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh		52.034.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2 07 05 2.02 0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				5200 Orang	349.440.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh		400.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Sekretariat Daerah						**46.784.905.672**							-	**SEKRETARIAT**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**46.784.905.672**							-	**SEKRETARIAT DAERAH**
	4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**46.784.905.672**							-	**SEKRETARIAT**
##	**4 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**37.383.275.472**						-	-	**SEKRETARIAT DAERAH**
	4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.382.922.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				66 Orang/bulan	10.382.922.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	350.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				30 Dokumen	350.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 tahun	4.441.795.700			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	-	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4 01 01 2.0 0001 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	160.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.0 0002 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	195.703.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.0 0003 6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	124.866.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.0 0004 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	2.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.0 0005 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	61.226.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.0 0009 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	1.900.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			5 unit	6.988.685.270			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.0 0001 7	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	1.581.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.0 0002 7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0				5 0	1.405.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-		-	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4 01 01 2.0 0005 7	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				343 Unit	1.811.446.170	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.0 0006 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				146 Unit	1.760.739.100	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.0 0010 7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	430.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	-		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	7.974.352.390			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.0 8 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	40.700.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.0 8 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	1.589.520.530	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.0 8 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	1.652.750.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.0 8 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	4.691.381.860	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.619.550.500			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	270.000.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	1.122.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				200 Unit	127.550.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	1.727.462.400			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.11 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	485.962.400	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.11 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	621.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	4 01 01 2.1 1 0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	220.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.1 1 0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	400.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.1 2	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	823.637.900			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.1 2 0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	363.637.900	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.1 2 0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	360.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.1 2 0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				2 Paket	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.1 3	Penataan Organisasi	Nilai SAKIP	-			78 baik	174.999.400			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.1 3 0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	4 01 01 2.13 0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	50.000.250	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.13 0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	74.999.150	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	2.899.869.912			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 01 2.14 0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	2.899.869.912	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam administrasi umum, penataan organisasi, protokoler dan komunikasi pimpinan		-	SEKRETARIAT DAERAH
##	**4 01 02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan Nilai LPPD**	**2,96sedang 20indeks**			**20 indeks 2,94 sedang**	**8.426.001.650**						**2,96sedang 20indeks**	**-**	**SEKRETARIAT DAERAH**
	4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD Nilai LPPD	2,96sedang			2,94 sedang 3,41 sedang	347.390.200			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam penyelengaraan administrasi hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	2,96sedang	-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.01 0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	85.272.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam penyelengaraan administrasi hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.01 0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				10 Dokumen	157.623.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam penyelengaraan administrasi hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		-	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4 01 02 2.0 0003 1	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				2 Dokumen	104.495.200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam penyelengaraan administrasi hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.0 0002	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap fasilitasi, evaluasi kegiatan kesejahteraan rakyat	-			10 indek	7.372.683.750			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam penyelengaraan administrasi hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.0 0001 2	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				8 Dokumen	7.345.819.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam penyelengaraan administrasi hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.0 0002 2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk				1 Dokumen	14.722.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam penyelengaraan administrasi hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.0 0003 2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum				1 Dokumen	12.142.250	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 3. Memajukan pendidikan yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam penyelengaraan administrasi hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.0 3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	653.237.800			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam penyelengaraan administrasi hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.0 0001 3	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				460 Dokumen	414.424.600	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam penyelengaraan administrasi hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.0 0002 3	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	177.406.700	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam penyelengaraan administrasi hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.0 0003 3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				1 Dokumen	61.406.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam penyelengaraan administrasi hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		-	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	10dokumen			-	52.689.900			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam penyelengaraan administrasi hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	10dokumen	-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 02 2.04 0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				10 Dokumen	52.689.900	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam penyelengaraan administrasi hukum, tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		-	SEKRETARIAT DAERAH
##	**4 01 03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	-	-			-	**975.628.550**						-	**-**	**SEKRETARIAT DAERAH**
	4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	365.350.650			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam merumuskan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	21.576.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam merumuskan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.01 0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	50.200.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam merumuskan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.01 0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				34 Dokumen	293.574.650	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam merumuskan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam		-	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-	169.996.400			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam merumuskan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.02 0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	54.663.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam merumuskan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.02 0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	51.504.400	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam merumuskan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.02 0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	63.829.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam merumuskan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	386.820.100			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam merumuskan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam	-	-	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	4 01 03 2.03 0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	186.614.100	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam merumuskan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.03 0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	161.941.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam merumuskan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.03 0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Orang	38.265.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam merumuskan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam		-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-			-	53.461.400			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam merumuskan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
	4 01 03 2.04 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	26.425.400	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam merumuskan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam		-	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	4 01 03 2.04 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	27.036.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengkoordinasian dalam merumuskan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam		-	SEKRETARIAT DAERAH
		Sekretariat DPRD						**42.000.000.000**							**45.380.350.000**	**SEKRETARIAT DPRD**
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**42.000.000.000**							**45.380.350.000**	**SEKRETARIAT DPRD**
	4 02	**SEKRETARIAT DPRD**						**42.000.000.000**							**45.380.350.000**	**SEKRETARIAT DPRD**
##	**4 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Terselenggaranya Administrasi Perkantoran**	-			**100% Persen**	**24.218.450.000**						-	**26.019.800.000**	**SEKRETARIAT DPRD**
	4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tahun	2.200.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	2.500.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	2.200.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.500.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Tahun	300.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	320.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	300.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		320.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Tahun	2.013.450.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	2.240.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.450.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		60.000.000	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4 02 01 2.0 6 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	650.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		680.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.0 6 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	203.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		250.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.0 6 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	450.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		500.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.0 6 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	310.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		350.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.0 6 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	350.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		400.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Tahun	1.445.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	1.799.800.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.0 7 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	1.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.200.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.0 7 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				130 Unit	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		200.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.0 7 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	246.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		350.000.000	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4 02 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	49.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		49.800.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Tahun	2.339.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	2.500.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	35.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		40.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	450.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		460.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.854.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Tahun	1.861.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	2.380.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	305.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		310.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	206.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		210.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				210 Unit	350.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		360.000.000	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	4 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.500.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-			1 Tahun	13.510.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	13.700.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.15 0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/Bulan	12.500.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		12.600.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.15 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				30 Paket	510.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		550.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.15 0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	500.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		550.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Layanan Administrasi DPRD	-			1 Tahun	550.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	580.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 01 2.16 0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				60 Laporan	550.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		580.000.000	SEKRETARIAT DPRD
##	**4 02 02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD**	**-**			**100 Persen**	**17.781.550.000**						**-**	**19.360.550.000**	**SEKRETARIAT DPRD**
	4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-			1 Tahun	4.600.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif	-	5.150.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.01 0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				5 Dokumen	3.200.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif		3.500.000.000	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	4 02 02 2.01 0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				5 Dokumen	1.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif		1.200.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.01 0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				5 Dokumen	400.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif		450.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	-			1 Dokumen	3.951.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif	-	4.200.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.02 0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	800.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif		850.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.02 0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	800.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif		850.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.02 0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	800.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif		850.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.02 0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	800.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif		850.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.02 0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	751.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif		800.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-			1 Tahun	800.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif	-	850.000.000	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4 02 02 2.03 0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	800.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif		850.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	-			6 Kali	3.000.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif	-	3.700.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04 0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	2.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif		2.200.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.04 0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	1.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif		1.500.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-			1 Tahun	5.430.550.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif	-	5.460.550.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.05 0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				60 Laporan	4.680.550.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif		4.700.550.000	SEKRETARIAT DPRD
	4 02 02 2.05 0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	750.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Tebing Tinggi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif		760.000.000	SEKRETARIAT DPRD
		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah						**5.161.811.350**							**7.495.227.382**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.161.811.350**							**7.495.227.382**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	5 01	**PERENCANAAN**						**4.731.811.350**							**6.460.227.382**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
##	**5 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 persen**			**100 persen**	**3.451.855.468**						**100 persen**	**5.069.815.100**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran keuangan PD	-			100 persen	2.156.842.468			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	3.216.818.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	2.156.842.468	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.216.818.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 persen	244.513.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	403.944.300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	9.900.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.890.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	22.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		23.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	30.613.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		33.674.300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		39.930.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	22.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		30.250.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 01 01 2.0 0009 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	135.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		266.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.0 0007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-			100 persen	315.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	750.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.0 0005 7	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	65.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.0 0006 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	250.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		750.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	565.500.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	654.152.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.0 0001 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.0 0002 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	120.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		120.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.0 0003 8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	13.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.0 0004 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	425.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		512.652.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	5 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	-			100 persen	170.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	44.900.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.0 0001 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	18.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		26.400.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.0 0002 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	22.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.0 0006 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	15.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		18.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 01 2.0 0010 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	114.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
##	**5 01 02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	-	-			-	**925.600.000**						-	**830.200.000**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	5 01 02 2.0 1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bimtek Penyusunan Renstra PD Koordinasi Penyusunan Renstra PD Penyusunan RAD SPM 2025-2029 Penyusunan RKPD 2026 dan Perubahan Tahun 2025 Penyusunan RPJMD sesuai tata cara dan tahapan yang berlaku	-			1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	850.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	-	775.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 02 2.0 0005 1	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		350.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 02 2.0 0007 1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 dokumen Dokumen	700.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		425.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Data Geospasial Tersedianya data, analisis data perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas (Data Statisktik)	-			1 dokumen 1 ddokumen	50.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	-	30.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 02 2.02 0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		30.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Pengendalian dan valuasi terhadap pelaksanaaan rencana pembangunan daerah	-			37 OPD 37 OPD 37 OPD	25.600.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	-	25.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 02 2.03 0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	25.600.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		25.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
##	**5 01 03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase pencapaian Hasil Renja PD**	**95 persen**			**95 persen**	**354.355.882**						**95 persen**	**560.212.282**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pencapaian SPM bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	-			100 persen	155.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	-	263.923.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.01 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 dokumen Dokumen	55.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		43.923.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.01 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	75.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		110.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.01 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		110.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	5 01 03 2.0 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase pencapaian kinerja bidang perekonomian dan SDA	-			95 persen	71.068.882			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	-	78.173.582	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.0 0003 2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				4 Laporan	38.068.882	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		41.873.582	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.0 0007 2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				4 Laporan	33.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		36.300.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.0 3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pencapaian SPM bidang infrastruktur dan kewilayahan	-			100 persen	128.287.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	-	218.115.700	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.0 0003 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	36.602.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		40.262.750	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.0 0005 3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 dokumen Dokumen	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		132.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 01 03 2.0 0008 3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				4 Laporan	41.684.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		45.852.950	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**430.000.000**							**1.035.000.000**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
##	**5 05 02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Indeks Inovasi Daerah**	**70 index**			**70 index**	**430.000.000**						**70 index**	**1.035.000.000**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**
	5 05 02 2.0 1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	-			45 persen	365.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya fungsi litbang dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah	-	870.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	5 05 02 2.0 1 0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	250.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya fungsi litbang dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah		100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 05 02 2.0 1 0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				3 Laporan	115.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya fungsi litbang dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah		770.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 05 02 2.0 4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi PD yang lolos verifikasi sesuai ketentuan	-			70 inovasi	65.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah	-	165.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5 05 02 2.0 4 0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	65.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah		165.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		Badan Keuangan Daerah						**130.470.096.585**							**145.493.128.742**	**BADAN KEUANGAN DAERAH**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**130.470.096.585**							**145.493.128.742**	**BADAN KEUANGAN DAERAH**
	5 02	**KEUANGAN**						**130.470.096.585**							**145.493.128.742**	**BADAN KEUANGAN DAERAH**
##	**5 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**10.462.768.001**						-	**11.718.360.160**	**BADAN KEUANGAN DAERAH**
	5 02 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	20.870.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	23.374.400	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.0 1 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10.348.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		11.589.760	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.0 1 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	10.522.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		11.784.640	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.018.522.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	7.860.744.640	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	5 02 01 2.0 0001 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	7.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		7.840.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.0 0005 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	12.348.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		13.829.760	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.0 0006 2	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	6.174.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		6.914.880	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	5.174.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	5.794.880	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.0 0001 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.174.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.794.880	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	52.654.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	59.032.480	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.0 0001 5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	6.174.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		6.914.880	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.0 0009 5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	20.740.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		23.288.800	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.0 0011 5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	25.740.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		28.828.800	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	916.350.019			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	1.026.312.021	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	24.696.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		27.659.520	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	200.166.019	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		224.185.941	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	98.784.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		110.638.080	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	92.610.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		103.723.200	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	185.220.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		207.446.400	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				44 Laporan	308.700.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		345.744.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	6.174.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		6.914.880	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	-			BB Nilai	615.828.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	689.727.360	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 02 01 2.0 7 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	450.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		504.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.0 7 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				18 Unit	61.740.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		69.148.800	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.0 7 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	104.088.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		116.578.560	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	-			BB Nilai	1.062.761.622			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	1.190.293.016	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.0 8 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	12.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		13.440.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.0 8 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	290.424.960	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		325.275.955	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.0 8 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	99.610.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		111.563.200	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.0 8 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	660.726.662	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		740.013.861	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Nilai AKIP BKD	-			BB Nilai	770.608.360			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	863.081.363	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	5 02 01 2.0 9 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	20.374.200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		22.819.104	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.0 9 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	142.613.760	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		159.727.411	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.0 9 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	12.522.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		14.024.640	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.0 9 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				109 Unit	170.402.400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		190.850.688	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.0 9 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		224.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 01 2.0 9 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	224.696.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		251.659.520	BADAN KEUANGAN DAERAH
##	**5 02 02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Penyusunan anggaran tepat waktu**	**100 persen**			**100 persen**	**118.721.283.072**						**100 persen**	**132.591.465.609**	**BADAN KEUANGAN DAERAH**
	5 02 02 2.0 1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	penyusunan anggaran tepat waktu	-			100 persen	2.489.773.920			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	-	2.412.175.359	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.0 1 0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	672.091.840	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		376.371.430	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.0 1 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	294.336.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		329.656.320	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 02 02 2.01 0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				37 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				37 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				37 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				37 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	139.245.120	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		155.954.534	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	1.057.473.760	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.184.370.611	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.01 0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	322.627.200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		361.342.464	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	-			96 Persen	494.203.360			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	-	553.507.763	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.02 0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	5 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.02 0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				114 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.02 0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				69 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.02 0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				12 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	80.143.840	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		89.761.101	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.02 0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.02 0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.02 0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	407.059.520	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		455.906.662	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	-			WTP Nilai	512.407.520			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	-	573.896.422	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				648 Laporan	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				648 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				18 Laporan	71.693.440	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		80.296.653	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				54 Laporan	182.600.320	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		204.512.358	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	249.113.760	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		279.007.411	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 02 02 2.03 0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				108 Orang	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				16 Lembaga	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.03 0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Anggaran tepat Waktu	-			Tepat Waktu Tepat	114.995.943.200			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	-	128.795.456.384	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.04 0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.04 0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.04 0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah				2 Laporan	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.04 0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				2 Laporan	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	5 02 02 2.04 0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				2 Laporan	110.240.986.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		123.469.904.320	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.04 0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	2.000.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		2.240.000.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.04 0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				4 Laporan	2.750.957.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		3.081.072.064	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tersusunnya Anggaran tepat Waktu	-			Tepat Waktu Tepat	228.955.072			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	-	256.429.681	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.05 0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				2 Dokumen	27.356.640	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		30.639.437	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 02 2.05 0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				5 Dokumen	201.598.432	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		225.790.244	BADAN KEUANGAN DAERAH
##	**5 02 03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Peningkatan Kualitas Pegelolaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**			**100 Persen**	**286.226.720**						**100 Persen**	**320.573.926**	**BADAN KEUANGAN DAERAH**
	5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terkelola Dengan Baik	-			83 Persen	286.226.720			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	-	320.573.926	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.01 0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	5 02 03 2.0 1 0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	62.507.200	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		70.008.064	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.0 1 0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.0 1 0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	137.637.920	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		154.154.470	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.0 1 0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	76.081.600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		85.211.392	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.0 1 0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.0 1 0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.0 1 0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.0 1 0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.0 1 0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				38 Laporan	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	5 02 03 2.0 1 0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 03 2.0 1 0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				56 Orang	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
##	**5 02 04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**	**2,75 Persen**			**2,75 Persen**	**999.818.792**						**2,75 Persen**	**862.729.047**	**BADAN KEUANGAN DAERAH**
	5 02 04 2.0 1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	-			4 Persen	999.818.792			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	-	862.729.047	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.0 1 0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				7 Dokumen	115.762.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.0 1 0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				8 Dokumen	258.758.752	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		289.809.802	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.0 1 0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.0 1 0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				8 Unit	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.0 1 0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				7 Laporan	55.014.400	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		61.616.128	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.0 1 0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				13 Laporan	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	5 02 04 2.0 1 0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				85000 Obyek Pajak	203.976.640	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		228.453.837	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.0 1 0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				536 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.0 1 0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				19 Layanan	189.392.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		212.119.040	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.0 1 0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	115.762.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.0 1 0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				14 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.0 1 0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				19 Dokumen	54.152.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		60.650.240	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.0 1 0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5 02 04 2.0 1 0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		1.120.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						**8.356.050.000**							**8.592.550.000**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**8.356.050.000**							**8.592.550.000**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	5 03	**KEPEGAWAIAN**						**7.154.050.000**							**7.390.550.000**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**
##	**5 03 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran**	**-**			**100 persen**	**5.533.050.000**						**-**	**5.769.550.000**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**
	5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kebijakan tentang perencanaan, pengangggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			10 dokumen	44.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	45.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	44.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		45.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	-			2 dokumen	4.300.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	4.500.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	4.300.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.500.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional kantor	-			5 paket	386.343.600			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	404.050.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.050.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		6.050.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	85.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		90.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	16.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		17.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 03 01 2.0 0004 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	44.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		46.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.0 0005 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	42.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		45.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.0 0009 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	192.793.600	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		200.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	-			2 unit	237.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	252.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.0 0002 7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	22.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		27.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.0 0005 7	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		40.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.0 0006 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	85.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		85.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.0 0009 7	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		100.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemeintah daerah	-			2 laporan	339.936.400			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	341.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 03 01 2.0 0001 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.0 0002 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	81.230.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		82.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.0 0003 8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	16.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.0 0004 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	237.206.400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		238.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dilakukan pemeliharaan	-			9 unit	225.770.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	227.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.0 0001 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		30.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.0 0002 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	31.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		31.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.0 0006 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	14.770.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 01 2.0 0009 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		150.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
##	**5 03 02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Jumlah kasus ASN yang tertangani Persentase Penempatan ASN sesuai kompetensi Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu**	**2786indeks**			**20 jumlah 52 persen 98 persen**	**1.621.000.000**						**2786indeks**	**1.621.000.000**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**
	5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pengadaan dan pemberhentian ASN	-			336 dokumen	342.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN	-	342.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.01 0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	45.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN		45.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.01 0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	165.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN		165.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.01 0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				120 Dokumen	38.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN		38.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.01 0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	52.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN		52.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.01 0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				200 Dokumen	42.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN		42.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen ASN yang dimutasi dan naik pangkat	-			1100 dokumen	106.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN	-	106.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.02 0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				300 Dokumen	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN		50.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 03 02 2.02 0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				800 Dokumen	56.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN		56.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	-			880 orang	960.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN	-	960.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.03 0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				30 Orang	39.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN		39.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.03 0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				440 Dokumen	335.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN		335.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.03 0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				100 Dokumen	560.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN		560.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.03 0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				80 Orang	26.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN		26.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	-			368 orang	213.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN	-	213.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.04 0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN		30.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 03 02 2.04 0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				250 Orang	151.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN		151.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	5 03 02 2.0 0008 4	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				20 Laporan	32.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN		32.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**1.202.000.000**							**1.202.000.000**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**
##	**5 04 02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi**	-			**85 persen**	**1.202.000.000**						-	**1.202.000.000**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**
	5 04 02 2.0 1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Kebijakan Teknis dan rencana pengembangan kompetensi ASN	-			1 dokumen	27.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi ASN	-	27.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 04 02 2.0 0001 1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	27.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi ASN		27.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 04 02 2.0 2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sertifikasi, kelembagaan, dan pengembangan kompetensi ASN	-			105 orang	1.175.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi ASN	-	1.175.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5 04 02 2.0 0007 2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				105 Laporan	1.175.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi ASN		1.175.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Inspektorat Kabupaten						**12.741.081.450**							**13.483.905.883**	**INSPEKTORAT KABUPATEN**
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**12.741.081.450**							**13.483.905.883**	**INSPEKTORAT KABUPATEN**
	6 01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**12.741.081.450**							**13.483.905.883**	**INSPEKTORAT KABUPATEN**
##	**6 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**	-			**100 Persen**	**8.628.101.100**						-	**9.165.276.715**	**INSPEKTORAT KABUPATEN**
	6 01 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersedia	-			4 Dokumen	150.000.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan publik perangkat daerah	-	157.500.000	INSPEKTORAT KABUPATEN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	150.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan pelayanan publik perangkat daerah		157.500.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi keuangan PD	-			12 Bulan	4.832.000.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	-	5.074.422.150	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	4.832.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		5.074.422.150	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kompetensi aparat pengawas	-			33 Orang	900.000.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	-	1.050.000.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				39 Orang	900.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		1.050.000.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	899.467.600			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	-	944.441.715	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	25.540.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		26.817.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	96.282.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		101.096.100	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	65.484.600	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA BAGI HASIL (DBH)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		68.758.830	INSPEKTORAT KABUPATEN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6 01 01 2.0 0004 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	70.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA BAGI HASIL (DBH)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		73.500.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.0 0005 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	19.995.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA BAGI HASIL (DBH)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		20.994.750	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.0 0006 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	4.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		4.725.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.0 0009 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	617.666.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA BAGI HASIL (DBH)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		648.550.035	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	-			32 Unit	667.993.500			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	-	701.393.350	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.0 0002 7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	489.250.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		513.712.500	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.0 0005 7	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	80.768.500	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		84.806.925	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.0 0006 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	97.975.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA BAGI HASIL (DBH)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		102.873.925	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	-			12 Bulan	590.000.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	-	619.447.500	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.0 0001 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		8.400.000	INSPEKTORAT KABUPATEN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	6 01 01 2.0 8 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	150.313.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA BAGI HASIL (DBH)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		157.828.650	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.0 8 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	95.900.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA BAGI HASIL (DBH)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		100.695.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.0 8 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	335.787.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		352.523.850	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemelihaaran Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	-			19 Unit	588.640.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	-	618.072.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.0 9 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	52.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		55.125.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.0 9 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	64.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		67.200.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.0 9 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	31.700.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		33.285.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 01 2.0 9 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	440.440.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		462.462.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
##	**6 01 02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah**	**-**			**117 Dokumen**	**2.481.480.350**						**-**	**2.605.554.168**	**INSPEKTORAT KABUPATEN**
	6 01 02 2.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya pengawasan internal	-			103 Dokumen	1.778.710.950			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	-	1.867.646.298	INSPEKTORAT KABUPATEN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6 01 02 2.0 1 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				5 Laporan	298.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		312.900.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 02 2.0 1 0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				23 Laporan	234.985.850	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		246.735.143	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 02 2.0 1 0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				10 Laporan	266.200.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		279.510.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 02 2.0 1 0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				14 Laporan	418.640.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		439.572.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 02 2.0 1 0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				24 Laporan	240.237.100	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		252.248.955	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 02 2.0 1 0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				12 Kesepakatan	205.460.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		215.733.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 02 2.0 1 0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				15 Dokumen	115.188.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		120.947.200	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 02 2.0 2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tertanganinya kasus dan pengaduan masyarakat	-			12 Laporan	702.769.400			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP	-	737.907.870	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 02 2.0 2 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				5 Laporan	112.769.400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		118.407.870	INSPEKTORAT KABUPATEN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	6 01 02 2.02 0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan	590.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM APIP		619.500.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
##	**6 01 03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Terlaksananya perumumuan perencanaan pengawasan dan pendampingan serta asistensi**	-			**16 Dokumen**	**1.631.500.000**						-	**1.713.075.000**	**INSPEKTORAT KABUPATEN**
	6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya perencanaan pengawasan dengan baik	-			1 Rekomendasi	187.000.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah	-	196.350.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 03 2.01 0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	187.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah		196.350.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	terlaksananya pendampingan dan asistensi	-			15 Dokumen	1.444.500.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah	-	1.516.725.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 03 2.02 0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				5 perangkat daerah	900.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah		945.000.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 03 2.02 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				5 perangkat daerah	256.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah		268.800.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
	6 01 03 2.02 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				5 Kegiatan	288.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Kambut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah		302.925.000	INSPEKTORAT KABUPATEN
		Kecamatan Pulau Punjung						**2.710.009.950**							-	**KECAMATAN PULAU PUNJUNG**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.710.009.950**							-	**KECAMATAN PULAU PUNJUNG**
	7 01	**KECAMATAN**						**2.710.009.950**							-	**KECAMATAN PULAU PUNJUNG**
##	**7 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**2.657.509.950**						-	-	**KECAMATAN PULAU PUNJUNG**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	-			1 tahun	1.659.848.660			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	1.659.848.660	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	65.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	35.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	172.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.0 0002 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.0 0003 6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.0 0004 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.0 0005 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.0 0007 6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.0 0009 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	263.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.0 0002 7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.0 0005 7	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Unit	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.0 0006 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	72.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.0 0010 7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	71.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	195.347.400			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.0 0001 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.0 0002 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.0 0003 8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.0 0004 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	181.347.400	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	282.313.890			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.0 0001 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	7 01 01 2.0 9 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.0 9 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.0 9 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.0 9 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	170.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 01 2.0 9 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	50.313.890	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
##	**7 01 02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-			-	**3.000.000**						-	-	**KECAMATAN PULAU PUNJUNG**
	7 01 02 2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	3.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 02 2.0 4 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 02 2.0 4 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
##	**7 01 03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-			-	**23.000.000**						-	-	**KECAMATAN PULAU PUNJUNG**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	7 01 03 2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	13.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 03 2.0 0001 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	13.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	10.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 03 2.0 0003 2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 03 2.0 0004 2	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
##	**7 01 04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-			-	**12.000.000**						-	-	**KECAMATAN PULAU PUNJUNG**
	7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	7.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 04 2.0 0002 1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	7.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 04 2.0 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	5.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 04 2.0 0001 2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
##	**7 01 06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-			-	**14.500.000**						-	-	**KECAMATAN PULAU PUNJUNG**
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	14.500.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	8.000.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
	7 01 06 2.01 0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				12 Dokumen	6.500.000	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		-	KECAMATAN PULAU PUNJUNG
		Kecamatan Sitiung						**2.400.000.000**							**2.512.180.000**	**KECAMATAN**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.400.000.000**							**2.512.180.000**	**KECAMATAN**
	7 01	**KECAMATAN**						**2.400.000.000**							**2.512.180.000**	**KECAMATAN**
##	**7 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**	-			**100 %**	**2.320.140.750**						-	**2.422.900.000**	**KECAMATAN SITIUNG**
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	-			1 Tahun	1.841.534.236			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	1.890.000.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	1.841.534.236	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.890.000.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-			1 Tahun	138.161.514			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	145.700.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2.605.350	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.700.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	15.755.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		13.000.000	KECAMATAN SITIUNG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.0 0003 6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	5.500.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		6.000.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.0 0004 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				300 Paket	16.500.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		18.000.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.0 0005 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	9.801.164	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.0 0009 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	88.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		96.000.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-			3 jenis	139.145.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	170.100.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.0 0002 7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	55.000.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		65.000.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.0 0005 7	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		12.100.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.0 0006 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	74.145.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		93.000.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	-			100 %	135.900.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	149.400.000	KECAMATAN SITIUNG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	7 01 01 2.0 8 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.200.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.400.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.0 8 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8.700.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		9.500.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.0 8 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	125.000.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		137.500.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	-			4 jenis	65.400.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	67.700.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.0 9 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	15.400.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.000.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.0 9 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	8.500.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Sitiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		7.000.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.0 9 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	8.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		8.400.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 01 2.0 9 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	33.000.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		36.300.000	KECAMATAN SITIUNG
##	**7 01 02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	-			**90 %**	**28.788.000**						-	**39.280.000**	**KECAMATAN SITIUNG**
	7 01 02 2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	-			12 jenis	28.788.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	39.280.000	KECAMATAN SITIUNG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	14.000.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		18.780.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	14.788.000	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		20.500.000	KECAMATAN SITIUNG
##	**7 01 03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Hasil Musrembang kecamatan yang ditampung dalam RKPD**	-			**60 %**	**24.071.250**						-	**21.000.000**	**KECAMATAN SITIUNG**
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	-			3 jenis	24.071.250			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	21.000.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	24.071.250	Kab. Dharmasraya, Sitiung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		21.000.000	KECAMATAN SITIUNG
##	**7 01 04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan**	-			**100% undefined**	**10.000.000**						-	**11.000.000**	**KECAMATAN SITIUNG**
	7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	-			100 %	10.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	11.000.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		11.000.000	KECAMATAN SITIUNG
##	**7 01 06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Nagari yang dilakukan pembinaaan**	-			**100 %**	**17.000.000**						-	**18.000.000**	**KECAMATAN SITIUNG**
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	-			100 %	17.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	18.000.000	KECAMATAN SITIUNG
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	17.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		18.000.000	KECAMATAN SITIUNG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Kecamatan Koto Baru						**2.352.831.700**							**2.420.000.000**	**KECAMATAN KOTO BARU**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.352.831.700**							**2.420.000.000**	**KECAMATAN KOTO BARU**
	7 01	**KECAMATAN**						**2.352.831.700**							**2.420.000.000**	**KECAMATAN KOTO BARU**
##	**7 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**100 persen**			**100 persen**	**2.303.931.700**						**100 persen**	**2.367.000.000**	**KECAMATAN KOTO BARU**
	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			8 Dokumen	12.400.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	15.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2.400.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		12.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	-			1 Tahun	1.669.231.700			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	1.700.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	1.669.231.700	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.700.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai	-			2 event	49.500.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	53.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	33.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		33.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	16.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		20.000.000	KECAMATAN KOTO BARU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-			1 Tahun	95.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	102.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.0 6 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.200.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.0 6 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	5.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		6.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.0 6 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				300 Paket	17.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		18.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.0 6 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6.600.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		7.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.0 6 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	4.400.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.0 6 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	3.300.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.0 6 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	55.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		60.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-			4 Jenis	87.500.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	94.500.000	KECAMATAN KOTO BARU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	22.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		22.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	27.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		30.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	33.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		35.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.07 0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		7.500.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	-			100 Persen	312.500.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	313.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	300.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		300.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di lakukan Pemeliharaan	-			4 Jenis	77.800.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	89.000.000	KECAMATAN KOTO BARU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	7 01 01 2.0 0001 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		20.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.0 0002 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.0 0006 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	8.800.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		9.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 01 2.0 0009 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	45.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		50.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
##	**7 01 02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP**	**90 persen**			**90 persen**	**5.500.000**						**90 persen**	**6.000.000**	**KECAMATAN KOTO BARU**
	7 01 02 2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	-			12 Jenis	5.500.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	6.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 02 2.0 0001 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	2.750.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		3.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 02 2.0 0002 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	2.750.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		3.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
##	**7 01 03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD**	**65 persen**			**65 persen**	**15.400.000**						**65 persen**	**16.000.000**	**KECAMATAN KOTO BARU**
	7 01 03 2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung diMusrenbang kabupaten	-			20 Usulan	15.400.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	16.000.000	KECAMATAN KOTO BARU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	7 01 03 2.0 0001 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	15.400.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		16.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
##	**7 01 04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan**	**100 persen**			**100 persen**	**5.500.000**						**100 persen**	**6.000.000**	**KECAMATAN KOTO BARU**
	7 01 04 2.0 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan	-			3 Kasus	5.500.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	6.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 04 2.0 0001 2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	5.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		6.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
##	**7 01 06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari**	**40 kasus**			**40 kasus**	**22.500.000**						**40 kasus**	**25.000.000**	**KECAMATAN KOTO BARU**
	7 01 06 2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	-			7 Jenis	22.500.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	25.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
	7 01 06 2.0 0002 1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	22.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		25.000.000	KECAMATAN KOTO BARU
		Kecamatan Sungai Rumbai						**2.000.000.000**							**2.841.749.880**	**KECAMATAN SUNGAI RUMBAI**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.000.000.000**							**2.841.749.880**	**KECAMATAN SUNGAI RUMBAI**
	7 01	**KECAMATAN**						**2.000.000.000**							**2.841.749.880**	**KECAMATAN SUNGAI RUMBAI**
##	**7 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**100 persen**			**100 persen**	**1.978.680.000**						**100 persen**	**2.802.789.114**	**KECAMATAN SUNGAI RUMBAI**
	7 01 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	-			15 orang	1.666.268.800			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	2.223.164.109	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.0 0001 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1.666.268.800	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.223.164.109	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-			1 Tahun	98.103.800			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	180.864.121	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	534.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.486.144	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	7.365.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		25.242.651	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3.475.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.856.400	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.216.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		29.716.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.387.800	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		6.911.665	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	72.126.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		110.651.261	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-			3 Jenis	50.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	50.000.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.06 0006 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		50.000.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	-			1 Tahun	132.307.400			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	288.153.972	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1.600.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.928.200	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15.780.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		19.326.120	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.000.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	113.927.400	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		262.899.652	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	-			3 Jenis	32.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	60.606.912	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	9.000.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		18.037.712	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	7.500.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		17.569.200	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	4.500.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		13.000.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	7 01 01 2.0 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	11.000.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		12.000.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
##	**7 01 02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP**	**90 persen**			**90 persen**	**1.550.000**						**90 persen**	**4.831.530**	**KECAMATAN SUNGAI RUMBAI**
	7 01 02 2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	-			12 Jenis	1.550.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	4.831.530	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 02 2.0 0001 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				35 Dokumen	700.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		3.221.020	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 02 2.0 0002 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				550 Laporan	850.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		1.610.510	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
##	**7 01 03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD**	**65 persen**			**65 persen**	**13.860.000**						**65 persen**	**18.796.116**	**KECAMATAN SUNGAI RUMBAI**
	7 01 03 2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	-			3 Jenis	13.860.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	18.796.116	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 03 2.0 0001 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				45 Lembaga Kemasyarakatan	13.860.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		18.796.116	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
##	**7 01 04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan**	**100 persen**			**100 persen**	**2.875.000**						**100 persen**	**4.685.120**	**KECAMATAN SUNGAI RUMBAI**
	7 01 04 2.0 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	-			3 Kasus	2.875.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	4.685.120	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 04 2.0 0001 2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3 Laporan	2.875.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		4.685.120	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
##	**7 01 06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari**	**100 Persen**			**100 Persen**	**3.035.000**						**100 Persen**	**10.648.000**	**KECAMATAN SUNGAI RUMBAI**
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	-			7 Jenis	3.035.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	10.648.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	3.035.000	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		10.648.000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
		Kecamatan Sembilan Koto						**2.246.986.000**							**2.376.295.505**	**KECAMATAN SEMBILAN KOTO**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.246.986.000**							**2.376.295.505**	**KECAMATAN SEMBILAN KOTO**
	7 01	**KECAMATAN**						**2.246.986.000**							**2.376.295.505**	**KECAMATAN SEMBILAN KOTO**
##	**7 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**2.227.286.000**						-	**2.354.785.505**	**KECAMATAN SEMBILAN KOTO**
	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	4.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	4.400.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.400.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.224.419.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	1.252.059.005	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	1.224.419.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.252.059.005	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	139.554.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	153.300.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.0 0001 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.000.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.0 0002 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		22.000.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.0 0003 6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		11.000.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.0 0004 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	20.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		22.000.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.0 0005 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.500.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.0 0007 6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.400.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.0 0009 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	68.554.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		75.400.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	649.700.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	714.700.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.0 0001 7	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	615.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		676.500.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	7 01 01 2.0 0005 7	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	5.200.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.750.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.0 0006 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	27.600.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		30.360.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.0 0007 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.900.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.090.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	158.363.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	173.951.500	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.0 0001 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.200.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.0 0002 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		6.600.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.0 0003 8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 unit Laporan	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.250.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.0 0004 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan Laporan	145.363.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		159.901.500	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	51.250.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	56.375.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	7 01 01 2.0 0001 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	2.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.200.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.0 0002 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	18.250.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		20.075.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.0 0006 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		6.600.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 01 2.0 0010 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		27.500.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
##	**7 01 02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-			-	**5.700.000**						-	**6.110.000**	**KECAMATAN SEMBILAN KOTO**
	7 01 02 2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	5.700.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	6.110.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 02 2.0 0001 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				10 Dokumen	2.900.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		3.100.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 02 2.0 0002 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				600 Laporan	2.800.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		3.010.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
##	**7 01 03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-			-	**6.820.000**						-	**7.502.000**	**KECAMATAN SEMBILAN KOTO**
	7 01 03 2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	6.820.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	7.502.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	7 01 03 2.0 0001 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	6.820.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		7.502.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
##	**7 01 04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-			-	**3.180.000**						-	**3.498.000**	**KECAMATAN SEMBILAN KOTO**
	7 01 04 2.0 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	3.180.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	3.498.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 04 2.0 0001 2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	3.180.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		3.498.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
##	**7 01 06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-			-	**4.000.000**						-	**4.400.000**	**KECAMATAN SEMBILAN KOTO**
	7 01 06 2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	4.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	4.400.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
	7 01 06 2.0 0002 1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		4.400.000	KECAMATAN SEMBILAN KOTO
		Kecamatan Timpeh						**1.852.023.550**							**1.998.725.905**	**KECAMATAN**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.852.023.550**							**1.998.725.905**	**KECAMATAN**
	7 01	**KECAMATAN**						**1.852.023.550**							**1.998.725.905**	**KECAMATAN**
##	**7 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**1.848.023.550**						-	**1.994.325.905**	**KECAMATAN TIMPEH**
	7 01 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.493.227.800			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	1.642.550.580	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.0 0001 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.493.227.800	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		1.642.550.580	KECAMATAN TIMPEH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	90.451.600			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	115.996.760	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.200.000	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	22.645.600	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		24.910.160	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2.316.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.547.600	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	13.490.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		14.839.000	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.500.000	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	35.000.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		55.000.000	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	30.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	33.000.000	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		33.000.000	KECAMATAN TIMPEH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	158.344.150			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	174.178.565	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.0 8 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.300.000	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.0 8 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.500.000	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.0 8 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	150.344.150	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		165.378.565	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	76.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	28.600.000	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.0 9 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	13.500.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		14.850.000	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.0 9 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	6.500.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		7.150.000	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.0 9 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	6.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		6.600.000	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 01 2.0 9 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Timpeh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN TIMPEH
##	**7 01 03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-			-	**4.000.000**						-	**4.400.000**	**KECAMATAN TIMPEH**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	7 01 03 2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	4.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	4.400.000	KECAMATAN TIMPEH
	7 01 03 2.0 0001 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		4.400.000	KECAMATAN TIMPEH
		Kecamatan Koto Salak						**1.666.664.200**							**1.851.830.620**	**KECAMATAN KOTO SALAK**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.666.664.200**							**1.851.830.620**	**KECAMATAN KOTO SALAK**
	7 01	**KECAMATAN**						**1.666.664.200**							**1.851.830.620**	**KECAMATAN KOTO SALAK**
##	**7 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**	-			**100 Persen**	**1.653.704.200**						-	**1.837.674.620**	**KECAMATAN KOTO SALAK**
	7 01 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan asn	-			1 Tahun	1.333.004.200			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	1.445.304.620	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.0 0001 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.333.004.200	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.445.304.620	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai	-			2 Kegiatan	4.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	8.250.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.0 0002 5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.850.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.0 0009 5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.400.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-			100 persen	96.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	105.600.000	KECAMATAN KOTO SALAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.0 6 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.200.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.0 6 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	8.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		8.800.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.0 6 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.500.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.0 6 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		11.000.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.0 6 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	8.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		8.800.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.0 6 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.300.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.0 6 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		66.000.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-			4 Jenis	43.200.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	43.670.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.0 7 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	21.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		19.800.000	KECAMATAN KOTO SALAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.0 0005 7	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	6.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		7.150.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.0 0006 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	15.200.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.720.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	-			100 persen	147.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	161.700.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.0 0001 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.200.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.0 0002 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		8.250.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.0 0004 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	137.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		151.250.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	-			12 Unit	30.500.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	73.150.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.0 0001 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	12.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		13.750.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.0 0002 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.400.000	KECAMATAN KOTO SALAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	7 01 01 2.0 0006 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		44.000.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 01 2.0 0009 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		11.000.000	KECAMATAN KOTO SALAK
##	**7 01 02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase ketetapan Waktu Pelayanan perizinan dan Non perizinan sesuai SOP**	-			**90 persen**	**2.280.000**						-	**2.408.000**	**KECAMATAN KOTO SALAK**
	7 01 02 2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	-			10 Jenis	2.280.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	2.408.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 02 2.0 0001 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	1.180.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		1.298.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 02 2.0 0002 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				4 Laporan	1.100.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		1.110.000	KECAMATAN KOTO SALAK
##	**7 01 03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD**	-			**60 Persen**	**7.680.000**						-	**8.448.000**	**KECAMATAN KOTO SALAK**
	7 01 03 2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	-			3 Jenis	7.680.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	8.448.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 03 2.0 0001 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	7.680.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		8.448.000	KECAMATAN KOTO SALAK
##	**7 01 04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan**	-			**100 Persen**	**1.000.000**						-	**1.100.000**	**KECAMATAN KOTO SALAK**
	7 01 04 2.0 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	-			3 Kasus	1.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	1.100.000	KECAMATAN KOTO SALAK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	7 01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		1.100.000	KECAMATAN KOTO SALAK
##	**7 01 06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari**	-			**100 Persen**	**2.000.000**						-	**2.200.000**	**KECAMATAN KOTO SALAK**
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	-			100 persen	2.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	2.200.000	KECAMATAN KOTO SALAK
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Dokumen	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Salak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		2.200.000	KECAMATAN KOTO SALAK
		Kecamatan Asam Jujuhan						**1.338.242.000**							**133.200.000**	**KECAMATAN ASAM JUJUHAN**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.338.242.000**							**133.200.000**	**KECAMATAN ASAM JUJUHAN**
	7 01	**KECAMATAN**						**1.338.242.000**							**133.200.000**	**KECAMATAN ASAM JUJUHAN**
##	**7 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**1.317.204.000**						-	**133.200.000**	**KECAMATAN ASAM JUJUHAN**
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	878.348.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				7 Orang/bulan	878.348.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	105.176.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 jenis Paket	2.134.400	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.0 0003 6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	5.341.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.0 0004 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	22.132.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.0 0005 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	7.948.600	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.0 0009 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	67.620.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	124.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	131.000.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.0 0001 7	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		110.000.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.0 0002 7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	14.000.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.0 0006 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		11.000.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	185.180.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	7 01 01 2.0 0001 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 lembar Laporan	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.0 0002 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4.060.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.0 0003 8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12.698.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.0 0004 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	166.422.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	24.500.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	2.200.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.0 0001 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	16.500.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.0 0002 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	6.000.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 01 2.0 0006 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.200.000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
##	**7 01 02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-			-	**9.858.000**						-	-	**KECAMATAN ASAM JUJUHAN**
	7 01 02 2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	9.858.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	7 01 02 2.0 0001 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				120 Dokumen	6.058.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 02 2.0 0002 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	3.800.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
##	**7 01 03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-			-	**9.180.000**						-	**-**	**KECAMATAN ASAM JUJUHAN**
	7 01 03 2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	9.180.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 03 2.0 0001 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	9.180.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
##	**7 01 06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-			-	**2.000.000**						-	**-**	**KECAMATAN ASAM JUJUHAN**
	7 01 06 2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	2.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
	7 01 06 2.0 0002 1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Dokumen	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		-	KECAMATAN ASAM JUJUHAN
		Kecamatan Koto Besar						**2.156.759.600**							**2.251.190.476**	**KECAMATAN KOTO BESAR**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.156.759.600**							**2.251.190.476**	**KECAMATAN KOTO BESAR**
	7 01	**KECAMATAN**						**2.156.759.600**							**2.251.190.476**	**KECAMATAN KOTO BESAR**
##	**7 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**100 persen0**			**100 persen0**	**2.135.074.600**						**100 persen0**	**2.226.278.476**	**KECAMATAN KOTO BESAR**
	7 01 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	-			14 Bulan	1.800.362.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	1.850.362.000	KECAMATAN KOTO BESAR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	1.800.362.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.850.362.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.05 0001	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Paskibra Kecamatan	-			25 Paket	13.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	14.200.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	13.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		14.200.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-			1 Tahun	91.280.800			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	102.413.358	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2.025.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.045.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	9.848.800	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		9.947.288	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	3.910.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.949.100	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	10.687.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.913.870	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	7.294.100	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		7.367.041	KECAMATAN KOTO BESAR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	57.515.900	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		68.191.059	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	umlah Pengadaan Aset dalam setahun	-			6 Jenis	34.500.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	37.712.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		13.000.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	14.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		14.545.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Bulan Unit	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.167.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pembelian materai,jasa listrik,jasa perbaikan peralatan kantor,jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	-			1 Tahun	151.681.800			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	153.198.618	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.010.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7.358.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		7.431.580	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	143.323.800	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		144.757.038	KECAMATAN KOTO BESAR

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	7 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di pemeliharaan	-			11 Unit	44.250.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	68.392.500	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.0 0001 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	11.500.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		11.615.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.0 0002 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	750.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		757.500	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.0 0006 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	2.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.020.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 01 2.0 0009 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		54.000.000	KECAMATAN KOTO BESAR
##	**7 01 02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Periinan sesuai SOP**	**90 Persen**			**90 Persen**	**1.950.000**						**90 Persen**	**2.212.000**	**KECAMATAN KOTO BESAR**
	7 01 02 2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	-			12 Jenis	1.950.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	2.212.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 02 2.0 0001 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				6 Dokumen	1.200.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		1.212.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 02 2.0 0002 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				6 Laporan	750.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		1.000.000	KECAMATAN KOTO BESAR
##	**7 01 03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase hasil musrenbang kecamatanyang ditampung dalam RKPD**	**65 Persen**			**65 Persen**	**11.275.000**						**65 Persen**	**11.500.000**	**KECAMATAN KOTO BESAR**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	7 01 03 2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di musrenbang kabupaten	-			35 jenis	11.275.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	11.500.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 03 2.0 0001 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	11.275.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		11.500.000	KECAMATAN KOTO BESAR
##	**7 01 04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan Trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan**	**100 Persen**			**100 Persen**	**1.740.000**						**100 Persen**	**2.700.000**	**KECAMATAN KOTO BESAR**
	7 01 04 2.0 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	-			3 Kasus	1.740.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	2.700.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 04 2.0 0001 2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				7 Laporan	1.740.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		2.700.000	KECAMATAN KOTO BESAR
##	**7 01 06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah Pembinaan Terhadap Pemerintah Nagari**	**100 Persen**			**100 Persen**	**6.720.000**						**100 Persen**	**8.500.000**	**KECAMATAN KOTO BESAR**
	7 01 06 2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis Pembinaan yang dilakukan	-			7 Jenis	6.720.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	8.500.000	KECAMATAN KOTO BESAR
	7 01 06 2.0 0002 1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	6.720.000	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		8.500.000	KECAMATAN KOTO BESAR
		Kecamatan Padang Laweh						**1.584.700.800**							**1.743.170.880**	**KECAMATAN PADANG LAWEH**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.584.700.800**							**1.743.170.880**	**KECAMATAN PADANG LAWEH**
	7 01	**KECAMATAN**						**1.584.700.800**							**1.743.170.880**	**KECAMATAN PADANG LAWEH**
##	**7 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**100 persen**			**100 persen**	**1.566.675.800**						**100 persen**	**1.723.343.380**	**KECAMATAN PADANG LAWEH**
	7 01 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			8 Dokumen	2.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	2.200.000	KECAMATAN PADANG LAWEH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.0 0001 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.100.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.0 0006 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	1.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.100.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	-			1 Tahun	1.269.456.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	1.396.401.600	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.0 0001 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.269.456.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.396.401.600	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan peringatan HUT KEMRI dan diklat pegawai	-			2 ivent	11.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	12.100.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.0 0002 5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	8.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		8.800.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.0 0009 5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.300.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-			100 persen	100.619.800			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	110.681.780	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.0 0001 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	1.906.800	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.097.480	KECAMATAN PADANG LAWEH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.0 0002 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	10.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		11.220.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.0 0003 6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	9.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		9.900.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.0 0004 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		11.000.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.0 0005 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	9.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		9.900.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.0 0007 6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	500.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		550.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.0 0008 6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	500.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		550.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.0 0009 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	59.513.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		65.464.300	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-			3 Jenis	40.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	44.000.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.0 0002 7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	22.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		24.200.000	KECAMATAN PADANG LAWEH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.0 0005 7	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.300.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.0 0006 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	15.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		16.500.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa pembelian matrai, jasa listrik, jasa perbaikan peralatan kantor, Jasa pembayaran Honorarium PNS dan Non PNS	-			100 persen	119.100.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	131.010.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.0 0001 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	1.500.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.650.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.0 0002 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.600.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.760.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.0 0004 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	116.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		127.600.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di Pemeliharaan	-			4 jenis	24.500.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	26.950.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.0 0001 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	13.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		14.300.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.0 0002 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.400.000	KECAMATAN PADANG LAWEH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	7 01 01 2.0 0006 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	2.500.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.750.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 01 2.0 0009 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.500.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
##	**7 01 02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP**	**90 persen**			**90 persen**	**3.550.000**						**90 persen**	**3.905.000**	**KECAMATAN PADANG LAWEH**
	7 01 02 2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	-			10 Jenis	3.550.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	3.905.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 02 2.0 0001 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				6 Dokumen	1.500.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		1.650.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 02 2.0 0002 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				285 Laporan	2.050.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		2.255.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
##	**7 01 03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD**	**60 persen**			**60 persen**	**9.975.000**						**60 persen**	**10.972.500**	**KECAMATAN PADANG LAWEH**
	7 01 03 2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	-			3 Jenis	9.975.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	10.972.500	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 03 2.0 0001 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	9.975.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		10.972.500	KECAMATAN PADANG LAWEH
##	**7 01 04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan**	**100 persen**			**100 persen**	**1.500.000**						**100 persen**	**1.650.000**	**KECAMATAN PADANG LAWEH**
	7 01 04 2.0 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	-			3 kasus	1.500.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	1.650.000	KECAMATAN PADANG LAWEH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	7 01 04 2.0 0001 2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3 Laporan	1.500.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		1.650.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
##	**7 01 06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari**	**100 persen**			**100 persen**	**3.000.000**						**100 persen**	**3.300.000**	**KECAMATAN PADANG LAWEH**
	7 01 06 2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis pembinaan yang dilakukan	-			7 Jenis	3.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	3.300.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
	7 01 06 2.0 0002 1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		3.300.000	KECAMATAN PADANG LAWEH
		Kecamatan Tiumang						**2.400.000.000**							**2.296.244.966**	**KECAMATAN TIUMANG**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.400.000.000**							**2.296.244.966**	**KECAMATAN TIUMANG**
	7 01	**KECAMATAN**						**2.400.000.000**							**2.296.244.966**	**KECAMATAN TIUMANG**
##	**7 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**100 persen**			**100 persen**	**2.374.000.000**						**100 persen**	**2.267.744.966**	**KECAMATAN TIUMANG**
	7 01 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 tahun	1.313.259.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	1.332.957.885	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.0 0001 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	1.313.259.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		1.332.957.885	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perkantoran	-			1 tahun	117.640.800			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	118.814.581	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.0 0001 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.500.000	KECAMATAN TIUMANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.0 0002 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	12.000.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		13.000.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.0 0003 6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	6.963.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		7.067.445	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.0 0004 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		30.450.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.0 0005 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	11.000.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		12.033.376	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.0 0009 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	54.677.800	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		52.763.760	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Aset dalam setahun	-			12 Jenis	615.500.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	654.972.500	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.0 0001 7	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	400.000.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		400.000.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.0 0002 7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	30.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		45.000.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.0 0005 7	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	31.500.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		31.972.500	KECAMATAN TIUMANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7 01 01 2.0 0006 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	54.000.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		78.000.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.0 0009 7	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		100.000.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 tahun	206.600.200			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	33.500.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.0 0001 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		3.500.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.0 0002 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9.000.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.0 0004 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	194.600.200	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		20.000.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang di pemeliharaan	-			6 unit	121.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	127.500.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.0 0001 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	11.000.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		12.000.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.0 0002 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.500.000	KECAMATAN TIUMANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	7 01 01 2.0 0006 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		10.000.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 01 2.0 0009 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	100.000.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		100.000.000	KECAMATAN TIUMANG
##	**7 01 02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di wilayah Kecamatan Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Periinan sesuai SOP**	**100persen**			**100 persen 100 persen**	**7.310.000**						**100persen**	**8.500.000**	**KECAMATAN TIUMANG**
	7 01 02 2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	-			2 jenis	7.310.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	8.500.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 02 2.0 0001 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				30 Dokumen	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		3.500.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 02 2.0 0002 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				500 Laporan	4.310.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		5.000.000	KECAMATAN TIUMANG
##	**7 01 03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD**	**60 persen**			**60 persen**	**11.690.000**						**60 persen**	**12.000.000**	**KECAMATAN TIUMANG**
	7 01 03 2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusung di Musrenbang kabupaten	-			3 Jenis	11.690.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	12.000.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 03 2.0 0001 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				80 Lembaga Kemasyarakatan	11.690.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		12.000.000	KECAMATAN TIUMANG
##	**7 01 04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan**	**100 persen**			**100 persen**	**3.000.000**						**100 persen**	**3.500.000**	**KECAMATAN TIUMANG**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah yang gangguan yang terjadi di wilayah kecamatan	-			22 kasus	3.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	3.500.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 04 2.02 0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3 Laporan	3.000.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		3.500.000	KECAMATAN TIUMANG
##	**7 01 06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari**	**52 kasus**			**52 kasus**	**4.000.000**						**52 kasus**	**4.500.000**	**KECAMATAN TIUMANG**
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis Pembinaan yang dilakukan	-			1 jenis	4.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan	-	4.500.000	KECAMATAN TIUMANG
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Tiumang, Tiumang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan		4.500.000	KECAMATAN TIUMANG
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						**25.990.727.230**							**28.585.195.903**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN**
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**25.990.727.230**							**28.585.195.903**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN**
	8 01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**25.990.727.230**							**28.585.195.903**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN**
##	**8 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran**	**-**			**100 persen**	**5.024.104.500**						-	**5.580.573.460**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporaan yang tersedia	-			7 dokumen	26.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	28.600.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	26.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		28.600.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 tahun	2.696.524.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	2.966.176.400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	2.696.524.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		2.966.176.400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 bulan	574.430.300			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	702.431.840	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		11.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	60.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		66.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	33.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		36.222.560	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	39.300.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		43.230.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	43.344.800	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		47.679.280	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	388.785.500	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		498.300.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	-			undefined unit/set	1.341.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	1.475.100.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8 01 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	595.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		654.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	335.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		368.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				38 Unit	127.200.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		139.920.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				32 Unit	233.800.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		257.180.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		55.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			12 bulan	243.750.200			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	268.125.220	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		4.400.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	22.150.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		24.365.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	217.600.200	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		239.360.220	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	8 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedia pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			12 bulan	142.400.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	140.140.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.0 0001 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	5.800.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		6.380.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.0 0002 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	69.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		75.900.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.0 0005 9	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				17 Unit	5.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		5.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.0 0006 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	22.600.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		24.860.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 01 2.0 0009 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		27.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
##	**8 01 02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Jumlah Konflik Sosial yang ditangani**	**5 persen**			**5 persen**	**2.402.000.000**						**5 persen**	**2.642.200.000**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	8 01 02 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-			355 orang	2.402.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik Sosial	-	2.642.200.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 02 2.0 0004 1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				110 Orang	198.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik Sosial		217.800.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 02 2.0 0005 1	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				12 Laporan	104.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik Sosial		114.400.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	8 01 02 2.0 1 0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka				355 Orang	2.100.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik Sosial		2.310.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
##	**8 01 03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA**	**Persentase Pendidikan dan Pemantauan Situasi Politik**	**80 persen**			**80 persen**	**16.848.622.730**						**80 persen**	**18.418.722.443**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	8 01 03 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-			140 orang	16.848.622.730			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik Sosial	-	18.418.722.443	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 03 2.0 1 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				140 Orang	16.678.622.730	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik Sosial		18.231.722.443	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 03 2.0 1 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2 Laporan	170.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik Sosial		187.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
##	**8 01 04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan**	**35 kelompok**			**35 kelompok**	**210.000.000**						**35 kelompok**	**231.000.000**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	8 01 04 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-			3 Laporan	210.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Jumlah Organisasi masyarakat dan partai politik yang terbina	-	231.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 04 2.0 1 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				3 Laporan	210.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Jumlah Organisasi masyarakat dan partai politik yang terbina		231.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
##	**8 01 05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Pembinaan LSM**	**30 kasus**			**30 kasus**	**428.000.000**						**30 kasus**	**528.000.000**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian Renja PD	Prakiraan Capaian Target Renja PD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	8 01 05 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-			6 laporan	428.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik Sosial	-	528.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 05 2.0 0003 1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				200 Orang	140.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik Sosial		154.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 05 2.0 0004 1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	165.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik Sosial		181.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 05 2.0 0005 1	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				8 Laporan	123.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik Sosial		192.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
##	**8 01 06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Jumlah Penyakit Masyarakat**	**2 kasus**			**2 kasus**	**1.078.000.000**						**2 kasus**	**1.184.700.000**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	8 01 06 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta PenangananKonflik di Daerah	-			80 orang	1.078.000.000			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik Sosial	-	1.184.700.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 06 2.0 0004 1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				80 Orang	1.022.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik Sosial		1.124.200.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8 01 06 2.0 0005 1	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				4 Laporan	56.000.000	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kewaspadaan Konflik Sosial		60.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							J U M L A H	################							################	

BAB 6. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi. Capaian dan target indikator utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Berdasarkan realisasi 2022, 2023 dan proyeksi tahun berjalan (tahun) 2024, maka proyeksi tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6-1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi		Target RPJMD		Target RKPD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
1	**Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur**							
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks			62,7	67	62,7	67
	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	58.09	58.15	63	65	63	60
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	88.22	89.07	80	95	90	92
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	92.15	92.49	97	98	97	95
	Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	2.13	4.35	23.03	12.90	23.03	4.00
	Rasio pemukiman layak huni	persen	84.15	84.3	94.25	97.05	94.25	90
	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	76.76	76.38	71.3	72.8	71.3	80
	Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	persen			29.12	27.98	29.12	27.98
2	**Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**							
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72.30	73.04	72.13	72.29	74	75
	Angka Harapan Hidup	tahun		74.04	72.05	72.24	74.24	74.5
	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8.56	8.71	8.49	8.5	8.70	8.75
	Harapan lama sekolah	tahun	12.51	12.68	12.45	12.46	12.6	12.75
	Indeks Pembangunan Gender	indeks	88.56		89.34	89.5	89.34	89.5
3	**Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing**							
	Pertumbuhan PDRB	persen	4.28	4.35	4.5	4.7	4.5	4.5
	Gini rasio	indeks	0.287	0.291	0.255	0.25	0.255	0.270
	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	52.12	55.63	45.76	46.74	54	57.0
	Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	persen	14.46	14.57	3.6	3.7	3.6	15

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi		Target RPJMD		Target RKPD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	6.23	6.22	5.29	5.1	5.29	6.00
	Tingkat Kemiskinan	persen	5.56	5.56	5.97	5.92	5.4	5.5
4	**Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien**							
	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	50.2	57.28	73	76	73	57.5
	Indeks perilaku antikorupsi	indeks			3.45	3.578	3.45	3.578
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Hasil evaluasi AKIP	bobot/ indeks	64.07	64,65 (B)	BB	A	BB	BB
	Nilai LPPD	Skor	3.5036		3.75	3.8	3.75	3.8
	Indeks SPBE	indeks	2.44	2.83	2.45	2.725	2.6	2.725
	Indeks Profesionalisme ASN	indeks	62.86		71	74	71	74
	Publik service indeks	indeks			3.21	3.3	3.21	3.3
	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	81.00	84.5	83	84	83	85
	Persentase nagari mandiri	persen	11.54	17.31	23.07	26.92	28.846	36.54
	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	indeks	0.84736	0.846	0.84	0.85	0.8437	0.860
	Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	indeks	0.72212	0.744	0.72	0.73	0.7198	0.750
	Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	indeks	0.62821	0.667	0.61	0.61	0.607	0.700
5	**Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan**							
	Indeks Pembangunan berkelanjutan	indeks			75.8	77.8	75.8	77.8
	Kesesuaian pemanfaatan ruang	persen		92.59	15	20	15	92.75
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	63.9	63.48	66	66.47	66	66.47
6	**Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah**							
	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	nagari	2	2	10	13	6	2
	Persentase peningkatan zakat	persen	12.37	36.67	2	2	12	20

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi		Target RPJMD		Target RKPD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
	Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	persen	100	100	90	95	100	100

Sumber : Bapperida Tahun 2024

6.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ditampilkan berdasarkan urusan pemerintah daerah, dimana proyeksi untuk tahun 2025 didasarkan pada realisasi tahun 2019 hingga tahun 2023, serta perkiraan capaian tahun 2024, serta rumusan identifikasi permasalahan pembangunan yang dihadapi maupun arah kebijakan yang akan dilaksanakan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga penetapan target kinerja/ proyeksi RKPD tahun 2025 di beberapa indikator berdasarkan urusan pemerintahan terdapat penyesuaian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 untuk target kinerja tahun 2025.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelengaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Adapun target kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 6.2:

Tabel 6-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD		TARGET RKPD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
1:01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**							
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	69.39	72.84	78	80.5	100	75
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen	99.58	99.43	108.94	109.94	100	100
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persen	96.75	80.44	107.3	108.3	100	85
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi	Persen	98.92	99.48	99.63	99.71	99.63	99.71
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts	Persen	90.71	81.06	97.13	98.13	97.13	85
6	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Orang	97.3	93.02	308	268	98	95
7	Jumlah anak 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PAUD	orang	91.7	81.3	7983	7874	92.5	85
8	Persentase guru dan tenaga kependidikan professional	Persen	35.55	56.77	98	99	42	70
1:02	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**							
1	Angka kematian bayi (AKB)	per 1.000 kelahiran hidup	11.7	9	16	15	10.5	9
2	Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	per 100,000 kelahiran hidup	201	84	105	103	194	84
4	Prevalensi Stunting	indeks	7.6	7.6	11.27	10.88	7.4	7.5
3	Prevalensi Malnutrisi	Persen	6.65	5.7	17.5	17.5	5.5	5.5
4	Persentase Rumah Tangga PHBS	Persen	32.9	49.4	35	37	35	50

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD		TARGET RKPD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persen	55.77	65	60	65	60	67.5
6	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam	Persen	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Persen	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	Persen	100	100	100	100	100	100
9	Visite Rate	/ Jumlah Penduduk	4.6	5.25	5	5	5	5.5
10	Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	Persen	21.4	93.3	64.2	78.5	64.2	93.33
11	Persentase UPT RSUD Terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100
1:03	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**							
1	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	58.09	58.15	63	65	59.3	60
2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	79.07	70.03	50	53	81	75
3	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	79.76	76.38	66	67	66	77.5
4	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	Persen	88.22	89.07	80	95	92	92
5	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	Persen	92.15	92.49	97	98	97	95
6	Persentase ketersediaan Utilitas Umum (Drainase)	Persen			5.98	6.19	5.98	6.19
7	Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	Persen	44.73	47.36	70	75	70	50
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	Persen	7.45	92.59	15	20	80	92.75
9	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar Kompetensi	Persen			15	20	15	20

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD		TARGET RKPD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1:04	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**							
1	Cakupan permukiman layak huni	Persen	91.82	91.49	94.25	97.05	92.5	92.5
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	96.73	91.49	95.2	97.6	98	92.5
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani	Persen	2.13	4.35	23.03	12.90	23.03	4.35
6	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	49.37	50.02	70.49	75.41	70.49	60
7	Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	12.76	15.34	12.51	14.3	12.51	20
1:05	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**							
1	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	Persen	100	100	100	100	100	100
3	persentase Inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta	Persen	0	100	100	100	100	100
4	Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	Nagari	0	3	2	4	2	4
6	Persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi	Persen	100	100	100	100	100	100
7	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	Persen	100	100	75	75	100	100
1:06	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**							

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD		TARGET RKPD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	97	97.7	85	88	97.5	97.7
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Persen	100	100	100	100	100	100
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
2:07	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**							
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71.65	73.93	80.25	81.43	73	74
2	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	Persen	44.92	36.4	30.54	32.18	42	40
3	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	56.09	39.2	45.12	46.32	95	50
4	Persentase Kasus - Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100
2:08	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**							
1	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
2	persentase Organisasi perempuan yang aktif	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	Predikat/ Nilai	pratama	pratama	Pratama	-	Pratama	pratama
4	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Predikat/ Nilai	madya	madya	Madya	Madya	Madya	Madya
5	rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100
6	Rasio KDRT	Persen	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2:09	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**							

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD		TARGET RKPD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah	Persen	36.51	80.06	63	73	63	80
2	Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari	K.Kal/kap/ hr	2,416	2,490	2,565	2,570	2565	2,570
3	Skor Pola Pangan Harapan	indeks	87.8	88.5	88.5	89	88.5	89
2:10	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**							
1	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat	Persen	35.61		41.75	46.16	41.75	60.00
2	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	Persen	100		100	100	100	100
3	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	Persil	0.002		8	9	8	9
2:11	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**							
1	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	dokumen	36.51		2	2	2	2
2	indeks kualitas air	indeks	53.18	54	56.4	56.5	56.4	56.5
3	indeks kualitas udara	indeks	85.32	83.28	83.95	84.05	83.95	84.05
4	indeks kualitas tutupan lahan	indeks	42.7	43.14	49.28	51.36	49.28	51.36
5	Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi	Ha/Kawasan	1	1	Kawasan Lahan: 1	Kawasan Lahan: 1	Kawasan Lahan: 1	Kawasan Lahan: 1
6	Meningkatnya luas tutupan lahan/Menurunnya lahan kritis	Ha	100	100	2	2	2	2
7	Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali)	persen	15.09	15.35	16	18	18	18
8	Penanganan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota)	persen	79.65	80.48	18	21	18	80
9	Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	usaha/kegiatan	100	20	20	20	20	20

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD		TARGET RKPD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2:12	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**							
1	Persentase kepemilikan KTP-el	Persen	93.63	95.56	100	100	100	100
2	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	64.02	66.21	100	100	100	100
3	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun	Persen	95.58	96.36	100	100	100	100
4	Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	100	100	93	95	93	95
6	Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	Persen	11		93	95	93	95
7	Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan	unit	11		17	20	17	20
8	Jumlah Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan	unit			17	20	17	20
2:13	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**							
1	Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM	Persen	30.77	82.69	76.92	86.54	48.07	82.69
2	Persentase APB nagari berbasis IDM	Persen	5.76	82.69	17.31	76.92	17.31	82.69
3	Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online	Persen	57.69	100	76.92	86.59	76.92	100
4	Persentase nagari memiliki bumnag berkembang	Persen	21.15	34.61	28.85	32.69	28.85	38.46

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD		TARGET RKPD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	Persen	100	100	92	94	100	100
6	Jumlah Bumnag Bersama	unit	5	6	3	4	9	6
7	Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga	nagari	5	4	4	6	5	6
2:14	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**							
1	Angka kelahiran total	Persen			2.62	2.59	2.62	2.59
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	Persen	80.6	70.19	81.3	81.35	81.3	81.35
3	Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	Persen	65.45	12.53	10.21	10.18	10.21	12.53
4	persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA) aktif	Persen	100	100	100	100	100	100
5	persentase kelompok tribina yang aktif	Persen	100	100	100	100	100	100
2:15	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**							
1	Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan	Persen	0	0	64	65	64	65
2	V/C (volume capaciti Ratio)	indeks			0.2	0.2	0.2	0.2
3	jumlah penambahan trayek angkutan umum	trayek	0	0	0	2	0	2
4	persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR.	Persen	77.82	86.5	88	88	88	88
5	akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	bobot	B	A	A	A	A	A
2:16	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika**							
1	Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi		100	100	38 OPD	38 OPD	100	100
			20		30 Nagari	40 Nagari		
					25 SMP	25 SMP		
			20		30 SD	40 SD		

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD		TARGET RKPD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2		11 Puskesmas	13 Puskesmas		
2	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	aplikasi	100	100	20	25	20	100
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	aplikasi	100	100	75	80	75	100
2:17	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**							
1	persentase Koperasi Sehat	Koperasi	47.77	59.7	45	50	50	60
2	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	Usaha mikro			60	70	60	
	Jumlah Pelaku usaha mikro yang menjadi wirausaha		41.5	58.55			45	60
2:18	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**							
1	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	miliar rupiah	423,750.00	1,126.00	197,639	197,602	426,000	1,126
2	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal	Persen	4.24	66.9	3.4	3.5	4.5	3.5
2:19	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**							
1	Jumlah cabang olahraga yang aktif	cabor	35	25	28	30	35	30
2	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi	cabor	21	15	26	29	26	15
3	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional	cabor	7	4	6	7	8	7
4	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	unit	245	236	10	11	10	11
5	Jumlah pemuda dan kepemudaan berprestasi	Orang	24	30	4	5	26	30

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD		TARGET RKPD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Jumlah organisasi pramuka yang aktif	unit	210	210	18	20	30	210
7	Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	18	20	5	5	20	20
2:20	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**							
1	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persen	100	100	80	90	100	100
2	Jumlah Nagari Statistik	Nagari	4	4	40	52	52	4
3	Jumlah Kecamatan Statistik	kecamatan	1	1	6	9	6	1
2:21	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**							
1	Aplikasi yang dilakukan asesment	web, aplikasi	0	0	15	20	15	20
2	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	Persen	5.26		60%	100	60	100
2:22	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**							
1	Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan	Grup	30	38	120	150	40	38
2	Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan	Jenis	14	16	18	20	18	16
3	Persentase lembaga adat yang aktif	Persen	80	85	90	95	90	85
4	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	unit	45	48	20	25	55	48
5	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Unit	101	102	120	150	55	102
2:23	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**							
1	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	orang	152,286	156,300	94,500	105,500	94,500	156,300
2	Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	Persen	38.68	44.57	51.26	57.55	51.26	50
2:24	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**							
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	47.37	68.42	78.95	89.47	78.95	76.92
2	Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	Persen	30.77	38.46	46.15	53.85	46.15	67.31
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD		TARGET RKPD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3:25	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan**							
1	Produksi Perikanan	Ton	25,120	25,449	29,529	31,000	29,529	30,000
3:26	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**						0	
1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	71,550	188,463	38318	39084	75,000	200,000
2	Tingkat hunian akomodasi	Persen	69.75	61,514	20.903	21.321	72.5	65
3	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	Unit	36	45	45	52	45	50
4	Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina	lembaga	21	24	37	45	37	25
3:27	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**							
1	Produksi Padi	ton	56,290	53,869	67,500	67,500	67,500	67,500
2	Produksi Jagung	ton	2,553	2,755	4,000	4,000	4,000	4,000
3	Produksi Kelapa sawit	ton	103,636.76	123,104.94	103,500	103,500	103,500	103,500
4	Produksi karet	ton	24,758.03	32,712.38	30,500	31,000	30,500	33,000
5	Produksi Daging	ton	1,535.78	1,697.15	1,200	1,200	1,200	1,700
6	Populasi Ternak (Sapi/Kerbau)	ekor	44,971	42,612	42,200	42,250	42,200	43,000
3.30	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**							
1	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	%	48.63	48.63	41	43	41	50
2	Alat UTTP yang Beratanda tera sah	Unit	44	44.77	45	50	45	50
3:31	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**							

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD		TARGET RKPD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase peningkatan omzet IKM	Persen	8.10	8.54	8.3	8.4	8.3	8.75
2	Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	Persen	73.14	75.68	90	100	90	80
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							
4:01	**Sekretariat Daerah**							
1	Nilai LPPD	bobot	3.5036		3.75	3.8		3.8
2	Nilai SAKIP	bobot	64.07	64,65 (B)	74	76	74	BB
3	Nilai RB	bobot	50.2	57.28	70.5	73.2	70.5	57.5
4:02	**Sekretariat DPRD**							
	Kinerja DPRD (sebagai indikator tujuan)							
1	Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan berdasarkan program rancangan peraturan daerah (Prompemperda)	Persen			85	90	85	90
2	Persentase ditetapkanya PerdaAPBD dan APBD-P	Persen			100	100	100	100
3	Persentase rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	persen			100	100	100	100
	Kinerja Sekretariat DPRD (sebagai indikator sasaran)							
1	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi	Persen	95	100	90	90	90	95
2	Persentase Fasilitasi hubungan Kerjasama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD	persen			90	90	90	95
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							
5:01	**Perencanaan**							
1	Capaian sasaran RPJMD	Persen	105.3		95	95	95	95
2	Rata-rata capaian sasaran Renstra PD	Persen	90		95	95	95	95
3	Rata-rata capaian Kegiatan/sub kegiatan	persen	97.21		95	95	95	95

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD		TARGET RKPD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5:02	**Keuangan**							
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	persen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Rata-rata ketergantungan dana transfer	persen	80.67	88.59	90	90	71	90
3	Persentase SILPA terhadap APBD	persen	4.46	5.57	0.2	0.2	97	0.2
5:03	**Kepegawaian**							
1	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	62.86		71	74	71	74
2	Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	persen	63.50	96.00	97	98	97	98
3	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	persen	97.00	81.90	50	52	50	85
4	Persentase kasus ASN yang tertangani	Persen	100.00	100	100	100	100	100
5:04	**Pendidikan Dan Pelatihan**							
1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	persen	49.04	85.01	17	19	30	90
5:05	**Penelitian Dan Pengembangan**							
1	Indeks inovasi daerah	indeks	57.84	55.61	Sangat inovatif(72,5)	Sangat inovatif(75)	Sangat inovatif(60,01)	Sangat inovatif(62)
5:06	**Pengelolaan Perbatasan**							
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							
6:01	**Inspektorat Daerah**							
1	Tingkat Kapabilitas APIP	Bobot	3	3	3 DC	3	3 DC	3
2	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Bobot	2.6	2.96	3	3	3	3
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							
8:01	**Kesatuan Bangsa Dan Politik**							
1	Persentase Pembinaan Partai Politik	Persen	62.5	62.5	68.7	100	62.5	100

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Satuan	Realisasi		Target RPJMD		TARGET RKPD	
			2022	2023	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	16.67	10.14	55	75	55	75
3	Persentase Pembinaan LSM	Persen	16.67		63.6	75	63.6	75
4	Jumlah Konflik Sosial	Kejadian	5	5	5	3	5	3
5	Jumlah Penyakit Masyarakat	kasus	2		2	3	2	3

Sumber : Bapperida Tahun 2024

BAB 7. PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja tahunan yang akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025. Dalam proses penyusunanannya, RKPD Tahun 2025 sudah melalui koordinasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan (stakeholder) melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan, utamanya sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan yang akan ditetapkan.

RKPD tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan perencanaan pembangunan pada periode RPJMD tahun 2021-2026. Sehingga rumusan kebijakan pembangunan tahunan sudah mempedomani RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan perencanaan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dengan memuat kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dokumen RKPD nantinya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang mempunyai 4 (empat) fungsi utama yaitu: (1) menjadi pedoman oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintah daerah tahun 2025; (2) sebagai landasan bagi penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun RAPBD Kabupaten Dharmasraya Tahun anggaran 2025; (3) menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan; (4) sebagai dokumen perencanaan strategis sehingga berdampak pada pencapaian indicator kinerja daerah Kabupaten Dharmasraya dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas–tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

RKPD Tahun 2025 telah disempurnakan sesuai dengan arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat, arah kebijakan Kabupaten Dharmasraya, serta evaluasi capaian kinerja pembangunan hingga tahun 2025. selanjutnya Dokumen RKPD Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA